DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA
2023

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

SURAT PERNYATAAN

Pj. BUPATI BARITO KUALA

SURAT PERNYATAAN

PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

TAHUN 2023

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga tata lingkungan pada tataran fungsional untuk tetap menjamin agar fungsi lingkungan hidup selalu lestari. Keterlibatan peran serta masyarakat di bidang tata kelola lingkungan (*good environmental governance*) akhirnya menjadi esensial bagi pengembangan pemerintah modern.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan bahwa perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, sehingga isu isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Persampahan dan Limbah
2. Kuantitas dan Kualitas Air
3. Banjir
4. Degradasi Lahan
5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Demikian surat pernyataan perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA

Mujiyat, S.Sn., M.Pd

Pj. BUPATI BARITO KUALA

SURAT PERNYATAAN INOVASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2023

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga tata lingkungan pada tataran fungsional untuk tetap menjamin agar fungsi lingkungan hidup selalu lestari. Keterlibatan peran serta masyarakat di bidang tata kelola lingkungan (*good environmental governance*) akhirnya menjadi esensial bagi pengembangan pemerintah modern maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 (DIKPLHD Tahun 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan bahwa inovasi lingkungan hidup daerah di Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, dimana detail pelaksanaan inovasi daerah telah tertuang dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 (DIKPLHD Tahun 2023) ini.

Demikian surat pernyataan inovasi lingkungan hidup daerah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA

Mujiyat, S.Sn., M.Pd

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. Fahriana, SH, MH**

NIP : 19650414 198601 2 003

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua data yang disampaikan dalam seluruh Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dan lampiran lampirannya ini adalah **benar** dan **sah** serta sudah sesuai dengan ketentuan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2023. Demikian surat pernyataan keabsahan data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Pj. Bupati Barito Kuala,

Mujiyat, S.Sn., M.Pd

Marabahan, Juli 2023

Kepala Dinas,

Hj. Fahriana, SH, MH

NIP. 19650414 198601 2 003

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dimana pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyusun laporan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Laporan ini juga merupakan Komitmen Pemerintah daerah

Kabupaten Barito Kuala tentang kepeduliannya terhadap Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup di daerahnya sesuai yang diamanatkan menurut UU 32 Tahun 2009 di atas dan juga Kebijakan Pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Periode 2017-2022 yang berwawasan lingkungan.

Sesuai Pedoman yang di berikan oleh Kementerian LH tahun 2013, sistematika buku laporan ini memuat berbagai informasi tentang kondisi lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala dan kecenderungannya, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan, yang disusun dalam 5 (lima) Bab yaitu: (1) Pendahuluan (2) Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact,* dan *Response* terhadap Isu-Isu Lingkungan Hidup, (3) Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala, (4) Inovasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan (5) Kesimpulan dan Saran.

Bahan penyusunan laporan bersumber dari data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait yang didukung data statistik dari BPS Kabupaten Barito Kuala serta sumber data lainnya dengan melakukan berbagai modifikasi yang dapat dipertanggung-jawabkan. Laporan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan perubahan dan kecenderungan kondisi lingkungan. Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkungan yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah, serta semua tingkatan lembaga pemerintah. Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah ini juga akan menyediakan referensi dasar tentang keadaan lingkungan bagi pengambil kebijakan sehingga akan memungkinkan diambilnya kebijakan yang baik dalam rangka mempertahankan proses ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan total di masa kini dan masa datang. Disadari, buku laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala kedepan.

Marabahan, Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA

Mujiyat, S.Sn., M.Pd

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR, DAN LAMPIRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN

SAMPUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Profil Kabupaten Barito Kuala 2
1.2.1. Luas dan Batas Wilayah 2
1.2.2. Kependudukan 5
1.2.3. Topografi 6
1.2.4. Kelerengan Lahan 8
1.2.5. Hidrologi 9
1.2.6. Ekosistem Kars dan Ekosistem Gambut 10
1.2.7. Klimatologi 11
1.2.8. Pertanian 13
1.2.9. Penggunaan Lahan 13
1.2.10. Sektor Unggulan 14
1.3. Tahapan Penyusunan 15
1.4. Maksud dan Tujuan 21
1.4.1. Maksud Penyusunan Dokumen IKPLHD 21
1.4.2. Tujuan Penyusunan Dokumen IKPLHD 23

1.4.3. Pengguna Dokumen IKPLHD 23
1.5. Ruang Lingkup 24
1.5.1. Lingkup Wilayah 24
1.5.2. Lingkup Substansi 24
BAB II ANALISIS *DRIVING FORCE*, *PRESSURE*, *STATE*, *IMPACT*, DAN *RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ..28
2.1. Tata Guna Lahan 30
2.2. Kualitas Air 59
2.3. Kualitas Udara 70
2.4. Risiko Bencana 79
2.5. Perkotaan 84
2.6. Tata Kelola 92
BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 102
3.1. Proses Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah .102
3.2. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah 115
3.2.1. Pengelolaan Persampahan dan Limbah.....125
3.2.2. Kuantitas dan Kualitas Air.....127
3.2.3. Kebakaran Hutan dan Lahan.....128
3.2.4. Pencemaran Udara.....130
3.2.5. Banjir 131
3.2.6. Pencemaran Udara.....136
3.2.7. Degradasi Lahan 142
BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....151
4.1. Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah 151
4.1.1. Anggaran Lingkungan Hidup.....152
4.1.2. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....153
4.2. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala 154

4.2.1. Pengelolaan Sampah Desa Melalui MALAMPAH (Masyarakat Pintar Mengelola Sampah) Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala... 157

4.2.2. Inovasi Pengelolaan Sampah (Mengangkat Sampah dari Sungai Menggunakan Jaring-Jaring) di Desa Kuala Lupak..... 159

4.2.3. Program Anjur Angkut Sampah..... 160

4.2.4. Pembuatan Komposter untuk sampah rumah tangga menjadi pupuk cair dan padat 161

4.2.5. BLUD UPT Limbah B3..... 163

4.2.6. Pemantauan Kualitas Air dengan Alat ONLINMO 167

4.2.7. Pembuatan Tripikon-S (Teknik septictank yang diletakan di sungai dengan pipa paralon) di sepanjang aliran sungai untuk meningkatkan kualitas air sungai..... 169

4.2.8. Inovasi Penggunaan lahan yang berkelanjutan 178

4.2.9. Sinergitas Bersama Untuk Meningkatkan Desa Berkelanjutan (SIBAKANTAN) 180

4.2.10. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan..... 183

BAB V PENUTUP 193

5.1 Kesimpulan 193

5.2. Saran..... 195

5.3. Rencana Tindak Lanjut..... 196

DAFTAR PUSTAKA 206

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Menurut Kecamatan ... 3
Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 ... 5
Tabel 1.3. Topografi di Wilayah Kabupaten Barito Kuala ... 8
Tabel 1.4. Kelerengan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Kuala ... 9
Tabel 1.5. Jumlah Sungai di Wilayah Kabupaten Barito Kuala ... 9
Tabel 1.6 Ekosistem Gambut di Wilayah Kabupaten Barito Kuala ... 11
Tabel 1.7 Rata-Rata Curah Hujan Bulanan (mm) ...
Tabel 2. 1. Perubahan Luasan Lahan Permukiman di Kabupaten Barito Kuala ... 33
Tabel 2.2 Jumlah Industri di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2021 ... 37
Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Kabupaten Barito Kuala ... 39
Tabel 2.4 Luas Kawasan Hutan Menurut Jenis Fungsi/Status di Kabupaten Barito Kuala ... 50
Tabel 2.5 Analisis D-P-S-I-R Tata Guna Lahan ... 58
Tabel 2.6. Kondisi Sungai di Kabupaten Barito Kuala ... 61
Tabel 2.7 Analisis D-P-S-I-R Kualitas Air ... 69
Tabel 2.8 Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 ... 71
Tabel 2.9 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kabupaten Barito Kuala 2021 ... 75
Tabel 2.10 Analisis D-P-S-I-R Kualitas Air ... 78
Tabel 2.11 Analisis D-P-S-I-R Risiko Bencana ... 83
Tabel 2.12. Rincian TPA Kabupaten Barito Kuala ... 87
Tabel 2.13 Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Tahun 2022 ... 88
Tabel 2.14 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 ... 94

Tabel 2.15 Pengaduan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 95

Tabel 2.16 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022 96

Tabel 2.17 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Staf yang telah Mengikuti Diklat 96

Tabel 2.18 Penghargaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala 97

Tabel 2.19 Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat 98

Tabel 3. 1 rekap skoring penentuan Isu Prioritas 2023.....113

Tabel 3. 2. tabel index kualitas air Kabupaten Barito Kuala tahun 2022 128

Tabel 3. 3. kejadian kebakaran hutan dan lahan per tahun 129

Tabel 3. 4. Lokasi banjir kabupaten Barito Kuala 135

Tabel 4. 1. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat di Kabupaten Barito Kuala.....152

Tabel 4. 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.....152

Tabel 4. 3 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala 153

Tabel 4. 4. Daftar Desa yang Menjadi Lokasi Percontohan Jamban Tripikon S 173

Tabel 4. 5. Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 180

Tabel 4. 6. Tabel Perkembangan Desa Berkelanjutan (Desa Proklim) di Kabupaten Barito Kuala mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023 182

Tabel 4. 7. Reboisasi Tanaman Mangrove dan Tanaman Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala 186

Tabel 4. 8. Data Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kab. Barito Kuala ...188

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Barito Kuala 4

Gambar 1.2 Diagram Model DPSIR 17

Gambar 1.3 Kerangka Kerja Analisis Lingkungan 19

Gambar 2. 1. Grafik Perubahan Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala 32

Gambar 2. 2. Grafik Perbandingan Luasan Lahan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dan Tahun 2021 34

Gambar 2. 3. Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Barito Kuala 36

Gambar 2. 4. Grafik Persentase Jenis Industri di Kabupaten Barito Kuala 2022 37

Gambar 2. 5. Grafik Perubahan Jumlah Industri di Kabupaten Barito Kuala 38

Gambar 2. 6. Penggunaan Lahan Kabupaten Barito Kuala 40

Gambar 2. 7. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 41

Gambar 2. 8. Luasan Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya 45

Gambar 2. 9. Peta RTRW Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2032 ..46

Gambar 2. 10 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Barito Kuala 52

Gambar 2.11 Luasan Lahan Kritis Kabupaten Barito Kuala 54

Gambar 2.12 Perubahan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Barito Kuala 55

Gambar 2.13 Sungai Barito di Kecamatan Marabahan 62

Gambar 2.14 Nilai Indeks Pencemaran (IP) Titik Pengujian Kualitas Sungai di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.....64

Gambar 2.15 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Titik Pengujian Kualitas Sungai di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 65

Gambar 2.16 Grafik Jumlah Kendaraan di Kab. Barito Kuala 71

Gambar 2.17 Grafik Suhu Udara Bulanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.....74

Gambar 2.18 Bencana di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.....80

Gambar 2.19 Perkiraan Kerugian Akibat Bencana di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.....82

Gambar 2.20 PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala.....84

Gambar 2.21 PVDRB ADHK Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Barito Kuala 85

Gambar 2.22. Timbulan Sampah Kabupaten Barito Kuala 2022.....86

Gambar 2.23 Jumlah Sampah yang Dikelola Bank Sampah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 89

Gambar 2.24 Grafik Jumlah Dokumen Lingkungan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.....93

Gambar 2.25 Perubahan Nilai IKLH Kabupaten Barito Kuala 97

Gambar 3. 1. Foto Kegiatan FGD Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah pada saat Expose LAPDA.....104

Gambar 3. 2. Skema Penentuan Isu Prioritas.....106

Gambar 3. 3. Tabel Hasil Output AHP Penetapan Isu Prioritas 114

Gambar 3. 4. Matrix Output AHP Penetapan Isu Prioritas 114

Gambar 3. 5. Lokasi TPA Tabing Rimbah Kab. Barito Kuala 126

Gambar 3. 6. Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Kuala 129

Gambar 3. 7. Gambaran Kualitas Udara Kabupaten Barito Kuala.....131

Gambar 3. 8. Banjir di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 134

Gambar 3. 9. Ilustrasi Aliran Polutan di Udara 136

Gambar 3. 10. Ilustrasi Polusi Udara dari Gas Buang Pabrik 137

Gambar 3. 11. Ilustrasi Polusi Udara dari Sumber-sumber Lain.....138

Gambar 3. 12. Contoh Berbagai Aktivitas dengan Sumber Emisi 140

Gambar 3. 13. Ilustrasi Komponen Lingkungan Terkena Dampak Kualitas Udara Ambien 141
Gambar 3. 14. Degradasi Lahan 145
Gambar 3. 15. Peta Kerapatan Tajuk Wilayah Kerja BPDAS Barito 146
Gambar 3. 16. Tutupan Hutan Alam Kalimantan 147
Gambar 3. 17. Forest Cover 148
Gambar 3. 18. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 149
Gambar 4. 1. Launching Bank Sampah Untung Tarus 158
Gambar 4. 2. Jumlah Sampah yang Dikelola Bank Sampah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 159
Gambar 4. 3. Ilustrasi Pengelolaan Sampah dengan Jaring..... 160
Gambar 4. 4. Penyerahan Bantuan Gerobak Untuk Mendukung Kegiatan Anjur Angkut Sampah 160
Gambar 4. 5. Pelaksanaan Kegiatan Anjur Angkut Sampah 161
Gambar 4. 6. Pembuatan Pupuk Padat dan Cair dari Sampah Rumah Tangga Menggunakan Komposter 161
Gambar 4. 7. Inovasi Pembuatan Pupuk oleh Kelompok Tani Karya Makmur Bunga Mandastana 162
Gambar 4. 8. Penyerahan Bantuan Incinerator Dari KLHK RI 163
Gambar 4. 9. Unit Insinerator dan Cold Storage di BLUD UPT Limbah B3 167
Gambar 4. 10. Alat ONLINMO dan Bangunannya 168
Gambar 4. 11. Grafik Kasus Diare Kabupaten Barito Kuala 171
Gambar 4. 12. Kondisi Wilayah Pesisir Sungai dan Dataran Rendah Kabupaten Barito Kuala..... 172
Gambar 4. 13. Design Tripikon – S..... 173
Gambar 4. 14. Keunggulan Tripikon-S 175
Gambar 4. 15. Bupati Batola meninjau stand Tripikon S di Bursa Inovasi Desa (Advokasi dan sosialisasi Inovasi Tripikon S). 176
Gambar 4. 16. Sinergitas kerjasama lintas sektor Pemasangan Tripikon-S 176

Gambar 4. 17. Pelatihan Perakitan Tripikon S Oleh Kader Desa, Tukang Desa, dan Tenaga Sanitarian Puskesmas..... 177

Gambar 4. 18. Grafik Jumlah Pemasangan Tripikon S 177

Gambar 4. 19. Pemasangan Tripikon-S..... 178

Gambar 4. 20. Penggunaan Lahan Berkelanjutan dengan menggunakan jerami sebagai bahan baku untuk pupuk organik 179

Gambar 4. 21. Pembuatan pupuk organik untuk lahan Pertanian..... 179

Gambar 4. 22. Verifikasi Proklim di Kampung Iklim Kebupaten Barito Kuala dan Penyerahan Piagam Proklim dari Menteri LHK 180

Gambar 4. 23. Piagam Proklim yang Diraih Kabupaten Barito Kuala dari Menteri LHK..... 181

Gambar 4. 24. Grafik Perkembangan Lokasi Desa Proklim 183

Gambar 4. 25. Desa-desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Danda Jaya..... 183

Gambar 4. 26. Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan dan Kesiap Siagaan Karhutla..... 184

Gambar 4. 27. Apel Siap Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan di Perusahaan Tasnida dan TBM 185

Gambar 4. 28. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Jejangkit 185

Gambar 4. 29. Grafik Kegiatan Penanaman Penghujauan 187

Gambar 4. 30. Aksi Penanaman Pohon Penghijauan Di Kuala Lupak Tabunganen 188

Gambar 4. 31. Rapat Koordinasi dan Apel Siaga Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan..... 190

Gambar 4. 32. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 190

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Tabel Data IKPLHD

Lampiran B : Penentuan Isu Prioritas

Lampiran C : SK Tim Penyusun Dokumen IKPLHD

Lampiran D : Biodata Tim Penyusun Dokumen IKPLHD

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan berkewajiban untuk melakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Berbagai perangkat perundang-undangan dibuat sebagai upaya untuk pengelolaan lingkungan hidup dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup berikut peraturan pelaksanya sampai pada tindak lanjut Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati bahkan bisa berupa instruksi bupati.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, telah menetapkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan harus menjadi pertimbangan di dalam membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) maupun di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (TRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah dimuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah menjadi perangkat penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi kondisi lingkungan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan pembangunan suatu daerah.

Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang–Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai badan publik, pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tersebut antara lain informasi yang diumumkan secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dengan latar belakang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan mengacu kepada pedoman umum penyusunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

1.2. Profil Kabupaten Barito Kuala

1.2.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Barito Kuala dengan Ibu Kota Marabahan, Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat 2°29“50”-3°30“18” Lintang Selatan (LS) dan 114°20“50”-114°50“18” Bujur Timur (BT). Wilayah Kabupaten Barito Kuala menempati areal wilayah barat dari Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah. Areal ini terletak memanjang dari Kecamatan Kuripan di utara hingga Kecamatan Tabunganen di selatan, dengan panjang kurang lebih 120 km dan lebar yang bervariasi antara 1,0. Secara administratif, Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan:

- Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di sebelah Utara,
- Laut Jawa di sebelah Selatan,
- Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin di sebelah Timur
- Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah Barat

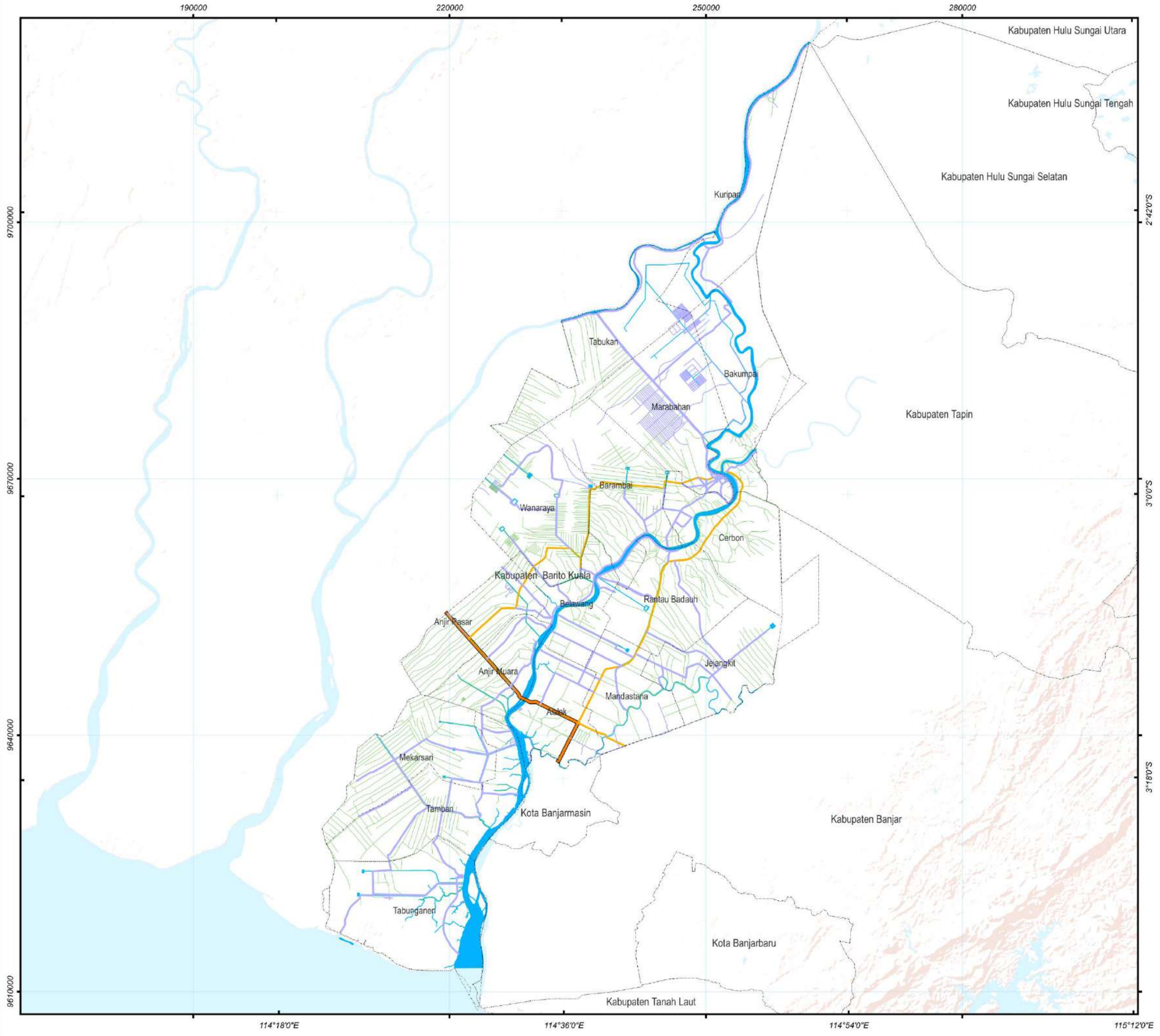
Wilayah Kabupaten Barito Kuala memiliki luas wilayah 2.996,96 Km² atau 7,99% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdistribusi pada 17 (tujuh belas) kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 201

kelurahan/desa. Kecamatan terluas di Kabupaten Barito Kuala yaitu Kecamatan Kuripan seluas 343,5 km^2 (11,46%), sedangkan daerah yang wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Wanaraya dengan luasnya sebesar 37,50 km^2 (1,25%). Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Peta Administrasi Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase
Alalak	106,85	3,57
Anjir Muara	116,75	3,90
Anjir Pasar	126,00	4,20
Bakumpai	261,00	8,71
Barambai	183,00	6,11
Belawang	80,25	2,68
Cerbon	206,00	6,87
Jejangkit	203,00	6,77
Kuripan	343,50	11,46
Mandastana	136,00	4,54
Marabahan	221,00	7,38
Mekarsari	143,50	4,79
Rantau Badauh	261,81	8,74
Tabukan	166,00	5,54
Tabunganen	240,00	8,01
Tamban	164,30	5,48
Wanaraya	37,50	1,25
Jumlah	**2.996,46**	**100,00**

(Sumber: Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2023)



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (IKPLHD)
KABUPATEN BARITO KUALA

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BARITO KUALA

N

Skala 1 : 450.000

0 5 10 15 20 km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid UTM 50S
Datum	:	World Geodetic System (WGS) 84

KETERANGAN :

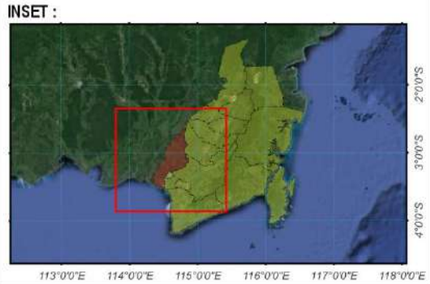
Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Sungai

Jalan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lain
- Jalan Setapak

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG Tahun 2018
2. Peta Dasar Kabupaten Barito Kuala
3. Interpretasi Citra Satelit

INSET :



PT GEOTENVIRO TEKNINDO NUSANTARA
2023

1.2.2. Kependudukan

Berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2021 mencapai 316.963 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Alalak yaitu sebanyak 64.080 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuripan yaitu sebanyak 5.838 jiwa. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Alalak dengan tingkat kepadatan 599,72 penduduk per kilometer persegi, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kuripan dengan tingkat kepadatan 17 penduduk per kilometer persegi. Hal tersebut menunjukkan sebaran atau distribusi penduduk di daerah Kabupaten Barito Kuala tidak merata. Penduduk Kabupaten Barito Kuala per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
Tabunganen	20,562	240.00	85.68
Tamban	32,652	164.30	198.73
Anjir Pasar	17,639	126.00	139.99
Anjir Muara	23,045	117.25	196.55
Alalak	61,271	106.85	573.43
Mandastana	17,999	136.00	132.35
Rantau Badauh	16,974	206.00	82.40
Belawang	14,220	80.25	177.20
Cerbon	10,116	183.00	55.28
Bakumpai	10,934	261.00	41.89
Kuripan	6,001	343.50	17.47
Tabukan	9,383	166.00	56.52
Mekarsari	18,437	143.50	128.48
Barambai	16,277	261.00	62.36
Marabahan	22,629	221.00	102.39
Wanaraya	14,701	37.50	392.03
Jejangkit	6,868	203.00	33.83
Jumlah	**319,708**	**2,996.15**	**2476.58**

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, 2022)

1.2.3. Topografi

Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang datar dengan kelerengan 0% - 2%, dengan ketinggian elevasi berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barito Kuala diapit oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas, hal ini sangat mempengaruhi tata air yang ada diwilayah kabupaten ini. Di samping itu terdapat pula 3 buah terusan (anjir) buatan yang menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat dan Anjir Tamban. Keadaan hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan *present landuse* baik didaerah ini maupun di bagian hulu. Dalam musim hujan pada waktu pasang air Sungai Barito dapat membanjiri sebagian besar wilayah ini dan mengakibatkan permukaan tanah tergenang terus menerus. Kapasitas pengairan alam melalui anak-anak sungai kecil sehingga terbentuk tanah rawa.

Pasang surut turut pula mempengaruhi tata air yang ada, yang selalu bergerak naik turun mengikuti fluktuasi pasang surut air pada Sungai Barito dan Sungai Kapuas, gerak pasang surut ini terjadi 2 kali dalam 24 jam dan setiap harinya terlambat 50 menit sesuai dengan peredaran bulan. Perbedaan tinggi rendah permukaan air pada waktu pasang surut dapat mencapai 2-3 M, gerak pasang surut inilah yang dimanfaatkan oleh para petani untuk menggali *handil-handil* (parit) pada daerah yang akan dijadikan persawahan Secara umum daerah ini ditutupi oleh tumbuhan rawa daerah pantai ditutupi oleh hutan bakau (Mangrove) dan sedikit ditemukan cemara laut (*Cacuarina sp*). Sedangkan daerah yang masih dipengaruhi oleh air payau 1-3 Km dari pantai, di lokasi ini banyak ditumbuhi pohon nipah dan tumbuhan lainnya adalah nibung. Tumbuhan jingah, rambai yang tumbuh di sepanjang sungai, tumbuhan galam (*Melaleuca spp*) dan purun tikus (*Fimbristylis spp*) terdapat pada daerah yang sifat keasamannya antara PH3, 5-4, 5 yang biasanya tumbuhan ini hidup berdampingan dan kadang-kadang diselingi oleh rumput-rumputan. Galam merupakan pohon

yang amat dominan dijumpai diwilayah ini, sedangkan hutan primer tidak ada.

Jenis kayu hutan yang lain adalah belangiran (*Shorea Belangiran*), tumih. Tumbuhan air seperti enceng gondok dan rumput air yang acap kali menutupi saluran (anjir), sehingga menghambat lalu lintas air.

Pada daerah ini dijumpai juga beberapa jenis fauna yang hidup, diantaranya beberapa jenis ikan darat seperti ikan gabus (*Ophicephalus striatus*), papuyu (*Anabste studineus*), sepat, baung, patin, pipih dan lain-lain. Ikan-ikan tersebut hidup disungai-sungai dan saluran rawa-rawa serta sawah. Jenis reftil seperti ular sawah, biawak. Terdapat pula salah satu jenis kera yang khas dan langka yaitu Bekantan (*Nasalis Larvatus*) yang merupakan maskot fauna Provinsi Kalimantan Selatan. Binatang mamalia lainnya adalah beberapa jenis kera, kucing hutan, beruang, musang dan lain-lain. Binatang lain yang merupakan hama tanaman adalah tikus dan babi hutan.

Jenis tanah yang terdapat ada dua jenis tanah yang masing-masing adalah organosol yakni seluas 101.900 Ha (34%) dan tanah alluvial seluas 191.390 Ha (66%). Tanah Organosol berwarna coklat hitam dan sering tanah ini disebut gambut atau peat (bahan yang mudah terbakar), tanah ini terbentuk dari serat tumbuh-tumbuhan yang mengalami proses pembusukan, sifat keasamannya sangat tinggi sehingga kalau ingin mempergunakan tanah ini harus dengan sistem drainase.

Tanah Alluvial berwarna coklat hijau, tanah ini terdiri dari endapan Alluvium yang bahan induknya terutama termasuk dari pasir dan lumpur yang dibawa dan diendapkan oleh arus sungai dari pedalaman, tanah terdapat di sepanjang Sungai Barito dan tepi Sungai Kapuas, berupa tanggul-tanggul dan juga pada beberapa medeander sungai. Tanah Alluvial ini menutupi areal seluas 191.390 Ha, atau lebih kurang 64% dari luas wilayah Kabupaten Barito Kuala dan merupakan daerah terbaik bagi pertanian pasang surut. Topografi di wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3. Topografi di Wilayah Kabupaten Barito Kuala

No	Topografi	Ketinggian	Luas (Ha)	%
1	Dataran	0 -150 mdpl	299.696	100
2	Perbukitan	150 – 1.500 mdpl	0	0
3	Pegunungan	Lebih dari 1.500 mdpl	0	0
Total			**299.696**	**100**

(Sumber : Bappelitbang Kab. Barito Kuala, 2020)

1.2.4. Kelerengan Lahan

Kemampuan tanah didaerah ini di ketahui bawah wilayah ini tidak seluruhnya datar, yakni lereng 0,2 % sehingga merupakan daerah endapan. Keadaan effektif tanah untuk alluvial lebih besar dari pada 90 cm tercatat hamper 60%-64% dari luas wilayah, sedangkan daerah yang ketebalan gambutnya lebih besar dari 75 cm terdapat seluas 6,74 % tekstur tanah 95% liat (halus) sedangkan drainage yang dominanya kini didaerah yang tergenang rawa, untuk erosi tidak ada. Dari data diatas, kalau kita transparankan pada peta penggunaan tanah dengan peta kemampuan tanah dan jenis tanah maka akan kita lihat pada umumnya daerah yang diusahakan penduduk adalah daerah alluvial yang digunakan pada umumnya persawahan, karena memang merupakan daerah yang cukup subur. Pada daerah orgonosal atau gambut juga telah diusahakan dengan membuat handil-handil atau saluran-saluran pembuangan air sehingga untuk tempat ketebalan gambutnya cukup tinggi dengan adanya handil-handil tersebut ketebalannya bisa menipis,sehingga bisa diusahakan. Adapun keterangan kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Kelerengan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Kuala

No	Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)	%
1	0 – 8	299.696	100
2	8 – 15	0	0
3	15 – 25	0	0
4	25 – 40	0	0
5	Lebih dari 40	0	0

(Sumber : Bappelitbang Kab. Barito Kuala, 2020)

1.2.5. Hidrologi

A. Sungai

Keberadaan sungai di Kabupaten Barito Kuala memiliki peranan penting baik dalam peranan kehidupan sehari-hari maupun peran perekonomian. Posisi kawasan yang dilalui oleh DAS Barito menjadi gerbang utama dalam hal transportasi sungai khususnya transportasi batubara. Namun kegiatan pemanfaatan sungai tersebut sedikit banyaknya telah mempengaruhi kualitas air sungai dan ekosistem disekitarnya. Adapun keterangan sungai di wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5. Jumlah Sungai di Wilayah Kabupaten Barito Kuala

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)
1.	Sungai Kapuas	51
2.	Sunagi Barito	146
3.	Sungai Nagara	6
4.	Anjir Talaran	20
5.	Anjir Serapat	16
6.	Anjir Tamban	19

(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Kuala, 2022)

Permasalahan yang sering ditemui disungai-sungai yang ada di Kabupaten Barito Kuala ini adalah terjadinya endapan sedimen. Hal ini terjadi akibat para petani yang dalam pengelolaan sawahnya belum membuat tunggul keliling yang mengakibatkan air masuk tanpa adanya penghalang. Air sungai yang bersifat asam juga berdampak membuat rumput atau gulma

untuk cepat tumbuh walaupun di dalam air. Pada bantaran sungai juga belum terdapat penutup atau gorong-gorong sehingga dapat berakibat terjadinya luapan air ke daratan atau banjir. Solusi yang diharapkan adalah dibangunnya tanggul keliling di bantaran sungai yang terindikasi terjadinya endapan sedimen dan penanggulangan tata air makro sehingga dikemudian hari tidak terjadi luapan air atau banjir. Nilai debit sungai tergantung pada tinggi rendahnya fluktuasi pasang surut dan bergantung pada iklim.

B. Danau/Waduk/Situ/Embung

Wilayah Kabupaten Barito Kuala lebih didominasi oleh daerah rawa/gambut, sehingga untuk danau, waduk, situ, embung tidak ditemukan di wilayah ini.

C. Mata air

Pada wilayah Kabupaten Barito Kuala saat ini belum ditemukan adanya mata air yang secara langsung dikeluarkan oleh alam itu sendiri. Namun pemanfaatan air tanah digunakan dan diupayakan sebagai usaha pemenuhan sistem penyediaan air minum yang belum terjangkau dengan sistem perpipaan, yaitu dengan menggunakan sumur gali dan sumur pompa tangan (*dragon pump*).

D. Cekungan Air Tanah (CAT)

Hampir sama dengan mata air, di daerah Kabupaten Barito Kuala sukar sekali ditemukan adanya Cekungan Air Tanah (CAT).

1.2.6. Ekosistem Kars dan Ekosistem Gambut

Pada wilayah Kabupaten Barito Kuala sampai saat ini belum ditemukan adanya ekosistem karst. Akan tetapi, diwilayah Barito Kuala sendiri terdapat pemanfaatan potensi rawa yang terbatas pada pengembangan areal pertanian. Kawasan gambut tidak ditentukan dari tingkat luasan dengan kondisi hidrologi Kabupaten Barito Kuala yang sanga tdipengaruhi oleh

curah hujan dan pasang surut aliran sungai, maka pemanfaatan lahan rawa untuk areal pertanian dikembangkan dengan menggunakan handil-handil (parit). Handil-handil tersebut berfungsi untuk mengalirkan air sungai yang mempunyai derajat keasaman netral ke areal rawa yang mempunyai derajat keasaman tinggi pada saat pasang dan kemudian mengalirkannya kembali ke sungai pada saat surut. Adapun ekosistem gambut di wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Ekosistem Gambut di Wilayah Kabupaten Barito Kuala

Nama/ Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Permasalahan	Upaya Konservasi
Rawa / Gambut	145,444	1 - 3	Karakteristik rawa dengan tingkat keasaman yang masih relative tinggi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman pertanian (persawahan)	Penyuluhan pada masyarakat tentang system persawahan pasang surut dengan adanya parit-parit. Pengembangan Tata Air Mikro (TAM). Penerapan kearifan lokal

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barito Kuala 2022)

1.2.7. Klimatologi

Kabupaten Barito Kuala terletak di garis Khatulistiwa yang banyak curah hujannya, menurut Fh. Schmit dan Y.A. Ferguson Dan Varhan delingan nomor 42 dari Jawatan Meteorologi dan Geofisika, wilayah ini termasuk daerah hujan tipe b yaitu iklim yang mempunyai 1-2 bulan kering dalam setahun. Temperatur rata- rata antara 26,6°C–27,7°C, suhu maksimal adalah 35,80°C terdapat pada bulan Oktober, sedangkan suhu minimum terdapat pada bulan Juli dengan suhu mencapai 20,80°C. Rata-rata hujan

pada tahun 2021 adalah 3259,1 mm/tahun dengan 232 hari hujan untuk daerah Marabahan.

Angin pada bulan Januari sampai Maret berhembus dari arah barat laut. Pada bulan April angin berhembus dari arah tenggara dan pada bulan November, arah angina dari Barat Laut. Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh iklim, geografi dan pertemuan arus udara. Pada tahun 2016 curah hujan rerata tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 358,14 mm dan rerata terendah pada bulan September sampai Desember dengan besaran 00 mm. Pada tahun 2017, jumlah curah rerata tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 310,91 mm dan rerata terendah pada bulan September yaitu sebesar 38,21 mm. Pada tahun 2018, jumlah curah rerata tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 419 mm dan rerata terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 43 mm. Pada tahun 2019, jumlah curah rerata tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 334,01 mm dan rerata terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 18,74 mm. Pada tahun 2020, jumlah curah rerata tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 532,00 mm dan rerata terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 115,10 mm. Sementara itu, pada tahun 2021, jumlah curah rerata tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 898,3 mm dan rerata terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 63,8 mm. Adapun rata-rata curah hujan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.7 Rata-Rata Curah Hujan Bulanan (mm)

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	272,18	241	322,49	457,8	898,3
Februari	299,41	211	279	532	426
Maret	310,91	419	297,64	264,5	166
April	203,04	121	334,01	256,8	213,6
Mei	243,51	244	65,97	187,1	199,6
Juni	185,88	146	136,04	189,2	222,3

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Juli	70,39	78	19,39	175,1	63,8
Agustus	88,69	43	18,74	115,1	161,8
September	0	38,21	68	155,9	121,7
Oktober	0	142,71	135	173,6	144,8
November	0	274,01	259	370,3	283,9
Desember	0	381,81	340	500,9	357,3
Rerata	**140,9**	**209,23**	**192,08**	**281,53**	**271,59**

Sumber : BPS, Barito Kuala Dalam Angka tahun 2022

1.2.8. Pertanian

Pertanian merupakan sektor potensial di Kabupaten Barito Kuala sebagai penghasil beras terbesar di Kalimantan Selatan yang mampu menyumbang kurang lebih 20 % dari total produksi Kalimantan Selatan. Usaha peningkatan peran sektor pertanian terus menerus dilaksanakan dengan program antara lain Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Agropolitan.

1.2.9. Penggunaan Lahan

Kabupaten Barito Kuala memiliki luas wilayah sebesar 2.996,96 km^2. luas wilayah menurut penggunaan lahan utama di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :

1. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2012-2032, hutan produksi yang bias dikonfirmasi 2.978,2 Ha, kawasan lindung 3.862,84 Ha dan Kawasan Budidaya non Kehutanan sebesar 261.192,7 Ha. Dan SK Bupati Nomor 188.45/98/KUM/2011 luas wilayah hutan kota Kabupaten Barito Kuala seluas 53,192 Ha.
2. Lahan persawahan 113.224 Ha, yang menggunakan irigasi pasang surut 112.478 Ha dan sementara tidak diusahakan 11.552 Ha.

3. Lahan tegalan/ kebun seluas 12.498 Ha
4. Lahan ladang/ huma seluas 1.146 Ha
5. Lahan pengembalaan ternak seluas 16.380 Ha
6. Lahan sementara yang tidak diusahakan seluas 17.438 Ha.

1.2.10. Sektor Unggulan

Sektor unggulan yang diusahakan oleh Kabupaten Bario Kuala terdiri dari sektor:

1. Pertanian, tanaman pangan dan holtikultura
   Sektor potensial di Kabupaten Barito Kuala adalah pertanian. Selain padi, buah-buahan juga menjadi andalan tanaman bahan pangan, diantaranya jeruk, manggis, pisang, nenas, mangga dan rambutan.
2. Perkebunan dan Peternakan
   usaha bidang perkebunan meliputi usaha perkebunan, salah satunya adalah pengembangan kelapa sawit yang diyakini akan mampu mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Populasi ternak di Kabupaten Barito Kuala terbagi menjadi tiga golongan, yakni ternak besar, ternak kecil dan unggas.
3. Kehutanan
   Wilayah hutan di Kabupaten Barito Kuala tersebar di seluruh kecamatan, sebagian dari hutan ini merupakan kawasan lindung, cagar alam dan hutan produksi.
4. Perikanan dan kelautan
   Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah berpotensi sumber daya alam di bidang perikanan dan kelautan.

1.3. Tahapan Penyusunan

Sehubungan dengan penerbitan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, jauh sebelumnya pemerintah daerah telah menyusun Neraca Lingkungan Hidup (NLH) yang dimulai sejak tahun 1982. Tahun 1986 berubah menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD), dan mulai tahun 1994 berubah nama menjadi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Dan pada tahun 2017 (SLHD) berganti nama menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

Proses penyusunan DIKPLHD adalah sebagai berikut :

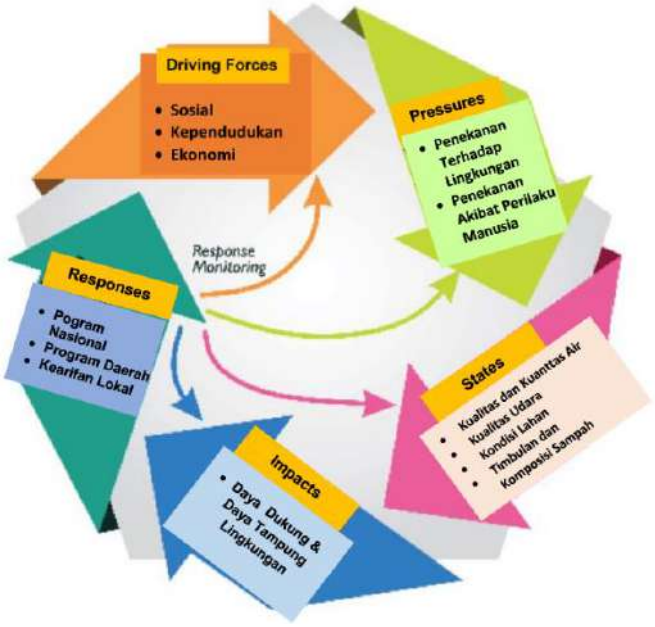
1. Penjaringan Isu prioritas dilaksanakan sesuai dengan kapasitas masaing – masing bidang dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).
2. Penetapan Tim penyusun oleh Bupati Kabupaten Barito Kuala berdasarkan SK No. 188.45/201/KUM/2023 Tanggal 28 April 2023.
3. Melaksanakan Penjaringan Isu prioritas lanjutan Pada tanggal 12 Mei 2023 dalam rangka identifikasi dan perumusan Prioritas isu lingkungan hidup daerah (penetapan Prioritas isu)
4. Melaksanakan rekap Penjaringan Isu prioritas pada tanggal 17 Mei 2023 dengan hasil Penetapan isu strategis Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).
5. Pengumpulan data hasil pemantauan secara berkala oleh masing-masing institusi terkait.
6. Melakukan evaluasi data secara berkala oleh forum tim penyusun
7. Menyusun Laporan Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
8. Melaksanakan lanjutan penetapan Isu prioritas dan finalisasi Draft Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) pada tanggal 12 Juli 2023 dalam rangka review hasil kajian

mengenai DIKPLHD oleh tim pokja/penyusun oleh Bupati Barito Kuala, Ketua Dewan Anggota DPRD, Para SKPD, Forkapinda, *Stakeholder* Terkait, LSM, Perguruan Tinggi dan Tenaga Ahli.

A. Kerangka Kerja

Kerangka kerja meliputi gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah termasuk proses perumusan dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas lingkungan hidup daerah. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 meliputi pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian laporan dengan model DPSIR (*Driving Forces*, *Pressures*, *States*, *Impacts*, *Response*). Kerangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan kepada konsep hubungan sebab akibat dimana terdapat obyek penggerak (*Driving Forces*) dalam kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan (*Pressure*) dan menyebabkan perubahan pada sumber daya alam dan lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas (*State*). Selanjutnya dari adanya perubahan lingkungan tersebut dapat diketahui dampak yang terjadi pada lingkungan di suatu daerah (*impact*), sehingga pemerintah dan masyarakat/*stakeholder* melakukan reaksi terhadap perubahan ini baik melakukan adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan (*societal response*). Hal yang terakhir merupakan umpan balik terhadap tekanan melalui kegiatan manusia. Aktivitas manusia sebagai penggerak dalam pemanfaatan sumber daya alam akan menimbulkan tekanan pada lingkungan dan mengubah keadaannya, atau kondisinya sehingga menimbulkan berbagai dampak permasalahan lingkungan. Manusia kemudian memberikan respon terhadap perubahan tersebut dengan membangun dan mengimplementasikan kebijakan. Analisis terhadap

tekanan yang muncul, kondisi eksisting yang terjadi berikut dampaknya serta response yang dilakukan kemudian dikenal sebagai pendekatan DPSIR seperti terlihat dalam diagram alir berikut:



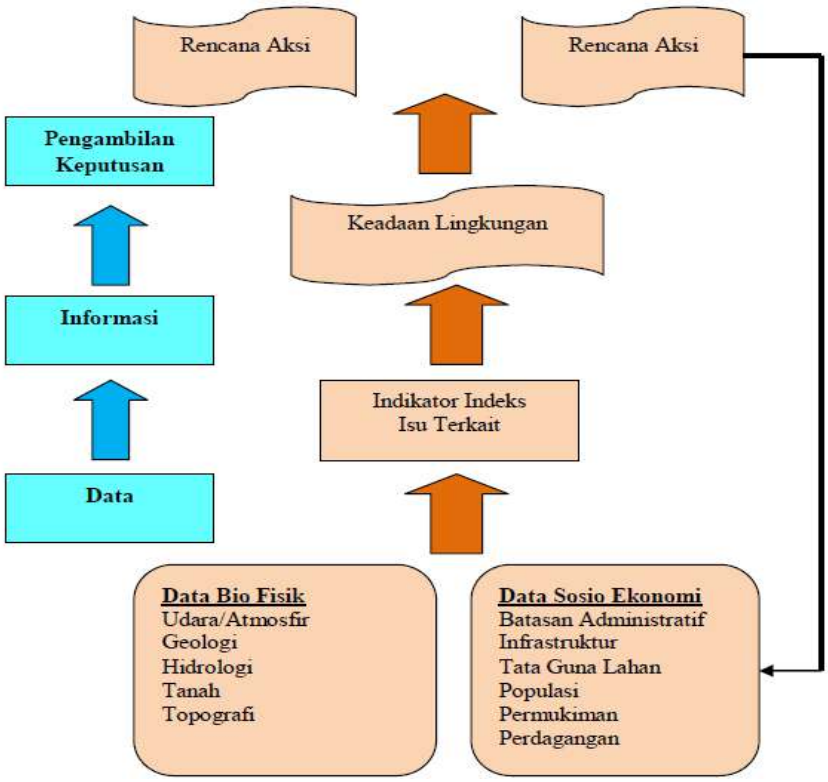
Gambar 1.2 Diagram Model DPSIR

Terdapat 5 (lima) indikator utama dalam kerangka DPSIR yang akan dianalisis yaitu:

1. Indikator penggerak kegiatan manusia terhadap lingkungan (*Driving Force*). Indikator ini menggambarkan penggerak kegiatan manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam seperti faktor sosial, kependudukan dan faktor kebutuhan ekonomi
2. Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*). Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
3. Indikator kondisi lingkungan (*state*). Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan
4. Indikator dampak lingkungan (*impact*). Indikator ini menggambarkan dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan
5. Indikator respon (*response*). Indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian *stakeholder* terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.

Kepedulian terhadap respon penanganan lingkungan ini mencakup berbagai *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, industri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, maupun masyarakat umum. Tekanan mencakup aktivitas dan dampak seperti konsumsi energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan urbanisasi. Tekanan juga mencakup interaksi-interaksi berikut : Lingkungan berlaku sebagai sumber dari aktivitas ekonomi manusia memperoleh bahan baku untuk memenuhi kehidupannya, seperti mineral, makanan, serat, dan energi dan dalam prosesnya, berpotensi mengurangi sumber-sumber daya tersebut atau sistem biologis (seperti tanah, hutan dan perikanan) tempat dimana mereka bergantung, sebagai menunjang sistem kehidupan mereka. Aktivitas manusia menciptakan aliran polutan, sampah/limbah, dan energi yang masuk kembali ke lingkungan, dan mengancamnya dalam bentuk kemerosotan dan degradasi lingkungan. Aktivitas manusia baik secara langsung maupun tak langsung mengubah bentuk, mengganggu dan mendegradasi ekosistem, sehingga menurunkan kemampuan lingkungan untuk menyediakan faktor- faktor penunjang bagi sistem kehidupan yang memadai. Kondisi lingkungan seperti air yang tercemar, udara yang tercemar, dan sumber pangan yang tercemar mempunyai dampak langsung terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan manusia. Tekanan ini akan membawa kita menuju perubahan kondisi/keadaan lingkungan, yang pada gilirannya kembali mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri. Kondisi lingkungan ini mencakup kualitas air, udara, lahan, ketersediaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya rakyat. Respon masyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda dalam bentuk aturan/legislasi baru, teknologi baru, perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat, obligasi/kewajiban internasional, reformasi birokrasi, dan reformasi ekonomi. Respon sosial ini berpengaruh terhadap keadaan lingkungan maupun aktivitas manusia (tekanan). Kemampuan untuk merespon tergantung pada kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia

mengenai keadaan dan tekanan terhadap lingkungan. Kerangka kerja analisis lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.3 Kerangka Kerja Analisis Lingkungan

B. Metodologi

Dimensi permasalahan lingkungan pada umumnya menyangkut dimensi yang luas. Dimensi pertama, bahwa permasalahan lingkungan cenderung lintas ruang; adanya suatu kondisi bahwa permasalahan lingkungan cenderung melewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kasus banjir, permasalahan lingkungan tidak terbatas pada satu kabupaten/kota tertentu, mungkin melewati batas-batas administrasi. Oleh karena itu pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjir seharusnya tidak dibatasi pada satu-dua kabupaten tertentu, perlu suatu jaringan informasi lingkungan antar wilayah administrasi, minimal pada satu Daerah Aliran Sungai (DAS). Ternyata hal ini memerlukan peran pemerintah

provinsi sebagai fungsi koordinasi. Dimensi kedua, bahwa fenomena lingkungan selalu berkaitan dengan lintas pelaku. Perubahan suatu lingkungan umumnya diakibatkan adanya tekanan atau *pressure* oleh kegiatan manusia terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam selanjutnya akan memberikan sinyal yang berupa *state*, dan bagaimana *response* manusia untuk mengatasi permasalahan tekanan tersebut. Sebagai contoh adalah tingkat kemacetan lalu-lintas yang cukup tinggi pada suatu wilayah. *Pressure*-nya adalah berbentuk kemacetan lalu-lintas. *State* yang ada adalah tingginya polusi udara dari sumber bergerak. *Response* kita bagaimana kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas dan polusi udara tersebut. Persoalan ini tidak bisa ditangani secara mandiri oleh instansi pemerintah, karena sudah menyangkut lintas pelaku. Oleh karena itu perlu dikembangkan jaringan informasi lingkungan antar pelaku. Dimensi ketiga, permasalahan lingkungan selalu menyangkut lintas generasi. Sebagai contoh adalah persoalan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Kenyataan ini selayaknya diinformasikan kepada generasi berikutnya sebagai perwujudan transparansi dan bentuk audit lingkungan.

C. Pengumpulan Data

Data yang disajikan dalam dokumen ini adalah data primer berdasarkan pemantauan atau pengambilan sampel pengukuran kualitas lingkungan baik air, udara dan tanah, selain itu juga berasal dari data sekunder yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Instansi lain. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penyusunan dokumen adalah sebagai berikut :

1. Menyusun daftar sumber data yang diperkirakan sesuai dengan pedoman penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.
2. Melakukan survei pendahuluan ke sumber-sumber data untuk mengetahui jenis data yang dihasilkan.

3. Menyusun formulir berdasarkan format yang ada pada pedoman penyusunan Dokumen IKPLHD.
4. Membandingkan formulir dengan format data yang ada pada publikasi-publikasi yang telah dikeluarkan oleh sumber data.
5. Melakukan pertemuan teknis dengan sumber-sumber data untuk mendapatkan data terbaru dan klarifikasi jika ada perbedaan format data.

D. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Data sekunder yang format dan satuannya sudah sesuai, maka data tersebut langsung dimasukkan tabel sesuai pedoman penyusunan.
2. Data yang berbeda format dan satuannya diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan pedoman penyusunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud Penyusunan Dokumen IKPLHD

Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah di maksudkan untuk mendokumentasikan perubahan dan kecenderungan kondisi lingkungan. Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkungan yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah serta semua tingkatan lembaga pemerintah. Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah juga akan menyediakan referensi dasar tentang keadaan lingkungan bagi pengambil kebijakan sehingga akan memungkinkan diambilnya kebijakan yang baik dalam rangka mempertahankan proses ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan di masa kini dan masa datang.

Pelaporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk

membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Pelaporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang baik dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan yaitu:

a) Secara rutin menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan kini dan prospeknya dimasa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah serta pengambil keputusan,
b) Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan himpunan indikator dan indeks lingkungan yang disepakati pada tingkat nasional,
c) Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang akan dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target lingkungan,
d) Menyediakan peringatan dini akan masalah potensial, serta memungkinkan adanya evaluasi akan rencana mendatang,
e) Memberikan sumbangan dalam menelaah kemajuan bangsa dalam menjamin keberlanjutan ekologis,
f) Merancang mekanisme *integrase* informasi lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan tujuan untuk menyediakan gambaran yang jelas tentang keadaan bangsa.
g) Mengidentifikasi adanya jeda pengetahuan tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan serta merekomendasikan strategi penelitian dan pemantauan untuk mengisi jeda tersebut, dan
h) Membantu mengambil keputusan untuk membuat penilaian yang terinformasi mengenai konsekuensi luas dari kebijakan dan rencana sosial, ekonomis, dan terkait lingkungan serta memenuhi kewajiban bangsa untuk pelaporan lingkungan.

1.4.2. Tujuan Penyusunan Dokumen IKPLHD

a) Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
b) Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk akuntabilitas publik,
c) Menyediakan sumber informasi utama bagi rencana pembangunan tahunan daerah, program pembangunan daerah, dan kepentingan penanaman modal (investor),
d) Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di daerah, serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4.3. Pengguna Dokumen IKPLHD

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dapat berfungsi untuk pelaporan dan pemantauan dari beberapa pengguna, yang terdiri dari:

a) Masyarakat umum yang berkepentingan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup,
b) Lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
c) Lembaga pendidikan sebagai sumber pembelajaran,
d) Kelompok industri sebagai bahan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,
e) Pengambil keputusan di bidang pemerintahan,
f) Perencana dan pengelolaan sumber daya alam,
g) Media cetak dan elektronik sebagai sumber berita dan
h) Lembaga internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah dalam penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD) terdapat di Kabupaten Barito Kuala, wilayah daerah kegiatan penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala dengan Ibu Kota Marabahan, Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat 2°29"50"-3°30"18" Lintang Selatan (LS) dan 114°20"50"-114°50"18" Bujur Timur (BT). Secara administrasi Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 kecamatan dengan luas wilayah 2.996,96 km^2 atau sekitar 7,99 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Batas-batas Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di sebelah Utara,
- Laut Jawa di sebelah Selatan,
- Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin di sebelah Timur
- Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah Barat

1.5.2. Lingkup Substansi

Lingkup substansi dalam penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD) Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Persiapan (Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran, Kerangka Acuan Kegiatan, Petunjuk Operasional, Penjadwalan dan Pengaturan Staf Personil):
2. Pelaksanaan Proses Pengadaan Penyedia Jasa;
3. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023:
   a. Inventarisasi data utama, yaitu data lingkungan hidup beserta data pendukung lainnya yang diperlukan untuk memperkuat analisis. Data yang diperlukan adalah data dari tahun sebelumnya untuk melihat kecenderungan.

b. Penyusunan daftar isian kondisi, masalah/kasus lingkungan hidup serta isu prioritas yang akan sebarkan kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta pihak terkait lainnya.
c. Melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi terjadinya masalah lingkungan hidup utama/prioritas, serta lokasi lain yang relevan dan penting.
d. Melakukan analisis *Driving Force*, *Pressure*, *State*, *Impact* dan *Response* untuk masing-masing isu Lingkungan Hidup Daerah, yang meliputi:
    1) Tataguna lahan, meliputi data-data yang terkait dengan luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, rencana tata ruang dan pemanfaatan pesisir dan laut, serta data pendukung lainnya.
    2) Kualitas air, meliputi kualitas air sungai, air tanah, dan air laut (kualitas air laut khusus bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut).
    3) Kualitas udara, meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi Kalimantan, bahan pencemar.
    4) Kalimantan bencana, bencana yang dimaksudkan bisa berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, banjir, longsor), bencana non alam (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial).
    5) Perkotaan, meliputi data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksisting. Data aspek fisik seperti pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah dan aspek sosial

ekonomi seperti dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman.

e. Menyusun Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat :
   1) Inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik).
   2) Inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat

Lingkup materi yang harus ditampilkan dalam penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) adalah (Berdasarkan Pedoman Nirwasita, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022):

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023, profil atau gambaran umum wilayah Kabupaten Barito Kuala, uraian singkat proses perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah, maksud dan tujuan serta ruang lingkup penulisan dokumen.

Bab II Analisis *Driving Force*, *Pressure*, *State*, *Impact* dan *Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah

Bab ini memuat analisis *Driving Force*, *Pressure*, *State*, *Impact* dan *Response* untuk masing-masing isu Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari isu tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, perkotaan, dan tata kelola.

Bab III Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Pada bab ini berisi mengenai isu prioritas lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala. Isu prioritas harus jelas dan fokus kepada isu yang terjadi di daerah. Kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas adalah: (1) kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; (2) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan (3) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera. Muatan yang dituangkan dalam Bab Isu Prioritas ini adalah berupa isu prioritas-isu prioritas terkini dan teraktual yang perlu mendapatkan penanganan sesegera mungkin tentang isu lingkungan yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala.

Bab IV Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik). Inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat harus dituangkan juga di dalam bab ini. Data yang mendukung dituangkan sejelas mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang lingkungan hidup termasuk persentasenya dibandingkan keseluruhan APBD.

Bab V Penutup

Bab ini memuat intisari (simpulan) dari Bab II s/d Bab IV, dan rencana tindak lanjutnya termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan kepala daerah.

Daftar Pustaka

Lampiran

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021

BAB II

ANALISIS DPSIR

ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

BAB II
ANALISIS *DRIVING FORCE*, *PRESSURE*, *STATE*, *IMPACT*, DAN *RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Faktor penggerak tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup memiliki kecenderungan meningkat. Beberapa faktor penggerak (*driving force*) antara lain faktor sosial kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, selain itu terdapat pula faktor ekonomi yang mendorong adanya kegiatan alih fungsi lahan untuk kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas yang berdampak pada isu lingkungan hidup seperti peningkatan limbah cair, limbah padat, gas dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pertumbuhan sektor transportasi dan energi; dan rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*) berupa aktivitas/ kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam yang akan menimbulkan tekanan lingkungan dan mengubah keadaannya atau kondisinya. Tekanan mencakup aktivitas seperti konsumsi energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan urbanisasi serta dampak-dampak yang diakibatkan dari aktivitas manusia tersebut.

Tekanan (*pressure*) terhadap lingkungan mencakup interaksi-interaksi sebagai berikut :

1. Lingkungan berlaku sebagai sumber dari aktivitas ekonomi manusia memperoleh bahan baku untuk memenuhi kehidupannya, seperti mineral, makanan, serat dan energi yang dalam prosesnya berpotensi mengurangi sumber-sumber daya tersebut atau sistem biologis (seperti tanah, hutan, perikanan, dan kelautan) tempat dimana mereka bergantung sebagai penunjang sistem kehidupan manusia.
2. Aktivitas manusia menciptakan aliran polutan, sampah/limbah dan energi yang masuk kembali ke lingkungan dan mengancamnya dalam bentuk kemerosotan dan degradasi lingkungan.

3. Aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung mengubah bentuk, mengganggu dan mendegradasi ekosistem, sehingga menurunkan kemampuan lingkungan untuk menyediakan faktor-faktor penunjang bagi sistem kehidupan secara memadai.
4. Kondisi lingkungan seperti udara yang tercemar, air yang tercemar, sumber air, dan sumber pangan yang mempunyai dampak langsung terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan.

Tekanan (*pressure*) ini akan membawa kita menuju perubahan kondisi/keadaan lingkungan yang pada gilirannya kembali mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri. Keadaan lingkungan yang ditekan meliputi kualitas air, udara, *lahan*, ketersediaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya rakyat. Tekanan (*pressure*) dari kegiatan manusia terhadap manusia dan sumber daya alam akan membawa kita menuju perubahan kondisi/keadaan lingkungan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri.

Kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya (*state*) merupakan salah satu indikator utama yang dianalisis dalam Dokumen IKPLHD. Indikator ini menggambarkan kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan prediksi situasi, kondisi dan pengembangannya di masa depan. Kondisi ini mencakup tata guna lahan dan laut, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, dan perkotaan. Berdasarkan hasil penilaian kondisi lingkungan akan diperoleh informasi status lingkungan hidup daerah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Respon (*response*) masyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda dalam bentuk aturan/legislasi baru, teknologi baru, perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat, kewajiban internasional, dan reformasi ekonomi. Respon sosial ini diharapkan mampu mempengaruhi keadaan lingkungan menuju kualitas dan kuantitas yang lebih baik serta mempengaruhi aktivitas manusia menjadi berperilaku dan berwawasan

lingkungan berkelanjutan. Permasalahan maupun isu mengenai lingkungan hidup dianalisa dan dijabarkan dengan mengaplikasikan pendekatan model DPSIR. Terdapat 5 (lima) indikator utama dalam kerangka DPSIR yang akan dianalisis yaitu:

1. Indikator penggerak kegiatan manusia terhadap lingkungan (*Driving Force*). Indikator ini menggambarkan penggerak kegiatan manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam seperti faktor sosial, kependudukan dan faktor kebutuhan ekonomi
2. Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*). Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
3. Indikator kondisi lingkungan (*state*). Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan
4. Indikator dampak lingkungan (*impact*). Indikator ini menggambarkan dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan
5. Indikator respon (*response*). Indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian *stakeholder* terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, LSM, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum.

Sehingga dihasilkan *output* yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala. Analisa DPSIR isu lingkungan hidup daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut.

2.1. Tata Guna Lahan

Lahan (*land*) diartikan sebagai lingkungan fisik yang merupakan hasil perpaduan atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Dalam

hal ini lahan mengandung pengertian ruang atau tempat. Kata lahan atau tanah dapat dipergunakan dalam makna yang setara dengan *land*.

Lahan sebagai salah satu sumber daya alam, memegang peranan penting karena merupakan wadah dari semua sumber daya yang ada di muka bumi. Satu kesatuan dari unsur-unsur lahan saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem lahan. Sistem lahan yang terbentuk berkolaborasi antar unsur yang bervariasi menjadikan adanya diferensiasi dan potensi yang variatif dalam dimensi ruang dan waktu, di samping sebagai wadah bagi sumber daya lain, lahan juga berfungsi sebagai wadah untuk kegiatan hidup manusia yang di representasikan dalam penggunaan lahan.

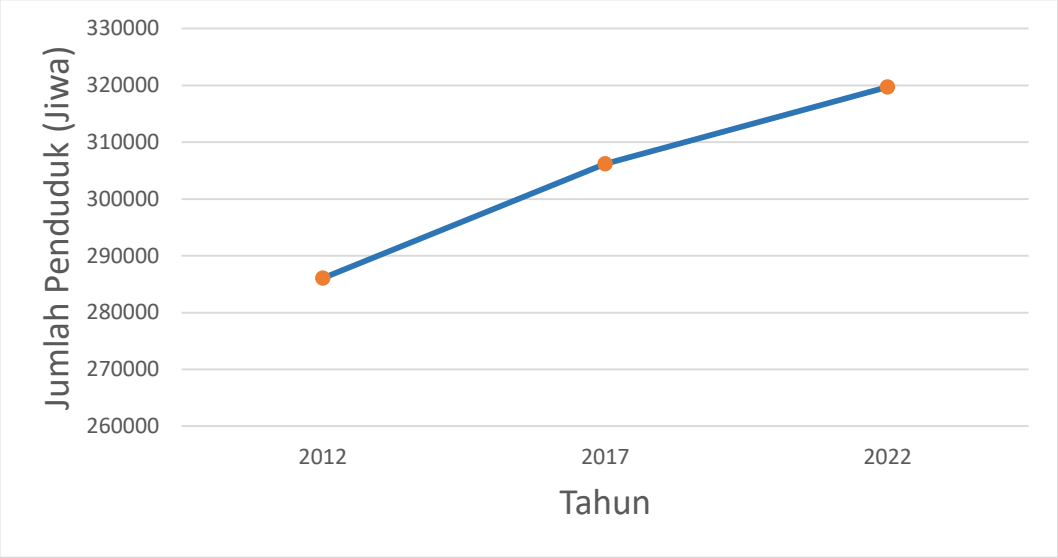
Penggunaan lahan di Kabupaten Barito Kuala sangat bervariasi, yaitu terdiri dari lahan permukiman, perkebunan, hutan, jalan, lahan terbuka, tempat rekreasi, makam, pekarangan, sawah, semak belukar, dan pertanian lahan basah. Variasi penggunaan lahan tersebut disebabkan oleh pembangunan di segala bidang yang cukup pesat dan banyaknya jumlah pendatang yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan untuk permukiman, dan pendirian fasilitas-fasilitas umum.

1. *Driving Force* (Penggerak)

Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan penduduk tersebut juga akan memicu perkembangan pembangunan yang mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan. Pada dasarnya pembangunan memanfaatkan sumber daya alam secara kontinu guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Disisi lain ketersediaan sumber daya alam terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin lama semakin meningkat akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam termasuk kebutuhan lahan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten

Barito Kuala menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala mencapai 319.708 jiwa pada Tahun 2022.

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian dan migrasi penduduk. Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala, jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2022 meningkat sebesar 33.633 jiwa atau 11,757% dibandingkan dengan tahun 2012 dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,98% per-tahun. Grafik pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2012 s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 1. Grafik Perubahan Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi, Kabupaten Barito Kuala, 2022)

2. *Pressure* (Tekanan)

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan ruang seperti kebutuhan akan tempat tinggal, tempat bekerja, dan infrastruktur dasar lainnya. Kebutuhan ruang tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan seperti alih fungsi lahan

menjadi permukiman/lahan terbangun, pertambangan, industri, dan sebagainya.

1) Permukiman

Permukiman sebagai suatu kebutuhan dasar hidup manusia yang harus dipenuhi. Perkembangan pemukiman yang terjadi dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, dari segi kuantitas perubahan tersebut biasanya ditunjukkan dengan perubahan jumlah pemukiman baru yang terdapat pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, jumlahnya akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat. Sedangkan perubahan dari segi kualitas dapat ditunjukkan dengan parameter seperti kualitas fisik rumah dan kualitas lingkungan rumah. Luasan permukiman/lahan terbangun di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan peta tutupan lahan pada Tahun 2021 adalah sebesar 3.561,80 ha. Luas tersebut meningkat sebesar 341,33 ha dibandingkan dengan luasan tahun 2019 dengan luasan 3.220,47 ha. Perubahan luasan lahan permukiman di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

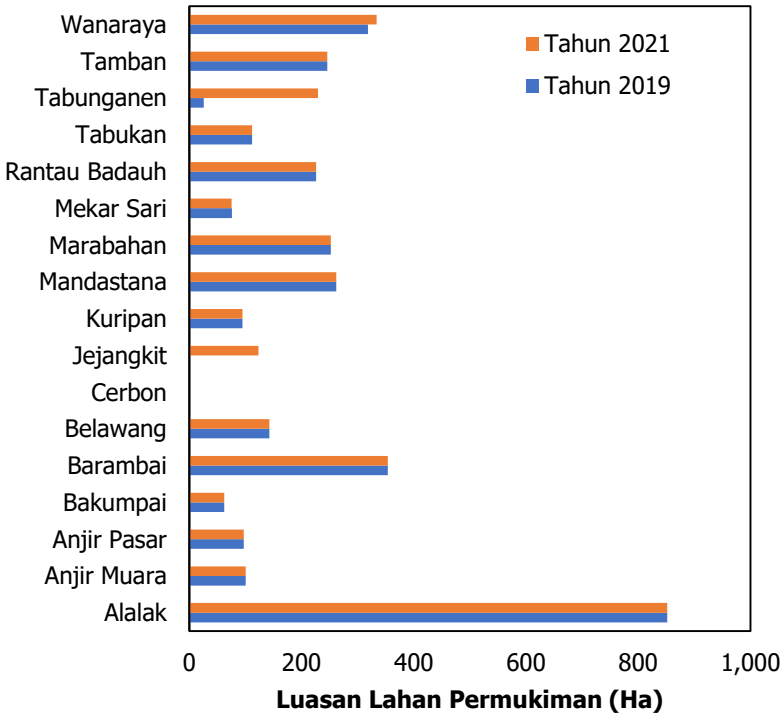
Tabel 2. 1. Perubahan Luasan Lahan Permukiman di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Luasan Lahan (Ha)		Perubahan Lahan (Ha)
	2019	2021	
Alalak	852,06	852,05	-0,01
Anjir Muara	100,26	100,24	-0,02
Anjir Pasar	97,15	97,09	-0,06
Bakumpai	62,18	62,17	-0,01
Barambai	353,87	353,87	-0,01
Belawang	142,62	142,64	0,02
Cerbon	0,00	0,00	0,00
Jejangkit	0,00	123,43	123,43
Kuripan	94,69	94,69	-0,01
Mandastana	261,69	261,72	0,03
Marabahan	251,99	252,12	0,13
Mekar Sari	75,93	75,15	-0,77
Rantau Badauh	226,15	226,16	0,02
Tabukan	111,78	111,80	0,03
Tabunganen	25,80	229,15	203,35

Kecamatan	Luasan Lahan (Ha)		Perubahan Lahan (Ha)
	2019	2021	
Tamban	245,73	245,74	0,00
Wanaraya	318,56	333,78	15,22
Jumlah	**3.220,47**	**3.561,80**	**341,33**

(Sumber : Pengolahan Data GIS KLHK, 2022)

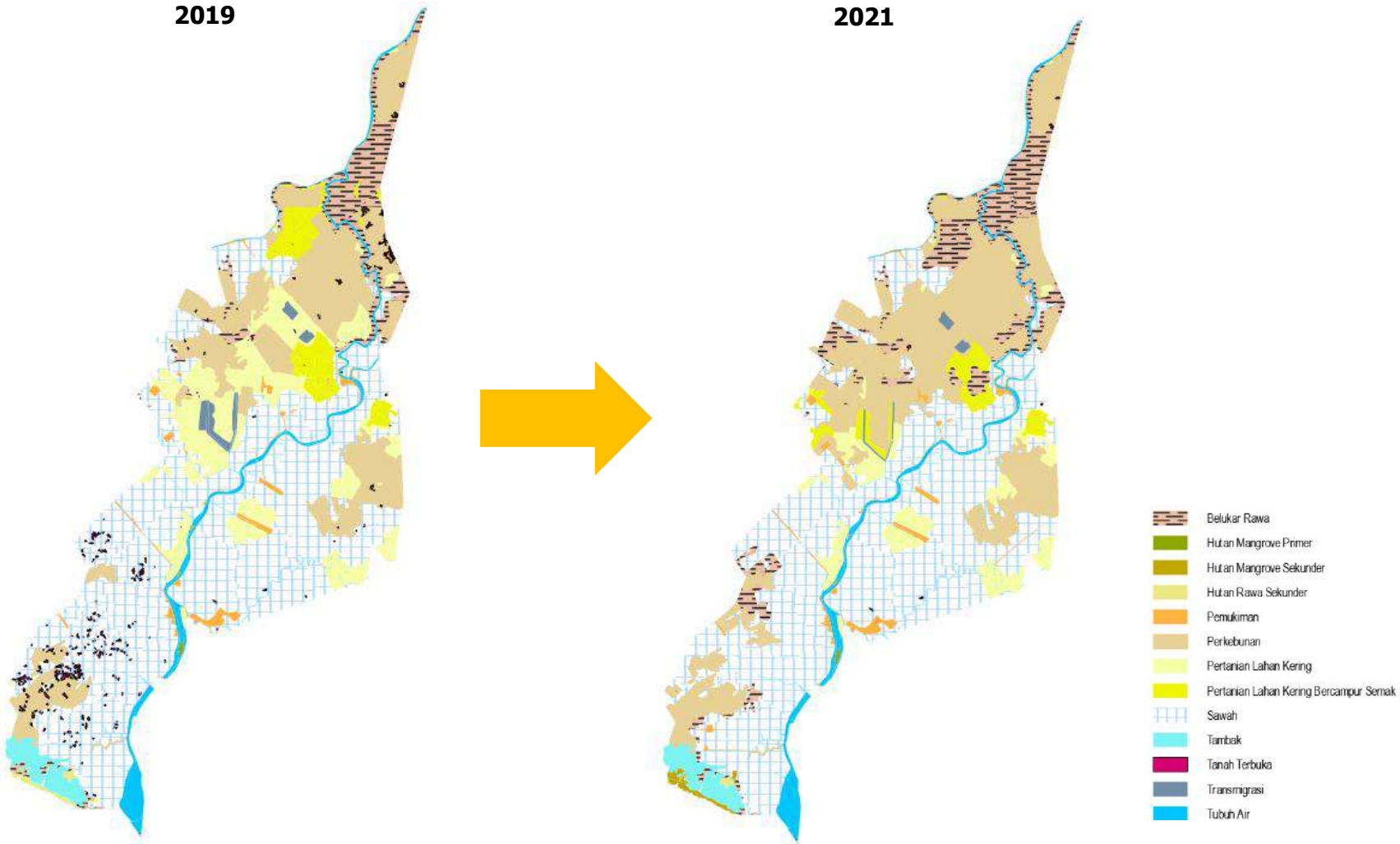
Berdasarkan tabel di atas, wilayah dengan peningkatan lahan permukiman terbesar adalah Kecamatan Tabunganen sebesar 203,35 ha diikuti oleh Kecamatan Jejangkit sebesar 123,43 ha dan Kecamatan Sungai Tabuk sebesar 251,41 ha . Peningkatan jumlah pemukiman tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk namun juga terjadi peningkatan investasi properti sebagai gaya hidup masyarakat saat ini. Grafik perubahan luasan lahan permukiman di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut.



(Sumber : Pengolahan Data GIS KLHK, 2022)

Gambar 2. 2. Grafik Perbandingan Luasan Lahan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dan Tahun 2021

Peningkatan kawasan permukiman di Kabupaten Barito Kuala juga dapat dilihat dari terus meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Sektor *Real Estate.* PDRB ADHK Sektor Real Estate Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Gambar 2.4.

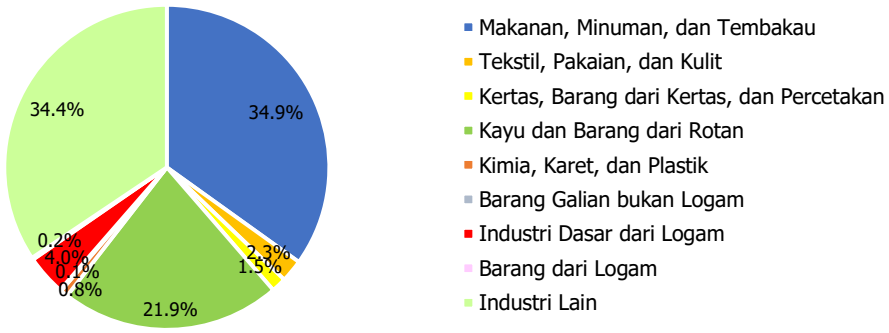


(Sumber: Pengolahan GIS, 2022)

Gambar 2. 3. Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Barito Kuala

2) Industri

Selain pertumbuhan pemukiman, berkembangnya industri di Kabupaten Barito Kuala turut memberikan dampak terhadap tata guna lahan. Sektor industri di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh bidang ; 1. Makanan, Minuman dan Tembakau ; 2. Kayu dan Barang dari Rotan. Persentase Jenis Industri di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 4. Grafik Persentase Jenis Industri di Kabupaten Barito Kuala 2022

Industri di Kabupaten tersebut diklasifikasikan menjadi industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Jumlah industri di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2017 s/d Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

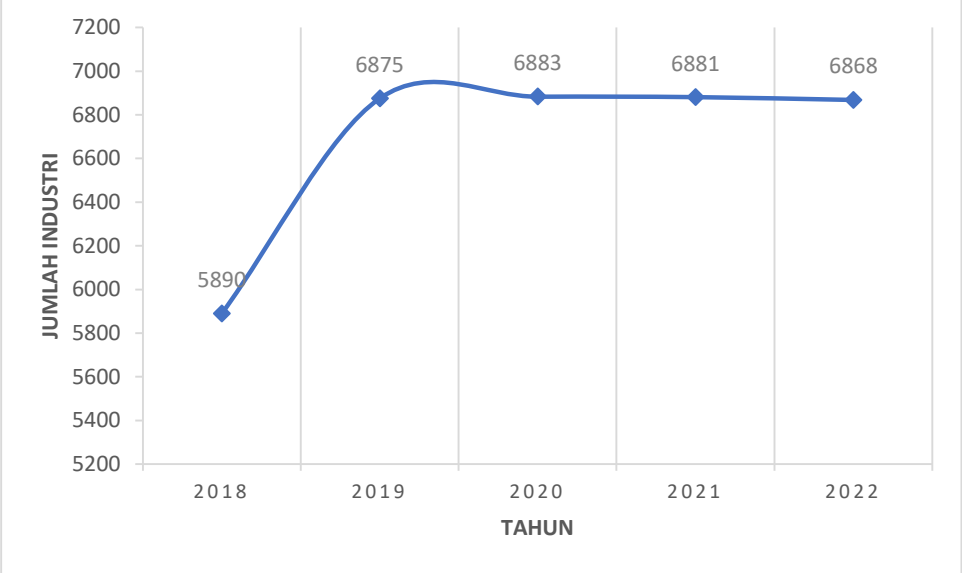
Tabel 2.2 Jumlah Industri di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2021

Klasifikasi Industri	2018	2019	2020	2021	2022
Industri Besar	2	2	2	2	6
Industri Sedang	16	16	16	16	7
Industri Kecil	1.246	1.216	1.216	1.216	1.208
Industri Rumah Tangga	4.626	5.641	5.649	5.647	5.647
Jumlah	5.890	6.875	6.883	6.881	6.868

(Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2018 – 2022)

Berdasarkan Tabel 2.2, dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah industri di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 978 atau 16,60%. Grafik

perubahan jumlah industri di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 5. Grafik Perubahan Jumlah Industri di Kabupaten Barito Kuala

3. *State* (Kondisi)

1) Penggunaan Lahan

Lahan sebagai salah satu sumber daya alam, memegang peranan penting karena merupakan wadah dari semua sumber daya yang ada di muka bumi. Satu kesatuan dari unsur-unsur lahan saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem lahan. Sistem lahan yang terbentuk berkolaborasi antar unsur yang bervariasi menjadikan adanya diferensiasi dan potensi yang variatif dalam dimensi ruang dan waktu, di samping sebagai wadah bagi sumber daya lain, lahan juga berfungsi sebagai wadah untuk kegiatan hidup manusia yang direpresentasikan dalam penggunaan lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Barito Kuala sangat bervariasi, yaitu terdiri dari lahan permukiman, perkebunan, hutan, jalan, lahan terbuka, tempat rekreasi, makam, pekarangan, sawah, semak belukar, dan pertanian lahan basah. Variasi penggunaan lahan tersebut disebabkan oleh pembangunan di segala bidang yang cukup pesat dan banyaknya

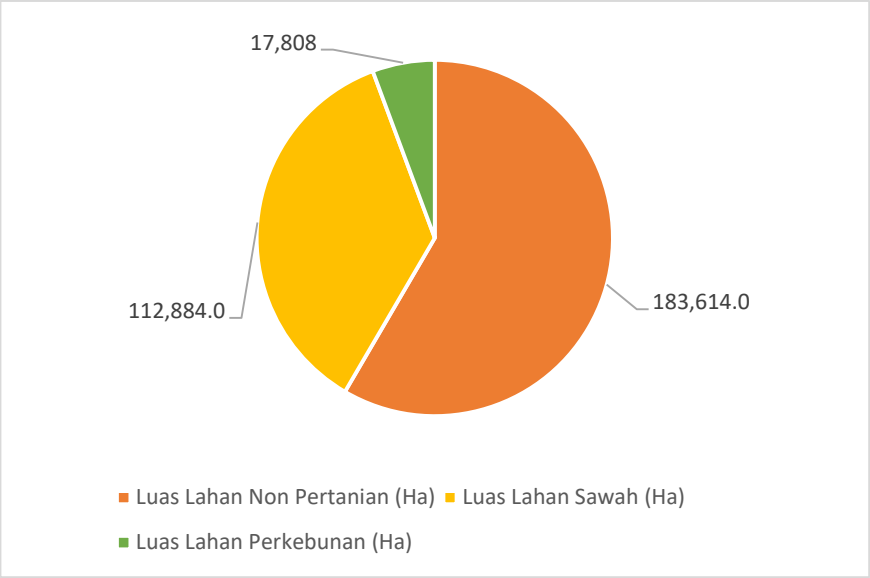
jumlah pendatang yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan untuk permukiman, dan pendirian fasilitas-fasilitas umum. Luasan penggunaan lahan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Kabupaten Barito Kuala

No.	Kecamatan/ Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Alalak	6.090	4.596	245
2	Marabahan	16.386	5.714	1.063
3	Mandastana	7.264	6.336	228
4	Anjir Muara	3.498	8.227	605
5	Anjir Pasar	3.189	9.411	725
6	Tamban	6.618	6.618	2.872
7	Tabunganen	8.034	15.966.0	1.685
8	Mekarsari	6.413	7.937	3.681
9	Belawang	3.232	4.788	236
10	Berambai	8.660	9.640	1.126
11	Bakumpai	20.623	5.477	194
12	Tabukan	10.348	6.252	537
13	Wanaraya	1.170	2.580	3.130
14	Rantau Bedauh	18.195	7.986	306
15	Cerbon	14.839	5.761	582
16	Jejangkit	16.655	3.645	513
17	Kuripan	32.400	1.950	80
18	**Total**	**183.614**	**112.884**	**17.808**

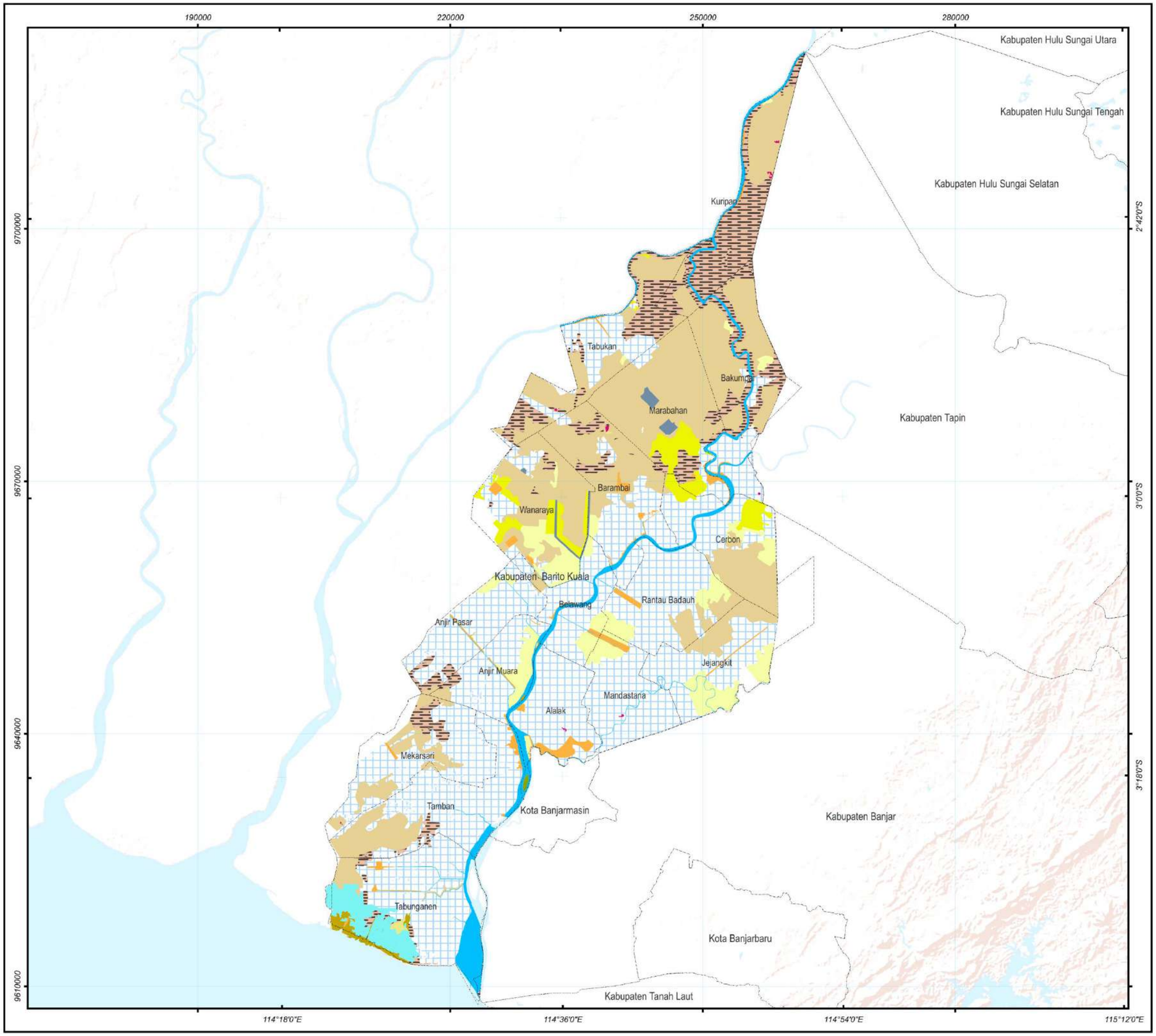
(Sumber : Dinas PUPR Kab. Barito Kuala dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Barito Kuala, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keseluruhan lahan yakni 314.306 Ha terdapat lahan non pertanian sebesar 183.614 Ha dan lahan yang termanfaatkan sebagai kawasan persawahan sebesar 112.884,01 Ha sedangkan luasan penggunaan lahan Perkebunan sebanyak 17.808 Ha.



(Sumber : Dinas PUPR Kab. Barito Kuala dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Barito Kuala, 2023)

Gambar 2. 6. Penggunaan Lahan Kabupaten Barito Kuala



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (IKPLHD)
KABUPATEN BARITO KUALA

PETA TUTUPAN LAHAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021

N

Skala 1 : 450.000

0 5 10 15 20 km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid UTM 50S
Datum	:	World Geodetic System (WGS) 84

KETERANGAN :

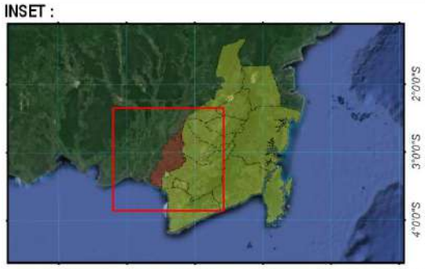
Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Tutupan Lahan
- Belukar Rawa
- Hutan Mangrove Primer
- Hutan Mangrove Sekunder
- Hutan Rawa Sekunder
- Pemukiman
- Perkebunan
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak
- Sawah
- Tambak
- Tanah Terbuka
- Transmigrasi
- Tubuh Air

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG Tahun 2018
2. Peta Dasar Kabupaten Barito Kuala
3. Peta Tutupan Lahan KLHK Skala 1:250.000 Tahun 2021
4. Interpretasi Citra Satelit

INSET :



PT JARANK SASAT TENTEKNIKA
2022

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan actor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKL = 100 - \left((84{,}3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK) \times 100)) \times \frac{50}{54{,}3}\right) \ldots\ldots (2.1)$$

dimana,

LTL = luas Tutupan Lahan

TL = luas Wilayah Kabupaten

DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

Hasil bagi LTL dengan LW adalah nilai Tutupan Lahan (TL). DKK di hitung dari penjumlahan luasan tutupan hutan dan tutupan belukar di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya yang terdampak Kanal dan kebakaran. Tata cara penghitungan DKK dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$DKK = \Sigma \text{ W dampak kanal} + \text{W dampak terbakar}$$

$$DKK = \Sigma\ W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2.2)$$

Keterangan :

DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran

TL = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut

W_{kl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut

W_{kb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi budi daya Ekosistem Gambut

W_{bl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut

W_{bb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi budi daya Ekosistem Gambut

$$\text{W Kanal di lindung} = 0{,}2 \times 0{,}6 \times 0{,}6 \times \frac{\text{TH FLG Kanal}+(\text{BH FLG Kanal}+\text{BL FLG Kanal})\times 0{,}6}{\text{Luas FLEG}}$$

$$\text{W Kanal di budidaya} = 0{,}2 \times 0{,}6 \times 0{,}6 \times \frac{\text{TH FLG Kanal}+(\text{BH FBG Kanal}+\text{BL FLG Kanal})\times 0{,}6}{\text{Luas FBEG}}$$

$$\text{W Terbakar di lindung} = 0{,}2 \times 0{,}6 \times 0{,}6 \times \frac{\text{TH FLG Kanal}+(\text{BH FLG Bakar}+\text{BL FLG Kanal})\times 0{,}6}{\text{Luas FLEG}}$$

$$\text{W Terbakar di budidaya} = 0{,}2 \times 0{,}6 \times 0{,}6 \times \frac{\text{TH FLG Kanal}+(\text{BH FBG Bakar}+\text{BL FLG Kanal})\times 0{,}6}{\text{Luas FBEG}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada halaman Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai IKL Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 adalah sebesar 23,43.

2) Kawasan Lindung

Menurut Permen No 15 tahun 2009 kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah:

a. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Luas kawasan berfungsi lindung di Kabupaten Barito Kuala adalah 3.842,57 Ha berupa kawasan konservasi alam.
b. Kawasan perlindungan setempat antara lain : sempadan sungai, sekitar waduk, embung, dan ruang terbuka hijau.
c. Kawasan rawan bencana terutama kawasan rawan banjir.

Pemerintah Kabupaten Batola melalui Peraturan Daerah tidak saja mengatur pemanfaatan kawasan dan kayu galam tetapi juga mengarahkan perlunya penunjukan kawasan dan jenis yang menurut kriteria perlu dikonservasi untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan keberadaan hutan rawa.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah mengupayakan rehabilitasi hutan atau lahan kritis dan gundul dengan mengalokasikan dana APBD tingkat II. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk senantiasa meningkatkan tutupan vegetasi.

Menurut Kuswanto, dalam Hanipah (2005:14) lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia atau biologi yang akhirnya dapat membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, pemukiman, dan kehidupan sosial ekonomi dari daerah lingkungan pengaruhnya.

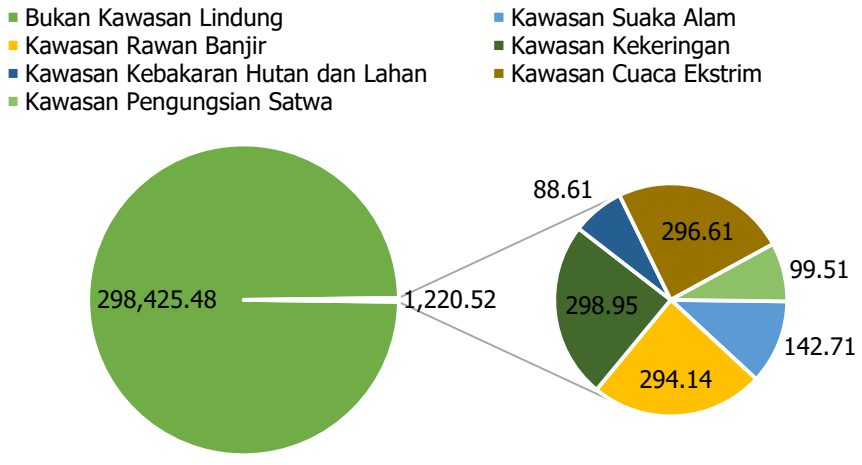
Luas lahan kritis yang perlu di rehabilitasi seluruhnya berjumlah 8.252,72 Ha dengan rincian 7.052,72 Ha berada dalam kawasan hutan dengan status kritis dan 1.200 Ha berada di kawasan hutan dengan status sangat kritis di kawasan Tabunganen.

Dengan teridentifikasinya lahan kritis dan potensi kritis di Kabupaten Barito Kuala maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah kebijakan dalam penanganan rehabilitasi lahan yang lebih tepat di antaranya dengan penanaman tanaman keras

melalui program Penghijauan. Namun demikian masih terdapat faktor penghambat antara lain kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam usaha melestarikan lahan, keterbatasan dana dan Sumber Daya Manusia yang mampu menangani pengelolaan lahan serta faktor alam yang dapat mendukung keberhasilan program penanganan lahan kritis dan potensi kritis.

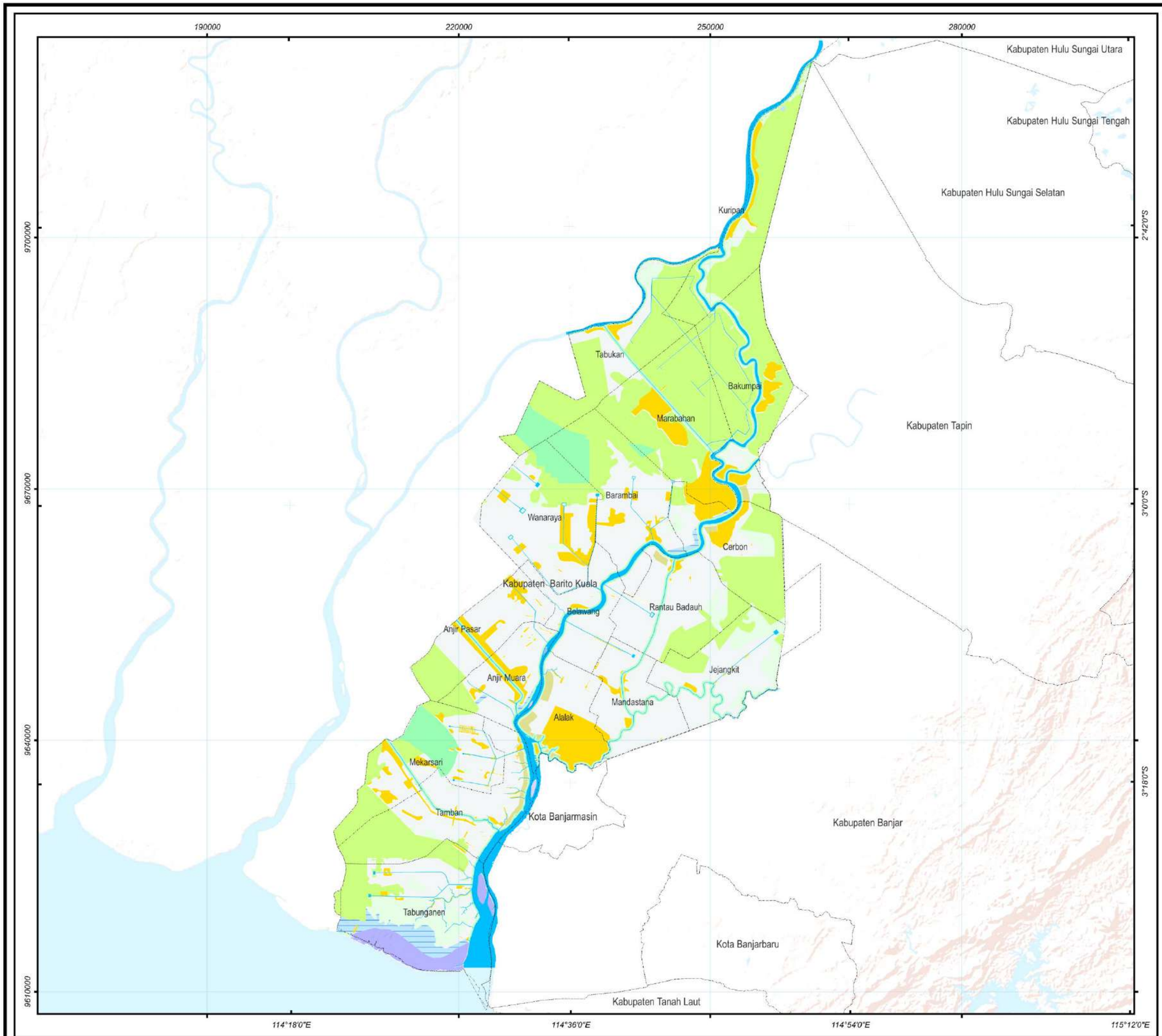
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan rencana kegiatan penghijauan dan reboisasi. Penghijauan ialah kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar lingkungan hutan, terutama pada tanah milik rakyat dengan tanaman keras, contohnya ialah jenis-jenis pohon hutan, pohon buah, tanaman perkebunan, tanaman penguat teras, tanaman pupuk hijau, dan juga rumput pakan ternak. Tujuan penanaman ini ialah agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, serta ditingkatkan kembali kesuburannya. Sedangkan reboisasi merupakan kegiatan penghutanan kembali kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan.

Peta RTRW Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Gambar 2.8, sedangkan luasan kawasan lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut.



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2022)

Gambar 2. 8. Luasan Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (IKPLHD)
KABUPATEN BARITO KUALA

PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

N

Skala 1 : 450.000

0 5 10 15 20 km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid UTM 50S
Datum	:	World Geodetic System (WGS) 84

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Pola Ruang
- Hutan Bakau
- Hutan Produksi Konversi
- Kawasan Budidaya Perikanan
- Kawasan Industri
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pertanian Holtikultura
- Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
- Kawasan Suaka Alam
- Kawasan Suaka Margasatwa
- Pertambangan mineral
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Sungai
- Taman Wisata Alam

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG Tahun 2018
2. Peta Dasar Kabupaten Barito Kuala
3. Peta pada Lampiran Perda Kabupaten Barito Kuala No. 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031
4. Interpretasi Citra Satelit

INSET :



PT GEOTENVIRO TEKNINDO NUSANTARA
2023

3) Hutan

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh sebab itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung jawab.

Sektor kehutanan bertujuan untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan cara:

a) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Luasan kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran proporsional.

b) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi : fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

c) Meningkatkan daya dukung DAS.

d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

e) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Menurut UU No. 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan pada statusnya dapat dibedakan menjadi :

a) Hutan Negara : kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (hak milik). Hutan negara dapat berupa hutan adat yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

b) Hutan Hak : adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi :

1) Hutan konservasi : adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi dapat dibedakan menjadi :

   - Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

   - Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

   - Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan air tanah.

3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan eksport. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.

Permasalahan klasik di kawasan sekitar hutan yang menyebabkan terlantarnya lahan hutan rakyat atau rusaknya hutan antara lain :

a. Kebiasaan masyarakat membakar semak belukar pada musim kemarau dengan harapan pada musim hujan lahan tersebut tumbuh rumput untuk pakan ternaknya. Kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan kesuburan tanah.

b. Terlantarnya lahan (*lahan tidur*) akibat ditinggal pemilik/ penggarap merantau ke kota besar merupakan salah satu penyebab kerusakan lahan.

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan, misalnya menanam tanaman semusim di lahan yang memiliki kecenderungan erosi yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan lahan semakin kritis baik secara fisik maupun secara kimiawi, yang selanjutnya berdampak kritis ekonomi dan sosial.

Oleh karena hal tersebut perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hutan sebagai sumber daya alam. Dengan adanya kawasan hutan ini, selain mengurangi erosi juga bisa untuk mempertahankan sumber daya air tanah yang sekarang ini semakin menipis dan menjadi kestabilan iklim mikro serta memperbaiki kualitas udara.

Wilayah hutan di Kabupaten Barito Kuala tersebar di seluruh wilayah kecamatan, di antaranya ditumbuhi oleh berbagai jenis kayu seperti galam, terantang, jingah, halaban, bungur, kayu bulan, kalampan/ bintaro, rambai, pulantan, jelutung, meranti rawa dan lain-lain.

Sebagian dari hutan ini merupakan kawasan lindung yang berfungsi khusus sebagai cagar alam, hutan wisata, hutan pantai berbakau dan hutan sempadan sungai. Pulau Kaget terletak di Kecamatan Tabunganen dengan luas 292,44 Ha dengan satwa khas Bekantan yang

merupakan kawasan cagar alam yang pemanfaatannya hanya sebatas pada penelitian yang sifatnya terbatas yang telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tanggal 6 November 1976 No.071/Kps/Um/1976. Pulau Kembang berada di Kecamatan Alalak merupakan hutan wisata berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Tanggal 27 Desember 1976 No.789/KpsUm/12/1976. Selain itu, hutan wisata juga terdapat di Pulau Bakut yang terletak di Kecamatan Alalak dengan flora yang khas yaitu rambai, kayu bulan, jingah, beringin dan faunanya yaitu bekantan dan kera abu-abu. Kabupaten Barito Kuala sendiri mempunyai Taman Wisata Alam seluas 120 Ha, cagar alam seluas 2 Ha, Suaka Margasatwa seluas 3606,63 Ha, serta hutan produksi konversi dengan luas 883 Ha.

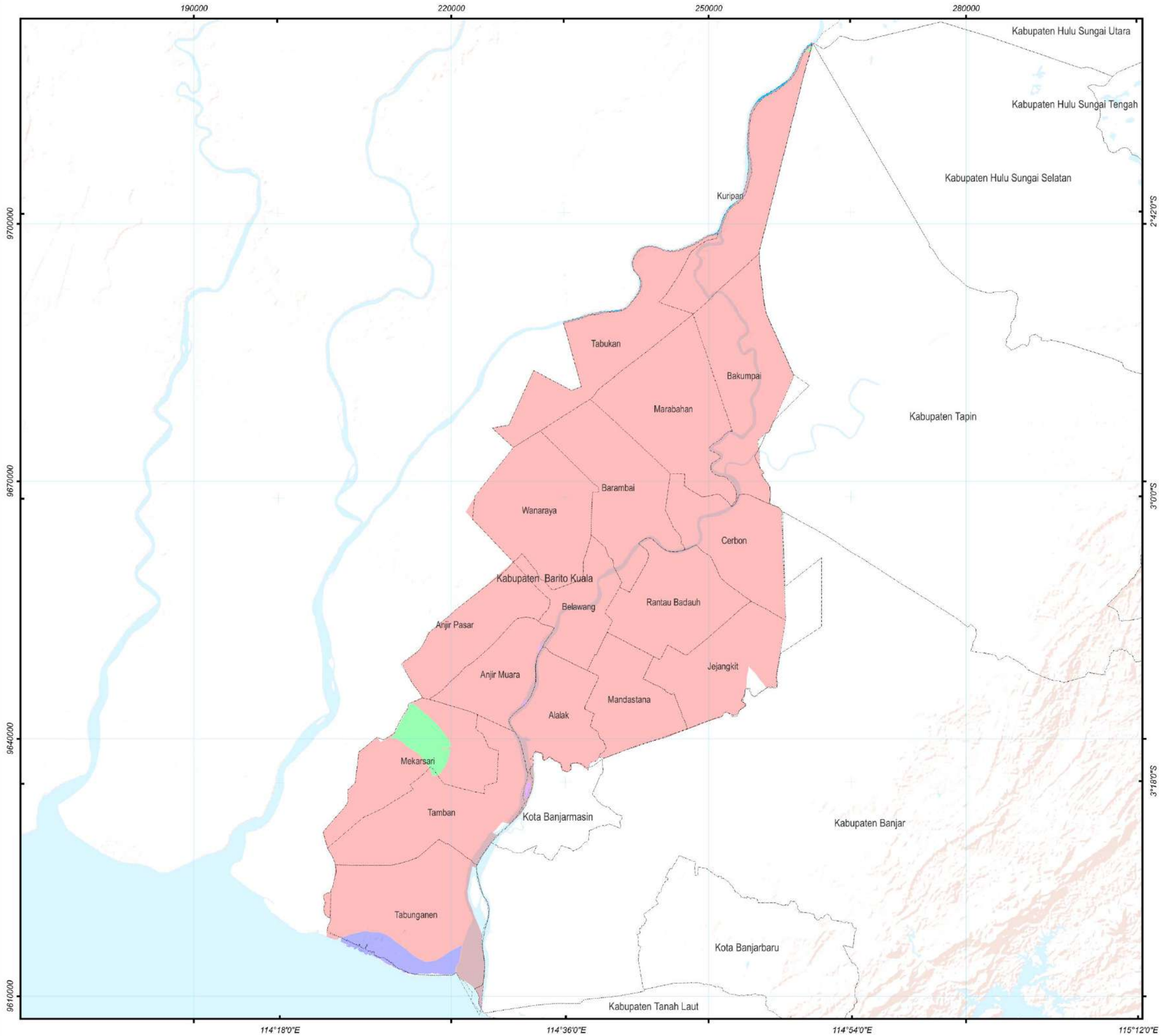
Kebijakan pemerintah diarahkan untuk melestarikan sumber daya alam dan konservasi lingkungan hidup melalui program : Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup, Perlindungan Kawasan Lindung dan Sumber Daya Hutan, Rehabilitasi lahan dan hutan. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Hutan Rakyat sehingga dapat meningkatkan partisipasi untuk menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun luas kawasan hutan menurut jenis fungsinya di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Luas Kawasan Hutan Menurut Jenis Fungsi/Status di Kabupaten Barito Kuala

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	-
2	Hutan Lindung	-
3	Taman Nasional	-
4	Taman Wisata Alam	120.00

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
5	Taman Buru	-
6	Cagar Alam	2.00
7	Suaka Margasatwa	3606.63
8	Taman Hutan Raya	-
9	Hutan Produksi Konversi	883.02
10	Hutan Produksi Terbatas	-
11	Kawasan Suaka Alam	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	-
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3	Hutan Kota	-
4	Taman Hutan Raya	-
5	Taman Keanekaragaman Hayati	-

(Sumber : BPKHTL Wilayah V Kalimantan Selatan, 2023)



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (IKPLHD)
KABUPATEN BARITO KUALA

PETA KAWASAN HUTAN
KABUPATEN BARITO KUALA

N

Skala 1 : 450.000

0 5 10 15 20 km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid UTM 50S
Datum	:	World Geodetic System (WGS) 84

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Kawasan Hutan
- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Produksi Konversi
- Laut - Air
- Suaka Margastwa
- Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG Tahun 2018
2. Peta Dasar Kabupaten Barito Kuala
3. WEBGIS Kementrian ESDM RI

INSET :



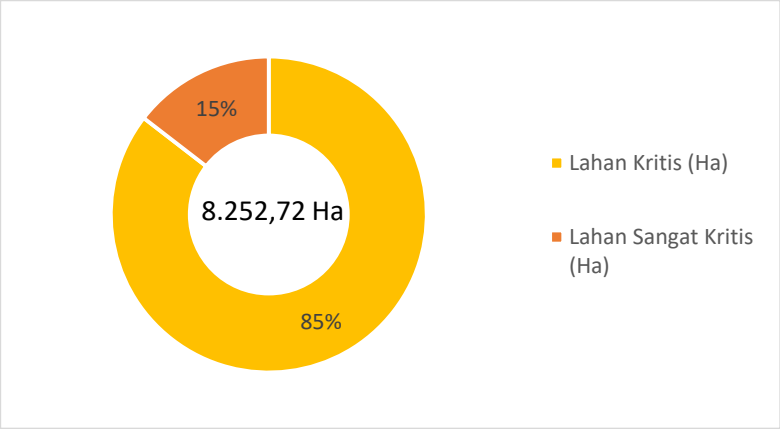
PT GEOTENVIRO TEKNINDO NUSANTARA
2023

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 juli 2009 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimatan Selatan, maka luas kawasan hutan menurut jenis fungsinya tidak mengalami perubahan sejak tahun 2013 sampai tahun 2019. Pengukuran luasan juga dilakukan setiap lima tahun sekali dan pengukuran terakhir dilakukan pada tahun 2013, sehingga pengukuran selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2018.

Data potensi hutan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa potensi terbesar ada pada hutan galam dimana sebagian besar dari hutan yang ada merupakan hutan galam seluas 58.791,81 m^3. Selama lima tahun terakhir hanya hutan galam yang merupakan potensi kehutanan Kabupaten Barito Kuala, dimana sebelumnya masih terdapat potensi untuk kayu bulan, jati, mahoni, sengon dan rotan. Data potensi kehutanan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan.

4) Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia atau biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, produksi pertanian, pemukiman, dan kehidupan sosial ekonomi dari daerah pengaruhnya. Lahan kritis di Kabupaten Barito Kuala diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu kritis dan sangat kritis. Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurangnya fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan sebagaimana kriteria fisik lahan antara lain kelas lereng, jenis tanah, geologi, curah hujan serta karakteristik dan manajemen penggunaan lahan. Lahan kritis Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

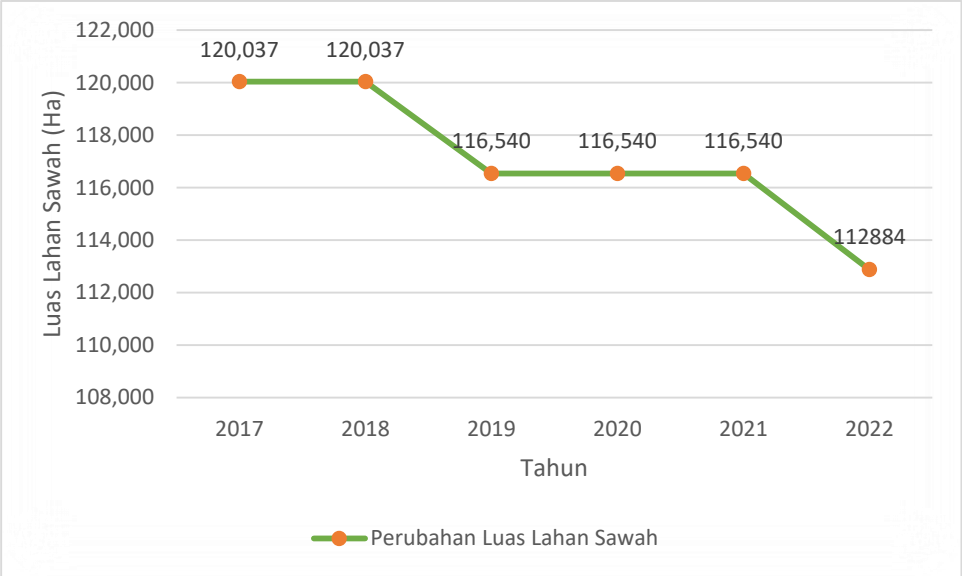


(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023)

Gambar 2.11 Luasan Lahan Kritis Kabupaten Barito Kuala

5) Perubahan Luas Lahan Sawah

Perubahan luas lahan sawah di Kabupaten Barito Kuala merupakan dampak dari peningkatan luas lahan permukiman. Lahan sawah yang terus mengalami penurunan luas akan menyebabkan menurunnya produksi padi. Perubahan luas lahan sawah di Kabupaten dari Tahun 2017 s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



(Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2017 s/d 2022, DPUPR Barito Kuala 2023)

Gambar 2.12 Perubahan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Gambar 2.12, dapat dilihat bahwa luas lahan sawah terus mengalami penurunan. Terhitung dari tahun 2017 s/d Tahun 2022, luas lahan sawah di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan sebesar 7,153% atau 7.153 ha. Hal tersebut tentu akan berdampak pada produksi padi sawah di Kabupaten Barito Kuala.

4. *Impact* (Dampak)

Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Barito Kuala berdampak pada kebutuhan lahan baru untuk perumahan dan untuk kegiatan-kegiatan lain sebagai pendukung. Dampak dari pola pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan sama artinya memberi beban terhadap lahan melebihi daya dukung dan daya tampungnya. Hal ini dapat dilihat pada dampak dari alih fungsi lahan terhadap lingkungan hidup yaitu :

1) Ancaman kualitas dan kuantitas air baku yang dikembangkan melalui strategi pelestarian kawasan baik melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan juga sempadan sumber daya air. Selain itu alokasi kawasan

hutan juga menjadi strategi penataan ruang untuk meningkatkan ketersediaan air dan juga mendapatkan manfaat ekonomi.

2) Meningkatnya bencana alam dan perubahan iklim yang dipicu oleh degradasi lahan dan perubahan iklim melalui strategi pelestarian kawasan berhutan dan juga RTH perkotaan. Selain itu adanya penetapan kawasan rawan bencana dan strategi evakuasi bencana melalui penetapan jalur dan lokasi evakuasi.
3) Alih fungsi lahan dan berkurangnya kawasan terbangun terus terjadi karena meningkatnya kebutuhan perkebunan dan permukiman akibat dari perluasan fungsi perkotaan dan ekonomi yang terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional.
4) Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dipicu oleh meningkatnya bangkitan transportasi, pengelolaan limbah dan sanitasi serta pertanian berpotensi tetap meningkat yang disebabkan meningkatnya perkebunan dan permukiman.
5) Dampak perubahan lahan akibat rencana struktur ruang adalah meningkatnya potensi air limpasan karena perubahan dari lahan non terbangun yang dapat menyimpan air menjadi terbangun. Potensi limpasan air ini jika dibiarkan maka akan menimbulkan genangan jika kapasitas sistem drainase tidak dapat menampung air tersebut.
6) Produksi padi di Kabupaten Barito kuala terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan produksi padi sawah sebesar 17,34% atau 67.573 ton. Hal tersebut diduga akibat dari penurunan luasan lahan sawah di Kabupaten Barito Kuala. Namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, produksi padi sawah di Kabupaten Barito Kuala meningkat sebesar 28,04% atau 90.346 ton.

5. *Response* (Respons)

Respon/upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi tekanan (*pressure*), kondisi (*state*) dan dampak (*impact*) terkait tata guna lahan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala. Penyusunan RTRW tersebut telah menetapkan kawasan lindung dan budidaya di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
2) Pengaturan penggunaan lahan harus sesuai dengan RTRW
3) Pemindahan satwa ke Habitat baru yang sesuai
4) Pengawasan izin terhadap pembangunan industri/ pabrik/ perusahaan
5) Pembangunan hutan desa di setiap desa (1 hutan desa/1 desa).
6) Rehabilitasi Lahan melalui Kegiatan Penghijauan rehabilitasi lahan pada lahan kritis dan reboisasi merupakan salah satu upaya peningkatan sumber daya alam yang ada untuk dapat dikembangkan dan dilestarikan. Kegiatan penghijauan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2022 yang terealisasi adalah seluas 0,06 Ha yang dilaksanakan di kecamatan Belawang dan Marabahan, sedangkan kegiatan reboisasi yang terealisasi adalah seluas 0,1 Ha di kecamatan Tabunganen dengan jumlah pohon sebanyak 1.019 batang.

Tabel 2.5 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi

No.	Kecamatan	Penghijauan				Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tabunganen	-	-	-	-	0.1	0.1	1,019
2	Belawang	0.029	0.029	290	-	-	-	-
3	Marabahan	0.029	0.029	290	-	-	-	-
	Jumlah	**0.06**	**0.06**	**580**	-	**0.1**	**0.1**	**1,019**

Tabel 2.5 Analisis D-P-S-I-R Tata Guna Lahan

Driving Force (Faktor Pemicu)	Pressure (Tekanan)	State (Keadaan)	Impact (Dampak)	Respons
Jumlah penduduk yang cenderung meningkat	Penyediaan lahan untuk pemukiman beserta fasilitas umumnya	Tata ruang RT/RW Kabupaten yang ditetapkan	Bertambahnya kondisi/ ekosistem lingkungan	Pengaturan penggunaan lahan harus sesuai dengan RT/ RW
pembangunan industri/ pabrik/ perusahaan	Penyediaan lahan untuk pembangunan industri/ pabrik/ perusahaan	Luas lahan tetap	Meningkatkan keadaan lahan kritis, Mengancam habitat satwa	Penanaman pohon penghijauan di lahan yang kritis, Pemindahan satwa ke habitat baru yang sesuai
Pembangunan untuk kegiatan ekonomi pertanian	Penyediaan lahan untuk pertanian	Ketersediaan Lahan semakin berkurang	Keterbatasan produksi pangan dalam menghadapi laju pertumbuhan penduduk	Pemindahan satwa ke Habitat baru yang sesuai

2.2. Kualitas Air

1. *Driving Force* (Penggerak)

Air merupakan sumber daya alam yang selalu terbarukan yang diperlukan untuk kebutuhan pokok makhluk hidup. Keberadaan air semakin lama akan semakin sulit diperoleh baik secara kualitas maupun kuantitas. Isu tersebut ditengarai oleh faktor penggerak yaitu :

- Adanya fenomena alam
- Perilaku manusia
- Peningkatan jumlah penduduk
- Peningkatan kebutuhan pemukiman dan kegiatan usaha
- Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal
- Kemiskinan dan wilayah kumuh masih tinggi

Daya dukung air di Kabupaten Barito Kuala di masa mendatang perlu dipertimbangkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaannya menjadi persoalan ketika kualitas dan kuantitasnya tidak dapat lagi memenuhi standar kelayakan dan kebutuhan bagi hajat hidup manusia. Penggerak salah satu adanya isu permasalahan lingkungan hidup yakni kualitas air di Kabupaten Barito Kuala ditengarai adanya peningkatan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk per tahun dari kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 1,37% per-tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mengakibatkan peningkatan limbah cair yang tinggi pula sehingga menyebabkan penurunan kualitas air.

2. *Pressure* (Tekanan)

Kualitas air sungai berkaitan erat dengan kondisi daerah aliran sungai meliputi kegiatan apa saja yang terdapat dalam wilayah daerah aliran sungai serta bagaimana pola pemanfaatan wilayah tersebut. Memperhatikan kualitas air sungai di Kabupaten Barito Kuala diketahui

bahwa terdapat aktivitas di daerah aliran sungai yang berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi polutan berupa bahan organik, padatan tersuspensi, dan bakteri *coliform*. Tekanan terhadap kualitas air sungai tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain :

- Adanya pencemaran air sungai, air permukaan dan air tanah
- Kesadaran terhadap sanitasi dan kebersihan yang masih rendah
- Pelaku usaha belum taat dalam pengelolaan air tanah dan limbah
- Perubahan tata guna lahan
- Perubahan fungsi sungai
- Pertumbuhan permukiman yang cepat

Beberapa faktor di atas memberikan dampak terjadinya penurunan kualitas air, baik air permukaan, danau atau waduk dan air sumur. Adanya kecenderungan penurunan kualitas air dimungkinkan oleh adanya bahan-bahan buangan yang terdiri dari bahan-bahan organik dan non anorganik lainnya. Pencemaran semacam ini berasal dari berbagai sumber seperti dari aktivitas pertanian berupa sisa pestisida yang terbawa ke dalam perairan, kotoran hewan maupun manusia, tanaman-tanaman mati atau sampah organik, bahan-bahan buangan industri pengolahan pangan dan lain-lain.

3. *State* (Kondisi)

Air yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari harus memenuhi standar kualitas air bersih. Kualitas air bersih dapat ditinjau dari segi fisik, kimia, mikrobiologi dan radioaktif. Namun kualitas air yang baik ini tidak selamanya tersedia di alam sehingga diperlukan upaya perbaikan, baik itu secara sederhana maupun modern. Jika air yang digunakan belum memenuhi standar kualitas air bersih, akibatnya akan menimbulkan masalah lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya.

Sumber air permukaan di Kabupaten Barito Kuala berasal dari Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Nagara, Sungai Anjir Talaran, Sungai Anjir Serapat dan Sungai Anjir Taman beserta anak sungainya yang sebagian besar

dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, sarana transportasi maupun perekonomian. Kondisi air sungai di Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Kondisi Sungai di Kabupaten Barito Kuala

No.	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m^3/dtk)	Debit Min (m^3/dtk)
1	Sungai Barito	Kab. Barito Kuala	150	600	476	8	-	-
2	Sungai Kapuas	Kec. Tabukan	25	210	202	8	6000	-
3	Sungai Alalak	Kec. Mandastana	52.5	46	44	7	-	-
4	Sungai Negara	Kec. Bakumpai	5.6	200	192	8	-	-
5	Sungai Puntik	Kec. Mandastana	5.8	25	24	5	-	-
6	Saluran Drainase Tamban	Kec. Tamban	17.9	60	58	5	-	-
7	Saluran Drainase Anjir Pasar	Kec. Anjir Pasar	14.6	50	48	5	-	-
8	Saluran Drainase Tabukan	Kec. Tabukan	20	25	24	5	-	-
9	Saluran Drainase Tabunganen	Kec. Tabunganen	32.5	70	68	8	-	-

(Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala, 2022)



(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala)

Gambar 2.13 Sungai Barito di Kecamatan Marabahan

Dalam upaya pengendalian dan pengelolaan kualitas air sungai, maka perlu dilakukan pengujian kualitas air sungai tersebut. Pengujian kualitas air juga diperlukan dalam perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Beberapa parameter wajib yang diperlukan dalam perhitungan IKA adalah TSS, DO, pH, BOD, COD, Total Fosfat, *Fecal coliform*, dan NO_3. IKA pada perhitungan kali ini mengacu pada Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (*Pollution Index* - PI).

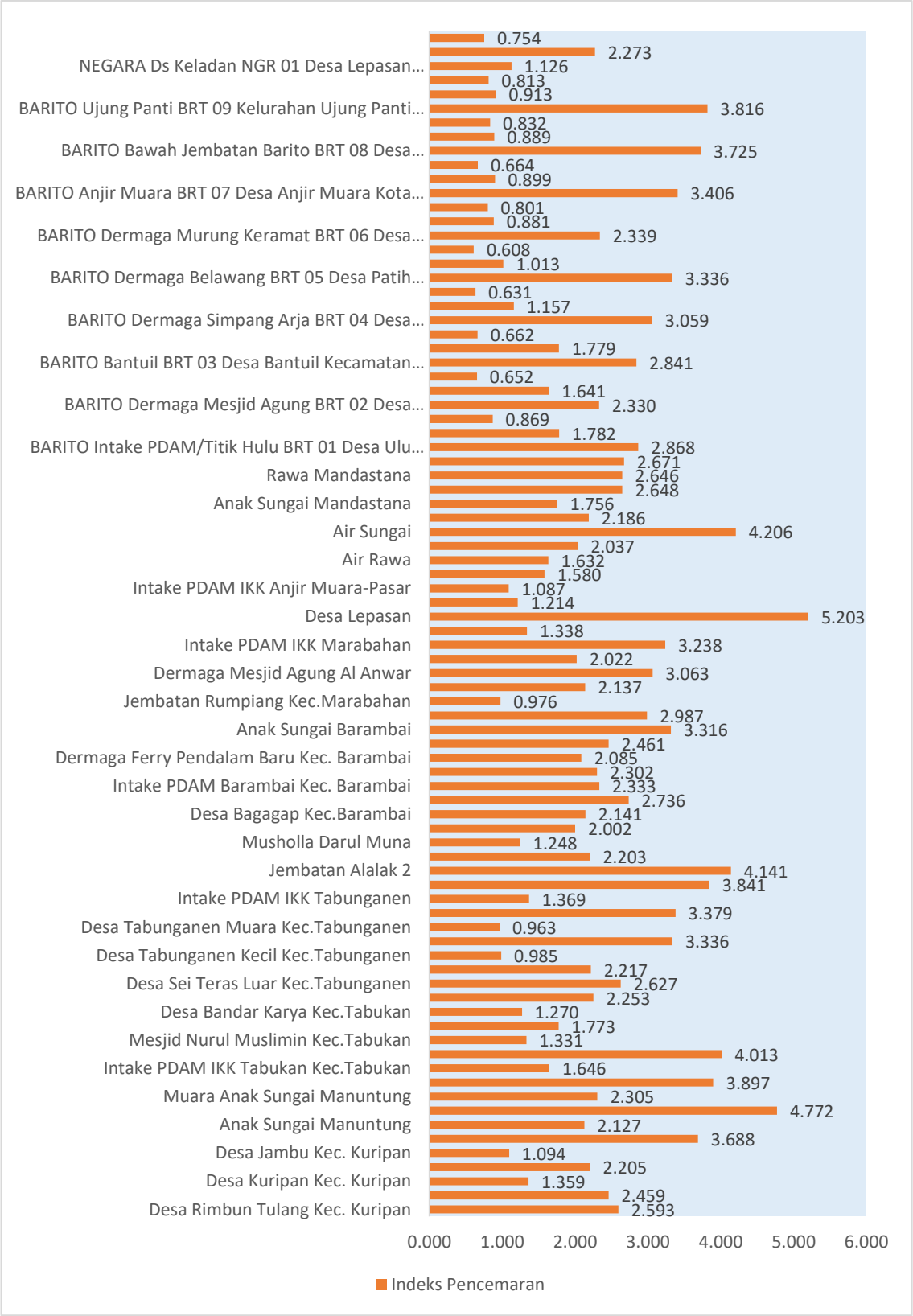
Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus pada persamaan 2.3.

$$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_R}{2}} \quad \text{..... (2.3)}$$

Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air dan Lij menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Sedangkan (Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij dan (Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Evaluasi terhadap Pij adalah sebagai berikut:

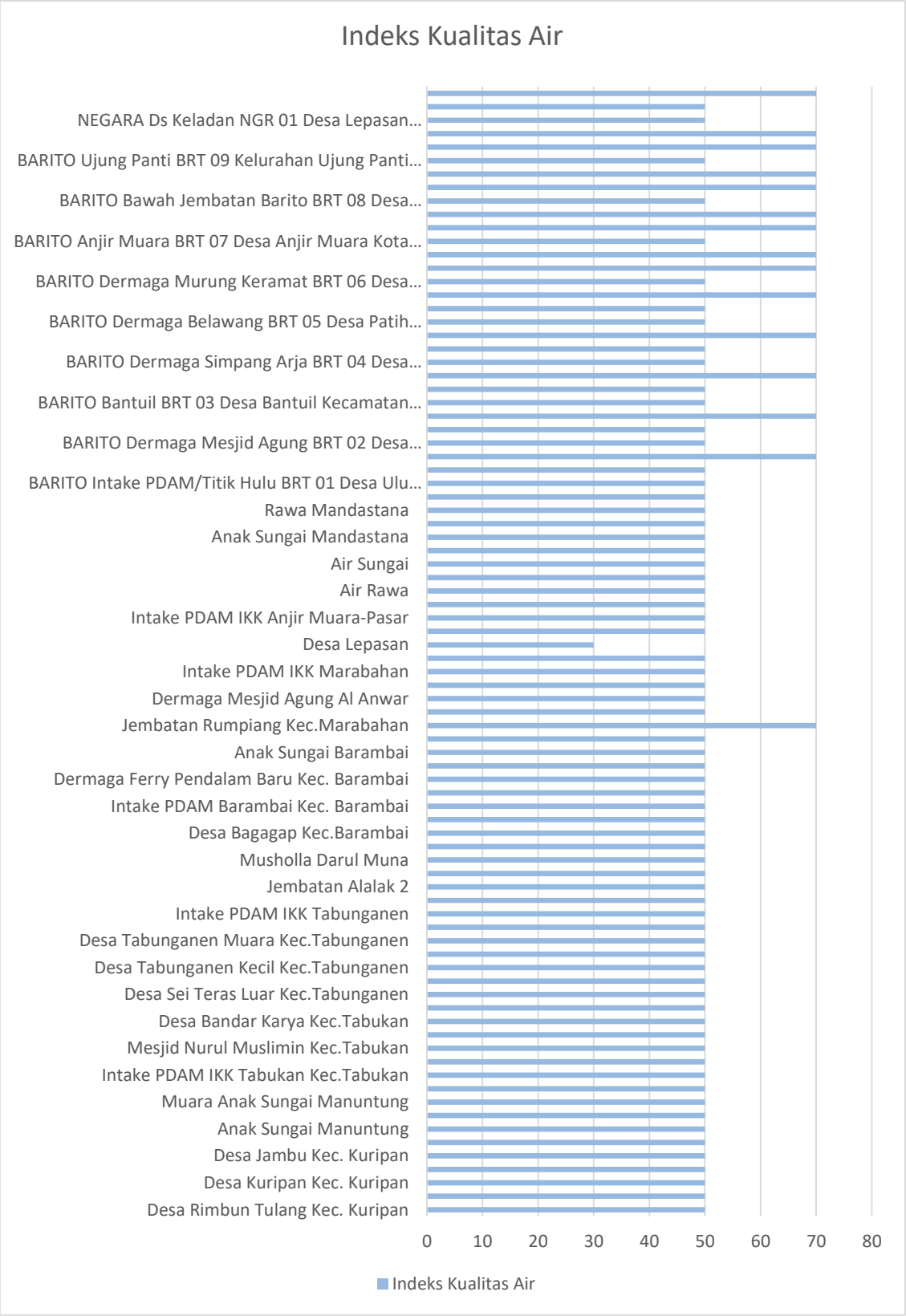
1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 Pij 1,0
2. Tercemar ringan jika 1,0 < Pij 5,0
3. Tercemar sedang jika 5,0 < Pij 10,0
4. Tercemar berat jika Pij > 10.0

Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.



Gambar 2.14 Nilai Indeks Pencemaran (IP) Titik Pengujian Kualitas Sungai di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Barito Kuala dalam Angka Tahun 2023)



Gambar 2.15 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Titik Pengujian Kualitas Sungai di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Barito Kuala dalam Angka Tahun 2023)

Berdasarkan Gambar 2.14, nilai IP tertinggi berada di titik lokasi Desa Lepasan dengan nilai sebesar 5,203, sedangkan nilai IP terendah berada di titik lokasi BARITO Dermaga Murung Keramat B RT 06 dengan nilai sebesar 0,608. Status mutu sungai di titik lokasi dengan IP tertinggi berstatus cemar sedang, sedangkan di titik lokasi dengan IP terendah masih dalam status baik (memenuhi baku mutu). Nilai IP tersebut apabila dikonversi ke nilai IKA sebagaimana terlihat di Gambar 2.15, rentang nilai IKA yang di dapat berkisar antara 30-70 poin. Secara keseluruhan, nilai IKA di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan hasil *input* pada halaman *website* KLHK mengenai perhitungan IKA, di dapatkan nilai sebesar 53,81 dengan status sedang.

Tabel 2.6. Penentuan Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Jumlah Pemantauan yang Memenuhi Mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Mutu Air
Memenuhi	17	20%	70	14.16666667
Cemar Ringan	66	79%	50	39.28571429
Cemar Sedang	1	1%	30	0.357142857
Cemar Berat	-	-	10	-
Total	84	100%		IKA = 53.81

4. *Impact* (Dampak)

Dampak pencemaran air terhadap lingkungan sangatlah besar. Jika dibiarkan dapat merusak ekosistem di perairan dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di air. Berikut adalah beberapa dampak adanya pencemaran air:

1) Meningkatkan kecepatan reaksi kimia

   Air yang tercemar adalah air yang telah mengandung aneka bahan polutan. Banyak jenis polutan yang merupakan bahan- bahan kimia. Ketika air banyak mengandung bahan kimia, hal ini akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia yang terjadi di dalam air.

2) Menurunnya jumlah biota sungai

   Pencemaran air dapat membuat banyak spesies ikan dan biota lain yang ada di lingkungan perairan punah. Hal ini sangat merugikan karena dapat menurunkan jumlah keanekaragaman dalam ekosistem air.

3) Mengganggu kesuburan tanah

   Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini karena air akan meresap ke tanah yang ada di sebelah kanan atau kiri. Hal ini berakibat tanah tersebut ikut mengandung berbagai zat polutan. Jika tanah telah tercemar zat polutan, otomatis tanah tersebut tidaklah subur.

4) Menurunkan jumlah oksigen dalam air

   Air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang akan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Hal ini akan berakibat tumbuhan- tumbuhan air kesulitan melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan akan menyebabkan tumbuhan tersebut memproduksi oksigen. Apabila tumbuhan terhalang melakukan fotosintesis, hal ini akan menyebabkan air mendapatkan oksigen yang hanya sedikit.

5) Keseimbangan lingkungan terganggu

   Keseimbangan lingkungan dapat terganggu saat terjadi perubahan interaksi dalam suatu ekosistem.

6) Gangguan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat akan terganggu terutama masyarakat yang bermukim di sekitar sungai yang menggunakan air sungai sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

7) Meningkatnya biaya pengolahan air bersih (PDAM)
   Biaya pengolahan air bersih akan meningkat seiring dengan meningkatnya pencemaran air yang terjadi.

5. *Response* (Respons)

Strategi penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mengatasi penurunan kualitas air adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan sesuai tata ruang
2) Penertiban untuk per ijinan dan penegakan hukum
3) Peningkatan program sanitasi
4) Peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah
5) Penguasaan untuk perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air oleh pemerintah

Tabel 2.7 Analisis D-P-S-I-R Kualitas Air

Driving Force (Faktor Pemicu)	Pressure (Tekanan)	State (Keadaan)	Impact (Dampak)	Respons
Laju pertumbuhan penduduk tinggi	Adanya pencemaran air sungai, air permukaan dan air tanah	Nilai indeks kualitas air masih dibawah baku mutu	Meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rendahnya kualitas air	Pembangunan sesuai tata ruang
Peningkatan kebutuhan pemukiman dan kegiatan usaha	Kesadaran terhadap sanitasi dan kebersihan yang masih rendah	Kuantitas air sungai di musim kemarau berkurang	Menurunnya jumlah biota sungai	Penertiban untuk per ijinan dan penegakan hukum
Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal	Pelaku usaha belum taat dalam pengelolaan air tanah dan limbah	Sebagian masyarakat menggunakan sungai sebagai tempat MCK	Meningkatnya biaya pengolahan air bersih (PDAM)	Peningkatan program sanitasi
Kemiskinan dan wilayah kumuh masih tinggi	Perubahan tata guna lahan	Sebagian masyarakat masih membuang sampah ke sungai		Peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah
	Perubahan fungsi sungai			Penguasaan untuk perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air oleh pemerintah

2.3. Kualitas Udara

1. *Driving Force* (Penggerak)

Faktor yang menjadi pendorong terjadinya pencemaran udara diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, jumlah kegiatan industri, dan jumlah kejadian karhutla akibat peningkatan kebutuhan lahan.

2. *Pressure* (Tekanan)

Penyebab terjadinya pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Kualitas udara di Kabupaten Barito Kuala dari hasil pemantauan masih memenuhi baku mutu. Namun demikian, bukan berarti aktivitas masyarakat Barito Kuala seperti mobilitas/transportasi, penggunaan bahan bakar, cerobong *boiler* industri selama ini tidak berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Beberapa hal yang menjadi tekanan adanya peningkatan polutan udara di Kabupaten Barito Kuala yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan jumlah kegiatan industri dan kebakaran hutan dan lahan.

1) Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor

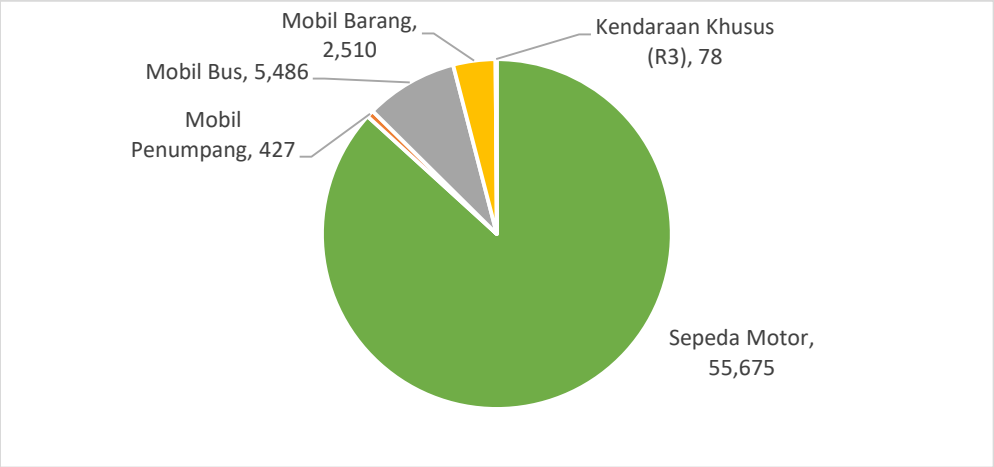
Keberadaan kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan kualitas udara. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Bahan pencemar yang terutama terdapat didalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NO_X) dan sulfur (SO_X), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb). Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Kuala dapat dari tahun 2018 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.8 Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sepeda Motor	55,675	55,675		-
2	Mobil Penumpang	427	84	343	-
3	Mobil Bus	5,486	5,424	62	-
4	Mobil Barang	2,510	1,977	533	-
5	Kendaraan Khusus (R3)	78	78	-	-

(Sumber : Dinas Perhubungan Kabupten Barito Kuala dalam Angka Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah kendaraan di wilayah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2022. Jumlah Kendaraan didominasi oleh sepeda motor sebanyak 55.675 unit, kemudian mobil bus sebanyak 5.486 unit, lalu mobil barang sebanyak 2.510 unit, mobil penumpang sebanyak 427 unit, dan kendaraan khusus (roda tiga) sebanyak 78 unit.



Gambar 2.16 Grafik Jumlah Kendaraan di Kab. Barito Kuala

(Sumber : Dinas Perhubungan Kabupten Barito Kuala dalam Angka Tahun 2023)

2) Peningkatan Jumlah Kegiatan Industri

Kegiatan industri yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat menyebabkan penurunan kualitas udara. Hal tersebut dikarenakan adanya penggunaan BBM yang dalam penggunaannya juga menghasilkan gas buang yang dapat mencemari udara.

Industri di Kabupaten Barito Kuala dapat dikelompokkan menjadi industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Perusahaan industri di Kabupaten Barito Kuala saat ini didominasi oleh bidang ; 1. Makanan, Minuman dan Tembakau ; 2. Kayu dan Barang dari Rotan. Berdasarkan penjelasan data sebelumnya pada Tabel 2.2, bahwa telah terjadi peningkatan jumlah industri di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1.036 atau 17,72%. Peningkatan terbesar adalah dengan klasifikasi industri rumah tangga yaitu sebesar atau 23,26% dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

3) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 16 kali dengan wilayah yang terdampak adalah Kecamatan Tabunganen, Alalak, Jejangkit, Belawang, Barambai, Rantau Badauh, Marabahan dan Tabukan.

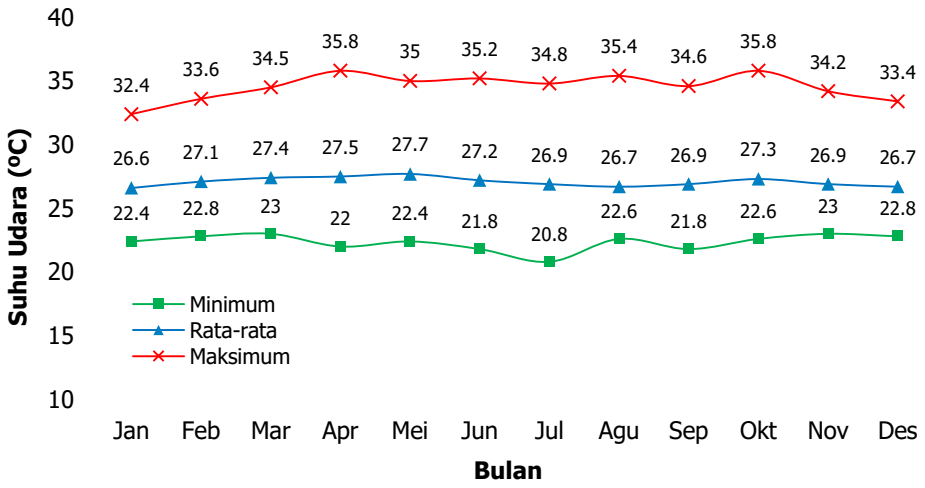
3. *State* (Kondisi)

Udara merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Sehingga keberadaan udara harus dijaga dan dipelihara agar tidak terjadi pencemaran. Pencemaran udara didefinisikan sebagai hadirnya substansi di udara dalam konsentrasi yang cukup untuk menyebabkan gangguan pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun material. Substansi ini bisa berupa gas, zat cair, maupun partikel padat. Pembangunan fisik yang dilakukan di Kabupaten Barito Kuala, baik dalam bidang ekonomi maupun infrastruktur dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kualitas udara menjadi lebih

buruk akibat pencemaran udara. Salah satu usaha Kabupaten Barito Kuala untuk menjaga kualitas udara tetap baik adalah dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas udara secara berkala sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan peningkatan pencemaran udara dan penanggulangan dampak ketika terjadi penurunan kualitas udara.

Faktor meteorologis mempunyai peranan yang penting dalam menentukan kualitas udara di suatu daerah. Kondisi atmosfer sangat ditentukan oleh berbagai faktor meteorologis, seperti kecepatan dan arah angin, kelembaban, suhu udara, tekanan udara, dan aspek tinggi permukaan. Kadar gas pencemar di udara selain dipengaruhi oleh jumlah sumber pencemar, parameter meteorologi juga mempengaruhi kadar gas pencemar di udara sehingga kondisi lingkungan tidak dapat diabaikan. Kecepatan angin, suhu udara dan kelembaban udara adalah bagian dari parameter meteorologi yang dapat mempengaruhi kadar gas pencemar di udara.

Suhu udara di suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Selain itu sebagaimana daerah tropis, Kabupaten Barito Kuala juga mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Suhu udara Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2021 berkisar antara 20,8ºC – 35,8ºC. Suhu tertinggi berada pada bulan April, sedangkan suhu terendah berada pada bulan Juli. Hasil pemantauan suhu udara di Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



(Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2022)

Gambar 2.17 Grafik Suhu Udara Bulanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

Pemantauan kualitas udara ambien merupakan bagian penting dalam pengelolaan kualitas udara. Pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual *passive sampler* dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Sebagai ukuran untuk menilai pencemaran udara, maka digunakanlah Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2) dan nitrogen dioksida (NO_2). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO_2 dan SO_2. Parameter NO_2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Pemantauan parameter NO_2 dan SO_2 Tahun 2021 di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kabupaten Barito Kuala 2021

Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO_2 (µg/Nm³)	CO (µg/Nm³)	NO_2 (µg/Nm³)
	Latitude	Longitude				
Area Padat Transportasi (Terminal Taksi Handil Bakti)	S: 03°16'36,13"	E: 114°35'52,19"	1 Jam	< 112.1	1,283	<34.6
Area Perkantoran (Kantor Bupati Batola)	S: 02°58'41,68"	E: 114°45'59,12"	1 Jam	< 112.1	401	<34.6
Area Permukiman (Handil Bakti, Komp.Kemuning Indah)	S: 03°15'36,13"	E: 114°36'32,86"	1 Jam	< 112.1	337	<34.6

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

4. *Impact* (Dampak)

Dampak dari Gas SO_2 (sulfur dioksida), merupakan polutan yang banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung unsur belerang seperti minyak, gas, batubara, maupun kokas. Pembakaran ini juga menghasilkan gas SO_3, yang secara bersama-sama dengan gas SO_2 lebih dikenal sebagai gas SOx atau sulfur oksida. Konsentrasi SO_2 berlebih diudara berbahaya bagi kesehatan yaitu menimbulkan iritasi mata, iritasi tenggorokan dan batuk, sedangkan bagi lingkungan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Pencemaran udara yang paling membahayakan bagi kesehatan manusia adalah yang berasal dari pencemar gas karbon monooksida (CO). Karbon monoksida sangat beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, oleh sebab itu CO disebut pula sebagai *sillent killer* atau *invisible killer*. Pemaparan Sumber utama emisi NO_2 adalah kendaraan bermotor. Gas NO_2 berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan (penurunan kapasitas difusi paru-paru), mengurangi jarak pandang dan resistansi di udara, juga dapat merusak tanaman. Partikulat secara alami dapat dihasilkan dari debu tanah kering yang terbawa oleh angin, dan/atau proses vulkanis yang berasal dari letusan gunung berapi. Partikulat juga dihasilkan oleh aktivitas manusia antara lain dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti transportasi kendaraan bermotor, bahan bakar industri, dan sumber-sumber non industri, misalnya pembakaran sampah baik domestik ataupun komersial. Partikulat di udara

secara potensial menyebabkan kerugian, seperti pada kesehatan paru- paru dan dapat mereduksi jarak penglihatan.

Efek lain dari pengaruh pencemaran udara adalah terjadinya hujan asam. Pemantauan kualitas air hujan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat pencemaran lingkungan terhadap efek hujan asam. Dampak yang bisa ditimbulkan dari hujan asam di antaranya adalah:

1) Kadar nutrisi tanah yang bertujuan untuk menyuburkan tanaman akan menurun karena mengandung asam yang berlebih.
2) Akan menurunkan produktivitas ikan di laut, danau maupun sungai yang disebabkan oleh hilangnya sumber utama makanan bagi ikan yakni plankton. Sebab air dan plankton tidak akan bisa hidup di dalam air yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi.
3) Bagi tumbuhan akan terganggunya proses fotosintesis sehingga banyak pertumbuhan tanaman terhambat dan bahkan
4) Bagi hewan darat akan banyak yang terkena kanker dan bahkan mati. Sebab hewan darat sumber utama minumannya ada di danau atau sungai. Apabila hal ini tercemar akan merusak pertumbuhan hewan.
5) Apabila air sudah terkontaminasi dengan larutan asam maka akan menyebabkan sejumlah penyakit seperti halnya iritasi pada kulit dan kanker.
6) Hujan asam juga berdampak pada mengikisnya benda-benda logam semisal besi. Hal inilah yang nantinya membuat besi menjadi karatan bahkan roboh.
7) Apabila tumbuhan terkena hujan asam yang terlalu tinggi akan menyebabkan tanaman menjadi layu yang pada akhirnya mati.
8) Ikan maupun hewan laut atau danau maupun sungai tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama apabila airnya sudah terkontaminasi hujan asam.
9) Berdampak pada rusaknya berbagai infrastruktur baik itu bangunan maupun lingkungan sekitar

5. *Response* (Respons)

Pengendalian pencemaran udara bertujuan untuk menurunkan jumlah dan kadar pencemaran terhadap udara. Usaha pengendalian pencemaran dapat dilakukan secara yuridis formal dengan penegakan peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup yang ada.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya menekan pencemaran udara telah melaksanakan usaha-usaha antara lain:

1) Secara periodik melakukan pemantauan udara di beberapa tempat potensi terjadi pencemaran udara.
2) Bersama-sama dengan masyarakat menggerakkan program penghijauan dengan melaksanakan Gerakan Penanaman Satu Juta Pohon.
3) Melakukan pengaturan terhadap jalur kendaraan.
4) Melakukan pemantauan pada masing-masing industri dan masyarakat untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

Tabel 2.10 Analisis D-P-S-I-R Kualitas Air

Driving Force (Faktor Pemicu)	Pressure (Tekanan)	State (Keadaan)	Impact (Dampak)	Respons
Laju pertumbuhan penduduk tinggi	Peningkatan jumlah kendaraan	Menurunnya kualitas udara	Meningkatnya penyakit ISPA	Pembangunan harus sesuai tata ruang
Peningkatan kebutuhan pemukiman dan kegiatan usaha	Peningkatan jumlah industri		Terganggunya jarak pandang untuk transportasi udara, darat dan sungai	Penertiban untuk perizinan bangunan dan lingkungan
Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor, industri dan rumah tangga meningkat	Kebakaran hutan dan Lahan		Meningkatnya pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim	Pengawasan dan Penegakan hukum
Pertambahan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan	Pengelolaan sarana prasarana pengelolaan kualitas udara pada pelaku usaha yang buruk		Dapat terjadinya hujan asam	Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengendalian pencemaran udara kepada seluruh *stake holder*
	Kesadaran masyarakat tentang bahaya membakar lahan dan sampah masih rendah			Uji berkala emisi kendaraan bermotor

2.4. Risiko Bencana

1. *Driving Force* (Penggerak)

Faktor penggerak bencana banjir adalah kondisi cuaca dan pertambahan jumlah penduduk. Kondisi cuaca seperti musim hujan dengan curah hujan yang tinggi akan dapat menyebabkan sungai meluap sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu, pada kondisi cuaca seperti kemarau panjang dapat menyebabkan hutan menjadi kering sehingga mudah terbakar.

Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya akan meningkatkan risiko bencana yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan di berbagai sektor juga membuat pembukaan lahan dengan cara ilegal seperti pembakaran marak terjadi. Selain itu pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan tersumbat saluran drainase sehingga akan berpotensi terjadinya banjir.

2. *Pressure* (Tekanan)

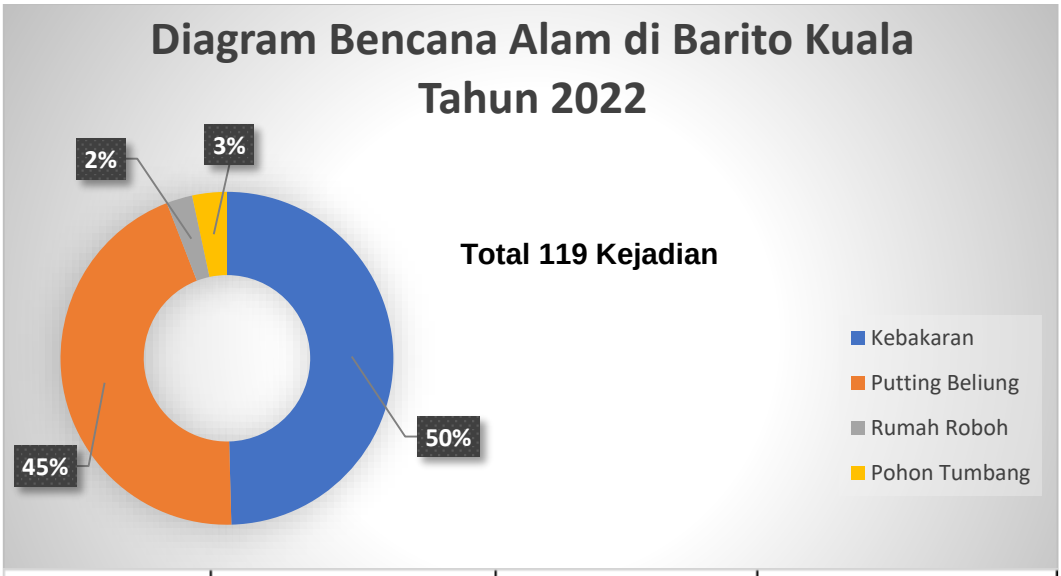
Faktor tekanan terjadinya bencana adalah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan industri sehingga tutupan hutan semakin berkurang dan limbah yang dihasilkan akibat kegiatan tersebut juga semakin meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Selain itu Tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah merupakan faktor yang dapat turut menyebabkan bencana seperti membuang sampah ke sungai dan membuka lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut memberikan dampak lingkungan sebagai berikut:

1) Terjadinya penyempitan penampang sungai karena sungai tidak dilestarikan. Sungai dibiarkan mengalami pendangkalan dan sumbatan oleh buangan baik sampah domestik maupun alam (pohon-pohon yang hanyut);

2) Luas area resapan air hujan yang berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi area terbangun.
3) Pembukaan lahan dengan cara di bakar menyebabkan hutan di sekitarnya menjadi rawan terbakar pada sawat kemarau.

3. *State* (Kondisi)

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala adalah kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah, dan angin puting beliung. Kebakaran hutan dan lahan dapat membahayakan flora dan fauna serta manusia akibat polusi udara yang ditimbulkan. Sementara itu, bencana angin puting beliung paling banyak terjadi pada musim peralihan atau pancaroba dan mampu merusak rumah dalam skala besar. Grafik jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan jenis bencananya dapat dilihat pada gambar berikut.



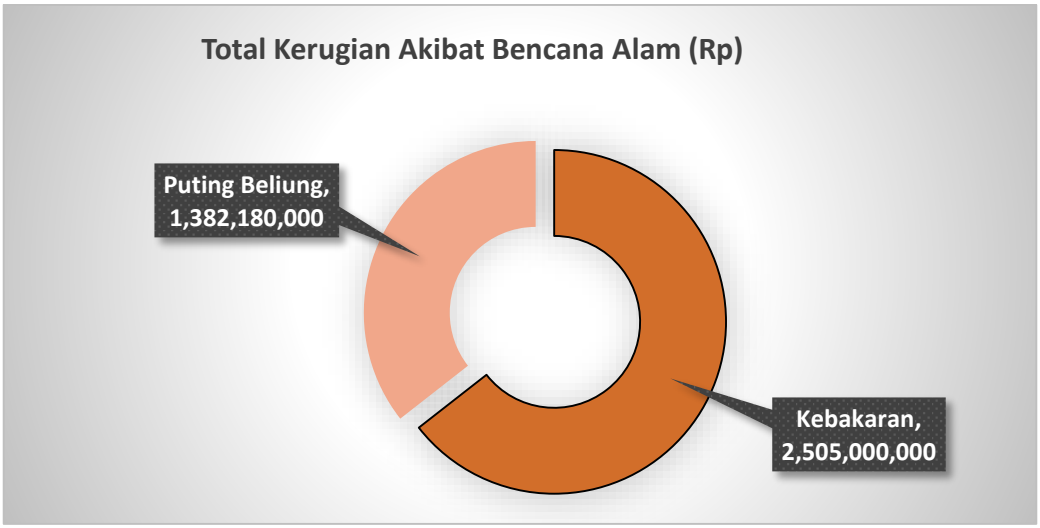
Kebakaran	Putting Beliung	Rumah Roboh	Pohon Tumbang
59	53	3	4

Gambar 2.18 Bencana di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
(Sumber : BPBD Kabupaten Barito Kuala, 2023)

4. *Impact* (Dampak)

Dampak yang ditimbulkan dari bencana alam yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala antara lain :

1) Mengakibatkan kerusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit.
2) Menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer
3) Terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran, terjebak asap atau rusaknya habitat. Kebakaran juga dapat menyebabkan banyak spesies endemik/khas di suatu daerah turut punah sebelum sempat dikenali/diteliti.
4) Hutan menjadi gundul akibat kebakaran hutan dana lahan yang dapat menyebabkan tanah longsor maupun banjir.
5) Berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan dikarenakan tidak adanya pohon yang berfungsi menampung cadangan air.
6) Berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu transportasi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.
7) Meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan asma, dimana pada tahun 2021, kasus penyakit ISPA menduduki peringkat pertama terbanyak penyakit di Kabupaten Barito Kuala yaitu sebesar 24.486 kasus. Hal ini bisa menyebabkan kematian bagi penderita berusia lanjut dan anak-anak. Polusi asap ini juga bisa menambah parah penyakit para penderita TBC/asma.
8) Menimbulkan Kerugian secara materil.



Gambar 2.19 Perkiraan Kerugian Akibat Bencana di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

(Sumber : BPBD Kabupaten Barito Kuala, 2023)

5. *Response* (Respons)

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mengatasi risiko bencana antara lain:

1) Membangkitkan kesadaran masyarakat sekitar sungai akan dampak dan kerugian banjir melalui sosialisasi.
2) Normalisasi sungai dan pengerukan sungai secara rutin/berkala.
3) Pembangunan pembuatan saluran drainase.
4) Peningkatan kewaspadaan di daerah dataran banjir.
5) Pelatihan tentang kewaspadaan banjir
6) Persiapan evakuasi bencana banjir seperti perahu dan alat-alat penyelamatan lainnya.
7) Pengawasan dan penegakan hukum
8) Pembentukan dan pelibatan Masyarakat dalam kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
9) Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
10) Pengadaan saranan dan prasarana Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan

Tabel 2.11 Analisis D-P-S-I-R Risiko Bencana

Driving Force (Faktor Pemicu)	Pressure (Tekanan)	State (Keadaan)	Impact (Dampak)	Respons
Laju pertumbuhan penduduk tinggi	Kebutuhan lahan permukiman meningkat	Berkurangnya lahan konservasi, rawa gambut dan semak belukar	Meningkatnya penyakit ISPA	Pengawasan dan penegakan hukum
Preferensi penduduk di lahan bukan untuk hunian/ lahan konservasi	Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan masih rendah	59 kejadian kebakaran, 53 kejadian angin puting beliung, 4 kejadian pohon tumbang, dan 3 kejadian rumah roboh.	Menimbulkan kerugian	Pembentukan dan pelibatan Masyarakat dalam kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
Topografi daerah bergambut dan berawa			Menurunkan estetika lingkungan	Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Kondisi Cuaca (Kemarau/Penghujan) dan Cuaca Ekstrim			Menyebabkan kerusakan lingkungan	Pengadaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan
			Berkurangnya habitat flora dan fauna	Normalisasi sungai dan pengerukan sungai secara rutin/berkala.
			Berkurangnya tutupan lahan	Pembangunan saluran drainase
			Terganggunya penglihatan transportasi di darat, udara, dan air	

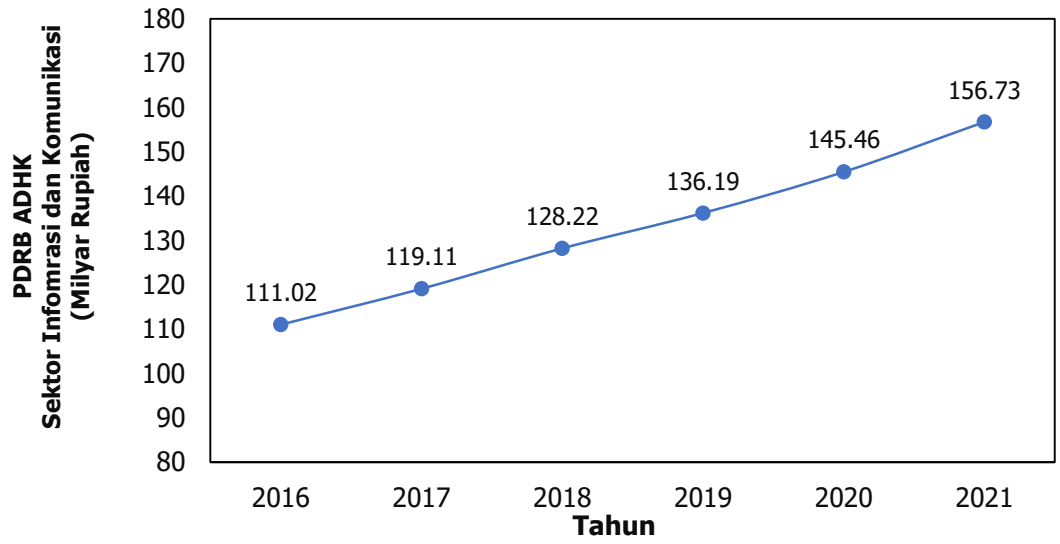
2.5. Perkotaan

1. *Driving* Force (Penggerak)

Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama dalam persampahan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula timbulan sampah yang dihasilkan. Selain itu, perilaku masyarakat yang kurang pengetahuan tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah juga merupakan penyebab permasalahan sampah sulit ditangani. Perkembangan industrialisasi dan perdagangan jasa juga mendorong terjadinya peningkatan jumlah timbulan sampah non domestik

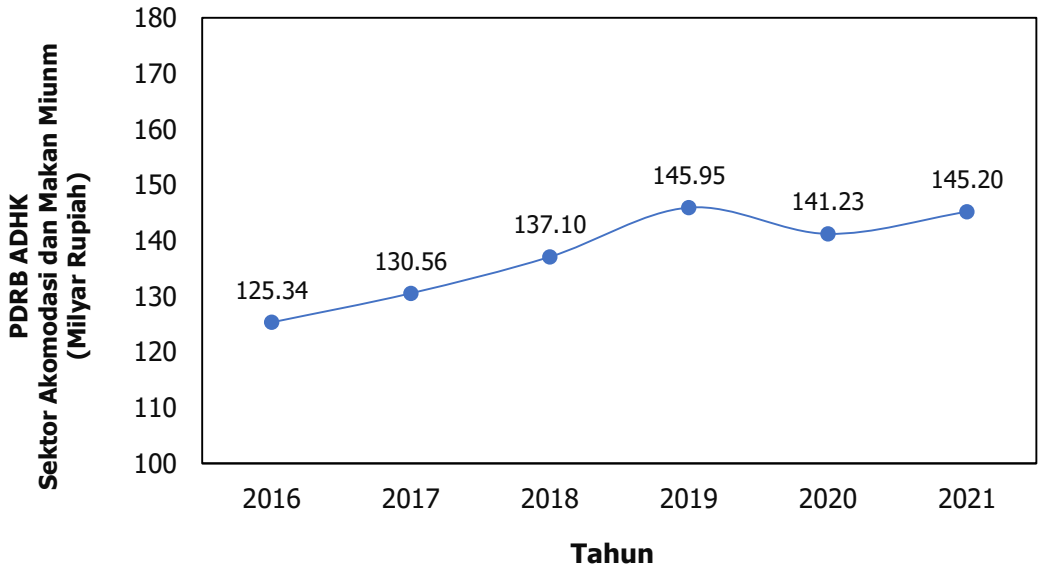
2. *Pressure* (Tekanan)

Kemajuan teknologi komunikasi menjadi tekanan (*pressure*) dalam permasalahan perkotaan seperti meningkatnya jumlah timbulan sampah. Kemajuan teknologi komunikasi ditandai dengan semakin meningkatnya PDRB bidang komunikasi setiap tahunnya. Grafik PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.20 PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala

Dengan adanya *Smartphone* sehingga muncul aplikasi pesan antar makanan seperti *Go Food* dan *Grab Food* sehingga hal ini memicu perubahan gaya hidup orang. Saat ini orang lebih cenderung memilih hidup serba praktis. Untuk makan, setiap orang dapat memanfaatkan aplikasi *Go Food* dan *Grab Food* untuk pemesanan makanan. Bahkan saat ini ada, aplikasi menyediakan bahan makanan siap masak. Dimana makanan dan bahan makanan tersebut dikemas dalam kemasan plastik, sehingga tidak dipungkiri hal ini memicu peningkatan jumlah timbulan sampah. Peningkatan penjualan makanan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari PDRB ADHK di Sektor Akomodasi dan Makan Minum sebagaimana gambar berikut.

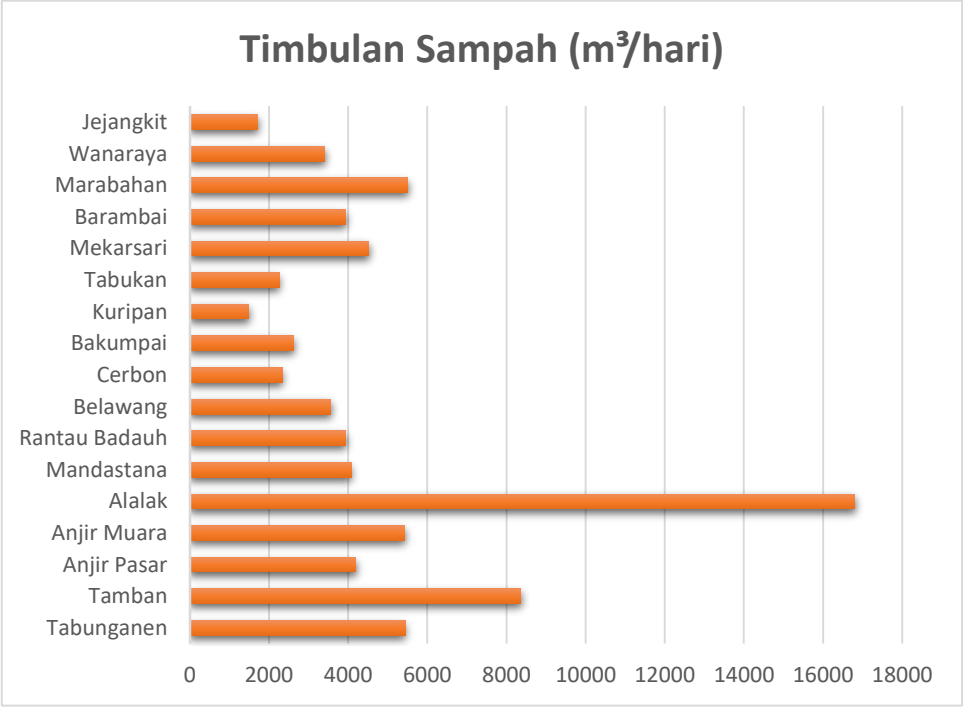


Gambar 2.21 PDRB ADHK Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Barito Kuala

3. *State* (Kondisi)

Sarana penampungan sampah di Kabupaten Barito Kuala sangat bervariasi di setiap kecamatan antara lain menggunakan tong/bak sampah, gerobak sampah dan truk pengangkut sampah. Ada juga yang ditimbun atau langsung dibakar pada lokasi penghasil sampah. Tidak semua kecamatan dapat memperoleh fasilitas bak sampah, sehingga perlu pengolahan

sampah ditingkat rumah tangga untuk mengurangi volume sampah. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah adalah dengan pelaksanaan program 3R, yaitu *Reduce* (pengurangan), *Reuse* (pemanfaatan kembali) dan *Recycle* (daur ulang) pada pengelolaan sampah sejak tingkat rumah tangga. Tingkat timbulan sampah di Kabupaten Barito Kuala dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk. Angka produksi sampah di Kabupaten Barito Kuala setiap tahun meningkat dan merupakan akumulasi dari seluruh aktivitas penduduk dari berbagai sektor. Jenis sampah yang dihasilkan terdiri dari sampah jenis organik, plastik, kayu, kertas, kain, karet, logam, kaca, dan lainnya. Grafik besaran sampah yang dihasilkan tiap kecamatan di Kabupaten Barito Kuala lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.22. Timbulan Sampah Kabupaten Barito Kuala 2022
(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa timbulan sampah terbesar berada pada Kecamatan Alalak yaitu sebesar 16.805,5 m^3/hari atau 16,8 ton/hari, diikuti oleh Kecamatan Tamban sebesar 8.366 m^3/hari atau 8,36 ton/hari. Sementara itu, timbulan sampah terkecil berada pada Kecamatan

Kuripan yaitu sebesar 1.480,25 m^3/hari 1,48 ton/hari, diikuti oleh Kecamatan Jejangkit sebesar 1.711 m^3/hari atau 1,71 ton/hari.

Dalam upaya penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala telah menyediakan beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) di perkotaan yang selanjutnya diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA yang digunakan oleh wilayah Kabupaten Barito Kuala saat ini adalah TPA Tabing Rimbah. Rincian TPA Tabing Rimbah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Rincian TPA Kabupaten Barito Kuala

Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (ha)	Kapasitas (m^3)	Volume Eksisting (m^3)
TPA Tabing Rimbah	*Controlled Landfill*	16	48.000	48.000

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

4. *Impact* (Dampak)

Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat membawa efek negatif bagi lingkungan yaitu untuk aspek kesehatan sampah dapat menjadi salah satu sumber penyakit, dan untuk aspek keindahan tata wilayah, sampah dapat mengurangi pemandangan karena adanya tumpukan sampah dan juga bau yang tidak sedap.

Timbulan sampah yang meningkat setiap tahunnya menimbulkan dampak sebagai berikut :

1) Semakin berkurangnya daya tampung TPA

   Daya Tampung TPA Tabing Rimbah pada tahun 2022 hampir melebihi daya tampung TPA akibat peningkatan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya

2) Meningkatnya wabah penyakit

   Menurunnya sanitasi pemukiman karena meningkatnya pencemaran air akibat peningkatan sampah yang tidak dikelola dengan baik

berpotensi meningkatkan wabah penyakit. Hal tersebut sering terjadi terutama di daerah dengan garis kemiskinan yang tinggi. Beberapa jenis penyakit yang diderita masyarakat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Tahun 2022

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Ispa ytt	24.486
2	Nasopharingitis akuta (common cold)	11.89
3	Hipertensi Primer	18.557
4	Gastritis dan Duodenitis	16.671
5	Rematik Artritis	7.453
6	Peny Pulpa dan Jar Periapikal	7.232
7	Artritis lainnya	8.122
8	Febris	6.346
9	Pharingitis	4.564
10	Alergi	6.981
11	Influenza	14,266
12	Dermatitis Kontak Alergi	5.443
13	Hyperurisemia-Gout Arthitis	4.271
14	Diabetes Melitus Type 2	2.988
15	Artritis Reumatoid	2.317
16	Gastroenteritis	1.782
17	Rinitis Akut	1.616

(Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2022, Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala, 2023)

5. *Response* (Respons)

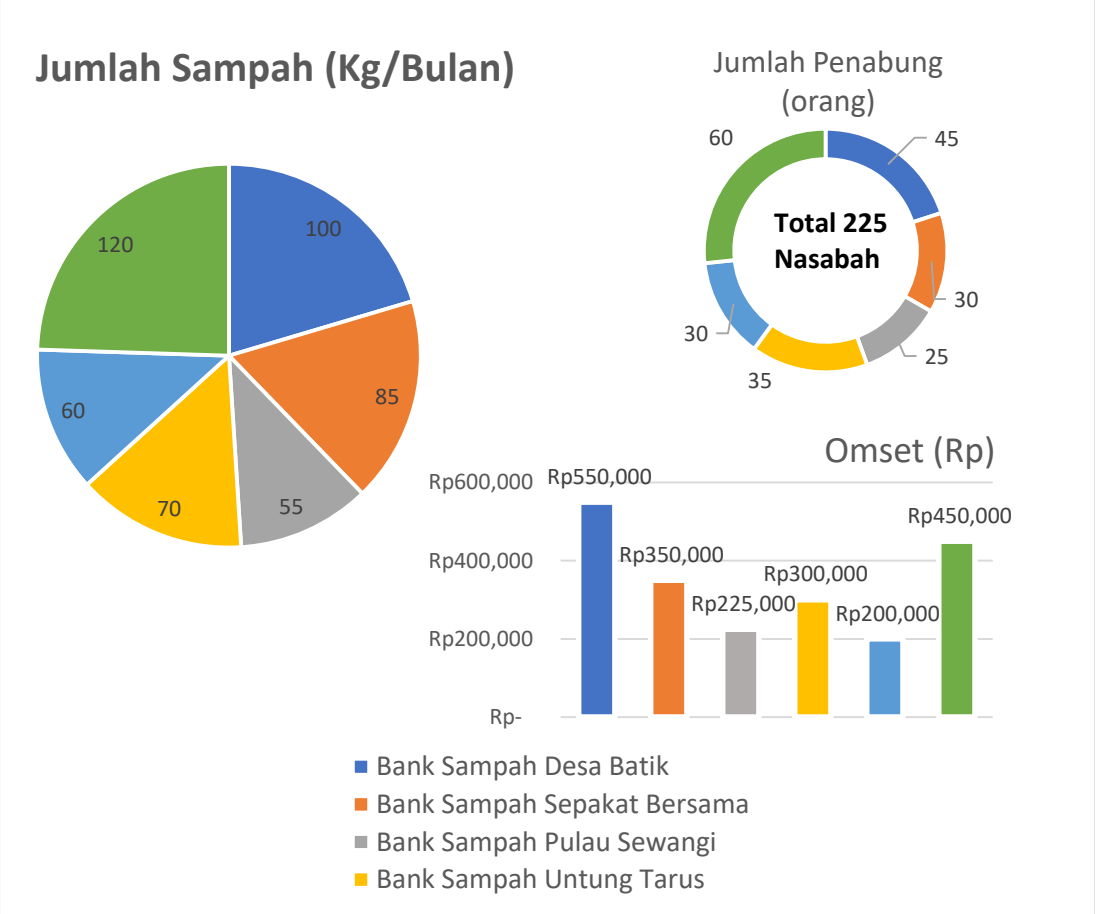
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mengatasi persampahan di Kabupaten Barito Kuala antara lain :

1) Pembangunan TPA Baru

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 telah melakukan perencanaan pembangunan TPA baru di Tabing Rimbah untuk mengatasi kapasitas TPA lama yang hampir penuh.

2) Bank Sampah

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan jumlah sampah yang terus meningkat melalui Bank Sampah. Jumlah sampah yang dikelola, jumlah penabung dan omset dapat dilihat pada Gambar 2.23 yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A Tabel 48.



Gambar 2.23 Jumlah Sampah yang Dikelola Bank Sampah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023)

3) Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Dalam rangka pengurangan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, maka perlu dilakukan pengadaan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah di antaranya adalah pemberian bantuan peralatan pengelolaan sampah untuk masyarakat, pengadaan mesin pencacah sampah dan mesin pres sampah untuk operasional TPA.

4) Program Anjur Angkut Sampah

Program anjur angkut sampah merupakan sinergi antara masyarakat, dunia usaha dan Dinas Lingkungan Hidup, dimana masyarakat sebagai penghasil sampah melalui paman gerobak menganjur (membawa) sampahnya ke Truk yang sudah disiapkan DLH.

Tabel 1. Analisis D-P-S-I-R Perkotaan

Driving Force (Faktor Pemicu)	Pressure (Tekanan)	State (Keadaan)	Impact (Dampak)	Respons
Laju pertumbuhan penduduk tinggi	Kemajuan teknologi yang mendorong masyarakat untuk membeli makanan secara *online,* sehingga kantong plastik untuk mengemas makanan semakin meningkat	Meningkatnya jumlah timbulan sampah	Daya tampung TPA yang terus berkurang	Perencanaan pembangunan TPA Baru
		Kapasitas TPA hampir melebihi daya tampung	Meningkatnya potensi wabah penyakit	Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan timbulan sampah melalui program Bank sampah
				Penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah

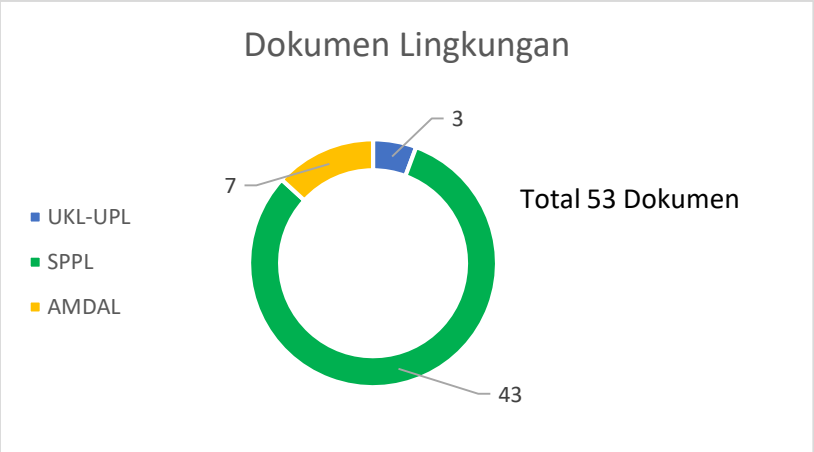
2.6. Tata Kelola

1. Driving Force (Penggerak)

Faktor penggerak dalam tata kelola di antaranya perizinan, anggaran pengelolaan lingkungan hidup, dan pendapatan asli daerah. Faktor tersebut apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan konflik seperti pengaduan masyarakat akibat kondisi lingkungan yang rusak maupun tercemar.

1) Perizinan

Setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan masalah lingkungan yang spesifik, demikian juga setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Untuk meminimalisir dampak yang dimungkinkan terjadi dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut maka diperlukan suatu instrumen untuk menilai kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan. Instrumen tersebut dapat berupa izin lingkungan yang meliputi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan), DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup), serta SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk kegiatan usaha skala kecil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Grafik jumlah jenis dokumen izin lingkungan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Gambar 2.24 dan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A Tabel 41.



Gambar 2.24 Grafik Jumlah Dokumen Lingkungan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

Berdasarkan Gambar 2.24, dapat dilihat bahwa dokumen izin lingkungan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2022 sebagian besar adalah dokumen dengan jenis SPPL yaitu sebesar 43 dokumen, diikuti oleh AMDAL sebanyak 7 dokumen dan UKL-UPL sebanyak 3 dokumen. Dengan banyaknya dokumen SPPL tersebut, mendorong pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Jumlah perusahaan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2022 yang masuk dalam pengawasan izin lingkungan berjumlah 11 perusahaan yang dapat dilihat pada Lampiran A Tabel 43.

2) Anggaran Lingkungan

Proses pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola lingkungan hidup daerah berasal dari APBD. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menganggarkan sekitar Rp 13.215.659.827,- untuk pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

3) Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber dana APBD adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

No	Sumber	Jumlah (Rp)
1	Pajak	Rp 25.308.005.563,00
2	Retribusi	Rp 3.972.799.353,00
3	Laba BUMD	Rp 10.122.349.618,00
4	Pendapatan lainya yang Sah	Rp 34.237.911.001,98
Jumlah		Rp 73.641.065.535,98

(Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2022)

2. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan dalam tata kelola adalah adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan tersebut dikarenakan adanya suatu hal yang mengganggu kenyamanan masyarakat tersebut. Beberapa pengaduan ditanggapi dengan diskusi dan mediasi untuk proses penyelesaiannya. Dengan adanya tanggapan tersebut oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala, menunjukkan

adanya respon yang baik dari pemerintah atas pengaduan tersebut. Beberapa pengaduan masyarakat pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Pengaduan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
1	Pengaduan warga masyarakat dekat dengan TPS Kantor Pemda	Terkait jenis sampah yang boleh dibuang di TPS dan jam pembuangan sampah yang sesuai dengan peraturan daerah (E.Lapor.id)	2022
2	Masyarakat Sungai Alalak	Dugaan adanya tumpahan minyak High Sulfur Fuel Oil (HSFO) di Sungai Alalak (Media Sosial)	2022
3	Pengaduan warga Desa Baliuk	Terkait dampak debu akibat aktivitas PT Talenta Bumi (Media Sosial)	2022

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2022)

3. State (Kondisi)

Dalam mengatasi permasalahan tata kelola lingkungan, maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) atau staf di bidang lingkungan untuk penyelesaian masalah tersebut. Jumlah dan kualitas SDM yang mumpuni akan menentukan terselesaikannya permasalahan dalam tata kelola. Jumlah dan kualitas SDM berdasarkan tingkat pendidikannya di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	2	-	-
2.	Master (S2)	3	3	6
3.	Sarjana (S1)	12	7	19
4.	Diploma (D3/D4)	3	5	8
5.	SLTA	12	4	16
6.	SMP	6	-	6
7.	SD	2	-	2
	Jumlah	**40**	**19**	**57**

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

Dari jumlah personil tersebut, belum terdapat tenaga fungsional di bidang lingkungan hidup. Namun ada beberapa pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti beberapa pelatihan menyangkut hal-hal teknis terkait pengelolaan lingkungan hidup. Jumlah staf fungsional dan staf yang telah mengikuti diklat di bidang lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Staf yang telah Mengikuti Diklat

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
1.	Dinas Lingkungan Hidup	Penyuluh Lingkungan Hidup	2 org	-	2	-
		Pengendali Dampak hidup	2 org	-	2	-
		Pengawas Lingkungan Hidup	1 org	-	1	-

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

4. *Impact* (Dampak)

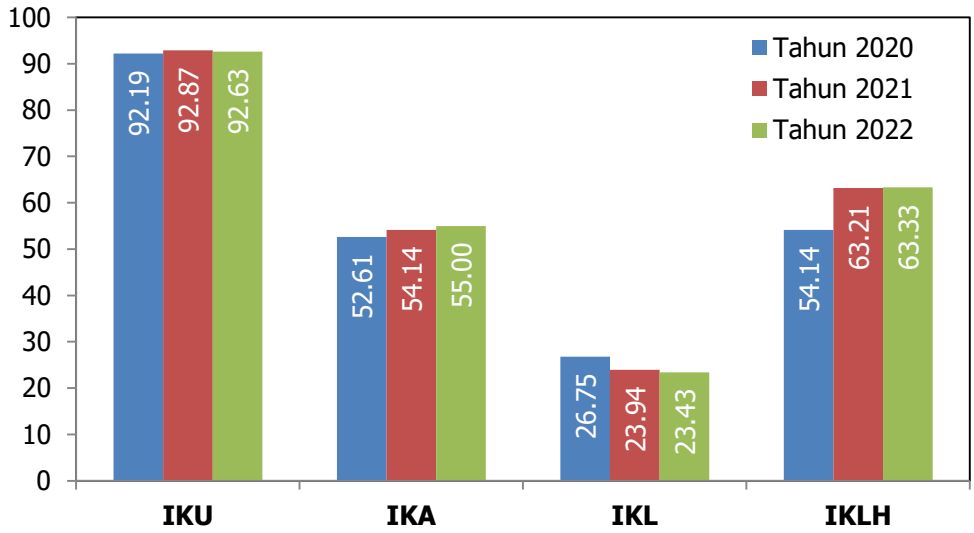
Dampak yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan melaksanakan urusan tata kelola urusan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menerima beberapa penghargaan di bidang lingkungan hidup. Penghargaan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Penghargaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala

No.	Nama Orang/Kelompok /Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	SMPN 2 Alalak	Adiwiyata Nasional	Kementerian LHK	2022
2	SDN Sungai Gampa Asahi	Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kalimantan Selatan	2022
3	SDN Sidorejo 1	Adiwiyata Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	2022

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

Hal lain yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan melaksanakan urusan tata kelola urusan lingkungan hidup adalah meningkatnya nilai IKLH setiap tahunnya. Grafik perubahan nilai IKLH di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.25 Perubahan Nilai IKLH Kabupaten Barito Kuala

5. Response (Respons)

Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala dalam tata kelola dilakukan melalui beberapa program. Program tersebut didominasi oleh kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Program yang diinisiasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
1	Pembuatan Produk Olahan Pupuk Organik Cair	DLH Barito Kuala	Kelompok Karya Makmur Bunga Mandastana	2022
2	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tunas Muda Kencana Desa Tanggulrejo Kec. Tabunganen	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
3	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sumber Tirto Utama Desa Sumber Rahayu Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
4	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sejahtera Desa Surya Kanta Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
5	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Berkat Bersama Desa Karang Buah Kec. Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
6	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tirta Mulya Desa	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
	Beringin Kencana Kec. Tabunagen			
7	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Murung Keramat Berkarya Desa Murung Keramat Kec.Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
8	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sidomapan Desa Karang Dukuh Kec. Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
9	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sinar Barambai Kolam Kanan Desa Kolam Kanan Kec. Barambai	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
10	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Maju Bersama Desa Barambai Kolam Kiri Dalam Kec. Barambai	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
11	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sidomulyo Desa Karang Dukuh Kec. Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
12	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Harapan Bersama Sukaramai Desa Suka Ramai Kec. Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
13	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sederhana Desa Karang Bunga Kec. Mandasatana	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
14	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Karya Asih Desa Karang Indah Kec. Mandastana	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
15	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Karya Makmur Desa Kolam Makmur Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
16	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Bangun Bersama Desa Beringin Kencana Kec. Tabunganen	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
17	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tani Manunggal Ds Kolam Kanan Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
18	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Subak Dwipa Desa Dwipasari Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2022)

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

BAB III

ISU PRIORITAS

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

BAB III
ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1. Proses Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam proses penjaringan isu lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala meliputi tim penyusun dokumen IKPLHD yang berasal dari berbagai instansi di Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan secara sekunder. Berikut penjelasan dari tahap persiapan proses penjaringan isu. Penataan lingkungan hidup daerah melalui pelaksanaan program – program yang telah direncanakan melalui mekanisme penyusunan perencanaan Kabupaten yaitu program – program yang dituangkan dalam rangka pemecahan masalah aktual. Tata cara penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang diterbitkan tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam proses penetapan isu prioritas harus dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Proses tersebut juga wajib menggunakan pendekatan DPSIR.

Pendekatan DPSIR merupakan pendekatan yang didasarkan pada konsep hubungan sebab akibat dimana aktivitas manusia memberikan tekanan pada lingkungan serta merubah kualitas maupun kuantitas sumber daya alam itu sendiri yang selanjutnya perubahan tersebut direspon oleh masyarakat. Pemicu dasar utama perubahan lingkungan hidup disebut *driving force*. Aktivitas manusia yang memberikan tekanan terhadap lingkungan tersebut yang disebut dengan *pressure*. State adalah kondisi lingkungan yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. *Impact* merupakan dampak yang ditimbulkan dari tekanan terhadap lingkungan hidup. *Response* terkait dengan sejauh apa masyarakat merespon isu lingkungan yang terjadi baik melalui aksi individu maupun

kolektif. Pada akhirnya pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara *Driving Force, Pressure, State, Impact* dan *Response* tersebut.

Tahapan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup dalam dokumen ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari tahap penjaringan awal isu prioritas serta analisis Driving Forces Pressure State Impact Response (DPSIR) oleh tim penyusun dokumen IKPLHD. Proses penjaringan awal isu prioritas ditinjau dari dokumen pendukung lainnya seperti dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, RTRW, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD. Dalam proses perumusan Isu Lingkungan Hidup ini, dilaksanakan dengan berbagai unsur / pihak yaitu dari :

1. Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
2. Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4. Seksi Penilaian dan Evaluasi Dokumen Lingkungan DLH Kabupaten Barito Kuala
5. Seksi Perencanaan Tata Lingkungan DLH Kabupaten Barito Kuala
6. Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Barito Kuala
7. Seksi Pengendalian pencemaran lingkungan DLH Kabupaten Barito Kuala Barito Kuala
8. UPT Persampahan DLH Kabupaten Barito Kuala Barito Kuala
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Barito Kuala

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
13. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala
14. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
15. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Kuala
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

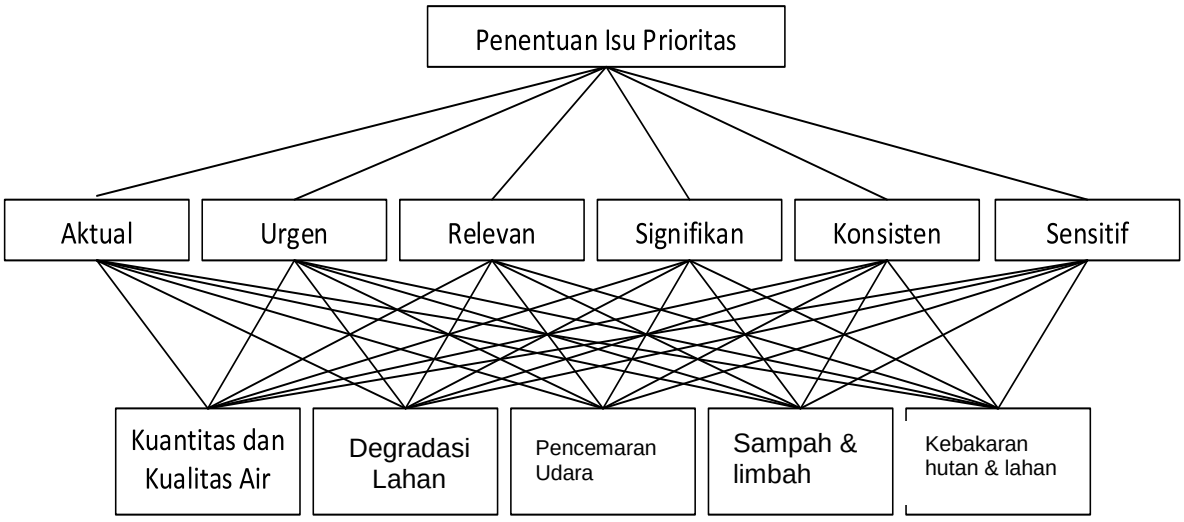


Gambar 3. 1. Foto Kegiatan FGD Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah pada saat Expose LAPDA

Berikut ditampilkan diagram penentuan isu prioritas dalam penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Permasalahan atau isu-isu lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi. Dimensi lintas ruang/wilayah adalah suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Dimensi lintas pelaku/sektor, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintas pelaku atau lintas sektor. Salah satu contoh adalah pencemaran sungai yang sumber pencemarnya dapat berasal dari berbagai pihak atau multi sektor misalnya sektor industri,

permukiman atau pertanian. Dimensi lintas generasi, bahwasanya permasalahan lingkungan hidup meliputi lintas generasi. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola dengan baik agar dapat tetap berfungsi untuk generasi sekarang dan masa datang. Populasi penduduk dapat berdampak negatif salah satunya terjadi degradasi lingkungan dalam suatu wilayah, sehingga tidak mampu menampung dan mendukung secara optimal berbagai aktivitas manusia untuk kepentingan kehidupan termasuk menyebabkan aktivitas pembangunan di segala bidang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas, baik jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin lama makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya akan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga menyebabkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala cenderung mengalami penurunan kuantitas dan kualitasnya dari waktu ke waktu. Isu lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala yang membutuhkan penanganan dengan segera yaitu, pencemaran air sungai, pencemaran udara, pengelolaan persampahan, banjir, limbah domestik, limbah pertanian dan peternakan, pertambangan illegal, lahan kritis, degradasi lahan, kebakaran hutan lahan, pemanasan global (global warming), dan Tata kelola. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Barito Kuala tahun 2023, isu lingkungan hidup yang dibahas secara mendalam adalah isu lingkungan hidup yang dinilai penting berdasarkan kriteria:

1. Kerusakan sumber daya alam hayati dan non hayati.
2. Berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan kualitas lingkungan hidup.
3. Mendapat perhatian publik secara luas dan perlu penanganan segera.



Gambar 3. 2. Skema Penentuan Isu Prioritas

Proses Penjaringan Isu Lingkungan Hidup, Isu prioritas lingkungan hidup berdasarkan Renstra DLH yang tertuang di IKPLHD tahun 2023 adalah :

1. Lahan, Hutan dan Keanekaragaman Hayati, Isu yang relevan dengan lahan dan hutan antara lain :
   a. Masih ditemuinya lahan kritis di beberapa daerah.
   b. Konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/non pertanian.
2. Air, Isu yang relevan dengan kualitas air yaitu :
   a. Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Barito Kuala, terutama dari segi kimia anorganik (konsentrasi Dissolved Oxygen (DO) lebih rendah dari kriteria baku mutu) dan mikrobiologi (adanya konsentrasi Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang melebihi kriteria baku mutu).
   b. Sedimentasi yang terjadi di badan sungai. Penyebab pencemaran

terbesar berasal dari aktivitas pertambangan, industri dan limbah domestik yang berasal dari rumah tangga.

3. Pencemaran Udara, Isu yang relevan dengan pencemaran udara yaitu :
   a. emisi sumber gas buang dari aktivitas industri diatas baku mutu
   b. kualitas gas buang dari kendaraan bermotor
4. Bencana Alam, Isu yang relevan dengan bencana alam yaitu :
   a. Banjir yang terjadi di beberapa daerah.
   b. tanah Longsor di wilayah tertentu.
5. Permasalahan infrastruktur sumber daya air, yaitu :
   a. Pembagian kewenangan dalam pengelolaan sistem jaringan irigasi yang seringkali menjadi penghambat ketika dibutuhkan penanganan yang segera.
   b. Ketersediaan sumber air baku yang semakin menurun yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup Keberadaan air baku tidak hanya digunakan oleh sector pertanian saja tetapi juga sebagai sumber bagi air minum, sehingga dikhawatirkan akan terjadi konflik pemanfaatan air baku.
   c. Penurunan daya tampung sungai, rawa dan embung yang ada di Kabupaten Barito Kuala.
6. Penurunan kualitas lingkungan permukiman & Persampahan
   a. Permasalahan penyediaan air bersih yang aman dan berkelanjutan, pengurangan luasan permukiman kumuh, serta perbaikan layanan sanitasi
   b. Belum terimplementasinya konsep pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R) dengan baik diseluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
7. Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Barito Kuala

a. Peningkatan suhu udara/ global warming.

b. Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan

Isu Pembangunan Berkelanjutan lainnya meliputi enam isu yakni (1) rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingginya kemiskinan, (2) rendahnya sarana infrastruktur dan akses transportasi (3) tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kawasan hutan, (4) ancaman menurunnya kualitas dan kuantitas air baku, (5) bencana alam dan perubahan iklim, dan (6) meningkatnya pencemaran lingkungan hidup. Dimana pada penjabaran isu pembangunan berkelanjutan diperoleh isu lingkungan hidup yang terdiri dari :

1. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kawasan hutan

   a) Keberadaan kawasan yang pada lokasi bukan peruntukannya
   b) Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perkebunan, permukiman, dan pertambangan
   c) Banyaknya kerusakan kawasan lindung di luar hutan yang dimiliki masyarakat dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan kaidah konservasi lingkungan
   d) Meningkatnya luasan lahan kritis dan Kerusakan kawasan hutan
   e) Semakin berkurangnya debit sumber mata air dan berkurangnya daerah resapan air
   f) Meningkatnya perburuan satwa liar
   g) Banyak bangunan di sempadan sungai
   h) Tingginya alih fungsi lahan kawasan ke kawasan budidaya, dari pertanian menjadi permukiman dan industri

2. Ancaman menurunnya kualitas dan kuantitas air baku

   a) Mengecilnya sumber mata air sebagai sumber air baku
   b) Menurunnya kualitas dan kuantitas air baku
   c) Tingginya sedimentasi sungai
   d) Penurunan tanah akibat penggunaan air bawah tanah

e) rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih
f) Penentuan kelas sungai
g) Banyak bangunan di sempadan sungai
h) Ketersediaan air untuk lahan pertanian berkurang
i) Masih rendahnya kondisi sungai dan bendungan/waduk
j) Kekurangan air untuk pengairan sawah

3. Bencana Alam dan Perubahan Iklim

a) Perubahan iklim yang menyebabkan ketersediaan air yang berkurang
b) Frekuensi bencana semakin meningkat
c) Masih adanya kawasan banjir, dan genangan air.
d) Kurangnya ketersediaan logistik bencana sebagai buffer stock pada daerah rawan bencana
e) Keterbatasan sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana
f) Bencana banjir, kebakaran dan bencana angin putting beliung

4. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup

a) Pencemaran limbah buangan industri dan pabrik
b) Pencemaran limbah rumah tangga
c) Pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri
d) Kerusakan lahan akibat pertambangan
e) Masih adanya penambangan tanpa izin
f) Kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan galian type c
g) Tingkat kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat masih kurang
h) Pencemaran akibat pengelolaan sampah yang tidak terintegrasi

4. Kebakaran Lahan dan Hutan

a) Perkembangan lahan pertanian dan perkebunan menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan
b) Upaya perubahan status wilayah dari pertanian menjadi lahan tidak produktif

c) Penurunan angka produksi lahan akibat degradasi lahan dan pembukaan lahan perkebunan sawit
d) Penurunan angka tutupan lahan akibat perubahan lahan
e) Peningkatan angka kerusakan lingkungan akibat berkurangnya tutupan lahan dan tata kelola yang kurang tepat
f) Pengelolaan lahan akibat perubahan sifat fisik lahan

5. Degradasi Lahan
   g) Perkembangan kota dan permukiman menyebabkan terjadinya degradasi lahan
   h) Upaya perubahan status wilayah dari pertanian menjadi permukiman
   i) Penurunan angka produksi lahan akibat degradasi lahan dan tata kelola
   j) Penurunan angka tutupan lahan akibat perubahan lahan
   k) Peningkatan angka kerusakan lingkungan akibat degradasi lahan dan tata kelola yang kurang tepat
   l) Pengelolaan lahan akibat perubahan degradasi lahan
6. Banjir

   a). Banjir sering mengakibatkan kerusakan di area banjir

   b). Pengelolaan tata ruang yang salah. Hal ini menyebabkan air tidak mudah terserap atau lambat mengalirnya, sehingga debit air cepat meningkat atau lebih banyak yang tertahan daripada yang tersalurkan ataupun yang terserap.

   c). Sampah yang dibuang di sungai secara sembarangan.

   d). kehilangan vegetasi (deforestasi) akan mendorong peningkatan risiko. Dengan hutan alami yang mencegah banjir, durasi banjir akan berkurang. Mengurangi tingkat penebangan hutan akan mengurangi pula insiden dan tingkat keparahan banjir

Berdasarkan pengumpulan data-data tentang isu lingkungan hidup yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut diatas, maka isu lingkungan hidup yang dapat dirumuskan sebagai isu prioritas lingkungan hidup adalah berdasarkan kondisi dan data aktual terbaru yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala yaitu :

1. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kawasan hutan

   Alih fungsi lahan di Kabupaten Barito Kuala berupa ancaman produktivitas pertanian tanaman pangan. Dimana, dengan menurunnya luas lahan hutan dengan jumlah lahan kritis yang tinggi, disertai dengan berubahnya produktivitas pertanian tanaman pangan, Terjadi pada kawasan pertanian dan hutan rakyat yang terkonversi menjadi lahan terbangun untuk pertambangan, perkebunan dan permukiman. Isu ini terkait pengurangan lahan pertanian dan hutan yang berpengaruh terhadap daya dukung pangan, lindung dan air. Meskipun demikian, pertanian menjadi kontributor terbesar PDRB Barito Kuala meskipun pertumbuhannya rendah.

2. Ancaman menurunnya kualitas dan kuantitas air baku

   Menurunnya ketersediaan dan kualitas sumber daya air, pencemaran limbah di badan air. Tingginya pencemaran air, meningkatnya alih fungsi resapan lahan menjadi terbangun mengancam menurunnya kualitas dan kuantitas air permukaan yang merupakan kebutuhan utama bagi pertanian, industri dan manusia untuk kebutuhan sehari- hari.

3. Bencana Alam dan Perubahan Iklim

   Banjir dan angin puting beliung merupakan bencana alam yang berelasi erat dengan perubahan iklim. Dengan karakteristik bentang alam di Kabupaten Barito Kuala, bencana alam di Kabupaten Barito Kuala yang utama adalah banjir, kebakaran dan angin puting beliung. Meningkatnya kerentanan masyarakat akibat dampak perubahan iklim dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kerentanan perubahan iklim terjadi pada kawasan yang rentan bencana terkait iklim seperti longsor, banjir, dan

kekeringan. Sehingga menyebabkan meningkatnya frekuensi dan kerusakan (magnitude) kejadian bencana alam

4. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup

   Meningkatnya lahan permukiman yang tidak diikuti dengan kemampuan pemenuhan layanan sanitasi dan persampahan. Peningkatan limbah cair dan padat serta adanya kemacetan berdampak pada meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah. Selain itu, peningkatan kegiatan industri dan penduduk serta permukiman yang tidak diimbangi layanan sanitasi dan persampahan menimbulkan terjadinya pencemaran air.

A. Sebagai acuan perumusan Isu lingkungan hidup pada laporan IKPLHD Kabupaten Barito Kuala tahun 2022 adalah :

(1) Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air
(2) Pengelolaan Persampahan dan Limbah
(3) Degradasi Lahan
(4) Pencemaran Udara
(5) Kebakaran Hutan dan Lahan

B. Identifikasi Isu peserta diskusi dari unsur OPD, dan Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD)

Dari hasil diskusi dengan pihak pihak terkait seperti dijelaskan diatas maka disepakati beberapa isu menurut persepsi masing – masing intansi / lembaga yang terlibat pada diskusi tersebut untuk tahun 2023, yaitu :

(1) Pengelolaan Persampahan dan Limbah
(2) Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air
(3) Banjir
(4) Degradasi Lahan
(5) Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan pada Tata cara penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah menjelaskan bahwa dalam

proses penetapan isu prioritas harus dirumuskan secara partisipasif serta permasalahan dan isu – isu strategis yang tertuang pada hal tersebut diatas dan dengan berdasar pada ketersediaan data yang didapat serta dengan mempertimbangkan masukan dari peserta forum diskusi maka diolah data hasil kuesioner dari peserta dengan menggunakan metode AHP, sehingga diperoleh 5 (lima) rumusan isu prioritas tersebut meliputi isu isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 :

1. Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air
2. Pengelolaan Persampahan dan Limbah
3. Degradasi Lahan
4. Pencemaran Udara
5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Tabel 3. 1 rekap skoring penentuan Isu Prioritas 2023

Alternatif/Kriteria	LH	DPUPR	DKPP	Distan	DPMPTSP	Disbunnak	Dinkes	DPPKBP3A	Bappelitbang	Disdukcapil	**Hasil**	**Peringkat**
Kuantitas dan Kualitas Air	515	550	510	500	515	480	505	515	450	514	8149	2
Banjir	471	570	535	500	520	535	505	465	485	505	7824	3
Pengelolaan Persampahan dan Limbah	522	540	495	515	520	520	490	515	490	540	8262	1
Degradasi Lahan	475	540	440	520	485	420	450	465	430	495	7765	4
Karhutla	450	540	433	490	515	475	465	510	475	501	7694	5

AHP Analytic Hierarchy Process (EVM multiple inputs)

K. D. Goepel Version 11.10.2017 Free web based AHP software on: http://bpmsg.com

Only input data in the light green fields and worksheets!

n=	5	Number of criteria (2 to 10)	Scale: 1		AHP 1-9
N=	8	Number of Participants (1 to 20)	α: 0,1	Consensus:	87,8%
p=	0	selected Participant (0=consol.)	2 7	Consolidated	

Objective PENETAPAN ISU PRIORITAS IKPLHD KAB. BATOLA Tahun 2023

Author DLH BATOLA

Date 5-Jul-23 Thresh: 1E-07 Iterations: 6 EVM check: 8,7E-08

Table

	Criterion	Comment	Weights	Rk
1	kuan&kualits air	Kuantitas dan kualitas	26,0%	2
2	sampah & limbah	pengelolaan	34,2%	1
3	degradasi lahan		13,3%	4
4	karhutla		7,9%	5
5	Banjir		18,6%	3
6			0,0%	
7			0,0%	
8			0,0%	
9		for 9&10 unprotect the input sheets and expand the	0,0%	
10		question section ("+" in row 66)	0,0%	

Result

Eigenvalue lambda: 5,781

Consistency Ratio 0,37 GCI: 0,61 CR: 17,4%

Gambar 3. 3. Tabel Hasil Output AHP Penetapan Isu Prioritas

Matrix

	1 kuan&kualits air	2 sampah & limbah	3 degradasi lahan	4 karhutla	5 Banjir	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	normalized principal Eigenvector
1 kuan&kualits air	-	1/3	1 1/2	2 2/7	4	-	-	-	-	-	25,96%
2 sampah & limbah	3 2/7	-	1 1/3	3 1/9	2	-	-	-	-	-	34,20%
3 degradasi lahan	2/3	3/4	-	2	2/7	-	-	-	-	-	13,33%
4 karhutla	4/9	1/3	1/2	-	1/2	-	-	-	-	-	7,87%
5 Banjir	1/4	1/2	3 3/5	2 1/6	-	-	-	-	-	-	18,65%
6 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
10 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Gambar 3. 4. Matrix Output AHP Penetapan Isu Prioritas

3.2. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu prioritas merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Sebuah isu akan menjadi prioritas yakni apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam jangka panjang. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di daerah, dan prosesnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya menjawab isu prioritas lingkungan guna mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan digunakan 4 (empat) strategi pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut;

- Pro Cooperation :
  Pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi bersatu padu mengatasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala.
- Pro Green Development :
  (Adanya komitmen bersama mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan di semua sektor), ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
- Pro Green Law Enforcement :
  (Penegakan hukum yang berpihak pada lingkungan hidup melalui Penguatan aturan dan jejaring aparatur penegak hukum lingkungan).
- Green Regulation & Budgeting :
  (Adanya kebijakan dan pendanaan yang pro lingkungan) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten.

Berbagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di Kabupaten Barito Kuala dengan berbagai inovasi diantaranya Kegiatan peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas udara, pengelolaan sampah secara terpadu serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan diselenggarakan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif harus dilakukan ***secara bersama antara pihak SKPD terkait / pemerintah, masyarakat dan dunia usaha guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.***

Permasalahan lingkungan yang menjadi isu utama/umum di dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Pencemaran Sungai Barito
2. Kebakaran Hutan Dan Lahan
3. Berkurangnya Lahan Pertanian
4. Menurunnya Produksi Bio Massa Lahan Pertanian
5. Meningkatnya Limbah Domestik
6. Berkurangnya Keanekaragaman Hayati
7. Pencemaran Tanah Dan Air Dari Penggunaan Pestisida Dan Herbisida Yang Berlebihan
8. Meningkatnya Pencemaran Udara
9. Intrusi Air Laut Yang Menyebabkan Pencemaran Sumber Air Baku
10. Bencana banjir di beberapa wilayah

Berdasarkan isu prioritas di atas dikerucutkan lagi menjadi empat isu prioritas penting, meliputi :

1. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air bersifat kumulatif dan tergantung pada badan air atau badan tanah yang digunakan untuk membuangnya.

(*Pressure*/Tekanan) Pencemaran air di Kabupaten Barito Kuala tekanan berasal dari beberapa hal:

a. Terdapat kegiatan usaha yang telah mempunyai Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) tetapi belum dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat menambah beban pencemaran yang ada disungai, misalnya dari limbah industri dan rumah tangga umum.
b. Adanya kegiatan usaha yang belum mempunyai IPAL individu maupun komunal misalnya kegiatan industri, domestik, pasar umum, warung makan, pertanian (penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan), hotel, pertokoan, puskesmas, yang membuang limbah langsung ke badan sungai.
c. Rendahnya kesadaran masyarakat yang masih melakukan pembuangan limbah cair dan limbah padat langsung kebadan sungai.
d. Aktivitas pertanian yang menggunakan pestisida berlebihan yang terdapat di wilayah bagian hulu Kabupaten Barito Kuala apabila tercuci oleh air hujan dapat mengakibatkan pencemaran pada tanah dan air sungai.

Pencemaran air permukaan di Kabupaten Barito Kuala akan mempunyai Tekanan terhadap komponen lingkungan air tanah dangkal dan komponen lingkungan tanah karena badan penerima buangan limbah cair tersebut langsung ke badan tanah. Air tanah (*ground water*) akan mengalami pencemaran berasal dari penanaman limbah cair atau padat

tanpa dilakukan pengolahan serta berasal dari limbah domestik (*septic tank*).

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan pencemaran air :

1. Pengambilan dan pengujian sampel air secara rutin.
2. Membuat himbauan/sosialisasi larangan membuang sampah kesungai.
3. Memperketat perizinan Izin Pembuangan Limbah Cair.

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan lain dipinggiran sungai yang menyebabkan peningkatan pencemaran Bakteri E.Coli sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala melakukan kajian dan penelitian tentang penggunaan dan manfaat Tripikon-S.

2. Pencemaran Udara

Pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kegiatan industri dan transportasi yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara ambient pada lapisan atmosfer. Penurunan udara ambient tersebut karena telah terjadinya pencemaran udara yang disebabkan oleh masuknya zat pencemar primer kedalam udara dalam jumlah dan waktu serta kondisi yang dapat merusak lingkungan, serta membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Zat pencemar primer diantaranya sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon dan partikulat. Sebagian besar zat pencemar udara dihasilkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran sampah, dekomposisi bahan organic dari pembabatan hutan dan lahan, hasil samping pertanian, peternakan, dan industri. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyebaran polutan/zat pencemar adalah : arah angin, kecepatan angin, tekanan udara, suhu udara, curah hujan dan topografi. Mutu udara ambient yang merupakan kadar, zat, energi dan/atau komponen lain

yang ada di udara bebas, dipengaruhi oleh sumber emisi bergerak maupun tidak bergerak sebagai hasil proses pembangunan. Sumber emisi bergerak yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala berupa kendaraan bermotor (mobil, bus, truk, sepeda motor, kapal/perahu motor). Sedangkan sumber tidak bergerak berupa kegiatan industri, domestik, peternakan, pertanian, dan kegiatan Tempat Pembuangan Sampah (TPA). Kecenderungan pencemaran udara (*Pressure*/tekanan) terutama di wilayah perkotaan di Kabupaten Barito Kuala khususnya Kecamatan Marabahan, Kecamatan Alalak dan Kecamatan Tamban yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya polutan udara dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat baik bisnis, jasa, perdagangan dan kegiatan industri, selain itu juga bertambahnya jumlah kendaraan bermotor (mobil, bus, truk, sepeda motor) yang pertumbuhanya sangat pesat saat ini. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor (mobil, bus, truk, sepeda motor) baik kendaraan pribadi, angkutan umum maupun transportasi industri berdampak pada meningkatnya paparan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Hal tersebut menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama di lokasi padat lalu lintas.

3. Pencemaran Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk (*Pressure* / Tekanan) di Kabupaten Barito Kuala maka semakin besar timbulan sampah yang dihasilkan. Selain itu pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam. Penghasil sampah di Kabupaten Barito Kuala berasal dari timbulan sampah yang bersumber dari kegiatan: (1) Industri besar dan kecil, (2) Rumah Tangga, (3) Pasar, Pertokoan, rumah makan dan Terminal,(4) Pendidikan, (5) Perkantoran (6) Hotel dan

Penginapan, (7) Rumah Sakit dan Puskesmas, (8) Peternakan, (9)Pertanian, (10) Perkebunan dan (11) dan sebagainya.

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat dibagi dua yaitu:

(a). Sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sisa makanan, buah-buahan. Sampah jenis ini dapat terurai (membusuk/hancur) secara alami.

(b). Sampah anorganik yaitu sampah yang berupa plastik, kaleng, kain, besi, dll. Sampah jenis ini tidak dapat terurai secara alami.

Sebagai tidak lanjut Peraturan Presiden Nomor 97 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga maka diterbitkan Peraturan Bupati Nomor : 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Barito Kuala Mengenai Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengurangan penggunaan kantong plastik dan Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengurangan Sampah Plastik. Tekanan /*Pressure* tentang permasalahan sampah di Kabupaten Barito Kuala berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah penduduk, yang secara otomatis akan meningkatkan jumlah timbulan sampah baik padat maupun cair. Hal ini akan diperparah lagi dengan terbatasnya dan tidak tersedianya tempat pembuangan sampah yang baik dan juga penggelolaan sampah rumah tangga yang masih kurang baik. Hal ini akan berimplikasi pada pola kebiasaan masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan bukan pada tempatnya baik di sungai maupun tempat timbunan sampah yang bukan pada tempat yang seharusnya. Dampak nyata akibat adanya permasalahan sampah yang tidak terkelola dengan baik adalah timbulnya bau yang menggangu, sumber sarang penyakit dan merusak estetika lingkungan hidup. Selama ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Pada umumnya

masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*) yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Oleh karena itu paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk dan bahan baku industri. Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan lingkungan (limbah dan sampah) dan aduan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Sementara *kebakaran* adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami ialah kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang menimbulkan panas dan percikan api. Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang hampir setiap tahun selalu berulang.

Di Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan luas lahan pertanian lebih dari 113.674 Ha, Ada kearifan lokal di Kabupaten Barito Kuala yang dilakukan secara turun temurun, dimana masyarakat membakar jerami dan rumput liar lainnya sehabis panen pada lahan individu, atau kalau diprediksi setiap individu mempunyai lahan 1,5 Ha yang masing-masing secara bersamaan yang mereka bakar setiap panen hal ini tentunya akan menyebabkan polusi udara, belum lagi hal ini juga bisa menyebabkan

lahan lainnya ikut terbakar. Berbagai upaya untuk menekan jumlah kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan baik secara preventif maupun penegakan hukum dengan segala perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dari Pusat sampai tingkat Provinsi. Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak ekosistem lingkungan hidup, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah Peraturan-peraturan yang mendasari pelarangan bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan antara lain termuat dalam :

1. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
3. Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di provinsi Kalimantan Selatan.

Inilah yang mendasari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan pencegahan dan pengendalian serta tindakan dalam mengantisifasi Kebakaran Lahan dan Hutan. Di Kabupaten Barito Kuala Kebakaran Lahan dan Hutan sangat di pengaruhi oleh dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pada saat musim hujan tidak ada kita temukan Kebakaran Lahan dan Hutan namun pada saat kemarau sering terjadi Kebakaran Lahan dan

Hutan yang biasanya terjadi pada bulan Juli sampai bulan Desember. Di Kabupaten Barito Kuala Kebakaran Lahan dan Hutan terjadinya tidak setiap tahun. Kebakaran Lahan dan Hutan terjadi saat musim kemarau yang panjang yang kejadian lima tahunan. Untuk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 tidak terpantau titik Hot Spot melalui satelit Anoa.

5. Banjir

Banjir melanda di Kabupaten Barito Kuala, wilayah Kecamatan Jejangkit, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hampir semua rumah warga terendam, ada 18.683 KK kepala keluarga 59.196 Jiwa yang rumahnya terendam dan terdampak karena aktivitas terganggu, 18 Orang Meninggal Dunia/ 18.880 Rumah, 249 Tempat Ibadah, 76 Sekolah, 63 Kantor, 1 Jembatan. Untuk akses keluar dan masuk di wilayah Jejangkit Muara. Sebanyak Tujuh desa masih tergenang banjir di wilayah Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batola genangan banjir ini berdampak pada ribuan jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Batola dari pengecekan timnya di lokasi kondisi terakhir untuk debit air di wilayah Jejangkit tidak ada penurunan sama sekali, hal ini di karenakan kiriman air dari kabupaten tetangga serta pasang surutnya air di Sungai Barito. Hampir semua warga 7 desa di Kecamatan Jejangkit yang terdampak. Cuma untuk distribusi bantuan tentunya ada prioritas dan itu disandingkan dengan data dari Kantor Kecamatan,. Pendistribusian bantuan ini terkendala karena banyaknya warga yang merasa terdampak dan menderita sebagai korban banjir juga, tapi ini masih validasi korban banjir dan bantuan masih dalam proses. Sedangkan, Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batola, berspekulasi ada sekitar tiga ribu hektar lahan pertanian yang terendam akibat banjir ini. Ada 7 Desa di Kecamatan Jejangkit dan 6 Desa di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, yang mengalami banjir, apabila genangan air di areal pertanian itu belum surut hingga April, maka

berpotensi gagal tanam akan dialami petani di dua kecamatan tersebut. Banjir yang menerjang Barito Kuala (Batola) merendam 3.000 hektare lahan pertanian. Diketahui di wilayah tersebut menjadi daerah penghasil padi dan cabai. Kepala Pelaksana Harian BPBD Barito Kuala menuturkan banjir tahun 2023 tidak separah pada awal tahun 2021. Namun, kondisi ini tetap menggangu aktivitas warga. Berdasarkan data BPBD ada tujuh desa di Jejangkit terendam banjir. Selain pemukiman warga, sekitar 3.000 hektare lahan pertanian juga terendam. Sebelumnya, diketahui banjir merendam dia wilayah di Batola yakni Kecamatan Jejangkit dan Mandastana.

B. ANALISIS DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi publik tentang lingkungan hidup dan perbaikan manajemennya maka Kabupaten Barito Kuala perlu dilakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Kerangka laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala didasarkan pada konsep hubungan sebab akibat dimana kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan (*Pressure*) dan menyebabkan perubahan. pada sumber daya alam dan lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas (*State*). Selanjutnya stakeholder baik pemerintah, kalangan industri, LSM, lembaga penelitian maupun masyarakat umum melakukan reaksi terhadap perubahan ini baik melakukan adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai kebijakan, program kerja maupun kegiatan (*Social Respon*). Hal yang terakhir merupakan umpan balik terhadap tekanan melalui kegiatan manusia. Analisis terhadap tekanan yang muncul, kondisi eksisting yang terjadi berikut dampaknya serta respons yang dilakukan terhadap tekanan tersebut, kemudian dikenal sebagai pendekatan D-P-S-I-R (Driver Pressure State Impact Respons). Tekanan akan membawa perubahan pada kondisi/keadaan lingkungan yang pada gilirannya kembali mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kondisi lingkungan mencakup kualitas air, udara,

lahan, sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan warisan budaya. Respon masyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda, terbentuk dalam bentuk aturan/ legislasi, teknologi baru, perubahan nilai–nilai di masyarakat, obligasi/ kewajiban internasional dan reformasi ekonomi. Respon sosial ini mempengaruhi baik keadaan lingkungan (*state*) maupun aktivitas manusia (tekanan/*pressure*). Kemampuan merespon tergantung pada kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia mengenai keadaan (*state*) dan tekanan (*pressure*) lingkungan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Barito Kuala memfasilitasi pemrosessan serta pentransformasian data ke dalam informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, data biofisik dan data sosio-ekonomis haruslah dikumpulkan dan diintegrasikan, serta dianalisis untuk dapat mempresentasikan dan menganalisis keadaan lingkungan secara lebih menyeluruh dan multi sektoral. Kemampuan untuk mengevaluasi secara akurat perubahan lingkungan sangat bergantung pada adanya data dasar dimana perubahan itu akan dibandingkan. Data dasar tersebut dibagi dalam informasi biofisik serta sosio- ekonomis :

- Data biofisik meliputi data atmosfer, topografi, geologi, hidrologi, tanah, serta flora dan fauna.
- data sosio-ekonomi meliputi data populasi, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, keterbatasan administrative, tata guna lahan, perdagangan, infrastruktur, serta pemukiman.

3.2.1. Pengelolaan Persampahan dan Limbah

Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar berbanding lurus dengan jumlah timbulan sampah dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 mencapai 98,79 ton/hari. Terhitung dari tahun 2019 s/d tahun 2023, timbulan sampah di Kabupaten Barito Kuala telah mengalami peningkatan sebesar 1,48 ton/hari atau 1,5%. Peningkatan timbulan sampah di

Kabupaten Barito Kuala belum diimbangi dengan jumlah volume sampah yang terangkut ke TPA. Keterbatasan fasilitas dan proses pengangkutan sampah yang cukup jauh menyebabkan beberapa wilayah tidak mendapat pelayanan sampah sehingga banyak dijumpai timbunan sampah di sekitar jalan. Kondisi tersebut apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi mencemari lingkungan terutama perairan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, sampah yang tidak terkelola akan mengurangi nilai estetika di wilayah tersebut.



Gambar 3. 5. Lokasi TPA Tabing Rimbah Kab. Barito Kuala

Peningkatan limbah cair di Kabupaten Barito Kuala juga telah terjadi peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Limbah cair non domestik di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 mencapai 803 m^3/hari, sedangkan limbah cair domestik mencapai 30.571 m^3/hari. Terhitung dari tahun 2017 s/d tahun 2023, limbah cair domestik di Kabupaten Barito Kuala telah mengalami peningkatan sebesar 1.363 m^3/hari atau 4,46%. Peningkatan limbah cair di Kabupaten Barito Kuala dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan, terutama sungai yang

menjadi tempat pembuangan limbah cair domestik bagi masyarakat di bantaran sungai.

3.2.2. Kuantitas dan Kualitas Air

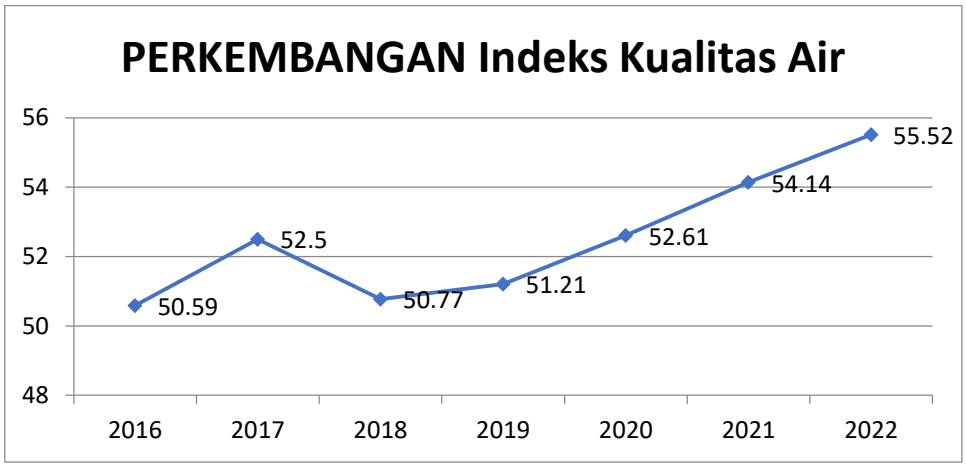
Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari juga termasuk untuk kebutuhan sanitasi yang menghasilkan air limbah. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan suatu kota/kabupaten berakibat pula pada pola perubahan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, dengan luas lahan yang tetap akan mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan semakin berat. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari pertanian, industri dan kegiatan rumah tangga akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air. Permasalahan air di Kabupaten Barito Kuala tidak hanya terletak pada pengelolaan potensi sumber air permukaan (kuantitas) baik sungai dan waduk/danau. Namun, dari hasil pemantauan yang telah dilakukan selain permasalahan kuantitas juga terdapat permasalahan kualitas dari air permukaan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala. Air Sungai yang berada di Kabupaten Barito Kuala dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar sungai sebagai tempat pembuangan air limbah dari aktivitas rumah tangga seperti MCK, industri dan limpasan dari aktivitas pertanian. Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan air limbah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai. Kondisi sungai yang tercemar di Kabupaten Barito Kuala tentu berpengaruh pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Berdasarkan hasil analisis kualitas air sungai Kabupaten Barito Kuala tahun 2021, nilai IKA Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan dan peningkatan. Nilai IKA tahun 2018 sempat mengalami penurunan, namun mulai pada tahun 2019, nilai IKA Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Peningkatan nilai IKA juga disebabkan oleh perubahan penggunaan metode

perhitungan IKA. tabel nilai IKA Kabupaten Barito Kuala per sungai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2. tabel index kualitas air Kabupaten Barito Kuala tahun 2022

Judul : Indeks Kualitas Air Sumber
Data : Dinas Lingkungan Hidup
Per Tanggal : 01 Agustus 2022

Lokasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Barito Kuala	50,59	52,5	50,77	51,21	52,61	54,14	55,52



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai IKA rata – rata berada dalam predikat sedang dengan nilai 52,48. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Barito Kuala sebagian besar memiliki predikat tercemar ringan.

3.2.3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang sudah menjadi bencana rutin setiap tahun terutama musim kemarau menyebabkan pencemaran udara yang berakibat pada terganggunya kesehatan masyarakat. Selain itu, dampak kebakaran hutan juga menimbulkan dampak cukup besar dalam hal kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas lahan, perubahan iklim mikro maupun global, serta terganggunya transportasi darat, air, maupun udara.



Gambar 3. 6. Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Kuala

Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 tersebar di beberapa Kecamatan dan lokasi dengan kejadian lahan terbakar sebanyak 33 kali kejadian dengan terletak di 7 lokasi kecamatan. Kawasan yang memiliki resiko kebakaran tinggi terletak di Kecamatan Kuripan, Jejangkit, Barambai, Mandastana dan Wanaraya. Hutan dan lahan yang kering akibat musim kemarau menjadi penyebab besarnya luasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, aktivitas pembakaran jerami oleh petani saat panen juga merupakan salah satu penyebab kebakaran hutan di Kabupaten Barito Kuala, terutama di wilayah yang mengandung gambut. Tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat di sekitar hutan yang masih rendah merupakan faktor yang dapat turut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan lebih diperparah lagi oleh banyaknya perambah hutan yang melakukan penebangan kayu tanpa mengindahkan kaidah lingkungan.

Tabel 3. 3. kejadian kebakaran hutan dan lahan per tahun

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (2018)	27			
Jumlah Luas Keseluruhan Hutan dan Lahan Terbakar (2018) (ha)	221,8			
Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan		21	2	0
Jumlah Luas Hutan Terbakar		84,25	80,02	0
Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan		87	19	7
Jumlah Luas Lahan Terbakar		334,9	53,98	38,5

Sumber :satudata prov. Kalsel, 2023

3.2.4. Pencemaran Udara

Pencemaran udara di Kabupaten Barito Kuala berkaitan erat dengan permasalahan transportasi. Ketersediaan layanan transportasi yang ada di Kabupaten Barito Kuala dinilai masih belum mampu mencukupi tingginya kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan yang berada di Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan analisis data jumlah kendaraan tahun 2020 dan 2021, telah terjadi peningkatan kendaraan yaitu 2,63 % atau 122 unit. Hal tersebut diduga karena kurangnya pelayanan transportasi umum perkotaan memicu peningkatan jumlah kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas semakin tinggi dan meningkatkan jumlah polutan yang memicu peningkatan pencemaran udara yang berasal dari emisi gas buang kendaraan/asap kendaraan bermotor. Peningkatan pencemaran udara juga ditambah akibat penambahan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan panjang dan penambahan jalan baru yang menyebabkan muncul persoalan kemacetan dan tidak teraturnya lalu lintas. Kualitas udara di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat melalui nilai polutan. Nilai polutan dapat memberikan gambaran mengenai pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Nilai polutan Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 3.7.



Judul : Indeks Kualitas Udara
Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup
Per Tanggal : 01 Agustus 2022

Lokasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Barito Kuala	83,8	92,73	89,28	92,26	92,19	92,87	92,29

Gambar 3. 7. Gambaran Kualitas Udara Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan gambar dan tabel diatas, nilai kualitas udara di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 berada pada nilai 92,29 dengan predikat baik. Meskipun begitu, penurunan kualitas udara di tahun-tahun berikutnya perlu diwaspadai dikarenakan semakin bertambahnya jumlah dan pengguna transportasi.

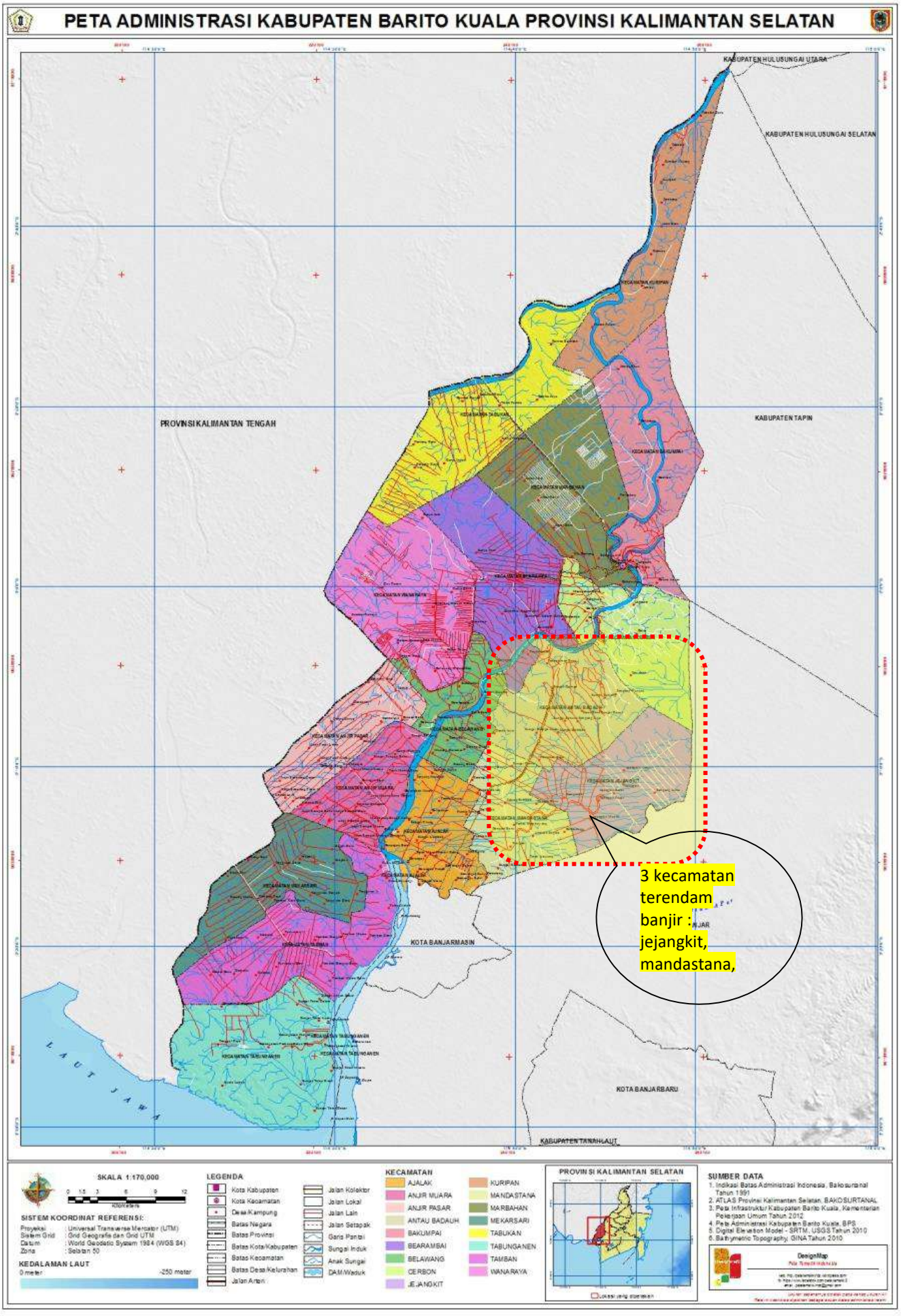
3.2.5. Banjir

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu dari 13 Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan wilayah dataran rendah yang dilewati oleh sungai besar seperti Aliran Sungai Barito membelah jantung ibukota Kabupaten Barito Kuala, yaitu Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Tamban, Sungai Barito ini punya empat cabang, yaitu sungai Kuripan, Sungai Marabahan, Sungai Tabukan dan Sungai Alalak. Rendahnya letak Kabupaten Barito Kuala dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik. Berdasarkan kondisi

tersebut, Kabupaten Barito Kuala mengalami bencana banjir setiap tahunnya. Barito Kuala memiliki beberapa delta yang disebut pulau. Pulau tersebut terdapat di tengah-tengah sungai Barito yang membelah kabupaten Barito Kuala. Sungai Barito lebarnya lebih dari 1 km. Delta tersebut antara lain:

- Pulau Kembang (hutan wisata, habitat kera ekor panjang)
- Pulau Bakut (terdapat jembatan Barito)
- Pulau Kaget (cagar alam, habitat kera hidung panjang, yaitu bekantan)
- Pulau Sugara (pulau yang berpenduduk)
- Pulau Alalak (pulau yang berpenduduk)
- Pulau Sewangi (pulau yang berpenduduk)

Bencana Banjir di Kabupaten Barito Kuala yang tercatat pada tahun 2021 merupakan bencana banjir yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Barito Kuala, banjir yang terjadi pada tahun 2021 merendam sebanyak 6 kecamatan yaitu kecamatan Kuripan, Cerbon, Rantau Badauh, Belawang, Mandastana dan Alalak dengan jumlah desa terbanyak 4 desa di kecamatan Tabukan dan 1 desa di Kecamatan Rantau Badauh. Bencana Banjir di Kabupaten Barito Kuala pada umumnya terjadi karena faktor cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut. Selain itu, saluran drainase yang belum optimal di beberapa lokasi dan aliran sungai yang sempit akibat tumpukan sampah juga menjadi faktor penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Barito Kuala.


PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN HULUSUNGAI UTARA
KABUPATEN HULUSUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN TAPIN
KOTA BANJARMASIN
KOTA BANJARBARU
KABUPATEN TANAHLAUT
LAUT JAWA
3 kecamatan terendam banjir : jejangkit, mandastana,
SKALA 1:170,000
SISTEM KOORDINAT REFERENSI:
KEDALAMAN LAUT
LEGENDA
KECAMATAN
AJALAK
ANJIR MUARA
ANJIR PASAR
ANTAU BADAUH
BAKUMPAI
BERAMBAI
SELAWANG
CERBON
JEJANGKIT
KURIPAN
MANDASTANA
MARABAHAN
MEKARSARI
TABUKAN
TABUNGANEN
TAMBAN
WANARAYA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SUMBER DATA





Ilustrasi Banjir di Batola Rendam 3.000 Hektare Lahan Pertanian (Foto: Antara)

Gambar 3. 8. Banjir di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Dari Data BPBD Kabupaten Barito Kuala banjir merendam puluhan desa di delapan kecamatan. Yakni Jejangkit, Mandastana, Kuripan, Tabukan, Bakumpai, Alalak, Rantau Badauh dan Handil Bakti.Tercatat ada 18.862 keluarga atau 54.199 jiwa terdampak bencana banjir di Barito Kuala, 671 rumah terendam. Sebanyak 9.177 warga terpaksa pengungsi.Wilayah hilir daerah aliran sungai (DAS) Barito, Kabupaten Barito Kuala, jadi daerah terparah dilanda bencana banjir di Kalimantan Selatan. Banjir yang sudah berlangsung tiga pekan tersebut merendam tujuh kecamatan, termasuk kawasan transmigrasi dan Kampung Inggris serta agropolitan jeruk. Sudah tiga minggu banjir merendam wilayah Barito Kuala. Kawasan pertanian dan agropolitan banyak mengalami kerusakan.

Tabel 3. 4. Lokasi banjir kabupaten Barito Kuala

NO	JENIS BENCANA	HARI/TGL/BLN	WAKTU	BANYAKNYA (Ha)/ KK/ JW	LOKASI KEJADIAN	KORBAN/ BANGUNAN	BANTUAN DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**BANJIR**	Jumat, 15 Januari 2021 s.d 26 Februari 2021	-	18.683 KK / 59.196 Jiwa	Kec. Cerbon, Kec.belawang, Kec. Jejangkit, Kec. Rantau Badauh, kec. Mandastana, Kec. Alalak	18 Orang Meninggal Dunia/ 18.880 Rumah, 249 Tempat Ibadah, 76 Sekolah, 63 Kantor, 1 Jembatan	Membuka Posko Induk Gabungan di Mandastana

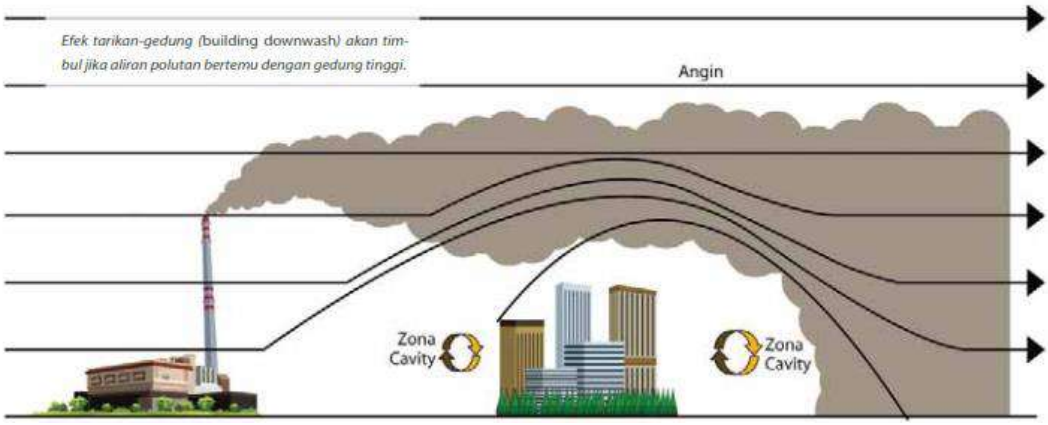
Kecamatan *Subdistrict*	Banjir/*Flood*		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tabunganen	–	–	–
Tamban	–	–	–
Mekarsari	–	–	–
Anjir Pasar	–	–	–
Anjir Muara	–	–	–
Alalak	–	–	–
Mandastana	–	–	–
Jejangkit	–	–	–
Belawang	–	–	–
Wanaraya	–	–	–
Barambai	–	–	–
Rantau Badauh	–	–	1
Cerbon	–	–	–
Bakumpai	–	–	–
Marabahan	–	–	–
Tabukan	–	–	4
Kuripan	–	–	–
Barito Kuala	–	–	5

https://baritokualakab.bps.go.id

NO	NAMA KECAMATAN	KEJADIAN BENCANA
		BANJIR
1	ALALAK	1
2	ANJIR MUARA	
3	ANJIR PASAR	
4	BAKUMPAI	
5	BARAMBAI	
6	BELAWANG	1
7	CERBON	1
8	JEJANGKIT	1
9	KURIPAN	
10	MANDASTANA	1
11	MARABAHAN	
12	MEKARSARI	
13	RANTAU BADAUH	1
14	TABUKAN	
15	TAMBAN	
16	TABUNGANEN	
17	WANARAYA	
JUMLAH		**6**

3.2.6. Pencemaran Udara

Pencemaran Udara adalah proses di mana kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia sama buruknya dengan pencemaran udara di ruang terbuka.



Gambar 3. 9. Ilustrasi Aliran Polutan di Udara

Sumber polusi udara

Pencemar udara dibedakan menjadi dua yaitu, pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Belakangan ini tumbuh keprihatinan akan

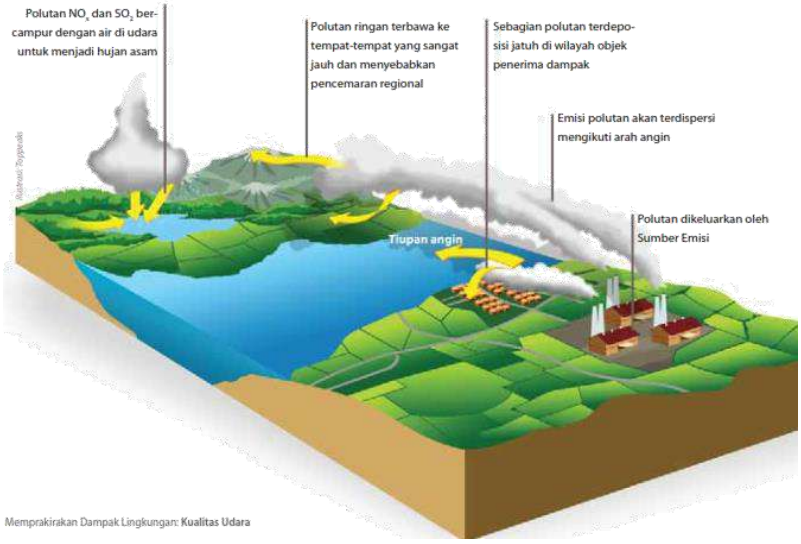
efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global yg memengaruhi;

Aktivitas manusia

- Transportasi
- Industri
- Pembangkit listrik
- Pembakaran (perapian, kompor, furnace, insinerator dengan berbagai jenis bahan bakar) termasuk pembakaran biomassa secara tradisional.

Gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC Sumber alami :

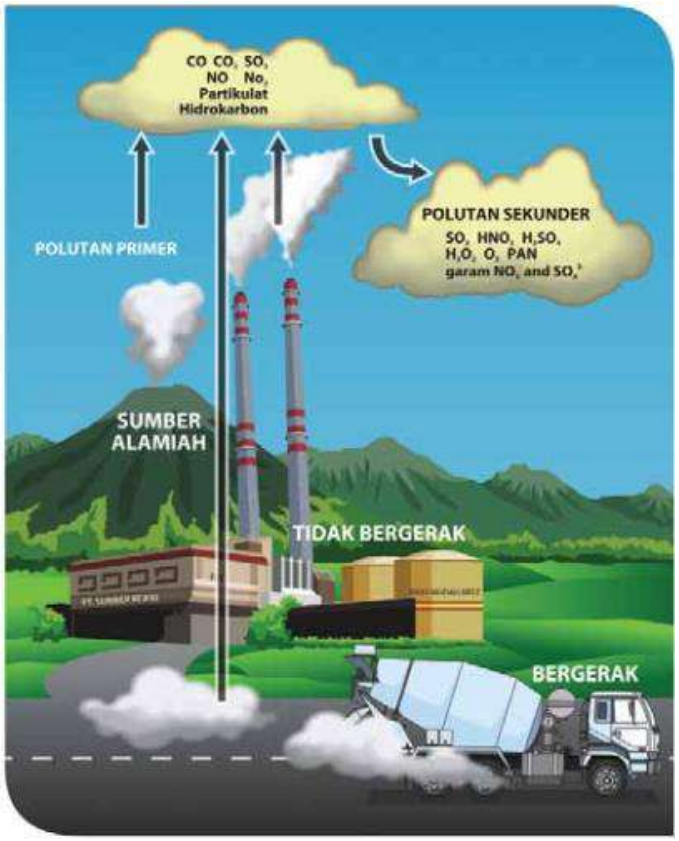
- Gunung berapi
- Rawa-rawa
- Kebakaran hutan
- Denitrifikasi
- Dalam kondisi tertentu, vegetasi dapat menghasilkan senyawa organik volatil yang signifikan yang mampu bereaksi dengan polutan antropogenik membentuk polutan sekunder



Gambar 3. 10. Ilustrasi Polusi Udara dari Gas Buang Pabrik

Sumber-sumber lain

- Transportasi
- Kebocoran tangki gas
- Gas metana dari tempat pembuangan akhir sampah
- Uap pelarut organik
- Jenis-jenis bahan pencemar udara (polutan)
- karbon monoksida
- nitrogen oksida
- sulfur oksida
- CFC
- hidrokarbon
- senyawa organik volatil
- Partikulat
- Radikal bebas



Gambar 3. 11. Ilustrasi Polusi Udara dari Sumber-sumber Lain

Dampak kesehatan

Substansi pencemar yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh bergantung kepada jenis pencemar. Partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), termasuk di antaranya, asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Beberapa zat pencemar dikategorikan sebagai toksik dan karsinogenik. Diperkirakan dampak pencemaran udara di Jakarta yang berkaitan dengan kematian prematur, perawatan rumah sakit, berkurangnya hari kerja efektif, dan ISNA pada tahun 1998 senilai dengan 1,8 triliun rupiah dan akan meningkat menjadi 4,3 triliun rupiah pada tahun 2015.

Dampak terhadap tanaman

Tanaman yang tumbuh di daerah yang mengalami pencemaran udara yang tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis.

Hujan asam

- pH biasa air hujan adalah 5,6 karena adanya CO_2 di atmosfer. Pencemar udara seperti SO_2 dan NO_2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini antara lain:
- Mempengaruhi kualitas air permukaan
- Merusak tanaman

- Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga memengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan, Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan



Suatu rencana kegiatan dapat saja memiliki lebih dari satu sumber emisi (multiple sources). Operasi kegiatan pertambangan, misalnya, memiliki beberapa aktivitas sumber emisi. Contohnya, komponen kegiatan peledakan guna menyingkirkan lapisan tanah permukaan, komponen kegiatan pengangkutan batuan (ore) dengan menggunakan alat berat dan truk pengangkut, komponen kegiatan penggerusan batuan, dan komponen kegiatan ekstraksi mineral dari batuan tersebut.

Gambar 3. 12. Contoh Berbagai Aktivitas dengan Sumber Emisi

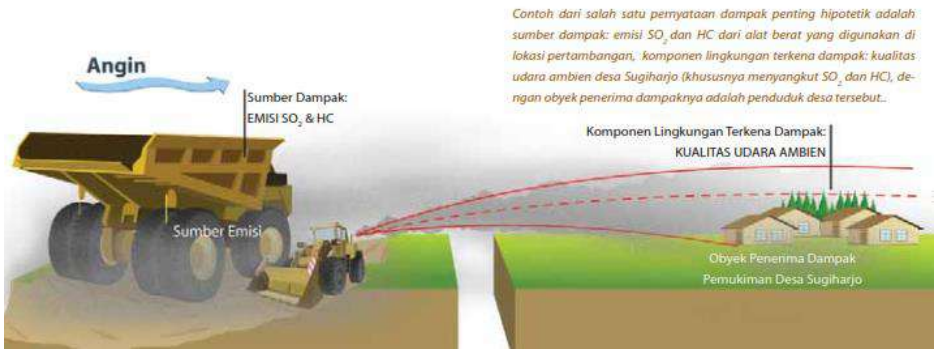
Efek rumah kaca

Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO_2, CFC, metana, ozon, dan N_2O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global.

Dampak dari pemanasan global adalah:

- Peningkatan suhu rata-rata bumi
- Pencairan es di kutub
- Perubahan iklim regional dan global
- Perubahan siklus hidup flora dan fauna
- Kerusakan lapisan ozon

Lapisan ozon yang berada di stratosfer (ketinggian 20–35 km) merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon (O_3) terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Dampak asap tebal akibat Kebakaran hutan lahan yang terjadi di daerah Barito Kuala maupun kiriman luar daerah ke Barito Kuala, di lihat dari hasil pengukuran udara di dua lokasi yakni Bundaran Bungur Kecamatan Bungur dan Bundaran Sirang Pitu Kecamatan Barito Kuala Utara dimana kualitas udara Barito Kuala untuk parameter debu TSP, parameter Nitrogen Dioksida ($N0_2$), Parameter Sulfur Dioksida (SO_2), dan Parameter Oksidan (O_3). Melihat dari hasil lab untuk parameter gas itu belum melebihi baku mutu yang ditetapkan tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hasil lab Parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) nilainya 76 ug/Nm^3. Parameter Sulfur Dioksida (SO_2) dengan nilai <112,1 ug/m^3. Dan Parameter Carbon Oksida (CO) dengan nilai 3.287 ug/Nm^3. Parameter tersebut merupakan pemantauan rutin yang dilakukan di lokasi Area Padat Transportasi (Terminal Taksi Handil Bakti), Area Perkantoran (Kantor Bupati Barito Kuala) dan Area Pemukiman (Handil Bakti, Komp. Kemuning Indah) selama 1 jam



Gambar 3. 13. Ilustrasi Komponen Lingkungan Terkena Dampak Kualitas Udara Ambien

3.2.7. Degradasi Lahan

Degradasi lahan adalah proses di mana kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Perubahan kondisi lingkungan tersebut cenderung merusak dan tidak diinginkan.Bencana alam tidak termasuk faktor yang mempengaruhi degradasi lahan, tetapi beberapa bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan merupakan hasil secara tidak langsung dari aktivitas manusia sehingga dampaknya bisa disebut sebagai degradasi lahan. Degradasi lahan memiliki dampak terhadap produktivitas pertanian, kualitas lingkungan, dan memiliki efek terhadap ketahanan pangan. Diperkirakan hingga 40% lahan pertanian yang ada di dunia saat ini telah terdegradasi. Jenis degradasi lahan Sejak berabad-abad jenis degradasi lahan yang terjadi diantaranya disebabkan oleh erosi air, angin, dan mekanis; degradasi secara kimiawi dan biologi. Empat jenis degradasi lainnya telah muncul pada saat ini, yaitu:

- pencemaran akibat aktivitas pertanian, industri, pertambangan, dan aktivitas komersial
- hilangnya lahan yang mampu ditanami akibat pembangunan habitat manusia
- radioaktif antropogenik, umumnya tidak disengaja
- cekaman lahan akibat konflik bersenjata

Secara rinci ada 36 jenis degradasi lahan yang semuanya disebabkan oleh manusia. Penyebab Degradasi lahan merupakan masalah serius yang sebagian besar terkait dengan aktivitas pertanian. Penyebab utama termasuk:

- Pembersihan lahan, seperti tebang habis dan deforestasi
- Hilangnya nutrisi tanah secara permanen akibat praktik pertanian yang kurang baik
- Penggembalaan hewan berlebih
- Irigasi yang tidak baik dan pengambilan air tanah berlebih
- Rebakan kota dan pembangunan usaha komersial

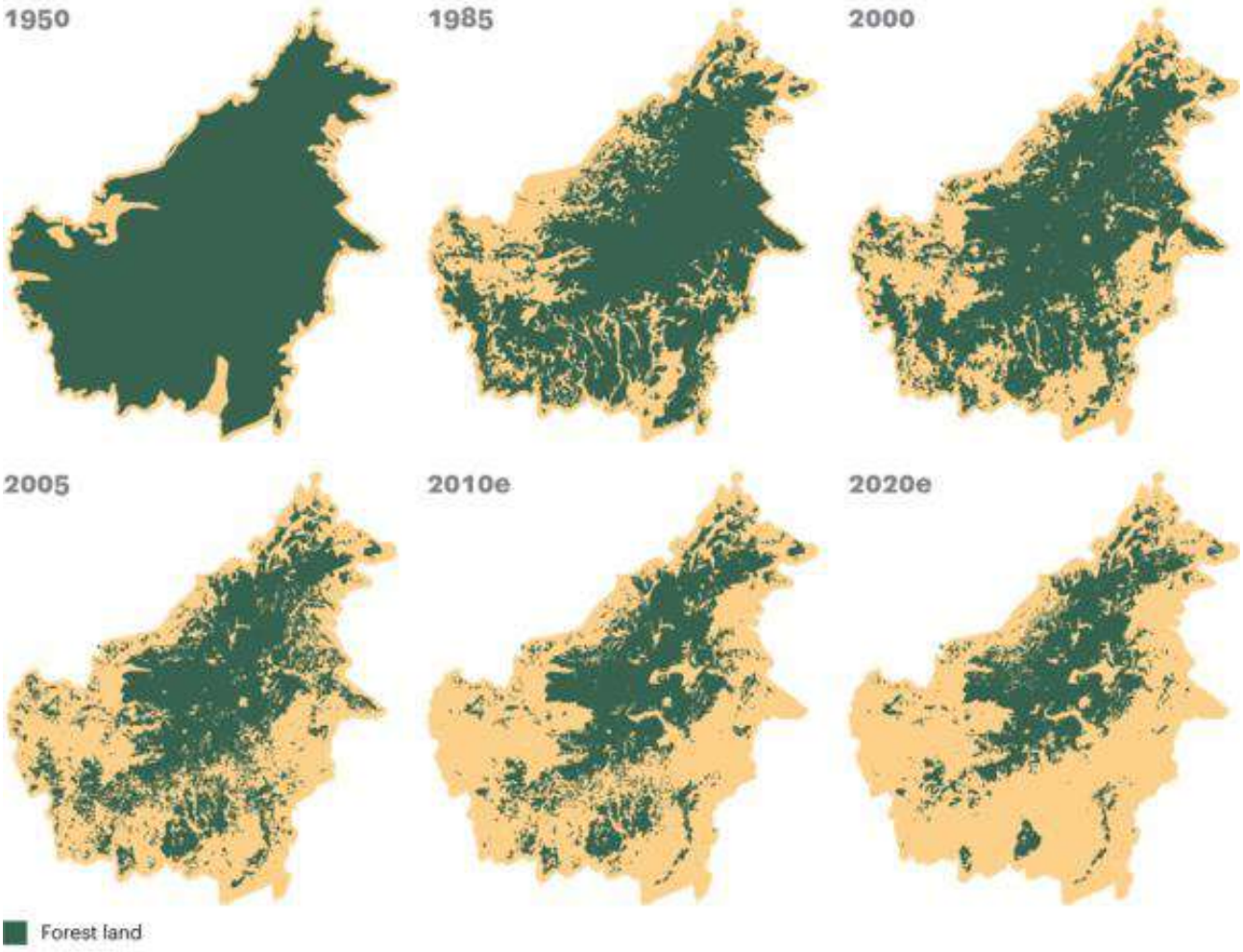
- Kontaminasi tanah
- Pertambangan
- Aktivitas olahraga seperti berkendara off-road
- Perluasan lahan yang menabrak habitat hewan liar
- Pembajakan tanah berlebihan (erosi mekanis)
- Pertanian monokultur
- Pembuangan sampah non-biodegradable seperti plastik

Kepadatan populasi manusia yang tinggi tidak selalu terkait dengan degradasi lahan, melainkan praktik yang dilakukan manusia terhadap lahan yang ditempatinya. Populasi dapat mendayagunakan sekaligus melestarikan lahan jika menginginkannya tetap produktif dalam waktu lama. Hingga kini, degradasi lahan merupakan faktor utama penyebab migrasi manusia besar-besaran di Afrika dan Asia. Lahan yang telah terdegradasi berat dan menjadi lahan kritis luasnya sekitar 48,3 juta ha atau 25,1% dari luas wilayah Indonesia. Untuk lahan gambut dari sekitar 14,9 juta ha lahan gambut di Indonesia, ± 3,74 juta ha atau 25,1 % dari total luas gambut telah terdegradasi dan ditumbuhi semak belukar. Proses degradasi lahan dimulai dengan tidak terkontrolnya konversi hutan, dan usaha pertambangan kemudian diikuti dengan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensi dan pengelolaan lahan yang kurang tepat. Lahan terdegradasi baik di tanah mineral maupun gambut ini menjadi sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) karena rentan terhadap kebakaran di musim kemarau panjang. Sesuai Perpres No. 61 tahun 2011 dan himbauan dari Kelompok Bank Dunia, bahwa "rehabilitasi lahan terdegradasi/terlantar harus memprioritaskan investasi pada sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit untuk produksi pertanian/perkebunan yang berkelanjutan", hal tersebut perlu direalisasikan secara nasional. Dalam inisiatif "Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus" (REDD+), lahan terdegradasi juga menjadi isu utama yang ditangani. Namun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki definisi, metodologi pemetaan, dan kebijakan pengelolaan lahan terdegradasi yang terintegrasi. Oleh karena itu

diperlukan kebijakan yang didasarkan pada kesepahaman tentang lahan terdegradasi yang memuat aspek definisi dan karakteristiknya, dari berbagai sektor Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkaitan dengan degradasi lahan. Penyeragaman melalui gerakan menuju satu peta (ONE MAP POLICY movement) yaitu satu referensi, satu database, satu prosedur/protokol, satu geoportal) menjadi kebutuhan mutlak.

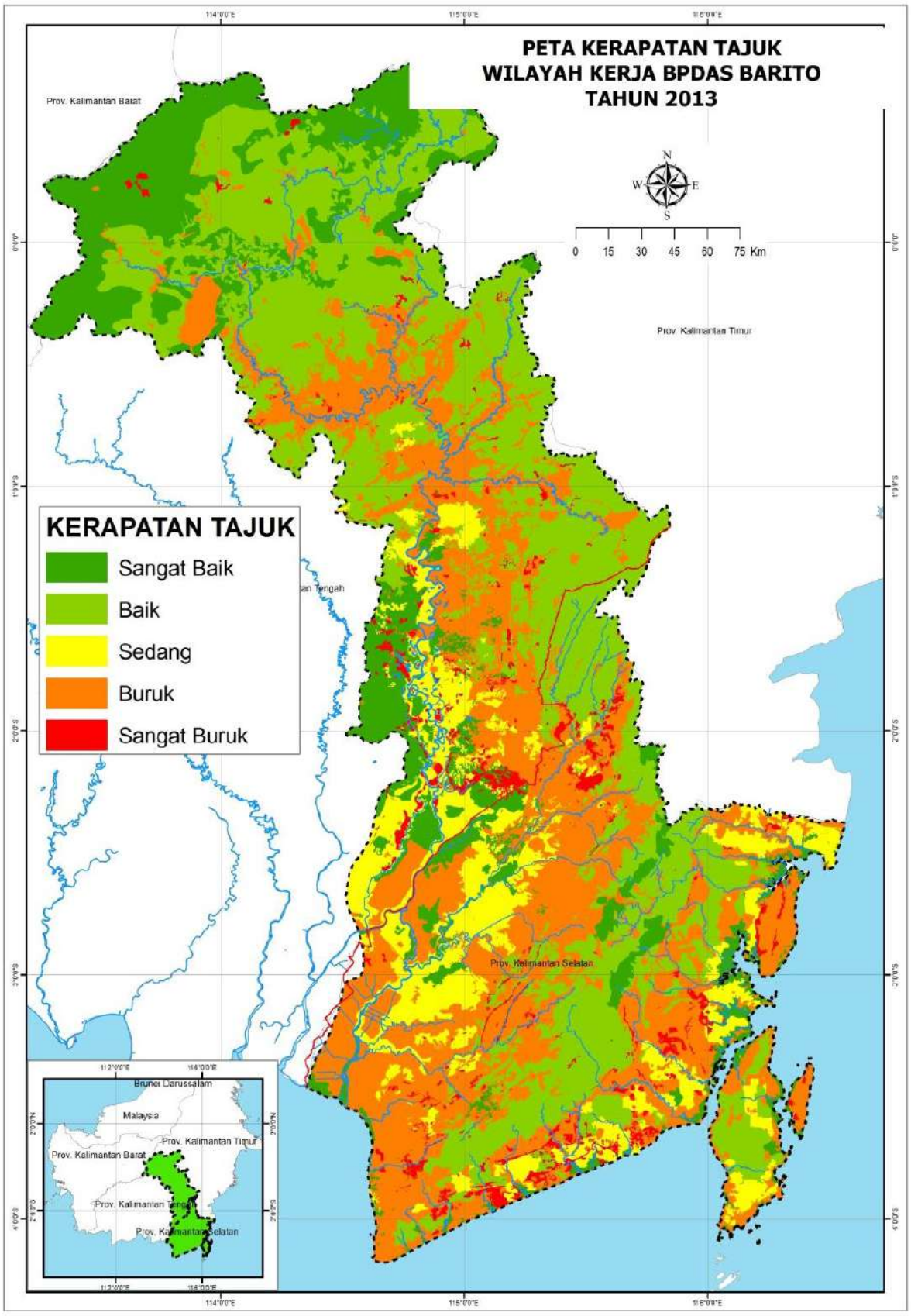
DEGRADASI LAHAN

Figure 2
Deforestation in Borneo, 1950–2020

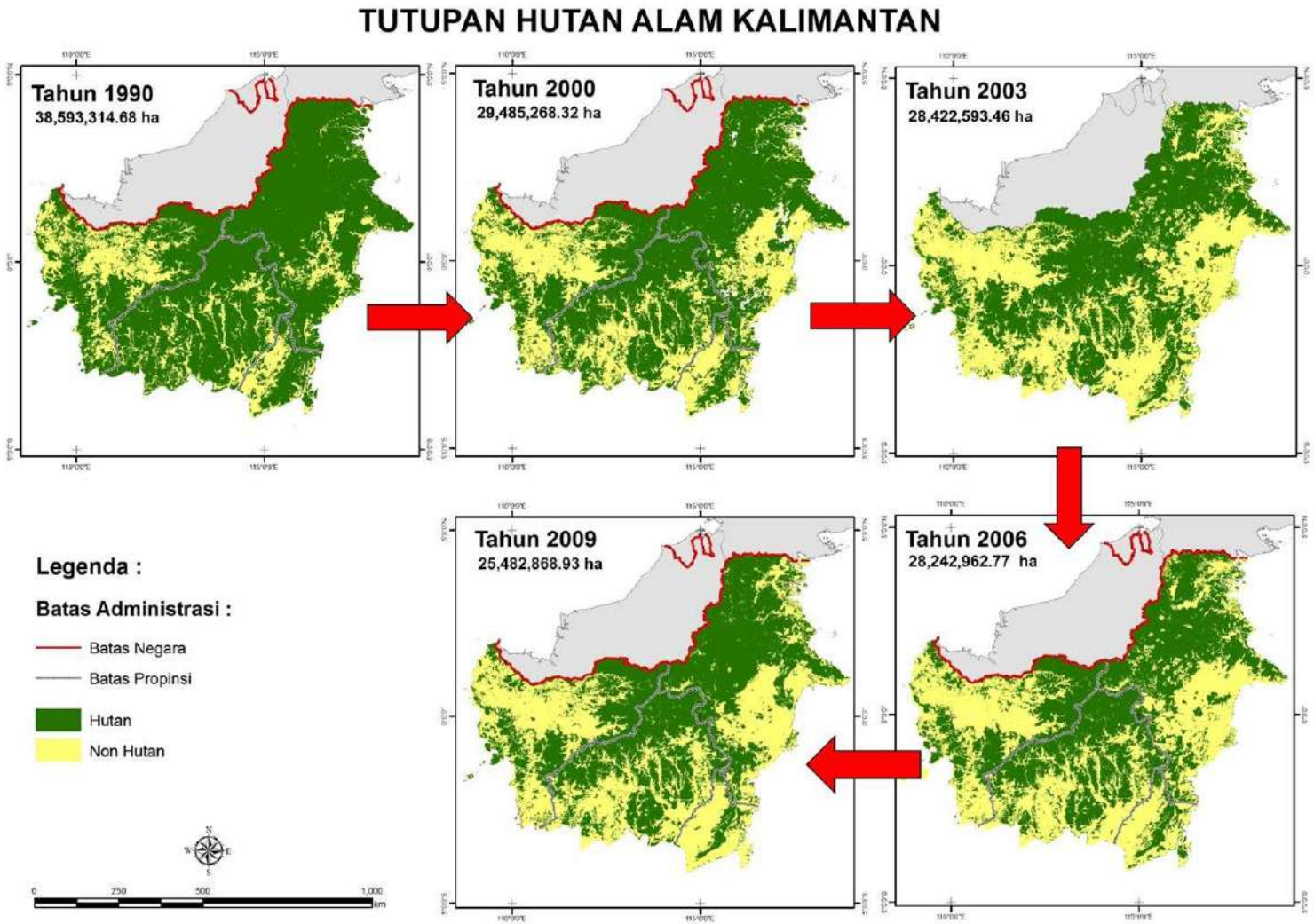


Source: WWF Germany

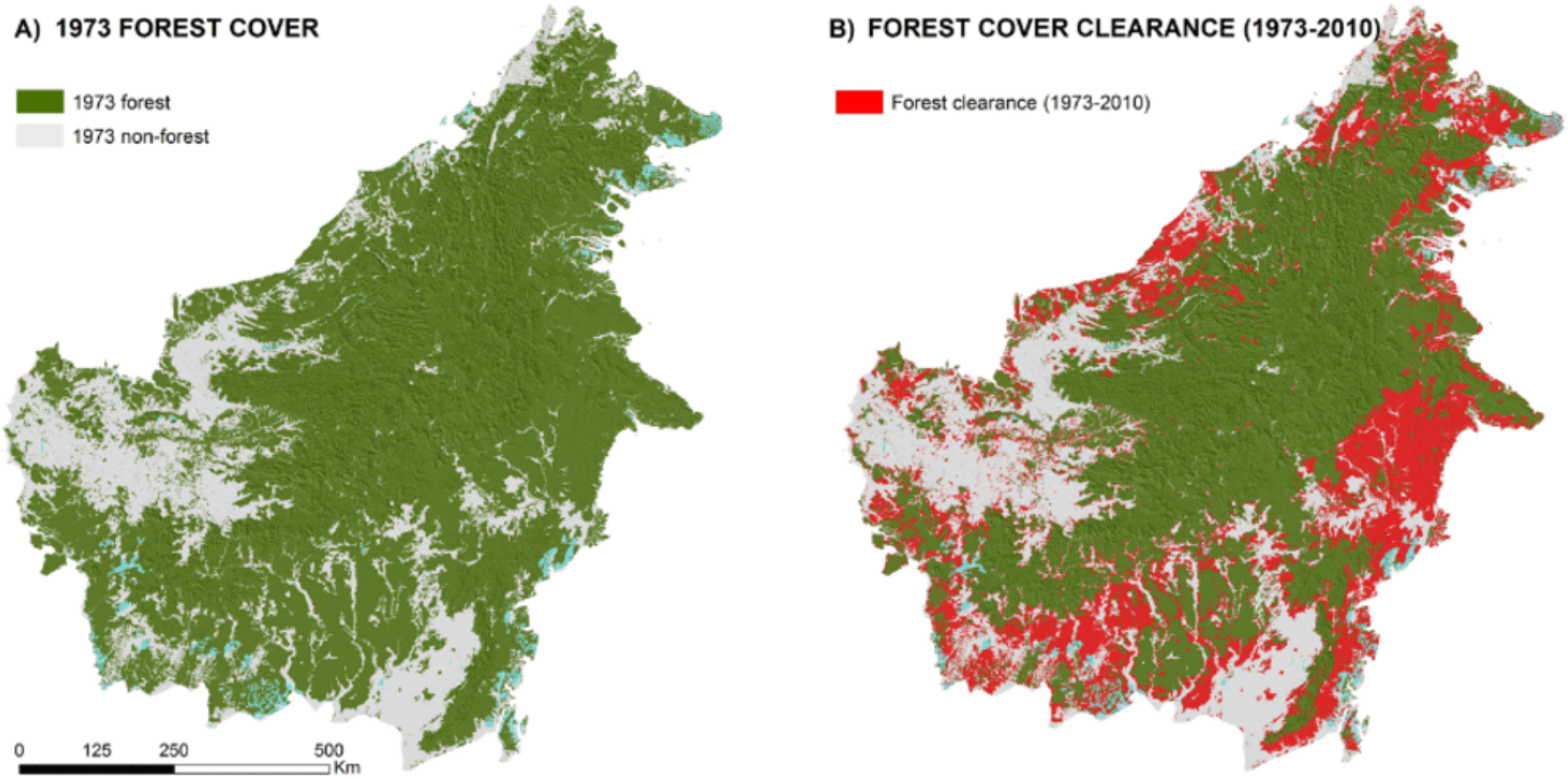
Gambar 3. 14. Degradasi Lahan



Gambar 3. 15. Peta Kerapatan Tajuk Wilayah Kerja BPDAS Barito



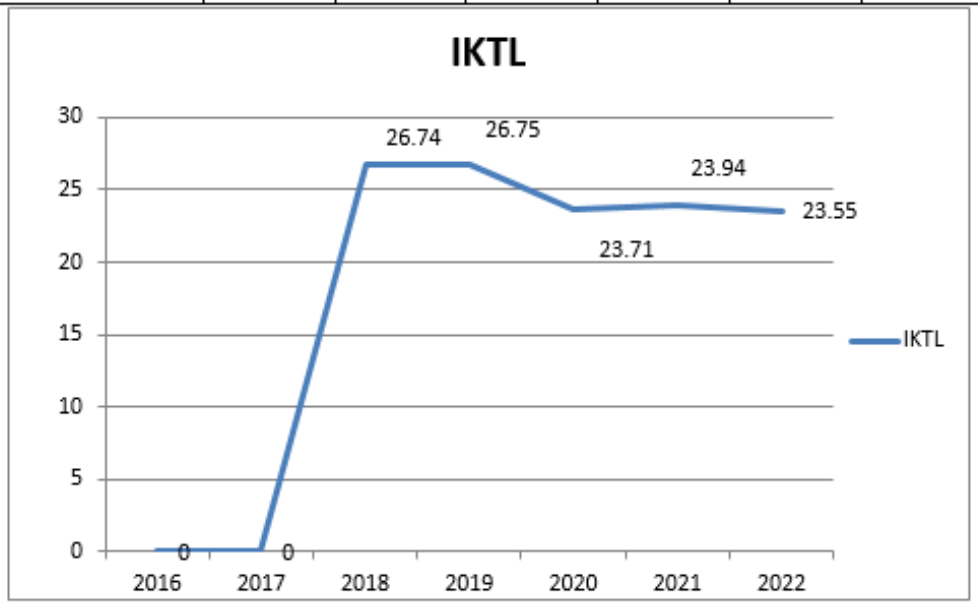
Gambar 3. 16. Tutupan Hutan Alam Kalimantan



Gambar 3. 17. Forest Cover

Judul : Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup
Per Tanggal : 01 Agustus 2022

Lokasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Barito Kuala	-	-	26,74	26,75	23,71	23,94	23,55



Gambar 3. 18. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan komponen-komponen lingkungan hidup. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penggunaan sumber daya alam haruslah selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Kabupaten Barito Kuala memiliki pertumbuhan kawasan terbangun cukup pesat. Pertumbuhan ini secara alamiah menuntut tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya bagi masyarakatnya. Untuk itu antara pelestarian sumber daya dengan pembangunan berkelanjutan diperlukan suatu agenda pengelolaan lingkungan yang disusun melalui proses evaluasi dan penyempurnaan program-program kerja yang telah dilaksanakan, serta pengkajian dan pengembangan program-program kerja baru.

4.1. Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Inovasi Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Barito Kuala di dukung dengan upaya peningkatan kapasitas lembaga daerah seperti yang terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat di Kabupaten Barito Kuala

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2	-	2	-
2	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	-	2	-
3	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	1	-	1	-

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

Tabel 4. 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

No.	Nama Instansi	Nomor Penetapan	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	99 Tahun 2022	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala menjadi 4 Bidang dan 1 Sekretariat (Tipe A)
2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	000.8.1./01170/ORG/2023	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Batola disetujui menjadi Kelas A

4.1.1. Anggaran Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan dengan perencanaan yang matang untuk menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan efisien dan peduli lingkungan. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengalokasikan jumlah anggaran yang cukup besar dalam program-program yang membawahi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Proses pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola lingkungan

hidup daerah berasal dari APBD. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menganggarkan sekitar Rp 17.866.021.208,- untuk pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

4.1.2. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2022 Kabupaten Barito Kuala telah menerbitkan produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diharapkan dapat menjaga kualitas lingkungan, dengan peraturan mengikat dan sah yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Produk hukum ini melengkapi dan menguatkan produk hukum sebelumnya, produk hukum yang dihasilkan berupa peraturan daerah dan peraturan walikota, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Keputusan Bupati	118.45/110/KUM/2023 tanggal 27 Pebruari 2023	Penetapan Lokasi Titik Pemantauan Udara di Kabupaten Barito Kuala
2	Keputusan Bupati	118.45/111/KUM/2023 tanggal 27 Pebruari 2023	Penetapan Lokasi Titik Pemantauan Air Sungai dan Rawa di Kabupaten Barito Kuala
3	Instruksi Bupati	01 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023	Pengurangan Sampah Plastik
4	Keputusan Bupati	118.45/326/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Danau Karya Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala
5	Keputusan Bupati	118.45/330/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala
6	Keputusan Bupati	118.45/327/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
7	Keputusan Bupati	118.45/11/KUM/2022 tanggal 2 Januari 2022	Penetapan Pembentukan Sekolah Adiwiyata Binaan Tahun 2022
8	Keputusan Bupati	188.45/201/KUM/2023 Tanggal 28 April 2023	Pembentukan Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/ Narasumber Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
9	Keputusan Bupati	188.45/263/KUM/2023 Tanggal 20 Juni 2023	Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Keputusan Bupati	188.45/253/KUM/2023 Tanggal 12 Juni 2023	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
11	Keputusan Bupati	188.45/9/KUM/2023 Tanggal 2 Januari 2023	Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

4.2. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka melakukan berbagai perubahan yang bernilai positif. Munculnya suatu perubahan sangat berpotensi untuk menimbulkan berbagai konflik, sehingga diperlukan suatu perumusan pembangunan yang dilakukan secara matang, khususnya dalam pengelolaan lingkungan. Dalam kerangka pengelolaan lingkungan, banyak pembangunan yang dilakukan dalam usaha untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan lingkungan yang lebih sinergis, hal ini dibutuhkan terkait pada banyaknya kasus-kasus pengelolaan lingkungan yang berujung pada munculnya konflik. Terdapat berbagai paradigma umum yang mendasari konsep pengelolaan lingkungan. Salah satunya adalah paradigma pengelolaan

lingkungan yang berdasarkan pada konsep *sustainable* dan partisipatif multi pihak.

Paradigma yang mengacu pada konsep *sustainable* merupakan suatu proses perubahan yang terencana yang didalamya terdapat keselarasan serta peningkatan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masnusia. Hal ini mengartikan bahwa konsep *sustainable* dapat menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan lebih meratanya akses peran dan kesempatan. Konsep ini terfokus pada 3 (tiga) pilar dasar yaitu *sustainable* lingkungan, *sustainable* ekonomi dan *sustainable* sosial. *Sustainable* lingkungan menekankan pada adanya keterbatasan lingkungan sehingga penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang, sehingga penting untuk menciptakan suatu sistem kinerja pengelolaan lingkungan yang memiliki koridor *sustainable*.

Paradigma *sustainable* lingkungan juga mengacu pada konsep keadilan yang dimaknai dengan adanya keterwakilan dan pendistribusi-annya, terkait dengan bagaimana kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi suatu regulasi yang benar-benar mewakili aspirasi dari masyarakat luas. Melalui konsep keadilan, diharapkan nantinya tercipta peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan generasi masa kini tanpa mengabaikan kesempatan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya. *Sustainable* di bidang ekonomi merupakan konsep pemanfaatan sumber ekonomi secara efisien dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini penting agar produktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada konsep keberlanjutan.

Sustainable sosial yaitu pelestarian segala bentuk modal sosial, termasuk jaringan hubungan atau interaksi antar individu dan kelompok masyarakat. Ketiga pilar dasar konsep *sustainable* ini merupakan suatu hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lain,dimana masing-masing saling mendukung antar konsep yang nantinya akan berdampak pada suatu keberlanjutan yang utuh.

Paradigma umum berikutnya adalah yang mengacu pada konsep partisipatif. Konsep ini menekankan pada pentingnya keterlibatan dari berbagai pihak terkait, dimana didasari dengan adanya kesetaraan dan kebersamaan dalam pengelolaan lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, lingkungan dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Mengacu pada kedua paradigma ini, maka perlu ada regulasi hukum yang jelas terkait kepada pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal pelaksanaannya. Saat ini kita telah memiliki berbagai konsep regulasi hukum yang diaplikasikan pada bentuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, tetapi mengapa masih saja timbul berbagai konflik terkait dengan pengelolaan lingkungan. Berikut akan dipaparkan secara luas dan gamblang mengenai fenomena konflik lingkungan.

Saat ini banyak kasus-kasus yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan, baik yang berskala kecil maupun berskala besar. Mulai dari konflik pengelolaan sumber daya perairan sampai pada benyaknya konflik yang timbul dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kondisi ini mengartikan bahwa pentingnya untuk membicarakan permasalahan konflik lingkungan hidup sebagai suatu langkah dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada dasarnya, sangat penting untuk menemukan akar/penyebab konflik, sehingga kita dapat mengetahui permasalahan secara mendasar. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terkait. Hal ini menjadi penting mengingat masing-masing pihak memiliki berbagai kepentingan yang berbeda. Diharapkan melalui pengidentifikasian ini, kita dapat mensinergiskan *stakeholders* terkait sesuai dengan peran masing-masing pihak sehingga nantinya dapat mengantisipasi timbulnya konflik.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sumberdaya alam seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya merupakan sumberdaya yang penting bagi kelangsungan hidup mahkluk hidup termasuk manusia. Bahkan, sumberdaya alam ini tidak hanya mencukupi

kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan sumberdaya alam tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan sumberdaya alam, misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air, dan sebagainya.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundang-undangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan hidup telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Inovasi daerah dalam pengelolaan Lingkungan hidup di Kabupaten Barito adalah sebagai berikut.

4.2.1. Pengelolaan Sampah Desa Melalui MALAMPAH (Masyarakat Pintar Mengelola Sampah) Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala

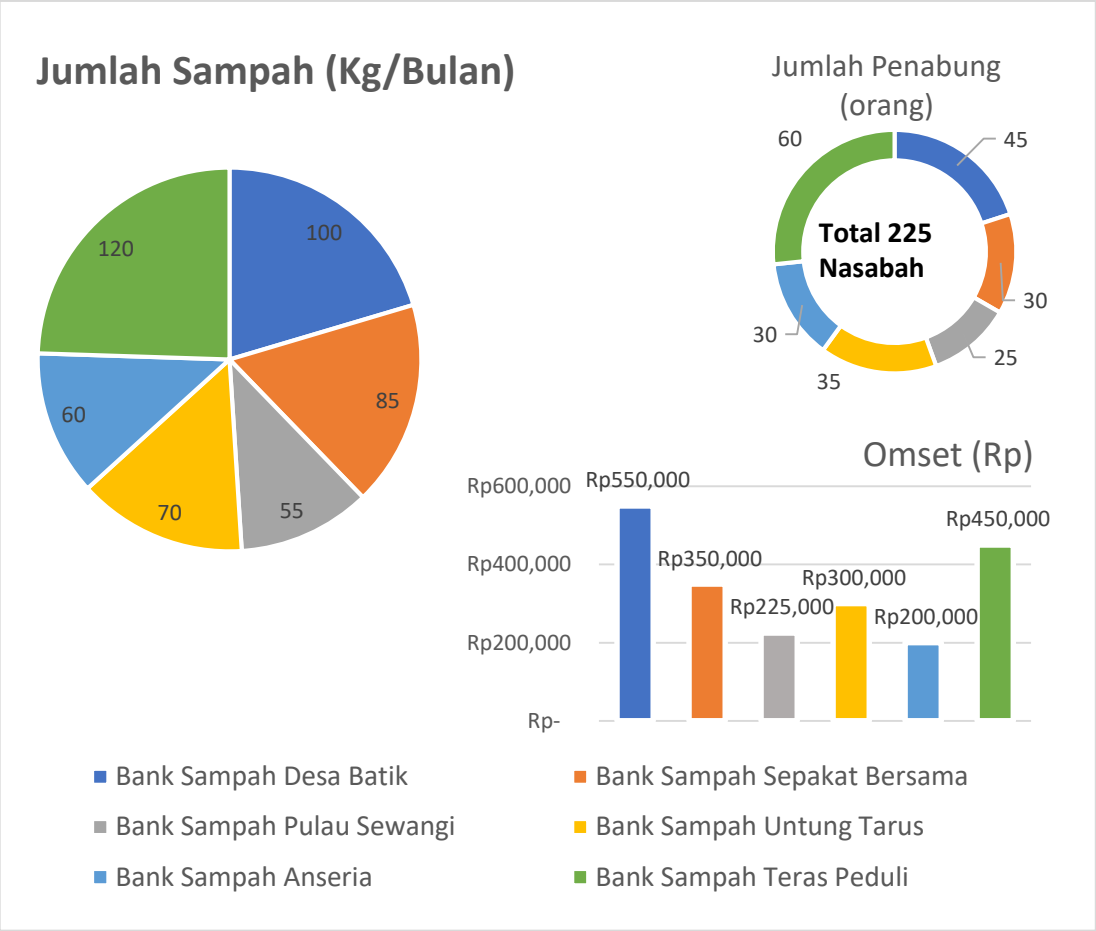
Gambaran inovasi MALAMPAH yakni (a). Pembentukan kelompok peduli sampah tingkat desa, (b). Kegiatan pemberdayaan masyarakat secara adaptif langsung melalui pelatihan pengolahan sampah, diskusi kelompok, sosialisasi terkait pengelolaan sampah lingkup desa, (c). Mendorong penggunaan dana desa dengan tetap berpegang pada ketentuan pertauran yang berlaku, (d). Membentuk dan mencanangkan DESA MALAMPAH, (e). Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait lainnya.

Sejauh ini Masyarakat Kabupaten Barito Kuala sudah mulai dikenalkan terkait konsep pengelolaan sampah terutama dengan bekerjasama melalui bank sampah.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan jumlah sampah yang terus meningkat melalui Bank Sampah.



Gambar 4. 1. Launching Bank Sampah Untung Tarus
(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023)



Gambar 4. 2. Jumlah Sampah yang Dikelola Bank Sampah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023)

4.2.2. Inovasi Pengelolaan Sampah (Mengangkat Sampah dari Sungai Menggunakan Jaring-Jaring) di Desa Kuala Lupak

Permasalahan terkait sampah memang menjadi masalah yang sering terjadi di berbagai tempat. Desa Kuala Lupak sebagai salah satu kawasan yang berdekatan dengan wilayah muara sungai merupakan tempat yang akan selalu menjadi persinggahan sampah yang berasah dari daerah hulu menuju ke laut. Maka dari itu, urgensi terkait pengendalian sampah di daerah ini benar-benar menjadi perhatian khusus untuk dikelola. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menginisiasi kegiatan yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar Desa Kuala Lupak untuk mengendalikan tingginya angka sampah yang menumpuk di kawasan muara tersebut dengan memanfaatkan jarring untuk mengumpulkan sampah agar tidak mencemari lingkungan sungai. Gambaran inovasi Mengangkat Sampah dari Sungai Menggunakan Jaring yaitu mengurangi sampah dari masyarakat yang

terbiasa membuang sampah ke Sungai agar tidak mengalir masuk ke laut dan makin memperparah kerusakan ekosistem laut di Desa Kuala Lupak yang muara sungainya langsung menghadap ke laut.



Gambar 4. 3. Ilustrasi Pengelolaan Sampah dengan Jaring

4.2.3. Program Anjur Angkut Sampah

Program Gerakan anjur angkut sampah merupakan sinergi antara masyarakat, dunia usaha dan Dinas Lingkungan Hidup, dimana masyarakat sebagai penghasil sampah melalui paman gerobak menganjur (membawa) sampahnya ke Truk yang sudah disiapkan DLH.





Gambar 4. 4. Penyerahan Bantuan Gerobak Untuk Mendukung Kegiatan Anjur Angkut Sampah

Untuk menganjur sampah tersebut diatur jadwal paman-paman gerobak tersebut pada jam yang sama agar dimasukkan dalam truk yang telah disediakan. Selanjutnya truk yang telah disediakan mengangkutnya ke TPA Tabing Rimbah. Harapan terlaksananya Program ini :

- Dapat menanggulangi permasalahan sampah di sepanjang jalan protokol
- Menyikapi adanya larangan untuk TPS dan *armroll* di sepanjang jalan protokol

Program ini dilaksanakan di Kecamatan Alalak Khususnya di Desa Semangat Dalam dan Semangat Bakti, karena kepadatan jumlah penduduk dan adanya larangan peletakan TPS di Jalan Protokol



Gambar 4. 5. Pelaksanaan Kegiatan Anjur Angkut Sampah

4.2.4. Pembuatan Komposter untuk sampah rumah tangga menjadi pupuk cair dan padat

Salah satu inovasi lingkungan di Kabupaten Barito Kuala yang lainnya adalah Pembuatan Komposter dari sampah rumah tangga terutama sampah organik menjadi pupuk padat dan cair agar dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman.



Gambar 4. 6. Pembuatan Pupuk Padat dan Cair dari Sampah Rumah Tangga Menggunakan Komposter

Selain pupuk organik dari sampah rumah tangga, ada pula produk pupuk organik lainnya yang merupakan hasil karya inovasi lingkungan hidup dari Kelompok Tani Karya Makmur Bunga Mandastana berupa :

1. Jakaba : terbuat dariu air hujan dan air cucian beras
2. Asam Amino : terbuat dari daging bekicot, EM4, dan air
3. MKP organik : terbuat dari kentang, pisang, serasah dedaunan, air kelapa dan garam.
4. Penghemat Kapur dolomit : terbuat dari kapur tohor, jeruk, dan air
5. Biosaka : terbuat dari 5 jenis rumput dan air
6. Pupuk Peram : terbuat dari urea, abu sekam, dolomit, EM4, dan bahan lainnya.



Gambar 4. 7. Inovasi Pembuatan Pupuk oleh Kelompok Tani Karya Makmur Bunga Mandastana

4.2.5. BLUD UPT Limbah B3

Kabupaten Barito Kuala satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai BLUD UPT Limbah B3 di kawasan industri sungai Pitung untuk mengelola limbah B3 yang mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang telah beroperasi mulai awal tahun 2021.





Gambar 4. 8. Penyerahan Bantuan Incinerator Dari KLHK RI

BLUD UPT Limbah B3 yang keberadaannya tidak terlepas dari Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Dinas Lingkungan Hidup melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan, pengolahan Limbah B3, pelayanan Pemusnahan Limbah B3, pembinaan dan fasilitasi Pemusnahan Limbah B3, pembinaan dan fasilitasi pencemaran lingkungan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. BLUD UPT Limbah B3 di Sungai Pitung merupakan Badan Layanan Usaha Daerah yaitu Pelaksana Teknis pemusnahan limbah B3 yang berinduk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dimana bertanggungjawab menyelenggarakan pemusnahan Limbah B3 dimana tata kerjanya diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala. UPT Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemusnahan Limbah B3 dari dunia usaha, unit pelayanan kesehatan dari wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang sesuai dengan kedudukan dan atau wilayah kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melihat Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, berdampak pada peningkatan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah untuk merealisasikannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan oleh pemerintah merupakan suatu keharusan, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia maju, sekaligus untuk mengarahkan capaian SDGs bidang kesehatan.

Peningkatan pelayanan kesehatan karena tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai akan berlanjut pada peningkatan timbulan sampah medis yang sebagian besar termasuk dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Timbulan sampah LB3 ini kalau tidak dikelola dengan benar akan mendatangkan permasalahan baru bidang kesehatan. Banyaknya fasilitas layanan kesehatan yang beroperasi yang tidak diimbangi dengan bertambahnya unit pengolah limbah medis menyebabkan timbulan limbah medis semakin meningkat, menyebabkan negara kita berada pada kondisi darurat limbah medis. Menurut Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, timbulan limbah medis yang dihasilkan pelayanan kesehatan di Indonesia mencapai ±290 ton/hari dan kapasitas pengolahan limbah medis yang beroperasi saat ini baru 10 jasa pengolahan limbah medis yang berizin di Indonesia dengan kapasitas ±170 ton/hari dan 87 rumah sakit yang memiliki alat insinerator untuk mengolah limbah medisnya sendiri dengan kapasitas ±60 ton/hari sehingga jumlah kapasitas pengolahan limbah medis yang dapat diolah hanya sebesar 230 ton/hari atau hanya sekitar 79% saja. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk bekerja cepat dan tanggap dalam menanggulangi permasalahan darurat limbah medis tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pemberian bantuan pengadaan insinerator kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari studi kelayakan pengolahan limbah B3 medis Kabupaten Barito Kuala (Dinas PUPR, 2019), jumlah timbulan LB3 medis yang bersumber dari Rumah Sakit dan Klinik di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 2.583 Kg/Hari. Jumlah limbah medis ini berasal dari Rumah sakit dan klinik yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat karena bertambahnya fasilitas layanan kesehatan. Timbulan LB3 medis di Provinsi tetangga (Kalimantan Tengah) ditaksir mencapai 1.265 kg/hari yang bersumber dari 24 RS dan 200 Puskesmas yang tersebar di 14 Kabupaten. Jumlah tersebut diprediksi akan semakin meningkat dengan bertambah maraknya pembangunan klinik rawat inap dan rawat jalan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Besarnya volume LB3 medis yang dihasilkan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah serta minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menarik perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala untuk membangun Insinerator dan sarana pendukungnya sebagai prasarana pengolah dan pemusnah LB3 medis. Menurut Pasal 17 Permenlhk No. P.56/Menlhk-Setjen/2015; pengolahan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara termal dan hanya dilakukan menggunakan peralatan insinerator.

Insinerator yang dibangun tidak hanya melayani pengolahan limbah B3 medis yang berasal dari wilayah Kabupaten Barito Kuala, namun juga akan melayani limbah B3 medis dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Bangunan yang terletak di Desa Sungai Pitung, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.

- **Tujuan Kegiatan**

  Tujuan pengoperasian fasilitas pengolah limbah medis serta sarana pendukungnya di Kabupaten Barito Kuala adalah:

  a. Menyediakan sarana pengolah LB3 medis dalam rangka meminimalkan dan menghindari pembuangan LB3 medis ke media lingkungan.

b. Mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya atau sifat racun dari limbah B3 baik berupa limbah infeksius, patologis maupun sitotoksis sehingga tidak membahayakan kepada lingkungan sekitar.
c. Mengoptimalkan kinerja pengelolaan lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala pada khususnya, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada umumnya

- **Manfaat Kegiatan**

Manfaat yang diharapkan dari terealisasinya pengoperasian fasilitas pengolah limbah B3 medis serta sarana pendukungnya di Kabupaten Barito Kuala adalah:

a. Mencegah masyarakat dari terpapar LB3 medis yang dibuang ke media lingkungan.
b. Menghindari resiko penurunan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pembuangan LB3 medis infeksius, patologis maupun sitotoksis ke media lingkungan sekitar.
c. Mendukung program pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan Indonesia Sehat.

Kegiatan pengolahan limbah B3 medis ini mendapat dukungan dan tanggapan positif dari berbagai pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan limbah B3 medis khususnya di Kabupaten Barito Kuala dan di Provinsi Kalimantan Selatan maupun di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya.



Gambar 4. 9. Unit Insinerator dan *Cold Storage* di BLUD UPT Limbah B3

4.2.6. Pemantauan Kualitas Air dengan Alat ONLINMO

Pemantauan kualitas air pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan manusia mempengaruhi kualitas air suatu sumber air, yang mana badan air itu juga dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan manusia. Kualitas air perlu dijaga agar selalu memenuhi baku mutu air sesuai dengan kelas peruntukannya.

Data hasil pemantauan air sungai dapat digunakan untuk mendukung nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Dalam mendukung nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tersebut diperlukan suatu alat/sistem yang dapat memberikan data kualitas air secara kontinyu, otomatis dan *online*. Pengadaan Alat/System Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online (*Onlimo*) sangat diperlukan dalam mendukung pemantauan kualitas air sungai yang dapat dipantau dan diakses dalam 24 jam. Data dari Onlimo tersebut nantinya dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan secara khusus seperti Bidang yang menangani pencemaran air pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala maupun

secara umum Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai dasar dalam penentuan kebijakan terkait pengendalian pencemaran air sungai.



Gambar 4. 10. Alat ONLINMO dan Bangunannya

Alat ONLIMO menggunakan sistem pompa otomatis dengan jumlah parameter kualitas air yang diukur sebanyak 11 (sebelas) parameter, terdiri dari pH (derajat keasaman), Temperatur, TDS (Total Padatan Terlarut), TSS (Total Suspensi Terlarut), DO (Oksigen Terlarut), *Ammonium, Depth* (Kedalaman), COD (*Chemical Oxygen Demand*), BOD (*Biological Oxygen Demand*), *Turbidity* (Kekeruhan) dan Nitrat.

Metode kerja alat ONLIMO melalui sistem integrasi sensor dengan data logger secara langsung menggunakan kabel pada sensor. Interval pengukuran dapat diatur minimal 1 menit per satu kali pengukuran pada data logger, sehingga data akan dikumpulkan oleh data logger setiap interval waktu yang diberikan dan disimpan di memori data logger untuk diteruskan ke Pusat Data ONLIMO di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

4.2.7. Pembuatan Tripikon-S (Teknik septictank yang diletakan di sungai dengan pipa paralon) di sepanjang aliran sungai untuk meningkatkan kualitas air sungai

Perilaku buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi di Indonesia. Di sejumlah daerah, masyarakat masih BAB sembarangan di kali atau sungai. Data Joint Monitoring Program WHO/UNICEF 2014, sebanyak 55 juta penduduk di Indonesia masih berperilaku BAB sembarangan. Mereka pun bisa mandi dan mencuci pakaian di sungai yang sama. Akibatnya, mereka rentan terkena penyakit diare. Selain diare, balita mudah terserang pneumonia dari pencemaran tinja melalui udara.

Dampak penyakit yang paling sering terjadi akibat buang air besar sembarangan ke sungai adalah *Escherichia coli*. Itu merupakan penyakit yang membuat orang terkena diare. Setelah itu bisa menjadi dehidrasi, lalu karena kondisi tubuh turun maka masuklah penyakit-penyakit lain

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2012, sebanyak 39-40 juta orang yang buang air besar sembarangan, itu termasuk orang yang mempunyai WC, namun masih membuang kotorannya ke sungai. Riset yang dilakukan UNICEF dan WHO, juga menyatakan lebih dari 370 balita Indonesia meninggal akibat perilaku buruk BAB sembarangan.

Penanganan buangan tinja tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sepele. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyebutkan, seseorang setiap tiap harinya membuang tinja seberat 125 -250 gram. Jika saat ini seratus juta orang Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, maka setiap harinya kawasan perkotaan tersebut bisa menghasilkan 25.000 ton tinja. Berikut ini adalah permasalahan yang mungkin ditimbulkan akibat buruknya penanganan buangan tinja:

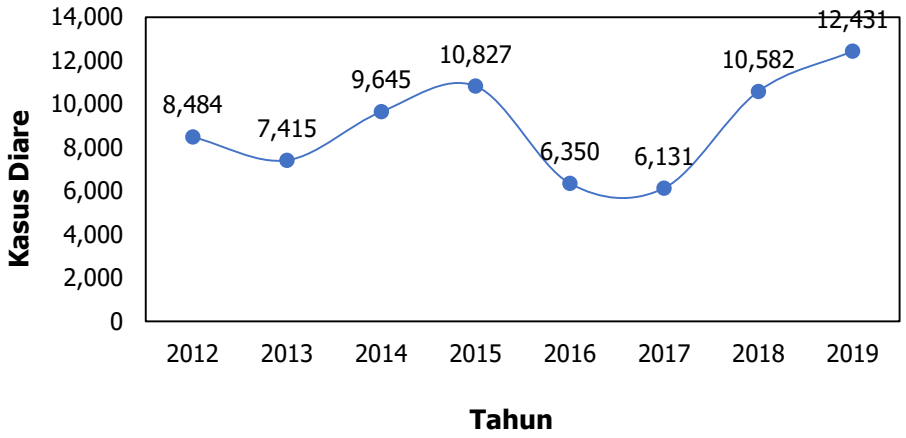
1. Mikroba Tinja manusia mengandung puluhan miliar mikroba, termasuk bakteri koli-tinja. Sebagian diantaranya tergolong sebagai mikroba patogen, seperti bakteri Salmonela typhi penyebab demam tifus, bakteri Vibrio cholerae penyebab kolera, virus penyebab hepatitis A, dan virus penyebab polio. Tingkat penyakit akibat kondisi sanitasi yang buruk di

Indonesia sangat tinggi. BAPPENAS menyebutkan, tifus mencapai 800 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan polio masih dijumpai, walaupun dinegara lain sudah sangat jarang.

2. Materi Organik Kotoran manusia (tinja) merupakan sisi dan ampas makanan yang tidak tercerna. Ia dapat berbentuk karbohidrat, dapat pula protein, enzim, lemak, mikroba dan sel-sel mati. Satu liter tinja mengandung materi organik yang setara dengan 200-300 mg BODS (kandungan bahan organik). Sekitar 75 persen sungai di Jawa, Sumatra, Bali dan Sulawesi tercemar berat oleh materi organik dari buangan rumah penduduk. Air sungai ciliwung memiliki BODS hampir 40 mg/L (empat kali lipat dari batas maksimum 10 mg/L). Kandungan BOD yang tinggi itu mengakibatkan air mengeluarkan bau tak sedap dan berwarna kehitaman.
3. Telur Cacing Seseorang yang cacingan akan mengeluarkan tinja yang mengandung telu-telur cacing. Beragam cacing dapat dijumpai di perut kita. Sebut saja, cacing cambuk, cacing gelang, cacing tambang, dan keremi. Satu gram tinja berisi ribuan telur cacing yang siap berkembang biak diperut orang lain. Anak cacingan adalah kejadian yang biasa di Indonesia. Penyakit ini kebanyakan diakibatkan cacing cambuk dan cacing gelang. Prevalensinya bisa mencapai 70 persen dari balita. 4. Nutrien Umumnya merupakan senyawa nitrogen (N) dan senyawa fosfor (P) yang dibawa sisa-sisa protein dan sel-sel mati. Nitrogen keluar dalam bentuk senyawa amonium, sedangkan fosfor dalam bentuk fosfat. Satu liter tinja manusia mengandung amonium sekitar 25 gram dan fosfat seberat 30 mg. Senyawa nutrien memacu pertumbuhan ganggang (*algae*). Akibatnya, warna air menjadi hijau. Ganggang menghabiskan oksigen dalam air sehingga ikan dan hewan lainnya mati.

WHO juga mencatat 88 persen angka kematian akibat diare disebabkan kesulitan mengakses air bersih dan keterbatasan sistem sanitasi. Hal itu juga diperparah oleh perilaku BAB sembarangan. Selain penyakit perilaku BAB sembarangan juga memperbesar risiko yang menghambat pertumbuhan fisik anak-anak.

Angka kesakitan diare di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 yaitu 350 per 1.000 penduduk. Berikut data Trend Penemuan Kasus Diare di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2019.



(Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, 2022)

Gambar 4. 11. Grafik Kasus Diare Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil Riskesdas tersebut maka target untuk penemuan kasus diare pada tahun 2016 di Kabupaten Barito Kuala adalah 3 % dari jumlah penduduk sebesar 9.069 jiwa. Sedangkan penemuan kasus diare berdasarkan hasil laporan Puskesmas sebesar 12.431 jiwa.

Untuk menekan angka kematian akibat diare ini, semua pihak harus sadar dan bersegera membuat sanitasi termasuk toilet yang sehat. Sadar Sanitasi diyakini akan membuat anak-anak bisa tumbuh sehat dan memiliki pola hidup bersih. Namun untuk menjalankan komitmen ini butuh peran serta masyarakat dan banyak pihak terkait, agar semua cita-cita menurunkan angka kematian cepat terwujud. Semua orang harus memiliki jalan pikiran sama menghilangkan budaya BAB sembarangan.

Berdasarkan konsep dan definisi *Milenium Development Goals* (MDGs) yang ada tahun 2016 dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), rumah tangga dikatakan memiliki akses sanitasi layak apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septik (*septic tank*) / Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang digunakan sendiri atau bersama. Persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2013 yaitu 60, 05% dan meningkat

pada tahun 2014 menjadi 61,08% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 62,14%.

Hasil data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Smart pusat sampai dengan Februari tahun 2018, akses sanitasi Nasional adalah 71,70 % , sedangkan akses sanitasi di Provinsi Kalimantan Selatan 68,51 %. Dari 13 Kab/Kota diprovinsi Kalimantan Selatan, akses sanitasi terendah berada di Kabupaten Barito Kuala yaitu 44,30 %. Padahal berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019 target pencapaian *universal accsess* harus 100 %. Termasuk masalah sanitasi yang dikenal dengan 100-0-100, yang artinya 100 untuk target persentase pencapaian air minum layak, 0 untuk target persentase permukiman kumuh, dan 100 untuk target persentase sanitasi layak di akhir tahun 2019.

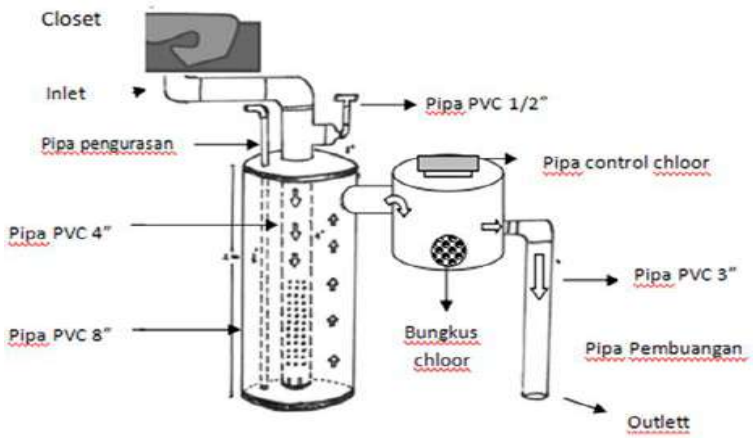
Demografi wilayah Kabupaten Barito Kuala yang sebagian besar perairan berpengaruh besar terhadap akses jamban sehat. Karena masyarakat sudah hidup dan bertempat tinggal dari nenek moyang mereka dekat dengan air sebagai sumber kehidupan, sehingga buang air besar pun dilakukan di sepanjang perairan, hal ini sangat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Berikut gambar kondisi wilayah pesisir sungai dan dataran rendah di Kabupaten Barito Kuala.



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2022)

Gambar 4. 12. Kondisi Wilayah Pesisir Sungai dan Dataran Rendah Kabupaten Barito Kuala

Untuk mengendalikan pencemaran pada air sungai sekaligus mengatasi sanitasi masyarakat tepi air yang memiliki lahan sempit dan berdaerah rawa, dibangunlah percontohan teknologi tepat guna yang dinamakan Tripikon-S. Dengan adanya teknologi Tripikon-S yang desainnya berbentuk tabung yang berfungsi sebagai tangki septik, diharapkan pencemaran air sungai dapat ditangani.



Gambar 4. 13. Design Tripikon – S

Tabel 4. 4. Daftar Desa yang Menjadi Lokasi Percontohan Jamban Tripikon S

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (BUAH)	KET
1	Kuripan	Jambu Baru	8	2021 (Bedah Kampung)
2	Bakumpai	Palingkau	8	2021 (Bedah Kampung)
3	Jejangkit	Cahaya Baru	8	2021 (Bedah Kampung)
4	Jejangkit	Jejangkit Timur	8	2021 (Bedah Kampung)
5	Mandastana	Antasan Segera	8	2021 (Bedah Kampung)
6	Anjir Muara	Anjir Serapat Muara	9	2021 (Bedah Kampung)
	Jumlah 2021		49	
NO	**KECAMATAN**	**DESA**	**JUMLAH (BUAH)**	**KET**
1	Belawang	Rangga Surya	9	2022 (Bedah Kampung)
2	Belawang	Murung Keramat	9	2022 (Bedah Kampung,dialihkan ke Rangga Surya))
3	Belawang	Samuda	9	2022 (Bedah Kampung)
4	Belawang	Patih Selira	8	2022 (Bedah Kampung)
	Jumlah 2022		35	

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu disimpulan bahwa Tripikon-S mampu menurunkan *poissanhe de Hydrogen* (pH), *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dari masing-masing 6,5 , 361,78 mg/L, 532,65 mg/L menjadi 6,2 , 235,06 mg/L, 405,21 mg/L. Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa *Escherichia coli* pada Tripikon-S dapat diturunkan secara signifikan dalam kisaran 70-90% di perairan sungai Martapura. Namun dari sisa penguraian masih terdapat bakteri *Escherichia coli* pada outlet atau buangan yang lepas ke perairan Sungai Martapura dengan jumlah yang banyak dan belum layak buang atau belum memenuhi batas baku mutu air limbah buangan yang sudah ditetapkan (Selintung, 2011 ; Noor, 2011).

Penelitian efektivitas teknologi Tripikon-S pada kualitas air juga dilakukan di Desa Baliuk, Kelurahan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala guna mengetahui efektivitas teknologi tripikon-S. Metode penelitian menggunakan eksperimental semu dengan melakukan pengujian laboratorium melalui sampel uji pipa air inlet dan outlet di fasilitas tripikon-S pada waktu yang berbeda (time series study). Sampel dalam penelitian ini adalah air limbah di inlet dan outlet pada fasilitas Tripikon-S. Analisis data statistik diuji normalitas dan homogenitas menggunakan uji Paired T (pH, BOD, COD). Jika data tidak berdistribusi normal digunakan alternatif uji wilcoxon (suhu, amonia). Sedangkan untuk *E.coli* menggunakan kategori memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara inlet dan outlet untuk variabel suhu ($p = 0,004$), BOD ($p = 0,001$) dan E. coli ($p = 0,034$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara inlet dan outlet dalam variabel pH ($p = 0,908$), COD ($p = 0,581$) dan Ammonia ($p = 0,776$). (M. Bakti Setiadi, 2018).

Tripikon didesain seperti closet yang disambungkan dengan menggunakan sistem tangki atau berbentuk tabung yang berfungsi sebagai *septic tank*. Tripikon-S (Tri/Tiga Pipa Konsentris-Septik) merupakan salah satu alternatif pengolahan air limbah domestik dengan teknologi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan kondisi lingkungan yang dihadapi di daerah yang terpengaruh pasang surut, seperti misalnya daerah pesisir pantai, muara, sungai, maupun rawa.

Keunggulan dari Tripikon-S antara lain kebutuhan lahan kecil, dapat menggunakan material lokal, dapat dikerjakan oleh tenaga lokal dan mampu menurunkan *Biological Oxygen Demand* (BOD) sekitar 75 %, sedangkan kekurangannya adalah kapasitas dalam skala kecil, diperlukan pengurasan jika pipa penuh dan tidak boleh ada sampah yang masuk lewat kloset. Teknologi ini dapat diterapkan untuk toilet individual maupun komunal. Secara rinci keunggulan Tripikon S bisa dilihat pada gambar dibawah ini :

KEUNGGULAN TRIPIKON S

SISTEM PENGOLAHAN	APLIKASI	PEMELIHARAAN	KELEBIHAN	KEKURANGAN	KESESUAIAN DI DAERAH SULIT
TRIPIKON S	• DAPAT DIGUNAKAN SISTEM INDIVIDU • COCOK DI TERAPKAN RUMAH APUNG DAN PANGGUNG •	• TIDAK BOLEH ADA SAMPAH YANG MASUK KE SISTEM	• DAPAT MENGGUNAKAN MATERIAL LOKAL • KEBUTUHAN LAHAN KECIL • DAPAT DIKERJAKAN OLEH TENAGA LOKAL • EFESIENSI PENURUNAN BOD SEKITAR 75%	• KAFASITAS RELATIF SKALA KECIL • PERLU ADANYA PENGURASAN	DAERAH PERAIRAN, SUNGAI, LAUT, TERAPUNG.

Gambar 4. 14. Keunggulan Tripikon-S

Dalam rangka peningkatan akses sanitasi di wilayah pinggiran sungai, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mencoba mengembangkan jamban Tripikon S yang merupakan teknologi tepat guna pada kondisi daerah pasang surut, pesisir pantai dan rawa.

Adapun usaha Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menerapkan inovasi Tripikon S melalui berbagai kegiatan diantaranya :

1. Sosialisasi Tripikon S

   Salah satu upaya menyebarluaskan informasi manfaat tripikon s kepada pihak terkait diantaranya SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Forum Komunitas Hijau, TNI/Polri, Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.



Gambar 4. 15. Bupati Batola meninjau stand Tripikon S di Bursa Inovasi Desa (Advokasi dan sosialisasi Inovasi Tripikon S).

Tripikon S juga masuk dalam menu inovasi SKPD Kabupaten Barito Kuala di Bursa Inovasi Desa yang diselenggarakan Kementrian Desa dan Transmigrasi.



Gambar 4. 16. Sinergitas kerjasama lintas sektor Pemasangan Tripikon-S

Sinergitas kerjasama lintas sektor dalam rangka aksi gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat dalam pembuatan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

2. Pelatihan / Workshop Cara Perakitan Tripikon S

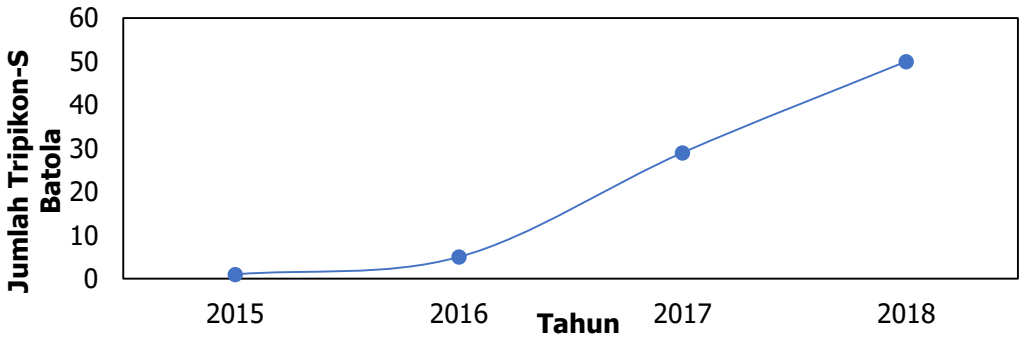
   Pelatihan / workshop diberikan kepada Kepala Desa, kader, tenaga sanitarian di puskesmas, tukang dan tokoh masyarakat.



Gambar 4. 17. Pelatihan Perakitan Tripikon S Oleh Kader Desa, Tukang Desa, dan Tenaga Sanitarian Puskesmas

3. Lokasi penempatan pemasangan tripikon S

Teknologi Tripikon-S di Kabupaten Barito Kuala pertama kali dibangun 1 unit percontohan pada tahun 2016 di Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan. Sampai dengan tahun 2018 sudah terbangun sebanyak 50 unit Tripikon-S. Biaya pembuatan tripikon s diambil dari dana APBD Kabupaten Barito Kuala namun tidak sepenuhnya dibiayai melainkan dana *sharing* dengan anggaran dana desa maupun dana pribadi masyarakat sendiri. Selanjutnya dalam pembuatan tripikon s akan diusulkan masuk ke dalam anggaran dana desa se Kabupaten Barito Kuala guna mempercepat implementasi pemasangan tripikon s. Grafik pemasangan tripikon s di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 18. Grafik Jumlah Pemasangan Tripikon S



Gambar 4. 19. Pemasangan Tripikon-S

4.2.8. Inovasi Penggunaan lahan yang berkelanjutan

Kabupaten Barito kuala sebagai kabupaten berketahanan pangan dengan memperhatikan konservasi lingkungan (perlindungan dan pengelolaan lingkungan). Menetapkan Proyeksi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 120.000 ha Perda No 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Barito Kuala terluas se Kalimantan Selatan.

Di Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan luas lahan pertanian lebih dari 113.674 Ha, Ada kearifan lokal di Kabupaten Barito Kuala yang dilakukan secara turun temurun, dimana masyarakat membakar jerami dan rumput liar lainnya sehabis panen pada lahan individu, atau kalau diprediksi setiap individu mempunyai lahan 1,5 Ha yang masing-masing yang mereka bakar secara bersamaan setiap panen hal ini tentunya akan menyebabkan polusi udara, belum lagi hal ini juga bisa menyebabkan lahan lainnya ikut terbakar.

Inovasi yang dilakukan adalah dengan membiarkan jerami di sawah sampai kering, Jerami yang kering akan ditumbuhi oleh rumput liar yang apabila terandam air hujan akan mati dan membusuk. Untuk mempercepat pembusukan , maka jerami dan rumput liar yang sudah mati dikumpulkan (digompal) dengan 50% tenggelam dalam air disawah. Lebih kurang 15 hari rumput dan jerami yang terendam air tersebut dibalik sehingga tenggelam 50%. Lebih kurang 15 hari

kemudian rumput dan jerami tersebut busuk dan sudah menjadi pupuk organik. Selanjutnya pupuk organik tersebut di sebarkan ke seluruh permukaan sawah, sekaligus, ditanam padi demikian siklus selanjutnya.




(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2022)

Gambar 4. 20. Penggunaan Lahan Berkelanjutan dengan menggunakan jerami sebagai bahan baku untuk pupuk organik

Kaji terap/demplot pemakaian pupuk organik Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, Bantuan pestisida nabati mendorong petani untuk mengurangi pemakaian bahan anorganik (pembentukan Pos Pelayanan Agensi Hayati dapat mengurangi pencemaran air




(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2022)

Gambar 4. 21. Pembuatan pupuk organik untuk lahan Pertanian

Pemanfaatan bahan organik menjadi pupuk organik dilaksanakan oleh poktan/gapoktan baik secara swadaya maupun melalui bantuan pemerintah. Daftar penerima bantuan pemerintah unit pengolah pupuk organik (UPPO) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 5. Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

No	Penerima Bantuan	Desa	Kecamatan	Tahun Perolehan
1	Gapoktan Bunga Karang	Karang Bunga	Mandastana	2017
2	Gapoktan Kolam Kiri Dalam I	Kolam Kiri Dalam	Barambai	2017
3	Gapoktan Rawa Makmur	Danau Karya	Anjir Pasar	2018
4	Gapoktan Cahaya Baru	Cahaya Baru	Jejangkit	2018

(Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2018)

Pemanfaatan bahan organic sebagai pupuk organic dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik/ pupuk kimia. Sehingga secara ekonomi petani di Kabupaten Barito Kuala sangat diuntungkan. Secara ekonomis, pemanfaatan bahan-bahan organic dapat mengurangi biaya penggunaan pupuk anorganik/pupuk kimia mencapai 30%.

Bantuan yang diberikan pemerintah untuk unit pengolah pupuk organic (UPPO) berupa 1 unit alat pembuat pupuk (pemanfaatan untuk 10 ekor sapi), 1 Unit bangunan UPPO plus kandang sapi dan 1 unit angkutan roda 3.

4.2.9. Sinergitas Bersama Untuk Meningkatkan Desa Berkelanjutan (SIBAKANTAN)

Penerapan inovasi SIBAKANTAN untuk desa proklim lestari adalah untuk tercapainya pengelolaan lingkungan di tingkat desa secara berkelanjutan dan pemahaman mengenai perubahan iklim, penyebab dan dampak yang ditimbulkan dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

Gambar 4. 22. Verifikasi Proklim di Kampung Iklim Kebupaten Barito Kuala dan Penyerahan Piagam Proklim dari Menteri LHK

Melalui program inovasi SIBAKANTAN untuk desa proklim, Kabupaten Barito Kuala memperoleh beberapa penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup atas kontribusi dan upaya dalam menghadapi perubahan iklim.



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

Gambar 4. 23. Piagam Proklim yang Diraih Kabupaten Barito Kuala dari Menteri LHK

Program Kampung Iklim (Proklim) adalah prgram berlingkup nasional yang dikelola kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan kapasitas adaptasi tehadap dampak perubahan iklim dan penggunaan emisi gas rumah kaca, sesuai pada tabel dibawah ini.

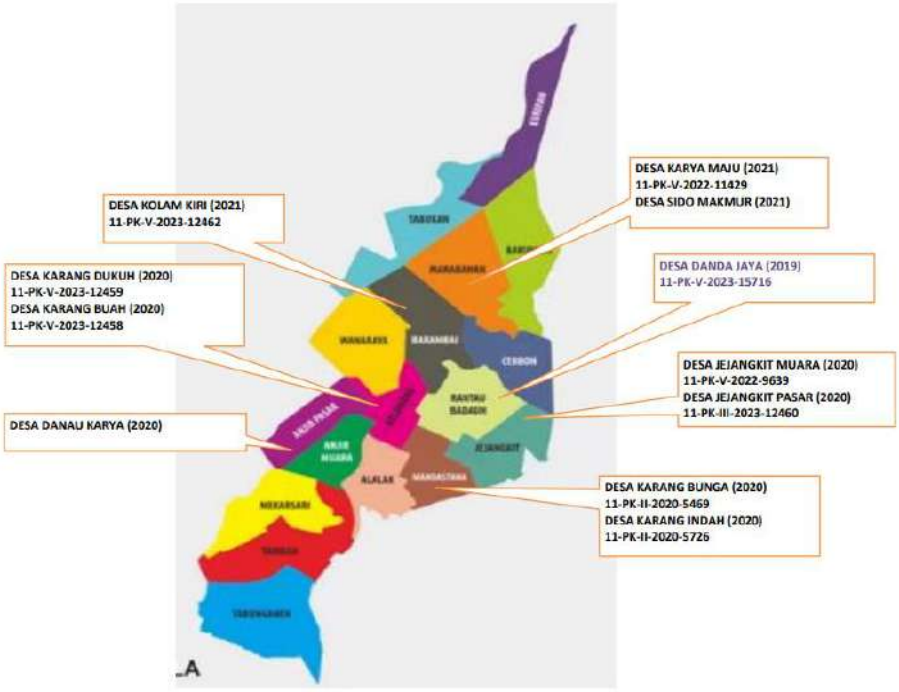
Tabel 4. 6. Tabel Perkembangan Desa Berkelanjutan (Desa Proklim) di Kabupaten Barito Kuala mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023

Tahun	Jumlah	Lokasi
2018	1	Desa Danda Jaya
2019	6	Desa Danda Jaya, Desa Karang Indah, Desa Karang Bunga, Desa Jejangkit Pasar, Desa Jejangkit Muara, Desa Danau Karya
2020	11	Desa Danda Jaya, Desa Karang Indah, Desa Karang Bunga, Desa Jejangkit Pasar, Desa Jejangkit Muara, Desa Danau Karya, Desa Barambai Kolam Kiri, Desa Karang Dukuh, Desa Karang Buah, Desa Karya Maju, Desa Sido Makmur
2021	11	Desa Danda Jaya, Desa Karang Indah, Desa Karang Bunga, Desa Jejangkit Pasar, Desa Jejangkit Muara, Desa Danau Karya, Desa Barambai Kolam Kiri, Desa Karang Dukuh, Desa Karang Buah, Desa Karya Maju, Desa Sido Makmur
2022	11	Desa Danda Jaya, Desa Karang Indah, Desa Karang Bunga, Desa Jejangkit Pasar, Desa Jejangkit Muara, Desa Danau Karya, Desa Barambai Kolam Kiri, Desa Karang Dukuh, Desa Karang Buah, Desa Karya Maju, Desa Sido Makmur
2023	22	Desa Danda Jaya, Desa Karang Indah, Desa Karang Bunga, Desa Jejangkit Pasar, Desa Jejangkit Muara, Desa Danau Karya, Desa Barambai Kolam Kiri, Desa Karang Dukuh, Desa Karang Buah, Desa Karya Maju, Desa Sido Makmur, Desa Puntik Dalam, Desa Puntik Luar, Desa Puntik Tengah, Desa Tabing Rimbah, Desa Terantang, Desa Sungai Pantai, Desa Sungai Gampa, Desa Sungai Gampa Asahi, Desa Anjir Pasar Kota, Desa Anjir Pasar Kota II, Desa Anjir Pasar Lama

Berdasarkan tabel diatas ada peningkatan desa proklim di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 sebesar 1 lokasi menjadi 22 lokasi di tahun 2023.



Gambar 4. 24. Grafik Perkembangan Lokasi Desa Proklim



Gambar 4. 25. Desa-desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Danda Jaya
(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

4.2.10. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Barito Kuala sebagian besar merupakan daerah hutan rawa gambut, dimana sebagian besar daerah ditumbuhi pohon galam. Dimana hutan rawa gambut merupakan hutan rawa basah yang tergenang. Gambut terbentuk tatkala bagian-bagian tumbuhan yang luruh terhambat pembusukannya, biasanya di lahan-lahan berawa, karena kadar keasaman yang tinggi atau

kondisi anaerob di perairan setempat. Tidak mengherankan jika sebagian besar tanah gambut tersusun dari serpih dan kepingan sisa tumbuhan, daun, ranting, pepagan, bahkan kayu-kayu besar, yang belum sepenuhnya membusuk. Kadang-kadang ditemukan pula, karena ketiadaan oksigen bersifat menghambat dekomposisi, sisa-sisa bangkai binatang dan serangga yang turut terawetkan di dalam lapisan-lapisan gambut. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada daerah rawa gambut kebanyakan terjadi pada musim kemarau yang disebabkan karena lahan gambut cepat mengalami kekeringan karena kadar penyimpanan airnya tidak maksimal (cepat terserap), selain itu faktor pendukung lainnya adalah struktur lapisan lahan daerah rawa gambut itu sendiri. Luasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 adalah seluas ±21,5 Ha.

Upaya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan tugas pemerintah daerah yang melibatkan pihak swasta (industri) dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara lain :

1. Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan

   Kegiatan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan pada daerah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan dilakukan untuk menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, dalam sosialisasi ini dihimbau juga kepada masyarakat untuk terus siap siaga dalam menghadapi dan mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 4. 26. Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan dan Kesiap Siagaan Karhutla



Gambar 4. 27. Apel Siap Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan di Perusahaan Tasnida dan TBM



Gambar 4. 28. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Jejangkit

2. Reboisasi dan Penghijauan

   Penghijauan ialah kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar lingkungan hutan, terutama ialah pada tanah milik rakyat dan milik pemerintah dengan tanaman keras, contohnya ialah jenis-jenis pohon hutan, pohon buah, tanaman perkebunan, dan sebagainya. Tujuan penanaman ini ialah agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, serta ditingkatkan kembali kesuburannya. Sedangkan reboisasi merupakan kegiatan penghutanan kembali kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan.

   Reboisasi dan penghijauan dilaksanakan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Batola dengan tujuan untuk menambah vegetasi dan memperluas tutupan vegetasi yang ada. Kegiatan reboisasi dan penghijauan

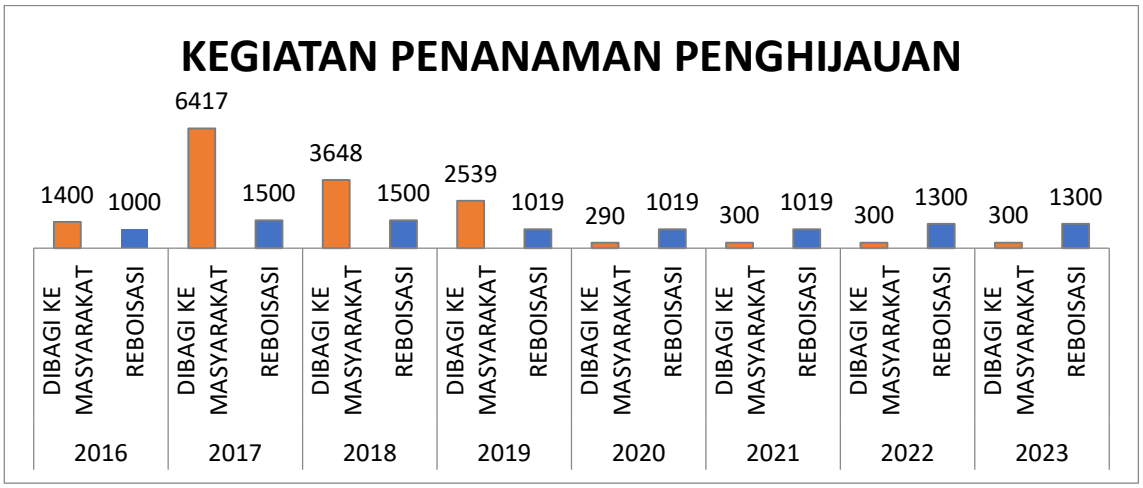
yang dilaksanakan melalui pengembangan dan pemeliharaan hutan rakyat, pohon penghijauan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan hutan kota, yang semuanya melibatkan masyarakat.

Tabel 4. 7. Reboisasi Tanaman Mangrove dan Tanaman Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala

No	Lokasi Tanam	Jumlah Ditanam (Pohon)	Jenis	Tahun Tanam
1	Kuala Lupak	1000	Bakau	2007
2	Pulau Bakut	2000	Rambai	2009
3	Pulau Kaget	1000	Rambai	
4	Pulau Kaget	1260	Rambai	2010
5	Pulau Kaget	1000	Bakau	
6	Pulau Kaget	2000	Bakau, Rambai	2011
7	Pulau Kaget	2000	Api-Api, Rambai	2012
8	Marabahan	1000	Trambesi, Gaharu	2013
9	Marabahan, Cerbon	2000	Trambesi	2014
10	Marabahan	6600	Trambesi,Angsana	2015
11	Pulau Bakut	2000	Api-api, dan Rambai	
12	Marabahan	1000	Trambesi	2016
13	Pulau Kaget	1500	Bakau, rambai	2017
14	Marabahan	6417	Trambesi,Mahoni,Sengon, Ketapang kencana, dan tanaman buah	2017
15	Kuala lupak	1500	Bakau	2018
16	Jejangkit	2450	Angsana, Trambesi, Alpukat, Ketapang, Bougenfil	2018
17	Handil Bakti	1013	Bougenfil, Pucuk Merah	2018
18	Kuala Lupak	1000	Bakau	2019
19	Bakumpai	1000	Trambesi, Angsana	2019
20	Belawang dan Marabahan	1019		2021

No	Lokasi Tanam	Jumlah Ditanam (Pohon)	Jenis	Tahun Tanam
21	Kuala Lupak	1300	Bakau	2022
22	Marabahan	300	Trendesi dan Angsana	2022
22	Kuala Lupak	1300	Bakau	2023
23	Marabahan	300	Trendesi dan Angsana	2023

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala Tahun 2022)



Gambar 4. 29. Grafik Kegiatan Penanaman Penghujauan

Penanaman pohon mangrove di pesisir kuala lupak (luar kawasan konservasi) ini sangat penting untuk kelangsungan hidup biota air sehingga ekosistem yang ada di air tidak terganggu. Penanaman dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Bupati), akademisi, perusahaan. Pelajar peduli lingkungan dan masyarakat di Desa Kuala Lupak.

Prinsip berkelanjutan (*sustainability*) memiliki implikasi kemampuan untuk bertahan. Dalam ekologi artinya cukup sederhana yaitu hidup di dalam daya dukung biosfer. Daya dukung dimaksudkan sebagai kemampuan untuk mengasimilasi sampah, menyediakan makanan dan sumber lainnya dalam waktu yang lama (Chiras, 1992).

Untuk para ilmuan, krisis tidak berkelanjutan (*unsustainability*) disebabkan kehidupan kita melebihi daya dukung bumi. Oleh karena itu agar krisis tersebut dapat diatasi perlu membawa masyarakat agar hidupnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekologi yang mampu menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan planet bumi (Chiras, 1991). Masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable society*) hidup di dalam lingkungan dengan daya dukung dan mencari sumber-sumber lain yang cukup untuk generasi yang banyak. Pada masyarakat seperti ini, bumi dipandang sebagai pusaka yang tak ternilai yang harus diwariskan dari generasi ke generasi.



Gambar 4. 30. Aksi Penanaman Pohon Penghijauan Di Kuala Lupak Tabunganen

3. Masyarakat Peduli Api (MPA)

Pemerintah Daerah terus berupaya melalui adanya sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya kebakaran hutan dan lahan secara rutin dan terus menerus, terkait dengan tindak lanjut sosialisasi tersebut adalah terbentuknya organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA).

Tabel 4. 8. Data Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kab. Barito Kuala

No.	Nama MPA	Lokasi (Kecamatan)	Status Sementara
1	Nurul Iman	Marabahan Kota	Aktif
2	BPK Sudirman	Marabahan Kota	Aktif
3	Kamyeksa	Marabahan Kota	Aktif
4	Seman Fire Fighter	Marabahan Kota	Aktif
5	Raja Tumpang	Marabahan Kota	Aktif
6	Karya Antik	Marabahan Kota	Aktif
7	Penghulu	Marabahan Kota	Aktif
8	Kompek Korpri	Marabahan Kota	Aktif
9	Darussa'adah	Marabahan Kota	Aktif

No.	Nama MPA	Lokasi (Kecamatan)	Status Sementara
10	Bar-Bar	Anjir Pasar	Aktif
11	Anpas	Anjir Pasar	Aktif
12	BPK 23 HG	Anjir Muara	Aktif
13	BPK Baiturrahman	Jl. Trans Kalimantan Km. 23 Anjir Serapat Baru	Aktif
14	BPK ASB	Anjir pasar	Aktif
15	BPK Syafa'atul	Mandastana	Aktif
16	Manuntung	Mandastana	Aktif
17	MPA Darul Fathanah	Tabukan	Aktif
18	Rukun Sejahtera	Belawang	Aktif
19	Lingkungan Hidup Sejahtera Kampung Siaga	Cerbon	Aktif
20	Bencana	Desa Penghulu	Aktif
21	Sama Itah	Desa Antar raya	Aktif
22	Gapoktan Karantika	Rantau Badauh	Aktif
23	Karya Sejahtera	Rantau Badauh Mekarsari	Aktif
24	KT Berkat Mufakat 1 Mekarsari Badan Permusyawaratan Desa	Tamban	Aktif
25	BPK Dua Sembilan Jejangkit Pasar Tabunganen	Alalak	Aktif
26	Barambai Kolam Kiri	Desa Jejangkit Pasar	Aktif
27	Semangat Dalam	Tabunganen	Aktif
28	BPK Barabai Kolam Kiri	Barambai	Aktif
29	BPK Semangat Dalam	Alalak	Aktif

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala tahun 2022)

Sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala sudah terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang menjadi binaan perusahaan yang ada di sekitarnya.

4. Rapat koordinasi lintas sektor

   Upaya dalam penangulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan tugas pemerintah daerah yang melibatkan pihak swasta (industry) dan masyarakat. Adapun pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Barito Kuala, sedangkan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah Dinas Lingkungan Hidup

Kab. Batola, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, TNI.



Gambar 4. 31. Rapat Koordinasi dan Apel Siaga Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan



Gambar 4. 32. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

5. Pengintegrasian Pencegahan Karhutla

   Pemerintah daerah mewajibkan pengintegrasian pencegahan karhutla dalam dokumen lingkungan pada perusahaan di wilayah kab. Batola. Adapun data perusahaan yg telah melakukan pengintegrasian dlm dokumen adalah PT. Putra Bangun Bersama, PT. Agri Bumi Sentosa, PT. Barito Putra Plantation, PT. Tiga Daun Kapuas, dan PT. Palmina Utama.

6. Penegakan Hukum

   Berikut adalah Peraturan-peraturan yang mendasari pelarangan bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan antara lain termuat dalam :

   1) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2) Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
3) Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
5) Peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di provinsi Kalimantan Selatan.
6) Undang-undang No. 32 Tahun 2019 tentang penanganan hutan dan lahan
7) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

BAB V

PENUTUP

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pencemaran Air

Terdapat kegiatan usaha yang telah memiliki IPAL namun tidak berfungsi dengan baik (industri dan rumah tangga) dan kegiatan usaha yang belum mempunyai IPAL individu maupun komunal (kegiatan industri, domestik, pasar umum, warung makan dan pertanian) yang membuang langsung limbah ke badan sungai sehingga menyebabkan pencemaran/menambah beban pencemaran disungai, adanya aktifitas pertanian yng menggunakan pestisida yang berlebihan dibagian hulu kabupaten Barito Kuala yang apabila tercuci air hujan mengakibatkan pencemaran air tanah dan sungai. Rendahnya kesadaran masyarakat yang melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari berupa pembuangan limbah cair dan padat ke sungai

2. Pencemaran Udara

Sumber emisi bergerak yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala berupa kendaraan bermotor (mobil, bus, truk, sepeda motor, kapal/perahu motor). Sedangkan sumber tidak bergerak berupa kegiatan industri, domestik, peternakan, pertanian, dan kegiatan Tempat Pembuangan Sampah (TPA). Kecenderungan pencemaran udara (Pressure/tekanan) terutama di wilayah perkotaan di Kabupaten Barito Kuala khususnya Kecamatan Marabahan, Kecamatan Alalak dan Kecamatan Tamban yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya polutan udara dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat baik bisnis, jasa, perdagangan dan kegiatan industri, selain itu juga bertambahnya jumlah kendaraan bermotor (mobil, bus, truk, sepeda motor) yang pertumbuhanya sangat pesat saat ini. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor (mobil, bus, truk, sepeda motor) baik kendaraan pribadi, angkutan umum maupun transportasi industri berdampak pada meningkatnya paparan emisi gas

buang dari kendaraan bermotor. Hal tersebut menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama di lokasi padat lalu lintas. Kebakaran hutan dan lahan merupakan penyumbang pencemaran udara untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala.

3. Pencemaran Sampah

Pencemaran sampah terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola hidup yang cenderung konsumtif dari masyarakat yang menyebabkan semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan. timbunan sampah yang bersumber dari kegiatan: (1) Industri besar dan kecil, (2) Rumah Tangga, (3) Pasar, Pertokoan, Rumah Makan dan Terminal,(4) Pendidikan, (5) Perkantoran (6) Hotel dan Penginapan, (7) Rumah Sakit dan Puskesmas, (8) Peternakan, (9) Pertanian, (10) Perkebunan dan (11) dan sebagainya. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia dan kurangangnya pengelolaan sampah rumah tangga yang kurang baik merupakan permasalahan yang ada di Kabupaten Barito Kuala ditambah dengan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik ke sungai maupun ke tempat penimbunan sampah yang bukan tempatnya yang mengakibatkan sampah tidak terkelola dengan baik.

4. Kebakaran Hutan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Barito Kuala terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia, adanya kegiatan aktifitas pertanian berupa kearifan lokal yang dilakukan secara turun temurun dimana masyarakat membakar jerami dan rumput liarnya pada lahan individu yang apabila diprediksi jika setiap individu memiliki 1,5 ha yang masing-masing secara bersamaan membakarnya setiap selesai panen yang tentunya akan menyebabkan pencemaran udara, belum lagi kegiatan lain yang dapat menyebabkan lahan ikut terbakar. Pemerinah Kabupaten Barito Kuala telah melakuan berbagai upaya untuk menekan jumlah kebakaran hutan dan

lahan baik secara preventif maupun penegakan hukum dengan segala perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dari Pusat sampai tingkat Provinsi. Peraturan-peraturan yang mendasari pelarangan bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan telah dikeluarkan oleh pemerintah namun kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan menyebabkan masih adanya kegiatan pembakaran lahan oleh masyarakat.

5. Banjir

Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala disebabkan karena curah hujan yang tinggi, adanya banjir kiriman dari kabupaten lain ke kabupaten Barito Kuala pada wilayah yang datarannya lebih rendah (kecamatan Jejangit dan Kecamatan Mandastana) yang berdampak pada terganggunya aktifitas warga (hampir semua rumah, sekolah, tempat ibadah, kantor dan jembatan terendam) dan terputusnya akses keluar masuk ke wilayah Jejangkit Muara. Tidak turunnya debit air di Kecamatan Jejangkit mengakibatkan 3.000 ha lahan pertanian terendam yang berpotensi gagal tanam dan gagal panen jika durasi banjirnya lama. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah banjir salah satunya melalui distribusi bantuan namun dari data yang disampaikan kecamatan masih ada korban banjir yang belum menjadi sasaran bantuan dan masih dam proses pendataan.

5.2. Saran

Dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan strategi : Pro Cooperation, Pro Green Development , Pro Green Law Enforcement, Green Regulation & Budgeting.

1. Membuat kebijakan berupa peraturan bupati tentang pengelolaan dana desa, pihak swasta (CSR) untuk pembuatan Tripikon S di setiap desa,

sehingga meningkatnya kualitas air sungai, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

2. Memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan limbah sesuai peraturan yang berlaku.
3. Melakukan penanaman pohon di wilayah Kabupaten Barito Kuala untuk penyerapan Karbon Dioksida.
4. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan produk pupuk organic pada lahan pertanian dan perkebunan dan membantu dalam pemasarannya.
5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan melalui dana desa dan pihak swasta (CSR).
6. Mengurangi/pembatasan penggunaan sampah plastik
7. Merubah prilaku masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan melalui pemberdayakan Lembaga/Kelompok/Organisasi Pecinta Lingkungan
8. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat (MPA) melalui sosialisasi dan pemasangan himbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
9. Melakuan pembersihan anak sungai dan kanal air, serta koordinasi antar semua pihak terkait dalam mengatasi banjir.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, rencana dan tindak lanjut termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan Kepala Daerah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Memperhatikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala.
2. Berupaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai di dalam RPJMD.

3. Memperhatikan status dan kualitas lingkungan dalam pengambilan kebijakan.
4. Merencanakan pembangunan dengan berwawasan lingkungan berdasarkan RPPLH Kabupaten Barito Kuala dengan memperhatikan Daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.
5. Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran air sungai, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
6. Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.
7. Menambah inovasi di bidang lingkungan serta produk hukum bidang lingkungan hidup dimana pencemaran berlangsung dimana-mana dengan laju begitu cepat mengarah kepada dua hal yaitu, pembuangan senyawa kimia tertentu yang makin meningkat terutama akibat kegiatan industri dan transportasi. Yang lainnya akibat penggunaan berbagai produk bioksida dan bahan-bahan berbahaya aktivitas manusia. Beban pencemaran dalam lingkungan air sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia yang kadang kala sangat berbahaya dan beracun. Pencemaran lingkungan sudah terjadi pula di lingkungan udara dan tanah dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Penyebab pencemaran ini selain disebabkan oleh aktivitas manusia (antropogemik) juga dapat ditimbulkan oleh kegiatan alami, seperti kebakaran hutan.
8. Menjalankan program pengendalian, pencegahan Degradasi lahan dan pemulihan lahan kritis dalam rangka mengontrol luasan lahan kritis, untuk bisa mengendalikan, ada empat indikator (pengendalian), yakni pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan nutrisi tanah. Kemudian critical rate atau angka lahan kritis yang tinggi, serta

coverage rate atau angka tutupan lahan yang rendah. Selain itu Dinas terkait menjaga tren angka lahan kritis dan presentase empat indikator pengendalian tersebut.

9. Melakukan pengelolaan lingkungan terhadap limbah, sampah serta pencemaran terhadap tanah khususnya kontaminasi tanah dengan tujuan agar melindungi fungsi mineral dan kesuburan dalam tanah, semua pihak dari pencemaran yang berbahaya.

Rekomendasi untuk rencana tindak lanjut merupakan rangkuman dari pembahasan isu

No.	Subyek Isu	Deskripsi Isu	Usulan Program
1.	Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Meningkatnya jumlah timbulan sampah penduduk dan pencemaran lingkungan oleh limbah	• Pembatasan sampah plastik • Penerapan program mengurangi sampah mulai dari sumbernya • Pengawasan terhadap usaha/kegiatan, yang menghasilkan limbah padat/cair
2.	Penurunan kualitas dan kuantitas air	Terbatasnya dan tercemar sumber air baku	• Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu • Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar di Daerah Aliran Sungai • Purifikasi Daerah Aliran Sungai yang tercemar
3.	Banjir	Banjir terjadi disebabkan perubahan tata guna lahan dimana catchment area	• Area wilayah berpotensi banjir dibuat

		tidak mampu atau tidak tersedia untuk menyerapkan air ke tanah sehingga air akan menggenangi lahan atau kawasan permukiman.	waduk/embung untuk mengatasi masalah banjir • Normalisasi dan Pembuatan kanal yang bisa membuat system bypass aliran banjir langsung ke sungai
4.	Degradasi Lahan	Degradasi lahan proses kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Perubahan kondisi lingkungan cenderung merusak dan tidak diinginkan	• Penegakan Kebijakan lahan dengan cara penataan terhadap peraturan dan ketentuan RTRW daerah • Pemetaan dan Pengelolaan lahan kritis • Rehabilitasi lahan kritis • Menjaga kelestarian lahan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Timbulnya titik api /Hotspot di wilayah Kabupaten Barito Kuala	• Pengelolaan hutan / lahan mudah terbakar dengan cara preventif • Penyuluhan kepada masyarakat di area hotspot

1. Penanganan Pengelolaan Persampahan dan Limbah

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan penanganan sampah meliputi : pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

2. Penanganan Penurunan kualitas dan kuantitas air

Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Adapun penanganan untuk perbaikan kualitas air sehingga kualitas air membaik adalah sbb: Penyusunan dan penetapan perumusan kebijakan dan penetapan baku mutu air yang digunakan sebagai instrumen pencegahan pencemaran Inventarisasi status kualitas air dan aokasi beban pencemaran air untuk penetapan daya tampung beban pencemaran yang dipakai sebagai dasar penetapan program dan kebijakan yang akan dilakukan untuk perbaikan kualitas air sungai Penurunan beban pencemaran air dari sumber domestic melalui pembinaan kepada pemerintah daerah, industry maupun masyarakat serta pilot project pembangunan IPAL untuk mengolah air limbah domestic Penurunan beban pencemaran dari sumber

usaha skala kecil melalui pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat dan usaha skala kecil dalam mengelolaa air limbahnya serta pembangunan IPAL dan biodigester dari beberapa kegiatan usaha skala kecil Penurunan beban pencemaran dari sumber non point source melalui pembinaan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan percontohan wetland untuk menurunkan beban pencemaran dari air limbah non point source Penurunan beban pencemaran dari sumber industry melalui pembinaan untuk mendorong kinerja perusahaan guna meningkatkan ketaatan terhadap baku mutu serta pengawasan terhadap kasus-kasus pencemaran.

3. Penanganan Banjir

Berikut ini ada beberapa cara untuk penanggulangan bencana banjir : Membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air sehingga jangan sampai tercemari dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat. Melakukan reboisasi tanaman khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuar lahan hijau untuk penyerapan air. Berhenti membangun perumahan di tepi sungai, karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai. Hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Sebenarnya menebang pohon tidak dilarang dan menanam kembali pohon tersebut dan tidak membiarkan hutan menjadi gundul. Dengan melakukan cara penanggulangan banjir tersebut dapat mencegah bencana banjir.

4. Penanganan Degradasi Lahan

Degradasi atau penurunan kualitas lahan merupakan isu global utama dan masih menjadi isu penting. Erosi tanah, kelangkaan air, energi, dan

keanekaragaman hayati menjadi permasalahan lingkungan global sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Erosi tanah menyebabkan degradasi lahan karena dapat menurunkan kualitas tanah serta produktivitas alami lahan pertanian dan ekosistem hutan. Konservasi tanah dan air mengarah kepada terciptanya sistem pertanian berkelanjutan yang didukung oleh teknologi dan kelembagaan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan sumber daya lahan serta lingkungan. Upaya untuk mengurangi degradasi lahan dapat dilakukan melalui:

1) penerapan pola usaha tani konservasi seperti agroforestri, tumpang sari, dan pertanian terpadu,

2) penerapan pola pertanian organik ramah lingkungan,

3) peningkatan peran serta kelembagaan petani.

4) Menjadikan lahan sebagai hutan

Salah satu langkah untuk mencegah degradasi lahan adalah dengan mengubah lahan menjadi hutan. Seperti yang diketahui hutan merupakan kawasan yang sangat penting untuk makhluk dimuka bumi. Hutan sebagai paru-paru dunia sehingga bisa menjadi penyeimbang di bumi dari berbagai macam bencana atau kerusakan. Melakukan penanaman pohon dilahan yang kosong bisa menjadi cara mengubah lahan menjadi hutan

5) Melakukan reboisasi

Reboisasi adalah cara efektif untuk menyelamatkan lingkungan terutama menyelamatkan tanah, udara, lingkungan dan binatang. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon di hutan gundul adalah cara terbaik untuk mencegah degradasi lahan. Pepohonan tidak hanya akan menyelamatkan erosi tanah, namun juga memapu menyimpan air didalam tanah

6)Membuat saluran pelepas air

Membuat saluran pelepas air bisa menjadi cara untuk mengatasi degradasi lahan. Biasanya didaerah dengan curah hujan tinggi memiliki tanah yang basah . jika tanah tersebut berupa gunung atau bukit atau bahkan dataran

tinggi, maka solusi yang pas untuk mencegah penurunan kualitas tanah dengan cara membuat sengkedan atau terasering.

5. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dalam cakupan yang luas bisa berdampak buruk pada lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Untuk itu, penting kiranya untuk mengetahui cara menjaga kelestarian hutan serta mencegah maupun menanggulangi kebakaran hutan agar bencana tersebut tidak merusak lingkungan. Beberapa cara yang cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi kebakaran hutan antara lain: Memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan. Tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Api unggun harus dipadamkan terlebih dahulu jika ingin meninggalkan hutan. Melakukan patroli hutan secara berkala untuk mengecek kondisi hutan. Melakukan pemotretan citra secara berkala terutama di wilayah dengan titik api yang tinggi. Menyediakan mobil pemadam kebakaran yang siap untuk digunakan. Apabila terjadi kebakaran hutan berskala kecil, maka lakukan penyemprotan secara langsung ke daerah yang terbakar. Jika kebakaran terjadi dalam skala besar, maka lakukan penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter juga membuat hujan buatan.

Tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran hutan adalah:

1. Melakukan identifikasi masalah dan analisa mengenai penyebab kebakaran hutan
2. Mengumpulkan data-data penting mengenai keterangan dari kebakaran hutan atau lahan secara rinci dan jelas
3. Pengawasan dan evaluasi kejadian untuk mencari sumber titik api pertama kebakaran hutan

4. Segera mencari sumber air terdekat dari lokasi kebakaran hutan atau lahan
5. Meminta bantuan warga atau masyarakat sekitar untuk ikut serta memadamkan api bersama-sama agar api lebih cepat padam dan tidak menyebar terlalu jauh
6. Meminta bantuan petugas hutan dan pemerintah setempat jika kebakaran hutan atau lahan terjadi dalam skala besar dan perlu peralatan yang lebih canggih, misalnya mobil pemadam kebakaran dan lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan bantuan penanggulangan bencana alam.

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2022, Data Tahunan BPBD tahun 2019-2022. BPBD Kababupaten Barito Kuala

Badan Pusat Statistik. 2021. *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2022*. BPS Kabupaten Barito Kuala.

Badan Pusat Statistik. 2022. *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2023*. BPS Kabupaten Barito Kuala.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). 2019. *Data Tahunan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan Tahun 2019*. BKSDA Kalimantan Selatan.

Bappelitbang. 2023. *Data Tahunan Bappelitbang tahun 2019-2022.* Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala.

BPKHTL Wilayah V.2023. *Data Tahunan BPKHTL Wilayah V tahun 2022*. BPKHTL Wilayah V Kalimantan Selatan

Dinas Lingkungan Hidup. 2022. *Renstra DLH Kab. Barito Kuala 2017-2022*,. DLH Kabupaten Barito Kuala.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2022. *Data Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022*. Dinas TPH Kabupaten Barito Kuala.

Dinas Kesehatan. 2022. *Data Tahunan Dinas Kesehatan tahun 2019-2022*. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Nicholls, R.J. and Tol, R.S.J.. 2006. *Impact and responses to sea-level rise: a global analysis of the SRES scenarios over the twenty-first century, Philosophical Transaction of the Royal Society* A 364: 1073-1095.

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

LAMPIRAN A

TABEL DATA IKPLHD

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutup di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Nama Kawasan					Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
						Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	1.	Kawasan Hutan Lindung		-	Data Area Tutupan Lahan untuk Masing-masing Nama Kawasan hanya tercantum dalam Luasan Kawasan	Data Area Tutupan Lahan untuk Masing-masing Nama Kawasan hanya tercantum dalam Luasan Kawasan	Data Area Tutupan Lahan untuk Masing-masing Nama Kawasan hanya tercantum dalam Luasan Kawasan	Data Area Tutupan Lahan untuk Masing-masing Nama Kawasan hanya tercantum dalam Luasan Kawasan
		2.	Kawasan Bergambut		-				
		3.	Kawasan Resapan Air		-				
	Kawasan Perlindungan Setempat	1.	Sempadan Pantai		-				
		2.	Sempadan Sungai		3,019.00				
		3.	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk		-				
		4.	Ruang Terbuka Hijau		64.523				
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1.	Kawasan Suaka Alam		-				
		2.	Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya		-				
		3.	Suaka Margasatwa dan Suaka Marga satwa Laut		3,603.00				
		4.	Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		1.74				
		5.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau		-				
		6.	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		-				
		7	Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		120.00				
		8.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		-				
	Kawasan Rawan Bencana	1.	Kawasan Rawan Tanah Longsor		-				
		2.	Kawasan Rawan Gelombang Pasang		-				

		3.	Kawasan Rawan Banjir		243,273.42				
	Kawasan Lindung Geologi	1.	Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	-				
				ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	-				
				iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	-				
		2.	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	-				
				Kawasan Rawan Gempa Bumi	-				
				Kawasan Rawan Gerakan Tanah	-				
				Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	-				
				Kawasan Rawan Tsunami	-				
				Kawasan Rawan Abrasi	-				
				Kawasan Rawan Gas Beracun	-				
		3.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	Kawasan Imbuhan Air Tanah	-				
				Sempadan Mata Air	-				
	Kawasan Lindung Lainnya	1.	Cagar Biosfer		-				
		2.	Ramsar		-				
		3.	Taman Buru		-				
		4.	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		-				
		5.	Kawasan pengungsian Satwa		-				
		6.	Terumbu Karang		-				
		7.	Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		-				
Kawasan Budidaya									3,919.34

Sumber : Dinas PUPR Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan/ Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Alalak	6,090	4,596	Tidak Terdapat Data Luasan Lahan Kering per Kecamatan	245	Tidak Terdapat Data Luas Lahan Hutan per Kecamatan	Tidak Terdapat Luas Badan Air per Kecamatan
2	Marabahan	16,386	5,714		1,063		
3	Mandastana	7,264	6,336		228		
4	Anjir Muara	3,498	8,227		605		
5	Anjir Pasar	3,189	9,411		725		
6	Tamban	6,618	6,618		2,872		
7	Tabunganen	8,034	15,966.0		1,685		
8	Mekarsari	6,413	7,937		3,681		
9	Belawang	3,232	4,788		236		
10	Berambai	8,660	9,640		1,126		
11	Bakumpai	20,623	5,477		194		
12	Tabukan	10,348	6,252		537		
13	Wanaraya	1,170	2,580		3,130		
14	Rantau Bedauh	18,195	7,986		306		
15	Cerbon	14,839	5,761		582		
16	Jejangkit	16,655	3,645		513		
17	Kuripan	32,400	1,950		80		
18	**Total**	**183,614.0**	**112,884.0**		**17,808**		

Sumber : Dinas PUPR Kab. Barito Kuala, 2023
Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2023

Tabel-3. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	883.00
2	Hutan Lindung	-
3	Taman Nasional	-
4	Taman Wisata Alam	120.00
5	Taman Buru	-
6	Cagar Alam	2.00
7	Suaka Margasatwa	3606.63
8	Taman Hutan Raya	-
9	Hutan Produksi Konversi	883.02
10	Hutan Produksi Terbatas	-
11	Kawasan Suaka Alam	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	-
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3	Hutan Kota	-
4	Taman Hutan Raya	-
5	Taman Keanekaragaman Hayati	-

Sumber : BPKHTL Wilayah V, 2023

Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*5)*	*(6)*	*(7)*
1. Mamalia	*Aonyx cinerea*	Berang-berang		Genting (VU)		TD
	Callosciurus notatus	Bajing kelapa, Tupai		Resiko lebih rendah (LR)	D	
	Macaca fascicularis	Monyet kra, Warik		Resiko lebih rendah (LR)		TD
	*Nasalis larvatus**	Bekantan	*v*	Terancam (EN)	D	
	Paradoxurus hermaphroditus	Musang luwak, musang pandan		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Presbytis cristata	Lutung kelabu, Hirangan		Terancam (EN)	D	
	Prionailurus viberrinus	Kucing Hutan		Tidak ditentukan (LC)	D	
	Pteropus vampyrus	kalong besar, Kaluang		Terancam (EN)		TD
	Sus barbatus	Babi hutan, Bayi		Resiko lebih rendah (LR)		TD
	Trachypithecus sp	Lutung/hirangan		Genting (VU)	D	
	Trachypithecus cristatus	Lutung		Genting (VU)	D	
	Tupaia sp	Tupai		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Tupai tana	Tupai tanah/tangkalisan		Tidak ditentukan (LC)		TD
2. Aves	*Accipiter sp.**	Elang-alap		Tidak ditentukan (LC)	D	
	Acridotheres javanicus	Kerak kerbau, jalak kerbau		Genting (VU)		TD
	Aegithina tiphia	Cipoh kacat		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Aethopyga temminckii	Burung-madu ekor-merah, Suit		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Alcedo euryzona**	Raja-udang kalung-biru, Binti		Nyaris punah (CR)	D	
	*Anhinga melanogaster**	Pecuk ular		Nyaris terancam (NT)	D	
	*Anthracoceros malayanus**	Kangkareng hitam, Alak-alak		Genting (VU)	D	
	*Anthreptes malacensis**	Burung-madu kelapa, Suit		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Ardeola speciosa	Blekok sawah		Tidak ditentukan (LC)		TD

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*5)*	*(6)*	*(7)*
	Artamus leucorhynchus	kekep babi		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Centropus sinensis	Burung bubut besar		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Charadrius sp	Cerek		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Collocalia esculenta	Walet sapi		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Copsychus malabaricus	Kucica hutan, Tinjau karang		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Delichon dasypus	Layang-layang rumah		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Dendrocygna sp	Belibis		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Dendrocopos canicapillus	Caladi belacan		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Dendrocopos moluccensis	Pelatuk beras, Caladi tilik		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Dendrocygna javanica	Belibis batu		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Egretta intermedia**	Kuntul perak		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Elanus caeruleus**	Elang tikus		Tidak ditentukan (LC)	D	
	Geopelia striata	Perkutut jawa		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Halcyon chloris**	Cekakak sungai, Raja-udang, Dandang		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Halcyon smyrnensis	Raja udang biru		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Haliastur indus**	Elang bondol		Tidak ditentukan (LC)	D	
	*Haliaeetus leucogaster**	Elang laut perut putih		Tidak ditentukan (LC)	D	
	Hirundo tahitica	Layang-layang batu		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Ictinaetus malayensis**	Elang hitam, Tembunau		Tidak ditentukan (LC)		TD

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*5)*	*(6)*	*(7)*
	Ketupa ketupu	Beluk ketupa, Kulai-kulai		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Leptocoma calcostetha	Burung Madu		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Leptoptilos javanicus**	Bangau tontong		Genting (VU)	D	
	Lonchura fuscans	Bondol kalimantan, Pipit		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Lalage nigra	Kapasan kemiri		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Meiglyptes tristis	Caladi batu, Bilatuk		Terancam (EN)		TD
	*Nectarinia jugularis**	Burung-madu sriganti, Suit		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Orthotomus ruficeps	Cinenen kelabu, Prenjak		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Orthotomus sericeus	Cinenen merah, Hawat, Curiak		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Passer montanus	Gereja eurasia		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Pelargopsis capensis**	Pekaka emas, Raja-udang, Sampikakah		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Pericrocotus cinnamomeus	Sepah Kecil		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Pericrocotus flammeus	Sepah hutan		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Pachycephala grisola	Kancilan Bakau		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Psittacula alexandri	Betet biasa		Nyaris terancam (NT)	D	
	Pycnonotus aurigaster	Cucak kutilang		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Pycnonotus goiavier	Merbah cerukcuk, Karuang		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Rhipidura javanica**	Kipasan belang		Tidak ditentukan (LC)	D	
	Todirhamphus sanctus	Cekakak suci		Tidak ditentukan (LC)		TD

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*5)*	*(6)*	*(7)*
	Treron vernans	Punai gading, Punai cerucuk		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Tringa hypoleucos	Trinil pantai		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Zosterops flavus	Kacamata Jawa		Terancam (EN)	D	
3. Reptilia	*Chrysopelea paradisi*	Ular terbang		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Cerberus rynchops	Ular air		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Homalopsis buccata	Ular air tawar bergaris, Paced water snake		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Mabuya multifasciata	Kadal, Bingkarungan		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Naja sputatrix	Ular tadung		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Python reticulatus	Ular sawah		Tidak ditentukan (LC)		TD
	*Tomistoma schlegeli**	Buaya sapit, Senyulong		Genting (VU)	D	
	Varanus salvator	Biawak		Tidak ditentukan (LC)		TD
4. Pisces	*Periophthalmus*	Tempakul		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Plotosus sp	Sembilang		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Channa striata	*Haruan*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Channa micropeltes	*Tauman*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Trichopodus trichopterus	*Sesapat*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Tricophodus pectoralis	*Sapat siam*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Anabas testudineus	*Papuyu*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Osphronemus gourami	*Kalui*		Tidak ditentukan (LC)		TD

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*5)*	*(6)*	*(7)*
	Helestoma temminki	*Biawan*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Belontia hasselti	*Kapar*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Mystus nemurus	*Baung bangku*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Mystus sp	*Baung kuning*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Mystus wickii	*Baung calak*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Mystus wolfii	*Panting*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Mystus nigricep	*Panting sanggiringan*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Mystus gulio	*Lundu*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Arius maculates	*Bidukang*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Pseudotropius brachypopterus	*Riu*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Clarias sp	*Pentet*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Pangasius lithostoma	*Lawang*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Pangasius nasutus	*Tekang Pantik*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Pangasius sutchi	*Patin*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Bagroides melapterus	*Pepuntin*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Krytopterus sp	*Lais kaca*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Phalachronotus micronemus	*Lais bamban*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Beladontichthys dinema	*Tabiring*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Wallago leeri	*Tapah*		Tidak ditentukan (LC)		TD

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*5)*	*(6)*	*(7)*
	Plotosus canius	*Sembilang*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Puntiuplites bulu	*Sanggang*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Cosmochilus harmandi	*Sapan*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Amblyrhynchichthys truncatus	*Kapas / bilar mata*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Hampala macrolepidota	*Adungan*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Leptobarbus hoevenii	*Jelawat*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Osteochilus melanopleurus	*Kelabau*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Thynnichthys thynnoides	*Menangin*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Cyclocheilichthys apogon	*Puyau*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Rasbora einthovenii	*Saluang barik*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Rasbora tornieri	*Saluang habang*	*v*	Tidak ditentukan (LC)		
	Rasbora borneensis	*Saluang batang*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Oxyeolotris marmorata	*Bakut*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Oreochromis niloticus	*Nila*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Polynemus paradiseus	*Bulu ayam*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Mugil cephalus	*Belanak*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Chanos chanos	*Bandeng*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Lutjanus lutjanus	*Kakap*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Ambassis miops	*Baga baga*		Tidak ditentukan (LC)		TD

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*5)*	*(6)*	*(7)*
	Synaptura comersoniana	*Sebelah*		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Corica soborna	*Bilis*		Tidak ditentukan (LC)		TD
5. Tumbuhan	*Acanthus ilicifolius*	Jeruju		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Acanthus montanus			Tidak ditentukan (LC)		TD
	Acrostichum aureum	paku laut		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Acrostichum speciosum			Tidak ditentukan (LC)		TD
	Aglaia cuculLata			DD		TD
	Alstonia angustiloba	pulai hitam		Terancam (EN)		TD
	Alternanthera sessilis	Kremah		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Avicennia marina	api-api putih		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Avicennia sp.	api-api		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Barringtonia asiatica	butun		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Bruguiera parviflora	lenggadai		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Calophyllum inophyllum	nyamplung		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Cayratia trifolia	Anggur semak, anggur liar				TD
	Cerbera manghas L.	bintaro		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Clerodendron inerme	Volkarmelia inermis				TD
	Crinum asiaticum	bakung putih		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Cyperus rotundus	Teki ladang		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Eichhornia crassipes	eceng gondok		Tidak ditentukan (LC)		TD

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*5)*	*(6)*	*(7)*
	Eleocharis dulcis	purun tikus		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Excoecaria agallocha	kayu buta-buta		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Fagraea fragrans	tembesu; tembusu		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Fagraea sororia	tembusu		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Ficus retusa	ara jejawi		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Fagraea erenulata	perdu		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Gluta renghas	rengas		Nyaris terancam (NT)		TD
	Heritiera littoralis	dungun kecil		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Hibiscus tiliaceus L.	waru		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Lasia spinosa			Tidak ditentukan (LC)		TD
	Lumnitzera racemosa	Teruntum		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Melaleuca cajuputi	Kayu putih		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Melastoma candidum	senggani		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Musa sp.			Tidak ditentukan (LC)		TD
	Nephrolepis sp. (?radicans)	Paku		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Nypa fruticans	nipah		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Pandanus sp.	pandan wangi		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Pandanus tectorius	pandan duri		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Phragmites karka	Perumpung		Tidak ditentukan (LC)		TD

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*5)*	*(6)*	*(7)*
	Phyllanthus emblica L.	Malaka		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Rhizophora apiculata	bakau minyak		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Rhizophora mucronata	bakau kurap		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Sarcolobus globosa	perdu				TD
	Scirpus mucronatus	kumbuh		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Sonneratia alba	perepat		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Sonneratia caseolaris	Pidada merah		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Stachytarpheta jamaicensis	pecut kuda		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Terminalia catappa	ketapang		Tidak ditentukan (LC)		TD
	Wedelia biflora	seruni laut				TD
	Xylocarpus granatum	bakau		Tidak ditentukan (LC)		TD

Sumber : BKSDA Kalimantan Selatan, 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa Yang ditangkarkan
1	2	3	4
1	Berdasarkan Informasi dari BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, tidak terdapat data terkait penangkaran satwa dan tumbuhan liar di Kabupaten Barito Kuala		
2			

Sumber : BKSDA Kalimantan Selatan, 2023

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tabunganen	7,052.72	-	1,200	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tidak Terdapat Data Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022	< 20 cm	Tidak Terdapat Data Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022		
2		20 - < 50 cm			
3		50 - < 100 cm			
4		100 – 150 cm			
5		> 150 cm			

Sumber : BPDASHL Barito, 2023

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tidak Terdapat Data Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022	Ketebalan Solum	< 20 cm	-	-
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	-
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	-	-
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasar kuarsitik	-	-
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm³	-	-
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H2O) 1 : 2,5	<4,5 ; > 8,5	-	-
8		Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 ms/cm	-	-
9		Redoks	<200mV	-	-
10		Jumlah Mikroba	< 10^2 cfu/g tanah	-	-

Sumber : BPDASHL Barito, 2023

Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tidak Terdapat Data Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022	Subsidensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	-	-
		Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH ≤ 2,5	-	-
		Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm	-	-

Sumber : BPDASHL Barito, 2023

Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kecamatan Tabunganen	1913.91	26.00	-
2				
3				

Sumber : Laporan Akhir Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Mangrove Provinsi Kalimantan Selatan (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan)

Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tidak terdapat ekosistem padang lamun disekitar Kabupaten Barito Kuala	-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tidak terdapat ekosistem terumbu karang disekitar Kabupaten Barito Kuala	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukiman	9,591.10	-
2	Industri	434.37	-
3	Perkebunan	41,944.67	-
4	Semak Belukar	30,708.22	-
5	Tanah Kosong	12,396.07	-
6	Perairan/Kolam	3,919.34	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas(Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tambang		Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-
			Mikro	-	-
2	Perkebunan		Besar	57180.2325	-
			Menengah	-	-
			Kecil	19060.0775	-
			Rakyat	28586.37	-
			Mikro	-	-
3	Pertanian		Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-
			Mikro	-	-
4	Pemanfaatan Hutan		Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-
			Mikro	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Barito Kuala berdasarkan database perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan , tidak terdapat Usaha Pertambangan.					
2						

Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan, 2023

Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan/ Kecamatan	Lokasi	Penghijauan				Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tabunganen	Tabunganen	-	-	-	-	0.1	0.1	1,019
2	Tamban	Tamban	-	-	-	-	-	-	-
3	Mekarsari	Mekarsari	-	-	-	-	-	-	-
4	Anjir Pasar	Anjir Pasar	-	-	-	-	-	-	-
5	Anjir Muara	Anjir Muara	-	-	-	-	-	-	-
6	Alalak	Alalak	-	-	-	-	-	-	-
7	Mandastana	Mandastana	-	-	-	-	-	-	-
8	Jejangkit	Jejangkit	-	-	-	-	-	-	-
9	Belawang	Belawang	0.029	0.029	290	-	-	-	-
10	Wanaraya	Wanaraya	-	-	-	-	-	-	-
11	Barambai	Barambai	-	-	-	-	-	-	-
12	Rantau Badauh	Rantau Badauh	-	-	-	-	-	-	-
13	Cerbon	Cerbon	-	-	-	-	-	-	-
14	Bakumpai	Bakumpai	-	-	-	-	-	-	-
15	Marabahan	Marabahan	0.029	0.029	290	-	-	-	-
16	Tabukan	Tabukan	-	-	-	-	-	-	-
17	Kuripan	Kuripan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		**0.06**	**0.06**	**580**	**-**	**0.1**	**0.1**	**1,019**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Presentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kuripan	Kecamatan Kuripan	14,800	Tidak ada data kedalaman yang terukur	99.67	Tidak teridentifikasi

Sumber : Keputusan Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor: SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 tentang Penetapan Status Kerusakan

Tabel-18. Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**
Tidak terdapat data terkait Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022					

Sumber : BPHP Wilayah IX Banjarbaru, 2023

Tabel-19. Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**
	Tidak terdapat data terkait Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022			

Sumber : BPHP Wilayah IX Banjarbaru, 2023

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Spesies		Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
(1)	(2)		(3)	(4)
A	**Tumbuhan Alam**			
1	Gaharu	*Aquilaria malaccensis*	Kemedangan/Gubal	App II
B	**Satwa Liar**			
	Reptilia			
1	Ular sanca darah	*Python breitensteini*	Kulit	App II
2	Ular Sanca Kembang	*Python reticulatus*	Kulit	App II
3	Biawak	*Varanus salvator*	Kulit	App II
4	Bulus/labi-labi	*Amyda cartilaginea*	Hidup/ Konsumsi	App II
5	Kura-kura Ambon	*Cuora amboinensis*	Hidup/ Konsumsi	App II
6	Kura-kura sumatera	*Notochelys platynota*	Hidup (Pet)	App II
7	Kura-kura bergerigi	*Cyclemys dentata*	Hidup (Pet)	App II
8	Kura-kura pipi putih	*Siebenrockiella crassicollis*	Hidup (Pet)	App II
9	Ular Puraca Karung	*Acrochordus javanicus*	Kulit	NApp
	Aves			
1	Kutilang	*Pycnonotus Aurigaster*	Hidup (Pet)	NApp
2	Merbah Cerukcuk	*Pycnonotus Goiavier*	Hidup (Pet)	NApp
3	Tekukur Biasa	*Streptopelia Chinensis*	Hidup (Pet)	NApp
4	Decu belang	*Saxicola caprata*	Hidup (Pet)	NApp
5	Anis Kembang	*Zoothera Interpres*	Hidup (Pet)	NApp

Keterangan : App II = Appendiks CITES II

NApp = Non Appendiks CITES

Sumber : BKSDA Kalimantan Selatan, 2023

Tabel-21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tidak Terdapat Data Detail Terkait Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam			Wisata Alam Curiak (8)	Tidak Terdapat Data Detail Terkait Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam			
2				Wisata Alam Pulau Kembang (83,29)				
3				Wisata Alam Pulau Bakut (15,58)				
4								

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-22. Kualitas Air Sumur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg p (mg/L)	NO 3 sbg N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Bariu m (mg/L)	Boron (mg/L)
			Lintang	Bujur																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Tidak terdapat data Kualitas Air Sumur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022																				
2																					
3																					

Seleniu m (mg/L)	Kadmiu m (mg/L)	Khro m (VI) (mg/L)	Tembag a (mg/L)	Besi (mg/L)	Timba l (mg/L)	Manga n (mg/L)	Air Raks a (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorid a (mg/L)	Sianid a (mg/L)	Fluorid a (mg/L)	Nitrit sebaga i N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlori n bebas (mg/L)	Beleran g sebagai H2S (mg/L)	Fecal colifor m (jml/10 0 ml)	Total colifor m (jml/10 0 ml)	Gross -A (Bq/L)	Gross -B (Bq/L)
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, 2023

Tabel-23. Kualitas Air Laut di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/L)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperature (°C)	pH
			Lintang	Bujur										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tengah Muara Barito	29-Mar-22	-3.533833	114.492667	Tengah Muara Barito	(NA)	Tidak Berbau	0,5	10,41	17,41	Nihil	Nihil	30,2	6,5
2	Sungai Rangit	29-Mar-22	-3.514972	114.463278	Sungai Rangit	(NA)	Tidak Berbau	0,5	12,1	17,7	Nihil	Nihil	30,3	6,6
3	Muara Sungai Barito (Barat)	29-Mar-22	-3.502250	114.425028	Muara Sungai Barito (Barat)	(NA)	Tidak Berbau	0,5	11,12	17,58	Nihil	Nihil	30,1	7,1

Salinitas (‰)	DO (mg/L)	BOD5 (mg/L)	COD (mg/L)	Amonia Total (mg/L)	NO2-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)	PO4-P (mg/L)	Sianida (CN) (mg/L)	Sulfida (H2S) (mg/L)	Klor (mg/L)	Minyak Bumi (mg/L)	Fenol (mg/L)	Pestisida (mg/L)	PCB (mg/L)
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	5,7	3,03	(NA)	<0,016	(NA)	0,03	<0,005	<0,005	<0,0022	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)
0	5,7	3,63	(NA)	<0,016	(NA)	0,04	<0,005	<0,005	<0,0022	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)
0	6	3,03	(NA)	<0,016	(NA)	0,04	<0,005	<0,005	<0,0022	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan, 2023

Tabel-24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
		Latitude	Longitude												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	BMKG Kelas I Banjarbaru - Tabunganen/Sei Jingah Besar	3°27'46"	114°50'26"	753	571	415	-	218	156.5	140.5	123.5	228	216.5	-	216.5
2	BMKG Kelas I Banjarbaru - Tamban/Koanda	3°27'46"	114°50'26"	382.5	361.5	262	-	271.5	135.5	106	95.5	128	220	-	220
3	BMKG Kelas I Banjarbaru - Anjir Muara/Anjir Pasar Kota	3°27'46"	114°50'26"	391	420.5	284	-	212.5	142.5	117	98	131	273	-	273
4	BMKG Kelas I Banjarbaru - Anjir Muara,Anjir Muara Kota Tengah	3°27'46"	114°50'26"	314	314	339	-	247	148.5	125	107.5	117.5	213.5	-	213.5
5	BMKG Kelas I Banjarbaru - Alalak/Panca Karya	3°27'46"	114°50'26"	305	263	479	-	199.5	228.5	173.5	130	226	192.5	-	192.5
6	BMKG Kelas I Banjarbaru - Mandastana/Karang Indah	3°27'46"	114°50'26"	365.5	348	309.5	-	225.5	179.5	111.5	169.5	172.5	162.5	-	162.5
7	BMKG Kelas I Banjarbaru - Rantau Badauh/Sei Bamban	3°27'46"	114°50'26"	402.5	293.5	367	-	178	123.5	108	113	135	226.5	-	226.5
8	BMKG Kelas I Banjarbaru - Belawang/Karang Dukuh	3°27'46"	114°50'26"	422	362	292	-	249.5	131	74.5	136.5	158.5	122.5	-	122.5
9	BMKG Kelas I Banjarbaru - Cerbon/Sawahan	3°27'46"	114°50'26"	512	550.5	414	-	313.5	190.5	190	163	160	226.5	-	226.5
10	BMKG Kelas I Banjarbaru - Bakumpai/Lepasan	3°27'46"	114°50'26"	443	322.5	317.5	-	154.5	214.5	89	138	212.5	169.5	-	169.5
11	BMKG Kelas I Banjarbaru - Tabukan/ Karya Makmur	3°27'46"	114°50'26"	473	229.5	326.5	-	140.5	135	140.5	105	157	190	-	190
12	BMKG Kelas I Banjarbaru - Mekarsari/Tamban Raya Baru	3°27'46"	114°50'26"	403	415	363	-	178	167.5	103.5	85.5	145.5	122	-	122
13	BMKG Kelas I Banjarbaru - Barambai/Kolam Kanan	3°27'46"	114°50'26"	564	392	280.5	-	217.5	482	332	141.5	141.5	203.5	-	203.5
14	BMKG Kelas I Banjarbaru - Marabahan/Marabahan Kota	3°27'46"	114°50'26"	389.5	310.5	310	-	186	164.5	120	93	102	179.5	-	179.5
15	BMKG Kelas I Banjarbaru - Wanaraya/Kolam Kiri	3°27'46"	114°50'26"	321.5	250.5	326.5	-	199.5	117.5	174.5	82.5	128.5	257	-	257
16	BMKG Kelas I Banjarbaru - Jejangkit/Sampurna	3°27'46"	114°50'26"	514.5	402	342.5	-	225	153	91	113.5	121	116	-	116
Kabupaten		Barito Kuala													

Sumber : BMKG Kelas I Banjarbaru, 2022

Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan (liter)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tabunganen	-	265	Belum ada pengambilan data terkait pengguna sumber air minum dari Mata air, Sumur, Sungai, Air Hujan, Air Kemasan, serta lainnya				
2	Tamban	-	191					
3	Mekarsari	-	-					
4	Anjir Muara	-	2230					
5	Alalak-Mandastana	-	22532					
6	Jejangkit	-	359					
7	Belawang-Wanar	-	599					
8	Barambai	-	1311					
9	Rantau Badauh	-	1046					
10	Cerbon	-	757					
11	Bakumpai	-	227					
12	Marabahan	-	5 051					
13	Tabukan	-	728					
14	Kuripan	-	-					
15			30.245					
16								
17								
18								
19								
Jumlah		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-26. Kualitas Air Hujan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO_4	NO_3	Cr	NH_4	Na	Ca^{2+}	Mg^{2+}
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nihil	Nihil	Nihil	Jan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
			Feb	Tidak terdapat data Kualitas Air Hujan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022								
			Mar									
			Apr									

Tabel-27. Kondisi Sungai di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m^3/dtk)	Debit Min (m^3/dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sungai Barito	Kab. Barito Kuala	150	600	476	8		
2	Sungai Kapuas	Kec. Tabukan	25	210	202	8	6000	
3	Sungai Alalak	Kec. Mandastana	52.5	46	44	7		
4	Sungai Negara	Kec. Bakumpai	5.6	200	192	8		
5	Sungai Puntik	Kec. Mandastana	5.8	25	24	5		
6	Saluran Drainase Tamban	Kec. Tamban	17.9	60	58	5		
7	Saluran Drainase Anjir Pasar	Kec. Anjir Pasar	14.6	50	48	5		
8	Saluran Drainase Tabukan	Kec. Tabukan	20	25	24	5		
9	Saluran Drainase Tabunganen	Kec. Tabunganen	32.5	70	68	8		

Sumber : Dinas PUPR Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-28. Kondisi Danau Waduk/Situ/Embung di kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Long Storage Ulu Benteng	Kelurahan Ulu Benteng	7.2	288,000
2				

Sumber : Dinas PUPR Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-29. Kualitas Air Sungai di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Deterjen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
				Lintang	Bujur																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1		Kecamatan Kuripan	Desa Rimbun Tulang Kec. Kuripan	114.79475	-2.60614	01 Maret 2022	28.5	7,31	54.0	82	34	4,57	<2**	<40**	0,011	0.6	-	-	<0,03	-	-	-	6800	-	-	-
						Wednesday, September 7, 2022	29.0	8.56	62.0	60	29	5.86	7.21	<40,32	0.015	3.4	-	-	<0,03	-	-	-	1100	-	-	-
2		Kecamatan Kuripan	Desa Kuripan Kec. Kuripan	114.79372	-2.62353	01 Maret 2022	29.0	6,74	58.0	122	32	4,68	<2**	<40**	0,012	1	-	-	<0,03	-	-	-	1400	-	-	-
						Wednesday, September 7, 2022	29.0	8.15	46.0	59	38	5.78	6.69	<04,32	0.015	4.5	-	-	<0,03	-	-	-	790	-	-	-
3		Kecamatan Kuripan	Desa Jambu Kec. Kuripan	114.76514	-2.71586	01 Maret 2022	29.0	6,04	55.0	95	30	4,90	2,55	<40**	0,012	0.7	-	-	<0,03	-	-	-	490	-	-	-
						Wednesday, September 7, 2022	28.0	7.53	53.0	31	42	6.09	11.25	43.89	0.017	4.2	-	-	<0,03	-	-	-	7900	-	-	-
4		Kecamatan Kuripan	Anak Sungai Manuntung	114.79736	-2.61967	01 Maret 2022	29.0	4,06	168.0	122	23	2,63	<2**	63,0	0,011	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
						Wednesday, September 7, 2022	28.0	8.36	33.0	69	27	5.43	10.17	<40,32	0.016	-	-	-	-	-	-	-	3200	-	-	-
5		Kecamatan Kuripan	Muara Anak Sungai Manuntung	114.79419	-2.61925	01 Maret 2022	29.0	3,84	150.0	102	40	2,57	<2**	77,6	0,011	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-
						Wednesday, September 7, 2022	28.0	7.78	46.0	33	35	5.47	7.73	<40,32	0.019	-	-	-	-	-	-	-	7000	-	-	-
6		Kecamatan Tabukan	Intake PDAM IKK Tabukan Kec.Tabukan	114.65072	-2.80503	01 Maret 2022	29.0	6,13	48.5	89	40	4,43	2,11	<40**	0,012	0.5	-	-	<0,03	-	-	-	230	-	-	-
						Wednesday, September 7, 2022	28.0	7.44	58.0	36	34	6.27	12.81	<40,32	0.028	4.1	-	-	<0,03	-	-	-	4900	-	-	-
7		Kecamatan Tabukan	Mesjid Nurul Muslimin Kec.Tabukan	114.63836	-2.80672	01 Maret 2022	29.0	6,40	45.0	71	56	4,53	2,10	<16*	0,011	0.9	-	-	<0,03	-	-	-	7900	-	-	-
						Wednesday, September 7, 2022	28.0	7.47	50.0	47	34	5.94	5.93	<40,32	0.021	4.4	-	-	<0,03	-	-	-	3300	-	-	-
8		Kecamatan Tabukan	Desa Bandar Karya Kec.Tabukan	114.63211	-2.80817	01 Maret 2022	29.0	5,76	55.0	89	34	3,97	2,25	<40**	0,011	1.3	-	-	<0,03	-	-	-	2400	-	-	-
						Wednesday, September 7, 2022	29.0	7.19	43.0	43	34	5.62	9.65	<40,32	0.023	4.5	-	-	<0,03	-	-	-	7900	-	-	-
9		Kecamatan Tabunganen	Desa Sei Teras Luar Kec.Tabunganen	114.49658	-3.40022	09 Maret 2022	28.5	6,86	287.0	98	29	4,49	2,52	<16*	0,012	2.80	-	-	<0,03	-	-	-	110	-	-	-
						Thursday, September 15, 2022	29.0	7.81	105.0	61	21	4.81	5.49	<40,32	0.02	3.00	-	-	<0,03	-	-	-	490	-	-	-
10		Kecamatan Tabunganen	Desa Tabunganen Kecil Kec.Tabunganen	114.49542	-3.41325	09 Maret 2022	29.0	6,55	67.0	89	24	4,61	<2*	<40**	0,011	1.6	-	-	<0,03	-	-	-	140	-	-	-
						Thursday, September 15, 2022	29.0	7.4	84.0	72	19	4.99	2.85	<40,32	0.134	3.6	-	-	<0,03	-	-	-	330	-	-	-
11		Kecamatan Tabunganen	Desa Tabunganen Muara Kec.Tabunganen	114.49672	-3.42228	09 Maret 2022	29.0	6,19	71.0	101	27	4,43	<2*	<40**	0,011	1.30	-	-	<0,03	-	-	-	110	-	-	-
						Thursday, September 15, 2022	28.0	6.94	103.0	75	24	5.1	7.89	<40,32	0.10	3.70	-	-	<0,03	-	-	-	1300	-	-	-
12		Kecamatan	Intake PDAM IKK Tabunganen	114.48508	-3.40994	09 Maret 2022	29.0	5,81	85.5	99	28	7,52	<2**	<16*	0,010	-	-	-	-	-	-	-	2700	-	-	-

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Deterjen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
				Lintang	Bujur																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
		Tabunganen				Thursday, September 15, 2022	28.0	6.12	1431.0	787	25	5.17	2.85	<40,32	0.164	-	-	-	-	-	-	-	1100	-	-	-
13		Kecamatan Alalak	Jembatan Alalak 2	114.59589	-3.28028	09 Maret 2022	29.0	47,9	134.0	107	8	3,37	<2**	<40**	<0,01**	0.5	-	-	<0,03	-	-	-	110	-	-	-
						Thursday, September 15, 2022	30.0	3.38	486.0	220	<2,5	3.01	3.29	<40,32	0.016	1.7	-	-	<0,03	-	-	-	78	-	-	-
14		Kecamatan Alalak	Musholla Darul Muna	114.58389	-3.27267	17 Maret 2022	29.5	4,77	177.0	107	8	3,13	<2**	<16*	0,015	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-
						Wednesday, September 28, 2022	31.0	3.22	543.0	216	7	3.03	<2	<40,32	<0,01	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-
15		Kecamatan Barambai	Desa Bagagap Kec.Barambai	114.67294	-3.05097	08 Maret 2022	27.5	7,99	76.0	51	30	3,79	<2**	<16*	0,011	0.6	-	-	<0,03	-	-	-	170	-	-	-
						Thursday, September 8, 2022	29.0	6.57	53.0	88	21	3.73	5.99	<40,32	0.013	4.1	-	-	<0,03	-	-	-	680	-	-	-
16		Kecamatan Barambai	Intake PDAM Barambai Kec. Barambai	-3.05097	-3.04075	08 Maret 2022	27.5	5,64	73.0	69	31	3,53	<2**	<16*	0,011	0.9	-	-	<0,03	-	-	-	3300	-	-	-
						Thursday, September 8, 2022	30.0	6.79	84.0	80	19	4.13	6.79	<40,32	0.013	4.4	-	-	<0,03	-	-	-	330	-	-	-
17		Kecamatan Barambai	Dermaga Ferry Pendalam Baru Kec. Barambai	114.71181	-3.05542	08 Maret 2022	28.0	5,88	76.0	61	31	4,31	<2**	<40*	0,011	0.7	-	-	<0,03	-	-	-	1300	-	-	-
						Thursday, September 8, 2022	29.0	7.83	72.0	58	29	4.72	8.15	<40,32	0.013	4	-	-	<0,03	-	-	-	330	-	-	-
18		Kecamatan Barambai	Anak Sungai Barambai	114.68968	-3.03799	08 Maret 2022	26.5	3,28	490.0	166	3	0.98	<2**	<16*	0,017	-	-	-	-	-	-	-	3300	-	-	-
						Thursday, September 8, 2022	29.0	6.49	80.0	103	28	3.46	<40,32	6.07	0.012	-	-	-	-	-	-	-	790	-	-	-
19		Kecamatan Marabahan	Jembatan Rumpiang Kec.Marabahan	114.77900	-3.00086	08 Maret 2022	27.0	5,49	66.0	93	33	3,83	<2**	<16*	0,011	0.9	-	-	<0,03	-	-	-	790	-	-	-
						Thursday, September 8, 2022	27.0	7.93	127.0	50	23	3.97	9.15	<40,32	<0,01	3.7	-	-	<0,03	-	-	-	490	-	-	-
20		Kecamatan Marabahan	Dermaga Mesjid Agung Al Anwar	114.77506	-2.98412	10 Maret 2022	29.0	7,41	62.0	109	13	3,62	<2**	<40**	0,011	-	-	-	-	-	-	-	4800	-	-	-
						Wednesday, September 21, 2022	27.0	8.41	193.0	56	43	3.76	2.63	<40,32	0.02	-	-	-	-	-	-	-	14000	-	-	-
21		Kecamatan Marabahan	Intake PDAM IKK Marabahan	114.75669	-2.97481	10 Maret 2022	29.0	7,32	39.0	77	93	3,25	2,18	<40**	0,011	-	-	-	-	-	-	-	160000	-	-	-
						Wednesday, September 21, 2022	28.0	7.81	31.0	57	70	4.25	4.39	<40,32	0.015	-	-	-	-	-	-	-	2400	-	-	-
22		Kecamatan Bakumpai	Desa Lepasan	114.76906	-2.97414	10 Maret 2022	29.0	7,04	105.0	97	28	1,89	<2**	<16*	0,010	-	-	-	-	-	-	-	160000	-	-	-
						Wednesday, September 21, 2022	27.0	8.97	40.0	66	49	4.03	9.11	<40,32	0.015	-	-	-	-	-	-	-	2400	-	-	-
23		Kecamatan Anjir Muara	Intake PDAM IKK Anjir Muara-Pasar	114.55742	-3.21386	17 Maret 2022	29.5	6,32	54.0	102	21	3,60	<2**	<40**	0,015	-	-	-	-	-	-	-	1700	-	-	-
						Wednesday, September 21, 2022	30.0	7.75	78.0	47	54	4.11	7.8	<40,32	0.014	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-
24			Air Rawa	114.50001	-3.14498	17 Maret 2022	29.0	4,04	180.0	101	33	2,52	<2**	<16*	0,017	-	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Deterjen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
				Lintang	Bujur																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
		Kecamatan Anjir Pasar				Wednesday, September 28, 2022	30.0	3.04	693.0	237	15	24	<2	<40,32	0.025	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
25		Kecamatan Anjir Pasar	Air Sungai	114.49494	-3.14342	17 Maret 2022	30.0	4,18	162.0	95	12	1.73	<2**	<16*	0,014	-	-	-	-	-	-	-	1100	-	-	-
						Wednesday, September 28, 2022	30.0	3.03	587.0	246	28	0.91	5.24	<40,32	0.02	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-
26		Kecamatan Mandastana	Anak Sungai Mandastana	114.65689	-3.203	17 Maret 2022	30.0	3,64	205.0	121	<2,5**	2,59	<2**	<16*	0,015	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-
						Wednesday, September 28, 2022	33.0	2.74	1099.0	394	<2,5	0.43	<2	<40,32	0.028	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
27		Kecamatan Mandastana	Rawa Mandastana	114.65744	-3.20386	17 Maret 2022	30.0	3.46	219.0	122	<2,5**	3,46	<2**	<16*	0,015	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-
						Wednesday, September 28, 2022	31.0	2.64	1252.0	434	<2,5	1.11	7.24	<40,32	0.02	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
28		Kecamatan Marabahan	BARITO Intake PDAM/Titik Hulu BRT 01 Desa Ulu Benteng Kec. Marabahan	114,822,917	-2,974,861	20 April 2022	28.7	6.67	-	166	16	4.72	2.28	17.9	0.0015	1.87	0.013	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	170	280	0.0033	-
						04 Agustus 2022	29.2	6.92	-	178	19	4.62	2.16	18.8	0.0015	2.34	0.003	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	310	840	0.0033	-
						08 Oktober 2022	29	7.22	-	174	20	5.14	2.23	18.3	0.0015	1.79	0.003	0.011	0.036	0.001	0.2	0.0031	400	470	0.0033	-
29		Kecamatan Marabahan	BARITO Dermaga Mesjid Agung BRT 02 Desa Basahap Hilir Kecamatan Marabahan	114,549,944	-2,984,056	22 April 2022	29	6.48	-	180	16	4.54	2.34	18.4	0.0015	2.04	0.015	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	240	540	0.0033	-
						04 Agustus 2022	29.6	6.84	-	196	19	4.66	2.44	20.2	0.0015	2.22	0.003	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	630	940	0.0033	-
						08 Oktober 2022	29.5	6.91	-	188	19	4.98	2.3	18.7	0.0015	1.92	0.003	0.011	0.048	0.001	0.2	0.0031	540	920	0.0033	-
30		Kecamatan Cerbon	BARITO Bantuil BRT 03 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon	114,561,778	-3,015,028	22 April 2022	28.5	6.62	-	248	18	4.32	2.34	19.3	0.0015	2.29	0.024	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	540	920	0.0033	-
						04 Agustus 2022	28.9	6.7	-	262	23	4.39	2.46	20.8	0.0015	2.46	0.003	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	1600	2400	0.0033	-
						08 Oktober 2022	28.7	7.15	-	270	21	4.95	2.36	19.7	0.0015	2.16	0.003	0.011	0.046	0.001	0.2	0.0031	700	940	0.0033	-
31		Kecamatan Rantau Badauh	BARITO Dermaga Simpang Arja BRT 04 Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh	114,568,356	-3,055,817	20 April 2022	28	6.58	-	254	18	4.3	2.4	19.8	0.014	2.33	0.028	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	1600	1700	0.0033	-
						03 Agustus 2022	28.6	6.68	-	270	25	4.48	2.52	21.6	0.0064	2.71	0.0092	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	1700	2800	0.0033	-
						10 Oktober 2022	29.3	6.88	-	276	24	4.74	2.45	21.2	0.0015	2.05	0.003	0.011	0.054	0.001	0.2	0.0031	700	920	0.0033	-
32		Kecamatan Belawang	BARITO Dermaga Belawang BRT 05 Desa Patih Selera Kecamatan Belawang	114,595,139	-3,086,106	20 April 2022	28.5	6.47	-	262	19	4.27	2.44	20.3	0.016	2.38	0.035	0.011	0.14	0.001	0.3	0.012	1700	2800	0.0033	-
						03 Agustus 2022	29.1	6.56	-	288	27	4.14	2.56	21.6	0.0084	2.52	0.012	0.011	0.14	0.001	0.4	0.0031	2400	3500	0.0033	-
						10 Oktober 2022	28.6	6.95	-	284	26	4.62	2.3	20.8	0.0015	2.1	0.003	0.011	0.058	0.001	0.3	0.0031	940	1200	0.0033	-
33		Kecamatan Belawang	BARITO Dermaga Murung Keramat BRT 06 Desa Murung Keramat Keramat Kecamatan Belawang	114,637,492	-3,126,694	20 April 2022	30.5	6.83	-	243	19	4.56	2.36	18.2	0.0015	2.37	-	0.011	0.14	0.001	0.3	0.015	2200	5400	0.0033	-
						03 Agustus 2022	30.9	6.92	-	250	24	4.62	2.28	19.4	0.0015	2.63	0.003	0.011	0.14	0.001	0.3	0.0031	2100	4300	0.0033	-
						10 Oktober 2022	29.5	6.84	-	296	25	4.49	2.33	19	0.0015	2.57	0.003	0.011	0.071	0.001	0.3	0.0031	920	1100	0.0033	-
34		Kecamatan Anjir Muara	BARITO Anjir Muara BRT 07 Desa Anjir	114,729,175	-3,179,583	20 April 2022	30.2	6.75	-	266	21	4.42	2.3	16.1	0.0066	2.4	0.038	0.011	0.14	0.001	0.3	0.02	2400	5400	0.0033	-
						03 Agustus 2022	30.8	6.82	-	274	25	4.36	2.32	20.2	0.0034	2.88	0.011	0.011	0.14	0.001	0.4	0.0031	3200	4700	0.0033	-

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Deterjen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
				Lintang	Bujur																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
			Muara Kota Kecamatan Anjir			10 Oktober 2022	29	7.06	-	290	25	4.41	2.36	19.3	0.0015	2.32	0.003	0.011	0.08	0.001	0.3	0.0031	700	1100	0.0033	-
35		Kecamatan Alalak	BARITO Bawah Jembatan Barito BRT 08 Desa Beringin Kecamatan Alalak	114,770,556	-3,217,278	20 April 2022	30	6.87	-	290	22	4.81	2.38	16.2	0.0082	2.32	0.052	0.011	0.14	0.001	0.4	0.0031	3500	5400	0.0033	-
						03 Agustus 2022	30.4	7.1	-	300	28	4.67	2.37	20	0.004	2.94	0.014	0.011	0.14	0.001	0.3	0.0031	3500	5400	0.0033	-
						10 Oktober 2022	29.6	7.39	-	310	28	4.56	2.41	19.4	0.0015	2.7	0.003	0.011	0.085	0.001	0.3	0.0031	4300	5800	0.0033	-
36		Kecamatan Tamban	BARITO Ujung Panti BRT 09 Kelurahan Ujung Panti Kecamatan Tamban	114,775	-3,250,169	20 April 2022	31	6.91	-	468	27	4.4	2.46	19.2	0.011	3.1	0.058	0.011	0.14	0.001	0.3	0.0031	5400	9200	0.0033	-
						03 Agustus 2022	31.8	7.13	-	462	31	4.3	2.52	21.5	0.0079	3.42	0.022	0.011	0.14	0.001	0.4	0.0031	4500	8400	0.0033	-
						10 Oktober 2022	30.8	6.8	-	436	29	4.44	2.45	20.5	0.0015	2.97	0.003	0.011	0.084	0.001	0.4	0.0031	5400	9200	0.0033	-
37		Kecamatan Bakumpai	NEGARA Ds Keladan NGR 01 Desa Lepasan Kecamatan Bakumpai	114,756,528	-2,972,083	22 April 2022	28.4	6.79	-	186	16	4.13	2.64	18.9	0.0015	1.52	0.003	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	540	920	0.0033	-
						04 Agustus 2022	28.7	6.92	-	234	25	4.22	2.72	20.3	0.0015	1.84	0.003	0.011	0.14	0.001	0.2	0.0031	2500	3800	0.0033	-
						08 Oktober 2022	29.6	7.05	-	266	28	4.75	2.4	19.4	0.0015	1.33	0.003	0.011	0.086	0.001	0.2	0.0031	700	940	0.0033	-

Sumber : Dinas LIngkungan Hidup Kab. Barito Kuala

Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung di KAbupaten Barito Kuala tahun 2022

No.	Nama	Lokasi	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspens (mg/L)	pH	DHL	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Long Storage	Kelurahan Ulu Benteng	4/7/2021	2° 58' 21"	114° 44' 23"		430	24,5	2,91		430	24,5	8,23	0,84
2														

COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Deterjen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
8,5		1,91	0,12				0,5		1,8	1,8		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah KK*	Fasilitas Tempat Buang Air Besar**			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TABUNGANEN	6,060	4,293	-	-	1,767
2	TAMBAN	10,910	3,806	164	-	6,940
3	MEKARSARI	13,060	12,505	501	-	54
4	ANJIR PASAR	5,615	4,579	938	-	98
5	ANJIR MUARA	7,633	6,582	95	-	956
6	ALALAK	8,705	6,450	2	-	2,253
7	MANDASTANA	3,946	3,155	42	-	749
8	JEJANGKIT	1,961	806	-	-	1,155
9	BELAWANG	4,451	2,453	3	-	1,995
10	WANARAYA	3,970	3,942	-	-	28
11	BARAMBAI	4,652	2,778	38	-	1,836
12	RANTAU BADAUH	4,634	3,576	141	-	917
13	CERBON	2,931	2,454	218	-	259
14	BAKUMPAI	3,183	1,336	16	-	1,831
15	MARABAHAN	5,177	3,452	140	-	1,585
16	TABUKAN	2,066	985	-	-	1,081
17	KURIPAN	1,708	969	-	-	739
Jumlah		**90,662**	**64,121**	**2,298**	**-**	**24,243**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	TABUNGANEN	2,004	1,953	5,702	5,755	1,345	1,347	1,257	843	34	32	142	145	2	0	0	1
2	TAMBAN	2,638	2,583	7,708	7,709	3,203	3,109	2,638	2,140	83	113	311	399	12	5	0	1
3	ANJIR PASAR	1401	1418	3,611	3,915	1,745	1,567	1,697	1,376	58	96	325	411	12	6	1	0
4	ANJIR MUARA	2,097	2,044	4,754	4,882	2,312	2,441	2,058	1,497	76	74	339	449	12	10	0	0
5	ALALAK	6,000	5,875	10,745	10,908	4,850	5,213	7,115	6,066	505	563	1,545	1,648	142	89	4	3
6	MANDASTANA	1,632	1,708	3,817	3,928	1,668	1,610	1,695	1,285	61	91	215	280	6	3	0	0
7	RANTAU BADAUH	1,624	1,662	3,560	3,648	1,559	1,560	1,478	1,196	58	67	235	315	7	5	0	0
8	BELAWANG	1,034	1,083	3,641	3,660	1,318	1,273	1,107	756	29	52	107	156	2	2	0	0
9	CERBON	1,081	1,015	2,248	2,319	875	807	774	589	35	46	134	182	6	5	0	0
10	BAKUMPAI	1,046	904	2,904	2,902	791	698	778	568	22	39	125	150	6	1	0	0
11	KURIPAN	575	545	1,483	1,550	454	385	497	313	21	34	67	74	1	2	0	0
12	TABUKAN	891	882	2,378	2,442	663	682	699	482	21	27	105	108	1	2	0	0
13	MEKARSARI	1,448	1,410	3,895	4,073	2,004	1,864	1,748	1,390	48	62	224	265	5	1	0	0
14	BARAMBAI	1,396	1,523	3,536	3,663	1,608	1,566	1,404	1,077	39	61	178	216	9	1	0	0
15	MARABAHAN	2,114	2,016	3,566	3,850	1,522	1,603	2,730	2,192	226	337	1,048	1,255	116	51	2	1
16	WANARAYA	1,470	1,394	2,787	2,984	1,717	1,561	1,358	964	30	46	159	219	8	4	0	0
17	JEJANGKIT	602	559	1,611	1,642	661	620	598	409	11	20	61	73	1	0	0	0
Jumlah		**29,053**	**28,574**	**67,946**	**69,830**	**28,295**	**27,906**	**29,631**	**23,143**	**1,357**	**1,760**	**5,320**	**6,345**	**348**	**187**	**7**	**6**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Barito Kuala	Hypertensi Esensial	16,507
2	Kab. Barito Kuala	Influenza	14,266
3	Kab. Barito Kuala	Gastritis	11,575
4	Kab. Barito Kuala	Dermatitis Kontak Alergi	5,443
5	Kab. Barito Kuala	Hyperurisemia-Gout Arthitis	4,271
6	Kab. Barito Kuala	Diabetes Melitus Type 2	2,988
7	Kab. Barito Kuala	Artritis Reumatoid	2,317
8	Kab. Barito Kuala	Gastroenteritis	1,782
9	Kab. Barito Kuala	Rinitis Akut	1616
10	Kab. Barito Kuala	Arttritis.Osteoarthiritis	1,256

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TABUNGANEN	6060	486	8%
2	TAMBAN	10910	556	5%
3	ANJIR PASAR	5615	2125	38%
4	ANJIR MUARA	7633	383	5%
5	ALALAK	8705	6954	80%
6	MANDASTANA	3946	3296	84%
7	RANTAU BADAUH	4634	1858	40%
8	BELAWANG	4451	2494	56%
9	CERBON	2931	1353	46%
10	BAKUMPAI	3183	1679	53%
11	KURIPAN	1708	134	8%
12	TABUKAN	2066	1868	90%
13	MEKARSARI	13060	3629	28%
14	BARAMBAI	4652	2558	55%
15	MARABAHAN	5177	2116	41%
16	WANARAYA	3970	2295	58%
17	JEJANGKIT	1961	1666	85%

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-35. Volume Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Lokasi	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Limbah Cair (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-		0.00870419	0	3.17703	0
Perkebunan	-	20,1	0.00258904	0.080032877	0.945	29.212
IndustriKayu Lapis	-	52	-	0.007035616	-	2.568
Stoke File	-	10,2	0.12159726	0.07430137	44.383	27.12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Lokasi	Lokasi		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
			Latitude	Longitude												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	BMKG Kelas I Banjarbaru	Banjarbaru	3°27'46"	114°50'26"	26.7	26.4	26.5	27.5	27.4	26.5	26.2	26.2	25.9	26.5	26.9	26.7

Sumber : BMKG Kelas I Banjarbaru, 2022

Tabel-37 Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO_2 (µg/Nm³)	CO(µg/Nm³)	NO_2 (µg/Nm³)	O_3 (µg/Nm³)	HC (µg/Nm³)	PM10 (µg/Nm³)	PM2,5 (µg/Nm³)	TSP (µg/Nm³)	Pb (µg/Nm³)	Dustfall (µg/Nm³)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm³)	Fluor Index (µg/Nm³)	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/Nm³)	Sulphat Index (µg/Nm³)	Sulphat Index (µg/Nm³)
	Latitude	Longitude																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Area Padat Transportasi (Terminal Taksi Handil Bakti)	S: 03˚16'36,13"	E: 114˚35'52,19"	1 Jam	< 112.1	1,283	<34.6	Tidak Terdapat Data Pengukuran											
Area Perkantoran (Kantor Bupati Batola)	S: 02˚58'41,68"	E: 114˚45'59,12"	1 Jam	< 112.1	401	<34.6	Tidak Terdapat Data Pengukuran											
Area Permukiman (Handil Bakti, Komp.Kemuning Indah)	S: 03˚15'36,13"	E: 114˚36'32,86"	1 Jam	< 112.1	337	<34.6	Tidak Terdapat Data Pengukuran											

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan, 2023

Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar industri dan Rumah Tangga

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG (Kg)	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri :	Tidak Terdapat Data Terkait	Tidak Terdapat Data Terkait	Tidak Terdapat Data Terkait	Tidak Terdapat Data Terkait	Tidak Terdapat Data Terkait		Tidak Terdapat Data Terkait	Tidak Terdapat Data Terkait	Tidak Terdapat Data Terkait	-	-
1	Industri Kecil						1342				-	339064
2	Industri Sedang						1451				-	206454
3	Industri Besar						1026				99027	2000820
											-	-
B	Rumah Tangga :						2105730				-	42

Tabel-39. Penjualan Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang di gunakan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sepeda Motor	55,675	55,675		-
2	Mobil Penumpang	427	84	343	-
3	Mobil Bus	5,486	5,424	62	-
4	Mobil Barang	2,510	1,977	533	-
5	Kendaraan Khusus (R3)	78	78	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-40. Perubahan Penambahan Ruas Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir (km)	
		2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Bebas Hambatan	Belum ada pengukuran untuk klasifikasi jenis jalan terkait	Belum ada pengukuran untuk klasifikasi jenis jalan terkait
2	Jalan Raya	Belum ada pengukuran untuk klasifikasi jenis jalan terkait	Belum ada pengukuran untuk klasifikasi jenis jalan terkait
3	Jalan Sedang	Belum ada pengukuran untuk klasifikasi jenis jalan terkait	Belum ada pengukuran untuk klasifikasi jenis jalan terkait
4	Jalan Kecil	628.13	628.13
5	Jalan Nasional	36.61	36.61
6	Jalan Provinsi	37.21	37.21

Sumber : Dinas PUPR Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2022	UKL-UPL	Perumahan	DLH Batola	PT.Abdul Azis Salamah	Kegiatan Pembangunan & Operasional Perumahan Komp Griya Azzam
2	2022	UKL-UPL	Perumahan	DLH Batola	PT.Abdul Azis Salamah	Kegiatan Pembangunan & Operasional Perumahan Komp Anisah Regency
3	2022	DELH (AMDAL)	Pabrik Pellet Kayu dan TUKS	DLH Batola	PT.Gouka Indo Energy	Pabrik Pellet Kayu dan TUKS
4	2022	AMDAL	Pembangunan Industri Kapal dan Perahu,Reparasi kapal,Perahu dan Bangunan Terapung	DLH Batola	PT.Barito Galangan Nusantara	Pembangunan Industri Kapal dan Perahu,Reparasi kapal,Perahu dan Bangunan Terapung
5	2022	AMDAL	Pembangunan dan Operasional Long Storage dan Gedung Kolam renang	DLH Batola	DISPORBUDPAR	Pembangunan dan Operasional Long Storage dan Gedung Kolam renang
6	2022	AMDAL	Pembangunan dan Operasional Galangan reparasi kapal	DLH Batola	PT. PATRIA MARITIM PERKASA	Pembangunan dan Operasional Galangan reparasi kapal
7	2022	AMDAL	Galangan Kapal	DLH Batola	PT. BINA BENUA SAMUDERA	Galangan Kapal
8	2022	AMDAL	Peningkatan Kapsaitas Produksi dan fasilitas Penunjang	DLH Batola	PT. DHARMA PUTERAKALIMANTAN SEJATI	Peningkatan Kapsaitas Produksi dan fasilitas Penunjang (dermaga, teras jalan, mes karyawan dan operasional industeri kayu lapis)
9	2022	UKL-UPL	Perumahan	DLH Batola	PT. ASYIFA PUTRI TUNGGAL	Pembangunan Perumahan Komp Asyifa Perdana Mandiri 8

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	2022	AMDAL	Rencana pengembangan dan operasional tempat pemrosesan akhir tabing rimbah	DLH Batola	DINAS PUPR	Rencana pengembangan dan operasional tempat pemrosesan akhir tabing rimbah
11	2022	SPPL	Perumahan	DLH Batola	Maulida Jufadini, S.Pd. M.Pd	Perumahan
12	2022	SPPL	BTS	DLH Batola	PT. DAYA MITRA	BTS (Menara Telekomunikasi)
13	2022	SPPL	BTS	DLH Batola	PT. DAYA MITRA	BTS (Menara Telekomunikasi)
14	2022	SPPL	Perumahan	DLH Batola	Adiansyah	Perumahan
15	2022	SPPL	BTS	DLH Batola	PT. DAYA MITRA	BTS (Menara Telekomunikasi)
16	2022	SPPL	BTS	DLH Batola	PT. DAYA MITRA	BTS (Menara Telekomunikasi)
17	2022	SPPL	BTS	DLH Batola	PT. TOWER BERSAMA	BTS (Menara Telekomunikasi)
18	2022	SPPL	Toko Modern	DLH Batola	PT. INDOMARET	Toko Modern
19	2022	SPPL	Toko / Kios	DLH Batola	Gunawan Petrus Yuanto	Toko / Kios
20	2022	SPPL	Toko / Kios	DLH Batola	Muslimah	Toko / Kios
21	2022	SPPL	Klinik Kecantikan Royal AL Banjari Skincare	DLH Batola	dr. Nurina	Klinik Kecantikan Royal AL Banjari Skincare
22	2022	SPPL	Café Sobat Ambyar	DLH Batola	Murdiansyah	Café Sobat Ambyar
23	2022	SPPL	Apotek Alzefa	DLH Batola	Dessy Cattleya	Apotek Alzefa
24	2022	SPPL	Apotek Muri	DLH Batola	Andi Muthia Azizah Tenri Bali	Apotek Muri
25	2022	SPPL	Apotek Murah	DLH Batola	Elsha Anith Roma Uli Sirait	Apotek Murah
26	2022	SPPL	Toko Modern	DLH Batola	PT. INDOMARET	Toko Modern
27	2022	SPPL	Toko Obat AL Fuad	DLH Batola	Samirah Aprilia	Toko Obat AL Fuad
28	2022	SPPL	Toko Obat Bilal	DLH Batola	Eko Yatminto	Toko Obat Bilal
29	2022	SPPL	Toko Obat Al Fatihah	DLH Batola	Muhammad Dwiwibowo	Toko Obat Al Fatihah
30	2022	SPPL	Apotek Berkat Orang Tua	DLH Batola	Giwang Anjar R	Apotek Berkat Orang Tua

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	2022	SPPL	Apotek Adyatma	DLH Batola	Rabiatul jannah	Apotek Adyatma
32	2022	SPPL	Apotek Hanidl Bakti	DLH Batola	Nunuk Asmawati	Apotek Hanidl Bakti
33	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Hipni, S.Pdi	Renovasi Madrasah
34	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Wahdah, S.Pdi	Renovasi Madrasah
35	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Syahrudin	Renovasi Madrasah
36	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Hj.Jumiah	Renovasi Madrasah
37	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Hamdani	Renovasi Madrasah
38	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Siti Sa'adah	Renovasi Madrasah
39	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Suwarno	Renovasi Madrasah
40	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Tazkil	Renovasi Madrasah
41	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Syapuansyah	Renovasi Madrasah
42	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Abdul Khair	Renovasi Madrasah
43	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Syahruzani	Renovasi Madrasah
44	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Suardi	Renovasi Madrasah
45	2022	SPPL	Renovasi Madrasah	DLH Batola	Zunaidi	Renovasi Madrasah
46	2022	SPPL	Sekolah Thafiz Terpadu	DLH Batola	M. Zainuddin	Sekolah Thafiz Terpadu
47	2022	SPPL	Apotek R Bungasfarma	DLH Batola	Siti Maimunah, S.Farm	Apotek R Bungasfarma
48	2022	SPPL	Apotek Yafiq Farma	DLH Batola	Iwan yuwindry	Apotek Yafiq Farma
49	2022	SPPL	Perumahan	DLH Batola	Akhmad Basuki	Komplek Graha Azahra Berangas
50	2022	SPPL	Ruko	DLH Batola	Angan M	Ruko
51	2022	SPPL	Klinik Polres Batola	DLH Batola	Erwin PS	Klinik Polres Batola
52	2022	SPPL	Renovasi Kantor	DLH Batola	Kantor Pengadilan Negeri Marabahan	Renovasi Kantor
53	2022	SPPL	Bangunan Rumah Tinggal	DLH Batola	Mukti Iwan Riawadi	Bangunan Rumah Tinggal

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2022	PT. PATRIA MARITIM PERKASA	Desa Sungai Jinga Kec. Tabunganen	Galangan Revarasi Kapal	TPS LB3	14/Verfikasi/PLB3/2022	AMDAL
2	2022	PT. BARITO GALANGAN NUSANTARA	Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban	Galangan Revarasi Kapal, perahu dan bangunan terpung	TPS LB3	04/Verfikasi/PLB3/2022	AMDAL
3	2022	PT. GOUKA INDO ENERGY	Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban	Pabrik pellet kayu dan TUKS	TPS LB3	013/Pertek-PLB3/2021	DELH
4	2022	DISPORBUDPAR	Kelurahan Ulu Benteng Kec. Marabahan	Pembangunan dan operasional Longstorage dan Gedung Kolam Renang	TPS LB3	19/Verfikasi/PLB3/2022	AMDAL
5	2022	PT. BINA BANUA SAMUDERA	Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban	Galangan Kapal	TPS LB3	600.1/44/Verifikasi/Pertek-PLB3/2022	AMDAL
6	2022	PT. DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI	Desa Tamban Kecil Kec. Tamban	Industri Kayu Lapis	TPS LB3	600.1/48/Verifikasi/Pertek-PLB3/2022	AMDAL
7	2022	DPUPR	Desa Tabing Rimbah Kec. Mandastana	Rencana Pengembangan dan Operasional TPA Tabing Rimbah	TPS LB3	660.1/809/DLH/2022	AMDAL

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan(AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kec Tamban	2022	PT. Barito Galangan Nusantara	4/3/2022	Taat
2	Kec Tamban	2022	PT Patria Maritim Perkasa	25/3/2022	Taat
3	Kec Alalak	2022	PT Decorindo Inti Alam Wood	11/5/2022	Taat
4	Kec Alalak	2022	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya	12/5/2022	Taat
5	Kec Alalak	2022	PT Gelora Citra Kimia Abadi	13/5/2022	Taat
6	Kec Mandastana	2022	PT Sumber Sinar Cahaya	25/5/2022	Taat
7	Kec Alalak	2022	Ruko/Pergudangan Taufik Rahman	7/6/2022	Taat
8	Kec Alalak	2022	Ruko/Pergudangan H. Bahrudin	8/6/2022	Taat
9	Kec Alalak	2022	CV Noor Afiat	9/6/2022	Taat
10	Kec Alalak	2022	PT Indoka Sakti	12/7/2022	Taat
11	Kec Alalak	2022	PT Yoltan Sari Indonesia	13/7/2022	Taat
12	Kec Alalak	2022	PT Duta Bahari Menara Line Dockyard	20/7/2022	Taat
13	Kec Marabahan	2022	PT Agri Bumi Sentosa	29/8/2022	Taat
14	Kec Tabunganen	2022	PT Teladan Makmur Jaya	20/9/2022	Taat
15	Kec Bakumpai	2022	PT Talenta Bumi	27/9/2022	Taat
16	Kec Kuripan	2022	PT Tasnido Agro Lestari	29/9/2022	Taat
17	Kec Marabahan	2022	PT Barito Putera Plantation	12/10/2022	Taat
18	Kec Alalak	2022	PT Arjuna Bintang Sakti	20/20/2022	Taat
19	Kec Kuripan	2022	PT Indonesia Multi Purpose Terminal	26/10/2022	Taat
20	Kec Bakumpai	2022	PT Anugerah Sawit Andalan	2/11/2022	Taat
21	Kec Bakumpai	2022	PT Anugerah Sawit Andalan (Eks KSU Mutiara Alam)	3/11/2022	Taat
22	Tabunganen	2022	PT Anugerah Sawit Inti Harapan	4/11/2022	Taat
23	Kec Tamban	2022	PT Tanjung Raya Plywod	9/11/2022	Taat
24	Kec Tamban	2022	PT Gouka Indo Energy	14/1/2022	Taat
25	Kec Barambai	2022	UPT PuskemasRawat Inap Barambai	15/11/2022	Taat
26	Kec Bakumpai	2022	PT Tri Buana Mas	21/11/2022	Taat
27	Kec Tamban	2022	PT Tiga Daun Kapuas	12/12/2022	Taat
28	Kec Alalak	2022	PT Agrabudi Gas Utama	13/2/2022	Taat
29	Kec Alalak	2022	PT Global Arta Borneo	26/12/2022	Taat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-44. Kebencanaan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mekarsari	Ds. Tinggiran Darat Rt 08 Kec. Mekarsari	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	90,000,000
2	Mandastana	Ds. Puntik Tengah Ray 12, Kec. Mandastana	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	100,000,000
3	Anjir Pasar	Ds. Anjir Pasar Kota I, Kec. Anjir Pasar	Kebakaran	2 buah rumah	Nihil	Nihil	300,000,000
4	Marabahan	Jln. Sei Tabuk Rt.06 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan	Kebakaran	1 buah gudang barang bekas	Nihil	Nihil	-
5	Alalak	Kel. Berangas Rt.06 Rw.02, Kec. Alalak	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	80,000,000
6	Tamban	Kedung Rejo Km. 6, Purwosari Baru, Kec. Tamban	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	80,000,000
7	Rantau Badauh	Desa Danda Jaya RT.15, Kec. Rantau Badauh	Kebakaran	2 buah rumah	Nihil	Nihil	120,000,000
8	Wanaraya	Desa Tumih, Kec. Wanaraya RT.09 RW.01	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	100,000,000
9	Belawang	Ds. Sungai Seluang Pasar, Kec. Belawang	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	150,000,000
10	Anjir Pasar	Ds. Anjir Seberang Pasar 1, Kec. Anjir Pasar	Kebakaran	1 buah rumah dan 1 Gudang penggilingan padi	Nihil	Nihil	350,000,000
11	Marabahan	Ds. Antar Baru km 5,5, Kec. Marabahan	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	10,000,000
12	Belawang	Ds. Binaan Baru RT.03 Kec. Belawang	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	200,000,000
13	Alalak	Kel. Berangas RT. 05 Gg. Busdin Kec. Alalak	Kebakaran	1 Buah Kontrakan Kosong	Nihil	Nihil	10,000,000
14	Tamban	Ds. Tamban Sari Baru, RT.05 KM 05, Kec. Tamban	Kebakaran	2 buah rumah	Nihil	Nihil	60,000,000
15	Jejangkit	Ds. Cahaya Baru Trans Kec. Jejangkit	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	50,000,000
16	Alalak	Kelurahan Berangas Rt 07 Rw 02 Kec. Alalak	Kebakaran	5 buah rumah	Nihil	Nihil	200,000,000
17	Belawang	Ds. Karang Dukuh, Kec. Belawang	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	150,000,000
18	Tabukan	Ds. Pantang Baru Kec. Tabukan	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	5,000,000
19	Alalak	Jl. Trans Kalimantan rt.09, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak	Kebakaran	1 buah kios bakso	Nihil	Nihil	50,000,000
20	Bakumpai	Kec. Bakumpai	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
21	Kuripan	Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
22	Jejangkit	Kec. Jejangkit	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	Alalak	Komp. Dalam Sakti Permai, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
24	Kuripan	Desa Jambu Baru Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
25	Kuripan	Ds. Jambu Baru & Ds. Jerenang Baru, Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
26	Kuripan	Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
27	kuripan	Ds. Kabuau, Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
28	Kec. Kuripan	Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
29	Kec. Barambai	Kec. Barambai	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
30	K+B37:B49	Ds. Kabuau & Ds. Jambu, Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
31	Kuripan	Ds. Jambu Baru, Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
32	Wanaraya	Ds. Pinang Habang, Kec. Wanaraya	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
33	Kuripan	Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
34	Kuripan	Ds. Jambu Baru, Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
35	Kuripan	Ds. Jambu, Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
36	Kuripan	Ds. Jambu Baru, Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
37	Kuripan	Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
38	Jejangkit	Ds. Bahandang, Kec. Jejangkit	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
39	Jejangkit	Ds. Jejangkit Timur, Kec. Jejangkit	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
40	Cerbon	Kec. Cerbon	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
41	Kuripan	Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
42	Barambai	Ds. Pendalaman Baru, Kec. Barambai	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
43	Kuripan	Ds. Jambu Baru, Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
44	Alalak	Ds. Semangat Bakti RT.03 RW.00, Kec. Alalak	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	50,000,000
45	Kuripan	Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
46	Jejangkit	Ds. Bahandang, Kec. Jejangkit	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
47	Kuripan	Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
48	Mekarsari	Ds. Tinggiran Baru, Kec. Mekarsari	Kebakaran	5 buah rumah	Nihil	Nihil	250,000,000
49	Mandastana	Ds. Lok Rawa, Rt. 05 Rw. 02, Kec. Mandastana	Kebakaran	1 Buah Bengkel	Nihil	Nihil	50,000,000
50	Jejangkit	Ds. Jejangkit Timur. Kec. Jejangkit	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
51	Jejangkit	Ds. Jejangkit Timur. Kec. Jejangkit	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
52	Jejangkit	Ds. Jejangkit Timur. Kec. Jejangkit	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
53	Kuripan	Ds. Kabuau, Kec. Kuripan	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
54	Mandastana	Ds. Pantai Hambawang, Kec. Mandastana	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
55	Barambai	Ds. Handil Barabai, Kec. Barambai	Kebakaran	-	Nihil	Nihil	-
56	Rantau Badauh	Ds. Sahurai rt.06. Kec. Rantau Badauh	Kebakaran	bagian dapur	Nihil	Nihil	-
57	Tabunganen	Ds. Tabunganen Pemurus rt. 05, Kec. Tabunganen	Kebakaran	1 buah rumah kosong	Nihil	Nihil	-
58	Marabahan	Jl. Veteran RT.23 RW.04, Marabahan Kota, Kec. Marabahan	Kebakaran	BRI Unit Bakumpai	Nihil	Nihil	-
59	Marabahan	Ds. Karya Maju, ray 4 rt. 002 rw. 001, Kec. Marabahan	Kebakaran	1 buah rumah	Nihil	Nihil	50,000,000
60	Jejangkit	Ds. Cahaya Baru Rt. 04 dan 08, Kec. Jejangkit	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	2,000,000
61	Tamban	Ds. Tamban Sari Baru, Kec. Tamban	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	2,000,000
62	Mekarsari	Ds. Tinggiran Tengah dan Jelapat II, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	495,000,000
63	Tabunganen	Ds. Karya Baru, Kec. Tabunganen	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	250,000,000
64	Mandastana	Ds Tatah Alayung Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	6,680,000
65	Mandastana	Ds Karang Indah dan Ds Karang Bunga Kec.Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	110,000,000
66	Jejangkit	Ds. Jejangkit Pasar rt.05 rw. 03, Kec. Jejangkit	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	10,000,000
67	Rantau Badauh	Ds. Sinar Baru rt. 10, Kec. Rantau Badauh	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	50,000,000
68	Alalak	Komplek Bakti Persada I rt. 007, Ds. Semangat Dalam, Alalak	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	5,000,000
69	Mekarsari	Sei Lauk Ds. Tinggiran Darat rt.018, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	30,000,000

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
70	Mekarsari	Handil Mesjid rt. 05, Ds. Tinggiran Baru, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	6,100,000
71	Anjir Pasar	Ds. Barunai Baru rt. 02, Kec. Anjir Pasar	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	150,000,000
72	Alalak	Jl. Pulau Sugara rt. 10, Kec. Alalak	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	65,000,000
73	Mandastana	Desa Puntik Luar RT.009 RW.003, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	3,000,000
74	Mandastana	Jl. Ray 3 Polder RT.009 RW.003 Desa Puntik Luar, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	1,000,000
75	Mandastana	Jl. Ray 3 Polder RT.009 RW.003 Desa Puntik Luar, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	500,000
76	Mandastana	Jl. Puntik Raya RT.007 RW.002, Ds. Puntik Luar, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	1,500,000
77	Mandastana	Desa Puntik Dalam RT.03 Ray 6, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	-
78	Mandastana	Desa Puntik Tengah RT.02 Ray 4, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	-
79	Mandastana	RT.001 RW.001 Desa Antasan Segera, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	5,000,000
80	Mandastana	Desa Tabing Rimbah RT.10 RW.03, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	4,000,000
81	Mandastana	Desa Tabing Rimbah RT.10 RW.03, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	2,000,000
82	Mandastana	Desa Tabing Rimbah RT.09 RW.03, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	500,000
83	Mandastana	Desa Tabing Rimbah RT.08 RW.02, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	500,000
84	Mandastana	Desa Tabing Rimbah RT.07 RW.02, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	2,500,000
85	Mandastana	Desa Tabing Rimbah RT.07 RW.02, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	700,000
86	Mandastana	Desa Tabing Rimbah RT.08 RW.02, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	700,000
87	Mandastana	Desa Tanipah RT.03, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	-
88	Mandastana	Desa Tanipah RT.03, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	-
89	Mandastana	Desa Tanipah RT.06, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	-
90	Mandastana	Desa Tanipah RT.03, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	-
91	Mandastana	Desa Tanipah RT.03, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	-

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
92	Mandastana	Desa Lok Rawa, Kec. Mandastana	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	-
93	Mekarsari	Desa Tinggiran Darat RT.04, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	20,000,000
94	Mekarsari	Desa Tinggiran Darat RT.05, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	40,000,000
95	Mekarsari	Desa Tinggiran Darat RT.05, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	20,000,000
96	Mekarsari	Desa Tinggiran Darat RT.06, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	20,000,000
97	Mekarsari	Desa Tinggiran Darat RT.06, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	40,000,000
98	Mekarsari	Desa Tinggiran Darat RT.10, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	20,000,000
99	Mekarsari	Desa Tinggiran Darat RT.07, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	-
100	Mekarsari	Desa Indah Sari, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
101	Mekarsari	Desa Tamban Raya Baru, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
102	Mekar Sari	Desa Mekarsari Kec. Mekar Sari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	6,000,000
103	Mekarsari	Desa Tamban Raya, Kec. Mekarsari	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
104	Rantau Badauh	Desa Sungai Pantai RT.01 - RT.04. kec. Rantau Badauh	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	12,500,000
105	Alalak	Kec. Alalak (Semangat Dalam)	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
106	Alalak	Kec. Alalak (Semangat Bakti)	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
107	Alalak	Kec. Alalak (Semangat Karya)	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
108	Belawang	Sei Seluang Pasar, Kec. Belawang	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
109	Jejangkit	Desa Sampurna RT.003, Kec. Jejangkit	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
110	Jejangkit	Desa Bahandang RT.004 RW.002, Kec. Jejangkit	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
111	Tamban	Desa Jelapat I RT.14, Kec.Tamban	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
112	Barambai	Desa Pendalaman RT.07, Kec. Barambai	Putting Beliung	-	Nihil	Nihil	
113	Rantau Badauh	Ds. Sungai Gampa Rt. 007, Kec. Rantau Badauh	Rumah Roboh	1 buah rumah	Nihil	Nihil	
114	Marabahan	Jl. Aes Nasution, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan	Rumah Roboh	1 pohon	Nihil	Nihil	

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
115	Cerbon	Ds. Simpang Nungki, Kec. Cerbon	Rumah Roboh	2 pohon	Nihil	Nihil	
116	Mandastana	Ray 4 Puntik, Kec. Mandastana	Pohon Tumbang	1 pohon	Nihil	Nihil	
117	Anjir Pasar	Anjir Pasar km 16, Kec. Anjir Pasar	Pohon Tumbang	1 pohon	Nihil	Nihil	
118	Anjir Pasar	Anjir Muara km 21. Kec. Anjir Muara	Pohon Tumbang	1 pohon	Nihil	Nihil	
119	Marabahan	di depan MTsN 2 Barito Kuala	Pohon Tumbang	2 pohon	Nihil	Nihil	

Sumber : BNPB Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-45. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tabunganen	240.00	20,562	0.71	85.68
2	Tamban	164.30	32,652	-0.42	198.73
3	Anjir Pasar	126.00	17,639	0.69	139.99
4	Anjir Muara	117.25	23,045	0.51	196.55
5	Alalak	106.85	61,271	2.68	573.43
6	Mandastana	136.00	17,999	1.70	132.35
7	Rantau Badauh	206.00	16,974	0.40	82.40
8	Belawang	80.25	14,220	0.49	177.20
9	Cerbon	183.00	10,116	-0.03	55.28
10	Bakumpai	261.00	10,934	0.24	41.89
11	Kuripan	343.50	6,001	-0.92	17.47
12	Tabukan	166.00	9,383	0.33	56.52
13	Mekarsari	143.50	18,437	0.68	128.48
14	Barambai	261.00	16,277	0.49	62.36
15	Marabahan	221.00	22,629	0.63	102.39
16	Wanaraya	37.50	14,701	-0.21	392.03
17	Jejangkit	203.00	6,868	-0.09	33.83
18	**Jumlah**	2,996.15			2476.58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala

Tabel-46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (M^3)	Volume Eksisting (M^3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mandastana	Desa Tabing Rimbah	Tabing Rimbah	Control Landfill	16	48,000	Panjang X Lebar X Tinggi 80m X 60m X 10m = 48.000 m^3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-47.Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (m^3/hari)
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Tabunganen	21768	5442
2	Tamban	33464	8366
3	Anjir Pasar	16782	4195.5
4	Anjir Muara	21736	5434
5	Alalak	67218	16804.5
6	Mandastana	16328	4082
7	Rantau Badauh	15725	3931.25
8	Belawang	14265	3566.25
9	Cerbon	9362	2340.5
10	Bakumpai	10493	2623.25
11	Kuripan	5921	1480.25
12	Tabukan	9032	2258
13	Mekarsari	18089	4522.25
14	Barambai	15732	3933
15	Marabahan	22046	5511.5
16	Wanaraya	13639	3409.75
17	Jejangkit	6844	1711
Jumlah		**318,444**	**79,611**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-48. Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bakumpai	2022	Bank Sampah Desa Batik	10-Jan-22	100	Aktif	Desa	45	4	Rp 550,000
2	Anjir Muara	2022	Bank Sampah Sepakat Bersama	27-Jan-22	85	Aktif	Desa	30	4	Rp 350,000
3	Alalak	2022	Bank Sampah Pulau Sewangi	10-Feb-22	55	Aktif	Desa	25	4	Rp 225,000
4	Tamban	2022	Bank Sampah Untung Tarus	25-Aug-22	70	Aktif	Desa	35	4	Rp 300,000
5	Anjir Muara	2022	Bank Sampah Anseria	3-Nov-22	60	Aktif	Desa	30	4	Rp 200,000
6	Alalak	2022	Bank Sampah Teras Peduli	13-Dec-22	120	Aktif	Perumahan	60	4	Rp 450,000
7					490			225		
8										

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Anjir Seberang Pasar I (DAK)	Desa Anjir Pasar I, Kec. Anjir Pasar	Pemerintah
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Belawang Desa Ujung (DAK)	Desa Belawang, Kec Belawang	Pemerintah
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Gandaraya (DAK)	Desa Gandaraya, Kec. Anjir Pasar	Pemerintah
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Mekarsari (DAK)	Desa Mekarsari, Kec. Mekarsari	Pemerintah
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Sei Pitung (DAK)	Desa Sei. Pitung, Kec. Alalak	Pemerintah
6	Pengembangan Jaringan Irigasi Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban	Desa Tamban Bangun Baru, Kec. Tamban	Pemerintah
7	Pengembangan Jaringan Irigasi DIR Antasan Segera Kecamatan Mandastana	Desa Antasan Segera, Kec. Mandastana	Pemerintah
8	Rehabilitasi Saluran Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya	Desa Babat Raya, Kec. Wanaraya	Pemerintah
9	Rehabilitasi Saluran Desa Dwipa Sari Kecamatan Wanaraya	Desa Dwipa Sari, Kec. Wanaraya	Pemerintah
10	Rehabilitasi Saluran Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya	Desa Kolam Makmur, Kec. Wanaraya	Pemerintah
11	Rehabilitasi Saluran Desa Sumber Rahayu Kecamatan Wanaraya	Desa Sumber Rahayu, Kec. Wanaraya	Pemerintah
12	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Murung Keramat	Desa Murung Keramat, Kec. Belawang	Pemerintah
13	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Semangat Dalam	Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak	Pemerintah
14	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Surya Kanta Kecamatan Wanaraya	Desa Surya Kanta, Kec. Wanaraya	Pemerintah
15	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Tumih Kecamatan Wanaraya	Desa Tumih, Kec. Wanaraya	Pemerintah
16	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled+Pembersihan) Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan	Kelurahan Ulu Benteng, Kec. Marabahan	Pemerintah
17	Normalisasi Sungai Desa Balukung Kec. Bakumpai	Desa Balukung, Kec. Bakumpai	Pemerintah
18	Normalisasi Sungai Pulau Alalak	Desa Pulau Alalak, Kec. Alalak	Pemerintah
19	Pengerukan Handil Tabukan Ds. Bandar Karya	Desa Bandar Karya, Kec. Tabukan	Pemerintah
20	Rehabilitasi DIR Irigasi Ds. Anjir Pasar Lama	Desa Anjir Pasar Lama, Kec. Anjir Pasar	Pemerintah
21	Rehabilitasi Saluran Desa Asia Baru Kecamatan Kuripan	Desa Asia Baru, Kec. Kuripan	Pemerintah
22	Rehabilitasi Saluran Desa Jerenang Kecamatan Kuripan	Desa Jerenang, Kec. Kuripan	Pemerintah
23	Rehabilitasi Saluran Desa Kabuau Kecamatan Kuripan	Desa Kabuau, Kec. Kuripan	Pemerintah
24	Rehabilitasi Saluran Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak	Desa Semangat Bakti, Kec. Alalak	Pemerintah
25	Rehabilitasi Saluran Ds Sei Kali Kec. Barambai	Desa Sei Kali, Kec. Barambai	Pemerintah
26	Rehabilitasi Saluran Ds Sei Rasau Kec. Cerbon	Desa Sei Rasau, Kec. Cerbon	Pemerintah
27	Rehabilitasi Saluran Sungai Tarutan Kel. Marabahan Kota	Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan	Pemerintah
28	Normalisasi Saluran Desa Batik RT.04 Kecamatan Bakumpai	Desa Batik, Kec. Bakumpai	Pemerintah
29	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari	Desa Mekarsari, Kec. Mekarsari	Pemerintah

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
30	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Purwosari I Kecamatan Tamban	Desa Purwosari I, Kec. Tamban	Pemerintah
31	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit	Desa Bahandang, Kec. Jejangkit	Pemerintah
32	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Sungai Sahurai Kecamatan Rantau Badauh	Desa Sungai Sahurai, Kec. Rantau Badauh	Pemerintah
33	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya	Desa Sidomulyo, Kec. Wanaraya	Pemerintah
34	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Waled) Desa Sungai Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh	Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh	Pemerintah
35	Rehabilitasi Saluran Ds Pinang Habang Kecamatan Wanaraya	Desa Pinang Habang, Kec. Wanaraya	Pemerintah
36	Normalisasi Saluran Desa Sido Makmur Kecamatan Marabahan	Desa Sido Makmur, Kec. Marabahan	Pemerintah
37	Rehabilitasi Saluran Desa Pendalaman RT.01 Kecamatan Berambai	Desa Pendalaman, Kec. Berambai	Pemerintah
38	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Karya Bersama Desa Beringin Kencana Kec.Tabunganen	Desa Beringin Kencana, Kec.Tabunganen	Masyarakat
39	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Karya Pepadaan Kencana Desa Beringin Kencana Kec. Tabunganen	Desa Beringin Kencana, Kec. Tabunganen	Masyarakat
40	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tirta Jaya Desa Purwosari Baru Kec. Tamban	Desa Purwosari Baru, Kec. Tamban	Masyarakat
41	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Maju Bersama Tabunganen Desa Beringin Kencana Kec.Tabunganen	Desa Beringin Kencana, Kec.Tabunganen	Masyarakat
42	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tunas Muda Kencana Desa Tanggulrejo Kec. Tabunganen	Desa Tanggulrejo, Kec. Tabunganen	Masyarakat
43	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sumber Tirto Utama Desa Sumber Rahayu Kec. Wanaraya	Desa Sumber Rahayu, Kec. Wanaraya	Masyarakat
44	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sejahtera Desa Surya Kanta Kec. Wanaraya	Desa Surya Kanta, Kec. Wanaraya	Masyarakat
45	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tirta Mulya Desa Beringin Kencana Kec. Tabunagen	Desa Beringin Kencana, Kec. Tabunagen	Masyarakat
46	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Berkat Bersama Desa Karang Buah Kec. Belawang	Desa Karang Buah, Kec. Belawang	Masyarakat
47	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Murung Keramat Berkarya Desa Murung Keramat Kec.Belawang	Desa Murung Keramat, Kec.Belawang	Masyarakat
48	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sidomapan Desa Karang Dukuh Kec. Belawang	Desa Karang Dukuh, Kec. Belawang	Masyarakat
49	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sinar Barambai Kolam Kanan Desa Kolam Kanan Kec. Barambai	Desa Kolam Kanan, Kec. Barambai	Masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
50	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Maju Bersama Desa Barambai Kolam Kiri Dalam Kec. Barambai	Desa Barambai Kolam Kiri Dalam, Kec. Barambai	Masyarakat
51	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Harapan Bersama Sukaramai Desa Suka Ramai Kec. Belawang	Desa Suka Ramai, Kec. Belawang	Masyarakat
52	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sidomulyo Desa Karang Dukuh Kec. Belawang	Desa Karang Dukuh, Kec. Belawang	Masyarakat
53	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sederhana Desa Karang Bunga Kec. Mandasatana	Desa Karang Bunga, Kec. Mandasatana	Masyarakat
54	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Karya Asih Desa Karang Indah Kec. Mandastana	Desa Karang Indah, Kec. Mandastana	Masyarakat
55	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Karya Makmur Desa Kolam Makmur Kec. Wanaraya	Desa Kolam Makmur, Kec. Wanaraya	Masyarakat
56	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Bangun Bersama Desa Beringin Kencana Kec. Tabunganen	Desa Beringin Kencana, Kec. Tabunganen	Masyarakat
57	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tani Manunggal Ds Kolam Kanan Kec. Wanaraya	Desa Kolam Kanan, Kec. Wanaraya	Masyarakat
58	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Subak Dwipa Desa Dwipasari Kec. Wanaraya	Desa Dwipasari, Kec. Wanaraya	Masyarakat
59	Pengolahan Limbah Toilet dengan Tripikon_S	Desa Jejangkit Timur Kec.Jejangkit	Dinas Kesehatan, Universitas Padjadjaran
60	Pembuatan Jamban Sehat Keluarga	Desa Tinggiran Darat Kec.Mekarsari	Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas PUPR Kab. Barito Kuala, 2023

Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaduan warga masyarakat dekat dengan TPS Kantor Pemda	Terkait jenis sampah yang boleh dibuang di TPS dan jam pembuangan sampah yang sesuai dengan peraturan daerah (E.Lapor.id)	2022	Selesai	-
2	Masyarakat Sungai Alalak	Dugaan adanya tumpahan minyak High Sulfur Fuel Oil (HSFO) di Sungai Alalak (Media Sosial)	2022	Selesai	-
3	Pengaduan warga Desa Baliuk	Terkait dampak debu akibat aktivitas PT Talenta Bumi (Media Sosial)	2022	Selesai	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-51. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Komunitas Pecinta Alam Tapak Barito (KPA-TB)	Marabahan	Nomor : 16 tanggal 27 Maret 2014	Marabahan
2	Forum Komunitas Hijau (FKH) Ijejela	Marabahan	Nomor : 027 tanggal 01 April 2015	Marabahan
3				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doktor (S3)	2		2
2	Master (S2)	3	3	6
3	Sarjana (S1)	12	7	19
4	Diploma (D3/D4)	3	5	8
5	SLTA	12	4	16
6	SMP	6		6
7	SD	2		2
	Jumlah	**40**	**19**	**59**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2	-	2	-
2	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	-	2	-
3	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	1	-	1	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SMPN 2 Alalak	Adiwiyata Nasional	Kementerian LHK	2022
2	SDN Sungai Gampa Asahi	Adiwiyata Provinsi	Gubernur Kalimantan Selatan	2022
3	SDN Sidorejo 1	Adiwiyata Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	2022
4	Desa Danda jaya	Proklim Utama	Kementerian LHK	2019
5	Bupati Barito Kuala		Kementerian LHK	2022
6	Kabupaten Barito Kuala	Adipura	Kementerian LHK	2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Tabel-55. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembuatan Produk Olahan Pupuk Organik Cair	DLH Barito Kuala	Kelompok Karya Makmur Bunga Mandastana	2022
2	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tunas Muda Kencana Desa Tanggulrejo Kec. Tabunganen	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
3	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sumber Tirto Utama Desa Sumber Rahayu Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
4	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sejahtera Desa Surya Kanta Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
5	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Berkat Bersama Desa Karang Buah Kec. Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
6	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tirta Mulya Desa Beringin Kencana Kec. Tabunagen	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
7	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Murung Keramat Berkarya Desa Murung Keramat Kec.Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
8	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sidomapan Desa Karang Dukuh Kec. Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
9	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sinar Barambai Kolam Kanan Desa Kolam Kanan Kec. Barambai	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
10	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Maju Bersama Desa Barambai Kolam Kiri Dalam Kec. Barambai	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
11	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sidomulyo Desa Karang Dukuh Kec. Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Harapan Bersama Sukaramai Desa Suka Ramai Kec. Belawang	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
13	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Sederhana Desa Karang Bunga Kec. Mandasatana	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
14	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Karya Asih Desa Karang Indah Kec. Mandastana	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
15	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Karya Makmur Desa Kolam Makmur Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
16	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Bangun Bersama Desa Beringin Kencana Kec. Tabunganen	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
17	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Tani Manunggal Ds Kolam Kanan Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022
18	Pemeliaharaan Jaringan Irigasi (Galian Waled) P3A Subak Dwipa Desa Dwipasari Kec. Wanaraya	DPUPR Barito Kuala	Masyarakat	2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Dinas PUPR Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	URAIAN	dua tahun sebelumnya	satu tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN	2423500000,00	2478180000,00
	a. Pertanian Sempit	-	-
	- Tanaman Bahan Makanan	-	-
	- Tanaman Perkebunan	-	-
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	-
	b. Kehutanan	-	-
	c. Perikanan	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	7720000,00	8130000,00
3	Industri Pengolahan	1372820000,00	1439620000,00
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	34730000,00	37280000,00
5	Bangunan	1148160000,00	1274210000,00
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1074010000,00	1141870000,00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	483332000,00	508060000,00
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	164520000,00	173360000,00
9	Jasa-jasa	762940000,00	822780000,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO		**7471732000,00**	**7883490000,00**
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		**7471732000,00**	**7883490000,00**

Sumber : BPS Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-57. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	URAIAN	dua tahun sebelumnya	satu tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN	1590470000,00	1613960000,00
	a. Pertanian Sempit	-	-
	- Tanaman Bahan Makanan	-	-
	- Tanaman Perkebunan	-	-
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	-
	b. Kehutanan	-	-
	c. Perikanan	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	5270000,00	5520000,00
3	Industri Pengolahan	901630000,00	926630000,00
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	22730000,00	24040000,00
5	Bangunan	780650000,00	835900000,00
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	689110000,00	708720000,00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	342390000,00	356840000,00
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	105070000,00	105390000,00
9	Jasa-jasa	505090000,00	532180000,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO		4942410000,00	5109180000,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		4942410000,00	5109180000,00

Sumber : BPS Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Keputusan Bupati	-	118.45/110/KUM/2023 tanggal 27 Pebruari 2023	Penetapan Lokasi Titik Pemantauan Udara di Kabupaten Barito Kuala	-
2	Keputusan Bupati	-	118.45/111/KUM/2023 tanggal 27 Pebruari 2023	Penetapan Lokasi Titik Pemantauan Air Sungai dan Rawa di Kabupaten Barito Kuala	-
3	Keputusan Bupati	-	118.45/326/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Danau Karya Anjir Pasar Kabupaten Bartio Kuala	-
4	Keputusan Bupati	-	118.45/330/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2023	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Bartio Kuala	-
5	Keputusan Bupati	-	118.45/327/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana Kabupaten Bartio Kuala	-
6	Keputusan Bupati	-	118.45/327/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala	
7	Keputusan Bupati	-	118.45/11/KUM/2022 tanggal 2 Januari 2022	Penetapan Pembentukan Sekolah Adiwiyata Binaan Tahun 2022	
8	Keputusan Bupati	-	188.45/201/KUM/2023 Tanggal 28 April 2023	Pembentukan Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/ Narasumber Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	
9	Keputusan Bupati	-	188.45/263/KUM/2023 Tanggal 20 Juni 2023	Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
10	Keputusan Bupati	-	188.45/253/KUM/2023 Tanggal 12 Juni 2023	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.	
11	Keputusan Bupati	-	188.45/9/KUM/2023 Tanggal 2 Januari 2023	Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	APBD	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	501785375	441102000
2	APBD	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	112729200	682743500
3	APBD	Pemulihan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1487880150	106790575
4	APBD	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	80925000	58000000
5	APBD	Penyimpanan Sementara Limbah B3	10092625	14967800
6	APBD	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1399015960	426152375
7	APBD	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	140712350	104066875
8	APBD	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		160457800
9	APBD	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184757405	117133250
10	APBD	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		19943775
11	APBD	Pengelolaan Sampah	306091723	7097029150
12	BLUD	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3987272727
Total			4,223,989,788	13,215,659,827

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala

Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	Rp 25,308,005,563.00
2	Retribusi	Rp 3,972,799,353.00
3	Laba BUMD	Rp 10,122,349,618,00
4	Pendapatan lainya yang Sah	Rp 34, 237,911,001,98
Total		Rp 73,641,065,535,98

Sumber : BPPRD Kab. Barito Kuala, 2023
BPKAD Kab. Barito Kuala, 2023

Tabel-61. Inovasi Pengelolaan LH daerah di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kecamatan Tabukan	Pengelolaan Sampah Desa Melalui MALAMPAH (Masyarakat Pintar Mengelola Sampah) Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala	Gambaran inovasi MALAMPAH yakni (a). Pembentukan kelompok peduli sampah tingkat desa, (b). Kegiatan pemberdayaan masyarakat secara adaptif langsung melalui pelatihan pengolahan sampah, diskusi kelompok, sosialisasi terkait pengelolaan sampah lingkup desa, (c). Mendorong penggunaan dana desa dengan tetap berpegang pada ketentuan pertauran yang berlaku, (d). Membentuk dan mencanangkan DESA MALAMPAH, (e). Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait lainnya	
2	Kecamatan Tabunganen	Inovasi Pengelolaan Sampah (Mengangkat Sampah dari Sungai Menggunakan Jaring-Jaring) di Desa Kuala Lupak	Gambaran inovasi Mengangkat Sampah dari Sungai Menggunakan Jaring yaitu mengurangi sampah dari masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke Sungai agar tidak mengalir masuk ke laut dan makin memperparah kerusakan ekosistem laut di Desa Kuala Lupak yang muara sungainya langsung menghadap ke laut.	SK Camat Tabunganen Nomor 02 Tahun 2023
3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Program Anjur Angku Sampah	Program Gerakan anjur angkut sampah merupakan sinergi antara masyarakat, dunia usaha dan Dinas Lingkungan Hidup, dimana masyarakat sebagai penghasil sampah melalui paman gerobak menganjur (membawa) sampahnya ke Truk yang sudah disiapkan DLH.	
4	Kelompok Tani Karya Makmur Bunga Mandastana	Pembuatan Komposter untuk sampah rumah tangga menjadi pupuk cair dan padat	Salah satu inovasi lingkungan di Kabupaten Barito Kuala yang lainnya adalah Pembuatan Komposter dari sampah rumah tangga terutama sampah organik menjadi pupuk padat dan cair agar dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman.	
5	Kawasan Industri Sungai Pitung	BLUD UPT Limbah B3	Kabupaten Barito Kuala satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai BLUD UPT Limbah B3 di kawasan industri sungai Pitung untuk mengelola limbah B3 yang mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang telah beroperasi mulai awal tahun 2021.	

6	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Pemantauan Kualitas Air dengan Alat ONLINMO	Data hasil pemantauan air sungai dapat digunakan untuk mendukung nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Dalam mendukung nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tersebut diperlukan suatu alat/sistem yang dapat memberikan data kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online. Pengadaan Alat/System Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online (Onlimo) sangat diperlukan dalam mendukung pemantauan kualitas air sungai yang dapat dipantau dan diakses dalam 24 jam	
7	Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan	Pembuatan Tripikon-S (Teknik septictank yang diletakan di sungai dengan pipa paralon) di sepanjang aliran sungai untuk meningkatkan kualitas air sungai	Untuk mengendalikan pencemaran pada air sungai sekaligus mengatasi sanitasi masyarakat tepi air yang memiliki lahan sempit dan berdaerah rawa, dibangunlah percontohan teknologi tepat guna yang dinamakan Tripikon-S. Dengan adanya teknologi Tripikon-S yang desainnya berbentuk tabung yang berfungsi sebagai tangki septik, diharapkan pencemaran air sungai dapat ditangani	
8	Kabupaten Barito Kuala	Inovasi Penggunaan Lahan Berkelanjutan	Inovasi yang dilakukan adalah dengan membiarkan jerami di sawah sampai kering, Jerami yang kering akan ditumbuhi oleh rumput liar yang apabila terandam air hujan akan mati dan membusuk. Untuk mempercepat pembusukan , maka jerami dan rumput liar yang sudah mati dikumpulkan (digompal) dengan 50% tenggelam dalam air disawah. Lebih kurang 15 hari rumput dan jerami yang terendam air tersebut dibalik sehingga tenggelam 50%. Lebih kurang 15 hari kemudian rumput dan jerami tersebut busuk dan sudah menjadi pupuk organik.	
9	Dinas Lingkungan Hidup	Sinergitas Bersama Untuk Meningkatkan Desa Berkelanjutan (SIBAKANTAN)	Penerapan inovasi SIBAKANTAN untuk desa proklim lestari adalah untuk tercapainya pengelolaan lingkungan di tingkat desa secara berkelanjutan dan pemahaman mengenai perubahan iklim, penyebab dan dampak yang ditimbulkan dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK	
10	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Upaya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan tugas pemerintah daerah yang melibatkan pihak swasta (industri) dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara lain : - Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan - Reboisasi dan Penghijauan - Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) - Melakukan Rapat koordinasi lintas sektor	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

LAMPIRAN B

PENENTUAN ISU PRIORITAS

Proses penyusunan isu-isu prioritas dan Dokumen IKPLHD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Kuala baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi pemerhati lingkungan. Selain itu dalam perumusan isu-isu juga mengacu pada isu-isu yang terdapat setiap wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijadikan isu prioritas dan strategis dalam Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023. Penentuan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup didasari dari permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi. Selain ketiga dimensi tersebut, dalam penentuan isu prioritas Laporan DIKPLHD dilakukan dengan pertimbangan:

a. Mendapat perhatian publik yang luas (aktual)
b. Perlu ditangani segera (urgen)
c. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik (signifikan)
d. Potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda (sensitif)
e. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (konsisten).

Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. Proses pelibatan pemangku kepentingan ini dilakukan melalui *Penjaringan isu prioritas* yang secara sederhana didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. *Penjaringan isu prioritas* adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Sebagai salah satu metode pengumpulan data, pengambilan data kualitatif melalui *Penjaringan isu prioritas* dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi penyusun DIKPLHD untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. *Penjaringan isu prioritas* memungkinkan tim penyusun

DIKPLHD dan *stakeholder* berdiskusi intensif dalam membahas isu-isu lingkungan hidup yang sangat spesifik. *Penjaringan isu prioritas* juga memungkinkan tim penyusun DIKPLHD mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. Hasil *Penjaringan isu prioritas* tidak bertujuan menggambarkan (representasi) suara masyarakat. Meskipun demikian arti penting *Penjaringan isu prioritas* bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya. Pertimbangan menggunakan *Penjaringan isu prioritas* dalam penyusunan DIKPLHD adalah untuk memperoleh informasi mendalam tentang persepsi isu-isu lingkungan hidup yang melibatkan persoalan masyarakat dan berimplikasi luas dari berbagai perspektif. Alasan lain adalah bahwa penyusunan DIKPLHD membutuhkan perasaan memiliki dari objek yang dikaji (masyarakat), sehingga pada saat memberikan rekomendasi maka masyarakat akan menerima rekomendasi tersebut. Partisipasi dalam *Penjaringan isu prioritas* memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kedekatan dan perasaan memiliki. Proses penyusunan dan perumusan isu lingkungan hidup dibantu pendekatan PSR (*Pressure State and Response*) untuk memberi pemahaman kerangka prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul. Dengan memperhatikan sumber daya *stakeholders*, maka dibuat pilihan masalah-masalah yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek mauun jangka panjang. Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah Kabupaten Barito Kuala. Penentuan isu prioritas lingkungan hidup dalam penyusunan IKPLHD dilakukan menggunakan metode *Participatory Approaches and Expert Opinion*. Isu-isu lingkungan hidup diperoleh melalui pengumpulan informasi yang dilakukan oleh kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) dan pendapat pakar (*expert opinion*) melalui forum *Penjaringan isu prioritas*. Kemudian isu-isu lingkungan hidup yang

telah teridentifikasi tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan metode tertentu untuk dilakukan pengambilan kesimpulan atas isu prioritas. Pengambilan keputusan dalam menetapkan isu prioritas lingkungan hidup daerah merupakan tantangan utama. Pengambilan keputusan pada dasarnya melibatkan satu set alternatif dan pilihan yang paling tepat dari alternatif-alternatif tersebut untuk dieksekusi. Pada saat pengambilan keputusan, secara tipikal terdapat tiga kondisi/situasi yang dihadapi pengambil keputusan, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepastian dari hasil (*payoff, outcome*) yang akan terjadi, yaitu:

1. Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian: mengacu kepada situasi dimana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan, dan probablilitas setiap kemungkinan tidak diketahui;
2. Pengambilan keputusan di bawah risiko: mengacu kepada situasi dimana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan, dan probabilitas setiap hasil diketahui atau dapat diperkirakan oleh pengambil keputusan;
3. Keputusan di bawah kondisi kepastian: mengacu kepada situasi dimana hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan, dan hasil ini diketahui secara tepat oleh pengambil keputusan.

Kerumitan masalah pengambilan keputusan bukan hanya terletak pada ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi, tetapi juga disebabkan karena pengambil keputusan berhadapan dengan masalah yang sangat kompleks, dimana banyak faktor ikut terkait. Salah satu metode yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan terhadap keputusan isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 adalah dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (2008). Penggunaan AHP dapat diaplikasikan untuk kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan atau perumusan strategi prioritas. Di dalam AHP suatu prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya telah

didekomposisi (struktur) terlebih dahulu, sehingga penetapan prioritas didasarkan pada suatu proses yang terstruktur (hierarki) dan rasional/logis. Metode AHP membantu memecahkan persoalan secara terstruktur dengan menyusun suatu hirarki kriteria, yang selanjutnya dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), untuk menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas (kesimpulan). Prinsip utama dalam perumusan isu prioritas lingkungan hidup dengan menggunakan AHP, antara lain: d*ecomposition, comparative judgement,* dan *logical concistency*. *Decomposition* adalah langkah dimana suatu tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Penentuan isu prioritas lingkungan hidup dalam penyusunan DIKPLHD dilakukan menggunakan metode *Participatory Approaches and Expert Opinion*. Isu-isu lingkungan hidup diperoleh melalui pengumpulan informasi yang dilakukan oleh kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pendapat pakar (*expert opinion*) melalui forum **Penjaringan isu prioritas**. Kemudian isu-isu lingkungan hidup yang telah teridentifikasi tersebut dilakukan proses penentuan isu prioritas. Salah satu instrumen untuk membantu proses penentuan isu prioritas lingkungan hidup adalah dengan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan salah satu alat bantu dalam proses pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 70-an. Penggunaan AHP dapat diaplikasikan untuk kajian kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan atau perumusan strategi prioritas. Di dalam AHP suatu prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya telah didekomposisi (struktur) terlebih dahulu, sehingga penetapan prioritas didasarkan pada suatu proses yang terstruktur (hierarki) dan rasional/logis. AHP membantu memecahkan persoalan secara terstruktur dengan menyusun suatu hirarki kriteria, yang selanjutnya dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), untuk menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas (kesimpulan).

Dengan kata lain, satu tujuan yang utuh, didekomposisi (dipecahkan) kedalam unsur penyusunnya dalam suatu susunan hirarki. Apabila unsur tersebut merupakan kriteria yang dipilih, maka unsur tersebut hendaknya mencakup semua aspek penting terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi pertimbangan kriteria yang dipilih benar-benar mempunyai makna bagi pengambilan keputusan dan tidak mempunyai makna atau pengertian yang sama. Dalam proses pemilihan isu prioritas, pertama-tama harus mendefinisikan situasi dengan seksama, memasukkan sebanyak mungkin rincian yang relevan, lalu menyusun model secara hirarki yang terdiri atas beberapa tingkat rincian, yaitu; fokus masalah, kriteria, dan alternatif. Fokus masalah merupakan masalah utama yang perlu dicari solusinya dan terdiri hanya atas satu elemen, yaitu sasaran menyeluruh. Selanjutnya, menyusun kriteria yang merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas fokus masalah. Untuk suatu masalah yang kompleks atau berjenjang, kriteria dapat diturunkan kepada sub-sub kriteria. Dengan demikian kriteria bisa terdiri lebih dari satu tingkat hirarki. Langkah terakhir adalah alternatif yang merupakan berbagai tindakan akhir dan merupakan pilihan keputusan dari penyelesaian masalah yang dihadapi. Beberapa isu prioritas yang telah disepakati akan diranking berdasarkan kriteria tertentu yang selanjutnya digunakan untuk menentukan urutan isu prioritas. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk meranking isu, antara lain: mendapat perhatian publik yang luas (aktual), perlu ditangani segera (urgen), sesuai kebutuhan masyarakat (relevan), dampak yang ditimbulkannya terhadap publik (signifikan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (konsisten), dan potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda (sensitif). Kriteria tersebut nantinya digunakan oleh pengambil kebijakan untuk memilih isu mana yang menjadi prioritas (Gambar L.1).

Tujuan/Goal (Hierarki I) : Menentukan Isu Prioritas

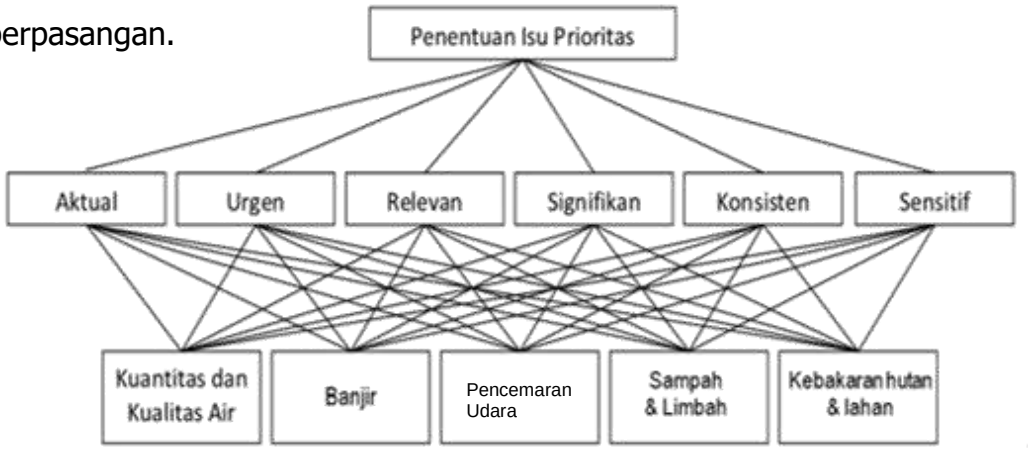
Kriteria (Hierarki II) :

- Aktual = mendapat perhatian publik yang luas;
- Urgen = perlu ditangani segera;
- Relevan = sesuai kebutuhan masyarakat;
- Signifikan = dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
- Konsisten = sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Sensitif = potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda.

Alternatif Isu (Hierarki III):

- Kuantitas dan Kualitas Air
- Banjir
- Pengelolaan Persampahan dan Limbah
- Karhutla
- Degradasi Lahan

Apabila proses dekomposisi telah selesai dan hierarki telah tersusun dengan baik (Gambar L.1), kemudian dilakukan penilaian perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) pada tiap-tiap hirarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. Perbandingan berpasangan dilakukan pada Hierarki III (antar alternatif) dan pada Hierarki II (antar kriteria). Penilaian atau pembobotan pada Hirarki III, dimaksudkan untuk membandingkan nilai atau karakter pilihan berdasarkan tiap kriteria yang ada secara berpasangan.



Gambar L.1 Bagan Hirarki Penentuan Isu Prioritas

Hasil dari penilaian adalah nilai/bobot yang merupakan karakter dari masing-masing alternatif isu lingkungan hidup. Penilaian atau pembobotan

pada Hierarki II, dimaksudkan untuk membandingkan nilai pada masing-masing kriteria guna mencapai tujuan, sehingga nantinya akan diperoleh pembobotan tingkat kepentingan masing-masing kriteria untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemberian skor penilaian perbandingan berpasangan pada Hierarki II dan III mengacu pada skor penilaian yang telah dibuat oleh beberapa pakar atau berdasarkan Penjaringan isu prioritas (Tabel L.1). Pemberian skor penilaian pada Hierarki II mengacu pada skor penilaian yang telah dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (2008), yaitu:

- 1 = Kedua elemen/alternatif sama pentingnya (*equal*)
- 3 = Elemen A sedikit lebih esensial dari elemen B (*moderate*)
- 5 = Elemen A lebih esensial dari elemen B (*strong*)
- 7 = Elemen A jelas lebih esensial dari elemen B (*very strong*)
- 9 = Elemen A mutlak lebih esensial dari elemen B (*very very strong*)
- 2,4,6,8 = Nilai antara diantara dua perimbangan yang berdekatan.

Tabel L.1 Skor untuk penilaian perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) pada tiap-tiap hirarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya

Alternatif/Kriteria	Aktual	Relevan	Signifikan	Konsisten	Sensitif
Kuantitas dan Kualitas Air	88,96	91,44	94,88	89,38	88,41
Pengelolaan Persampahan dan Limbah	95,16	91,88	91,88	88,73	90,96
Degradasi Lahan	83,96	85,22	84,71	82,69	82,19
Karhutla	80,17	78,28	82,06	81,68	81,43
Banjir	92,40	88,73	91,74	82,69	85,97

Sumber : Hasil Analisa 2023

Pengambilan data prosedur perbandingan berganda dilakukan menggunakan kuisioner berupa matriks (Tabel L.2). Dalam pembobotan tingkat kepentingan atau penilaian perbandingan berpasangan ini berlaku hukum aksioma reciprocal, artinya apabila suatu elemen A dinilai lebih esensial (5) dibandingkan dengan elemen B, maka B lebih esensial 1/5

dibandingkan dengan elemen A. Apabila elemen A sama pentingnya dengan B maka masing-masing bernilai = 1.

Tabel L.2 Skor Penilaian Perbandingan Berpasangan Pada Hirarki II

Alternatif/Kriteria	Aktual	Relevan	Signifikan	Konsisten	Sensitif
Kuantitas dan Kualitas Air	1,00	0,80	2,06	1,64	0,76
Pengelolaan Persampahan dan Limbah	1,27	1,00	2,72	1,46	1,07
Degradasi Lahan	0,49	1,03	1,00	0,71	0,47
Karhutla	0,61	0,68	1,07	1,00	0,54
Banjir	1,33	0,94	2,36	1,06	1,00
	6,10	5,54	12,13	8,09	4,89

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Jadi, banyaknya sel yang harus diisi adalah n(n-1)/2 karena matriks reciprocal elemen diagonalnya bernilai = 1, jadi tidak perlu diisi, sehingga hanya bagian yang putih saja yang diisi. Selanjutnya dilakukan pengukuran konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis. Proses AHP mencakup pengukuran konsistensi yaitu apakah pemberian nilai dalam pembandingan antar obyek telah dllakukan secara konsisten. Ketidakkonsistenan dapat timbul karena miskonsepsi atau ketidaktepatan dalam melakukan hirarki, kekurangan informasi, kekeliruan dalam penulisan angka, dan lain-lain. Suatu kasus dalam pengambil keputusan, jika A 4x lebih baik dari B, B 3x lebih baik dari C, maka seharusnya A 12x lebih baik dari C. Tetapi jika dalam pemberian nilai, A diberi nilai 6x lebih dari C, berarti terjadi inkonsistensi. Rasio konsistensi (*consistency ratio*, CR) menunjukkan sejauh mana analis konsisten dalam memberikan nilai pada matriks pembandingan. Secara umum, hasil analisis dianggap konsisten jika memiliki CR<10%. Jika nilai CR>10%, perlu dipertimbangkan untuk melakukan re-evaluasi dalam penyusunan matriks pembandingan.

Apabila proses pembobotan atau pengisian kuisioner telah selesai, langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarkinya masing-masing. Pada tahapan ini analisis dapat dilakukan secara manual menggunakan MS-Excel. Nilai-nilai yang diperoleh selanjutnya disusun kedalam matriks berpasangan serupa dengan matriks yang digunakan pada kuisioner matriks diatas. Hanya saja pada penyusunan matriks untuk analisis data ini, semua kotak harus diisi.

1. Menyatukan pendapat dari beberapa kuesioner yang diisi oleh pakar menggunakan nilai rata-rata.
2. Menyusun matriks perbandingan. Sebelum melangkah lebih jauh ke tahapan iterasi untuk penetapan prioritas pada pilihan alternatif atau penetapan tingkat kepentingan kriteria, maka terlebih dahulu dilakukan uji konsistensi. Uji konsistensi dilakukan pada masing-masing kuesioner/pakar yang menilai atau memberikan pembobotan. Kuesioner atau pakar yang tidak memenuhi syarat konsisten dapat dianulir atau di pending untuk perbaikan. Prinsip dasar pada uji konsistensi ini adalah apabila A lebih penting dari B, kemudian B lebih penting dari C, maka tidak mungkin C lebih penting dari A. Tolok ukur yang digunakan adalah CI (*Consistency ndex*) berbanding RI (Ratio Index) atau CR (*Consistency Ratio*). Ratio Index (RI) yang digunakan untuk setiap ordo matriks dapat dilihat pada Tabel L.3

   Tabel L.3 Nilai RI Berdasarkan Ordo Matriks

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59

Uji konsistensi dilakukan dengan menyusun tingkat kepentingan relatif pada masing-masing kriteria/alternatif yang dinyatakan sebagai bobot relatif ternormalisasi (*normalized relative weight*). Bobot relatif yang dinormalkan merupakan suatu bobot nilai relatif untuk masing-masing elemen pada setiap kolom yang dibandingkan dengan jumlah masing-masing elemen.

Selanjutnya pada Tabel L.4 dihitung bobot tingkat kepentingan relatif ternormalisasi pada masing-masing kriteria.

Tabel L.4 Nilai Bobot Tingkat Kepentingan Relatif Ternormalisasi pada Masing-Masing Kriteria

Alternatif/Kriteria	Aktual	Relevan	Signifikan	Konsisten	Sensitif	jumlah	rata2
Kuantitas dan Kualitas Air	0,28	0,27	0,24	0,25	0,25	1,64	0,26
Pengelolaan Persampahan dan Limbah	0,23	0,22	0,21	0,20	0,23	1,36	0,24
Degradasi Lahan	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09	0,49	0,22
Karhutla	0,10	0,14	0,11	0,11	0,10	0,68	0,11
Banjir	0,23	0,22	0,22	0,24	0,24	1,44	0,23

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya tentukan nilai CI (*Consistency Index*) dengan persamaan:

$CI = (\lambda_{max}. - n)/(n-1)$

Dimana :

CI = indeks konsistensi

λ_{max} = penjumlahan antara hasil kali perkalian antara baris pada Tabel L.2 dengan kolom rata-rata pada Tabel L.4.

n = ordo matriks

Setelah memperoleh nilai λ_{max}. selanjutnya dapat dihitung nilai CI. Apabila nilai CI bernilai nol (0) berarti matriks konsisten. Jika nilai CI yang diperoleh lebih besar dari 0 (CI>0) selanjutnya diuji batas ketidakkonsistenan. Pengujian diukur dengan menggunakan *Consistency Ratio* (CR), yaitu nilai indeks, atau perbandingan antara CI dan RI:

CR = CI/RI

$\lambda_{max}. = 6,0391$
CI = 0,0078
RI 6 = 1,24
Konsistensi (CR) = 0,0063

Penetapan prioritas alternatif pada tiap-tiap hierarki kriteria (aktual, urgen, relevan, signifikan, konsisten, sensitif) dilakukan melalui proses Iterasi (perkalian matriks). Sebagai contoh, untuk kriteria aktual, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah bentuk fraksi nilai-nilai

pembobotan kedalam desimal (Tabel L.5). Langkah kedua adalah mengkuadratkan matriks pada Tabel L.5 dan selanjutnya membuat nilai penjumlahan baris dan nilai normalisasi (Tabel L.6). Langkah ketiga adalah melakukan iterasi pada matriks Tabel L.6 dengan matriks Tabel L.5 menjadi Matriks baru (Tabel L.7), selanjutnya membuat nilai penjumlahan baris dan nilai normalisasi. Selanjutnya dihitung selisih antara nilai normalisasi vektor Matriks Tabel L.6 dan vektor Matriks Tabel L.7 (nilai selisih tersebut harus sama dengan 0,00). Apabila selisih (>0), maka lakukan kembali perkalian untuk matriks, dan langkah ini terus diulang hingga nilai selisih antar iterasi tidak mengalami perubahan (=0).

Tabel L.5 Nilai-Nilai Pembobotan dari Nilai Isu-Isu

nilai isu	alternatif isu pada kriteria aktual	Kuantitas dan Kualitas Air	Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Degradasi Lahan	Karhutla	Banjir
90,40	Kuantitas dan Kualitas Air	1,09	1,05	1,15	1,10	0,99
94,88	Pengelolaan Persampahan dan Limbah	1,14	1,10	1,21	1,15	1,04
86,49	Degradasi Lahan	1,04	1,00	1,10	1,05	0,95
82,19	Karhutla	0,99	0,95	1,05	1,00	0,90
91,19	Banjir	1,10	1,06	1,16	1,11	1,00

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Tabel L.6 Nilai dari Kuadrat Matriks Tabel L.5

alternatif isu pada kriteria aktual	Kuantitas dan Kualitas Air	Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Degradasi Lahan	Karhutla	Banjir	jumlah	normalisasi
Kuantitas dan Kualitas Air	5,45	5,24	5,75	5,50	4,96	31,81	0,17
Pengelolaan Persampahan dan Limbah	5,72	5,50	6,03	5,77	5,20	33,38	0,18
Degradasi Lahan	5,21	5,01	5,50	5,26	4,74	30,43	0,16
Karhutla	4,95	4,76	5,23	5,00	4,51	28,92	0,15
Banjir	5,50	5,29	5,80	5,55	5,00	32,09	0,17
jumlah						189,00	1,00

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Tabel L.7 Perkalian Matriks pada Tabel L.5 dengan Tabel L.6

alternatif isu pada kriteria aktual	Kuantitas dan Kualitas Air	Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Degradasi Lahan	Karhutla	Banjir	jumlah	normalisasi	selisih normalisasi antar matrix	rangking isu prioritas
Kuantitas dan Kualitas Air	27	26,2	28,7	27,5	24,8	159,05	0,203	0	2
Pengelolaan Persampahan dan Limbah	28	26,7	29,3	28,0	25,2	161,86	0,204	0	1
Degradasi Lahan	29	27,5	30,2	28,9	26,0	166,92	0,189	0	4
Karhutla	25	23,8	26,1	25,0	22,5	144,60	0,182	0	5
Banjir	27	26,4	29,0	27,7	25,0	160,43	0,202	0	3
jumlah						793	1,00	0	

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Oleh karena selisih antar nilai matriks tidak mengalami perubahan (=0), maka nilai yang diperoleh tersebut selanjutnya menjadi urutan prioritas. Dengan demikian, untuk kriteria aktual memberikan urutan alternatif isu prioritas lingkungan hidup, yaitu: Banjir (0,202), Kuantitas Dan Kualitas Air (0,203), Pengelolaan Persampahan dan Limbah (0,204), Degradasi lahan (0,189), dan Karhutla (0,182). Metode yang sama diteruskan pada tingkatan hierarki selanjutnya, atau pilihan-pilihan alternatif (urgen, relevan, signifikan, konsisten, dan sensitif). Berdasarkan penilaian terhadap kesemua kriteria (aktual, urgen, relevan, signifikan, konsisten, dan sensitif), maka didapat rekapitulasi akhir dari matriks alternatif isu prioritas seperti terlihat pada Tabel L.8. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengakumulasi nilai/bobot global yang merupakan nilai sensitivitas masing-masing alternatif isu. Dengan demikian, tujuan (goal) untuk mengidentifikasi isu prioritas lingkungan hidup memberikan hasil berturut-turut: Pengelolaan Persampahan dan Limbah (0,174), Kuantitas Dan Kualitas Air (0,173), Banjir (0,172), Degradasi lahan (0,170), dan Karhutla (0,166). Kelima isu tersebut akan diranking berdasarkan kriteria tertentu yang selanjutnya digunakan untuk menentukan urutan prioritas isu. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk meranking isu, antara lain: mendapat perhatian publik yang luas (aktual), perlu ditangani segera (urgen), dampak

yang ditimbulkannya terhadap masyarakat (signifikan), potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda (sensitif), dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (konsisten). Dibandingkan analisis Tahun 2023, maka kriteria 'sesuai kebutuhan masyarakat (relevan)', tidak digunakan mengingat maknanya hampir sama dengan kriteria 'dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat (signifikan)' dan juga isu-isu lingkungan bukan merupakan hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kriteria tersebut nantinya digunakan oleh pengambil kebijakan memilih isu mana yang menjadi prioritas. Kriteria-kriteria tersebut dianalisis menggunakan metode AHP dengan aplikasi *Microsoft Excel* untuk perhitungannya. Hasil penghitungan diharapkan dapat membantu penentuan isu prioritas lingkungan hidup.

Analisis Isu Prioritas

Prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP, yaitu: *decomposition*, *comparative judgement*, dan *logical concistency*. Prosedur AHP meliputi tahapan sebagaimana disajikan pada uraian berikut ini.

Dekomposisi Masalah

Dekomposisi masalah adalah langkah dimana suatu tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, sutu tujuan (*goal*) yang utuh, didekomposisi (dipecahkan) kedalam unsur penyusunnya. Apabila unsur tersebut merupakan kriteria yang dipilih, maka unsur tersebut hendaknya mencakup semua aspek penting terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi pertimbangan kriteria yang dipilih benar-benar mempunyai makna bagi pengambilan keputusan dan tidak mempunyai makna atau pengertian yang sama.

Tabel L.8 Rekapitulasi Akhir Rekapitulasi Akhir Analisis Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten BARITO KUALA

hirarki	Aktual	Relevan	Signifikan	Konsisten	Sensitif	skor akhir	rangking isu
Pengelolaan Persampahan dan Limbah	0,174	0,173	0,173	0,172	0,169	0,174	1
Kuantitas dan Kualitas Air	0,179	0,175	0,173	0,165	0,174	0,173	2
Banjir	0,164	0,167	0,168	0,166	0,165	0,172	3
Degradasi Lahan	0,178	0,167	0,171	0,162	0,169	0,170	4
Karhutla	0,162	0,170	0,167	0,170	0,164	0,166	5
jumlah							

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Permasalahan atau isu-isu lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi. Dimensi lintas ruang/wilayah adalah suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kejadian banjir, permasalahan mungkin tidak terbatas pada satu administrasi daerah tertentu tetapi bisa lebih dari satu wilayah administrasi sehingga pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjir tersebut memerlukan suatu sistem jaringan informasi atar wilayah administrasi sungai. Dimensi lintas pelaku/sektor, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintas pelaku atau lintas sektor. Salah satu contoh adalah pencemaran sungai yang sumber pencemarnya dapat berasal dari berbagai pihak atau multi sektor misalnya sektor industri, permukiman atau pertanian. Dimensi lintas generasi, bahwasanya permasalahan lingkungan hidup meliputi lintas generasi. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola dengan baik agar dapat tetap berfungsi untuk generasi sekarang dan masa datang. Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu prioritas merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis yang harus dihadapi untuk menuju

kondisi terbaik yang diinginkan. Sebuah isu akan menjadi prioritas yakni apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam jangka panjang. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di daerah, dan prosesnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Berdasarkan hasil sintesis pembobotan di atas, diketahui bahwa aspek aktual (mendapat perhatian publik yang luas) dan aspek urgen (perlu ditangani segera) merupakan kriteria yang menjadi prioritas utama untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup, selanjutnya adalah aspek signifikan (dampak yang ditimbulkannya terhadap publik), potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda (sensitif) dan pertimbangan terakhir adalah aspek konsisten (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi).

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

LAMPIRAN C
SK TIM PENYUSUN

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 201 /KUM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DI BIDANG LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 yang memuat data dan informasi di bidang lingkungan hidup;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi di Bidang Lingkungan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi di Bidang Lingkungan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 201 /KUM/2023
Tanggal 28 April 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
DI BIDANG LINGKUNGAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pj. Bupati Barito Kuala	Pembina	Membina terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua	Membantu mengkoordinir seluruh kegiatan penyusunan DIKPLHD
5	Kabid Tata Lingkungan	Anggota	Bertanggung jawab di bidang perizinan lingkungan
6	Kabid Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
7	Kabid Persampahan	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengelolan Persampahan
8	Kabid Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan
9	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Bertanggung jawab rencana tahunan/strategis bidang lingkungan hidup
10.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota	Bertanggung jawab pada data bidang lingkungan hidup
11.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota	Bertanggung jawab pada data bidang lingkungan hidup
12	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	Anggota	Bertanggung jawab pada data lingkungan hidup
13	Tenaga Administrasi Bidang Tata Lingkungan	Anggota	Bertanggung jawab pada data lingkungan hidup
14	Bendahara Pengeluaran	Anggota	Bertanggung jawab pada bidang Keuangan
15	Pengadministrasi Keuangan	Anggota	Bertanggung jawab pada data keuangan bidang lingkungan hidup

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

KEDUA : Tim sebagimana dfimaksud Diktum KESATU menpunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Penyusun
   1. Menyediakan data sebagai bahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 ;
   2. Menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 yang disusun oleh Tenaga Ahli/Narasumber;

b. Tenaga Ahli/Narasumber
   1. Menyusun, menganalisa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 berdasarkan data yang disediakan;
   2. Mempresentasikan hasil penyusunan Buku Data dan Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 kepada Tim Penyusun; dan
   3. Menyempurnakan hasil penyusunan Buku Data dan Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun dan Tim Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim bertangungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Barito Kuala.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 April 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 201 /KUM/2023
Tanggal 28 April 2023

SUSUNAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DI BIDANG LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Muhammad Syahirul Alim, ST.MT.	Peneliti	Melaksanakan analisa penyusunan Laporan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
2	Muhammad Firmansyah, ST.MT.	Pembantu Peneliti	Membantu peneliti dalam pengolahan data, analisa dan pengolahan laporan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
3	Winaldy Rahman, ST	Pengolah Data	Mengolah data dalam pelaksanaan penyusunan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

LAMPIRAN D
BIODATA TIM PENYUSUN DOKUMEN IKPLHD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	Mujiyat, S. Sn, M. Pd
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	Slemen, 13 November 2023
3.	Alamat	:	Komp. Griya Permata, Jln. Mawar 2b No. 41,
		:	RT. 15, RW. 003 Hnadil Bakti Kel. Handil Bakti
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5.	Status Perkawinan	:	Kawin
6.	Agama	:	Islam
7.	No. Telp (No. Hp)	:	085345692959
8.	Email	:	-

Pendidikan Formal :

1.	SD	:	1982
2.	SLTP	:	1985
3.	SLTA	:	1989
4.	Perguruan Tinggi	:	S1 1995
			S2 2006

Pendidikan Informal : -

Pengalaman Kerja :

a. Kasi Atraksi Disparsenibud Banjarmasin
b. Kabid Kebudayaan Disparsenibud
c. Kabid Informasi Pariwisata Disparsenibud
d. Kabid Pengembangan Pariwisata Disparsenibud
e. Kabid Bina Kebudayaan dan Kesenian Disparsenibud
f. Kepala SMA Banua
g. Kabid Pembinaan Olahraga Prestasi Dispora Prov. Kalsel
h. Kabag Keagaman Biro Kesra Setda Prov. Kalsel
i. Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kalsel
j. Kepala BPBD Prov. Kalsel
k. Kepala BPSDMD Prov Kalsel
l. Pj. Bupati Barito Kuala

Marabahan, 24 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA

Mujiyat, S. Sn., M. Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc.
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	Kandangan, 5 Juli 1966
3.	Alamat	:	Jl. A. Yani, Rumah Dinas Sekda Marabahan Kota, Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 70511
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5.	Status Perkawinan	:	Menikah
6.	Agama	:	Islam
7.	No. Telp (No. Hp) Email	:	08115012966 zulkifliyn@yahoo.co.id

1.	**Pendidikan Formal :**		
2.	SD	:	SDN BUPATI II Kandangan (1979)
3.	SLTP	:	SMP Negeri 1 Kandangan (1982)
4.	SLTA	:	SMA Negeri 1 Kandangan (1985)
	Perguruan Tinggi	:	Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru (S1 – 1990) UNESCO-IHE Delft Belanda (S2 – 2008)
	Pendidikan Informal	:	-

Pengalaman Kerja :

a. Penyuluh Pertanian Spesialis Kab. Barito Kuala (1992-1998)
b. Kasubag. Tata Usaha Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kab. Barito Kuala (1998 – 2000)
c. Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Barito Kuala (2001 – 2003)
d. Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Barito Kuala (2003 – 2004)
e. Kepala Bidang Produksi Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Barito Kuala (2004 - 2006)
f. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Barito Kuala (2008 - 2009)
g. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Barito Kuala (2009 – November 2018)
h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Barito Kuala (November 2018 – Mei 2021)
i. Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala (Mei 2021 – Sekarang)

Marabahan, 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
BARITO KUALA



Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap	: Hj. Fahriana, SH, MH
2. Tempat & tanggal lahir	: Banjarmasin, 14 April 1965
3. Alamat	: Wildan Sari 3 No 4 RT 1 RW 1 Banjarmasin
4. Jenis Kelamin	: Perempuan
5. Status Perkawinan	: Kawin
6. Agama	: Islam
7. No Telp	: 081351577601
8. Email	: fahriana65@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SD	: SDN Ksatria Banjarmasin Tahun 1976
2. SLTP	: SMPN 12 Banjarmasin Tahun 1980
3. SLTA	: SMAN 2 Banjarmasin Tahun 1983
4. PERGURUAN TINGGI	: SI Unlam Banjarmasin 1989 : S2 Unlam Banjarmasin 2006

Pendidikan Informal :

- Pendidikan Mediator
- Pelatihan Dasar-Dasar Amdal
- Pelatihan Penilai Amdal

Pengalaman Kerja :

- Diknas 1986 s/d 2000
- Dinas Pariwisata 2000 s/d 2003
- Dinas Tenaga Kerja 2003 s/d 2010
- Staf Ahli Bupati 2010 s/d 2012
- Kadis Lingkungan Hidup 2012 s/d Sekarang

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan cukup singkat dan apa adanya sesuai dengan daftar riwayat hidup saya. Adapun tujuan dari penulisan CV ini adalah sebagai data tambahan dalam penyusunan dokumen IKPLH Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

Marabahan, April 2021

Hj. Fahriana, SH,MH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	Nama Lengkap	:	Hj. Nurhidayati, SKM, M.Ling
2	Tempat dan Tanggal lahir	:	Banjarmasin, 04 Mei 1974
3	Alamat	:	Jl. Trikora Komp. Galuh Marindu 2 Blok. F No.1 Banjarbaru
4	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5	Status Perkawinan	:	Kawin
6	Agama	:	Islam
7	No. Telp/Hp	:	0822 4435 5274
8.	Email	:	Nurhidayatiwaguna@gmail.com

Pendidikan Formal :

1.	SD	:	SDN Kelayan Timur 7 Banjarmasin Tahun 1986
2.	SLTP	:	SMPN 6 Dahlia Banjarmasin Tahun 1989
3.	SLTA	:	SMAK DEPKES Banjarmasin Tahun1992
4.	Perguruan Tinggi	:	S1 Prodi Kesehatan Masyarakat UNISKA Al Banjary Banjarmasin Tahun 2012 S2 PSDAL ULM Banjarbaru Tahun 2016

Pendidikan Informal :

a. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2011
b. Pelatihan AMDAL Bagi Eksekutif Tahun 2012
c. Pelatihan Dasar-dasar Amdal (AMDAL A) Tahun 2015
d. Bimtek Penyusunan KLHS RPJMD / RPJPD Tahun 2022
e. Pelatihan Penyusunan KLHS Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2023

Pengalaman Kerja :

a. Puskesmas Marabahan Tahun 1994 s/d 2009
   Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala Tahun 2009 s/d Sekarang

Marabahan, 24 Juli 2023

Hj. NURHIDAYATI, SKM, M. Ling

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap	: Ihsan Fahri, ST, M. Ling
2. Tempat & tanggal lahir	: Banjarbaru, 18 Desember 1974
3. Alamat	: Komplek Bakti Lestari Jalur 7 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak
4. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
5. Status Perkawinan	: Kawin
6. Agama	: Islam
7. No. Telp	: 085249339959
8. Email	: dlhuptbatola@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SD	: SD Bhineka Tunggal Ika, Banjarbaru
2. SLTP	: SMP Darussalam , Martapura
3. SLTA	: SMA Negeri 2, Banjarbaru
4. PERGURUAN TINGGI	: S1. Teknik Kimia , Institut Tekhnologi Nasional, Malang S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Banjarbaru

Pendidikan Informal :

- Pelatihan Penilai Amdal
- Pengelolaan Laboratorium Dasar, Menengah, Lanjutan 1 dan Lanjutan 2
- Pelatihan Pengelolaan Sampah
- Pelatihan Pengelolaan B3
- Pelatihan Pencemaran Air
- Pelatihan Pencemaran Udara
- Pelatihan Pencemaran dan Kontaminasi Lahan

Pengalaman Kerja :

- Quality Control dan Assurance PT. Bridgestone Plantation Kalimantan
- Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan cukup singkat dan apa adanya sesuai dengan daftar riwayat hidup saya. Adapun tujuan penulisan CV ini adalah sebagai data tambahan dalam penyusunan dokumen IKPLHD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Marabahan, Januari 2023

Ihsan Fahri, ST, M. Ling

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	Nama Lengkap	:	Isnawati, S.AP, M.Ling
2	Tempat dan Tanggal lahir	:	Banjarbaru, 28 Juni 1975.
3	Alamat	:	Jl. Aes Nasution Gang Keraton Marabahan
4	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5	Status Perkawinan	:	Kawin
6	Agama	:	Islam
7	No. Telp	:	85249321825
8	Email	:	Isna.wati58@yahoo.com

Pendidikan Formal :

1	SD	:	SDN Banjarbaru Kota 9
2	SLTP	:	SMPN 1 Banjarbaru
3	SLTA	:	SPP- SPMA Negeri Banjarbaru
4	Perguruan Tinggi	:	- S1 Administrasi Publik STIA BINA BANUA Banjarmasin - S2 PSDAL UNLAM Banjarbaru

Pendidikan Informasi :

Pengalaman Kerja :

a. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset DLH Kab. Batola

b. Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan DLH Kab. Batola

Marabahan, Juli 2023

ISNAWATI S.AP, M.Ling

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	: RIWANDY S.ST.,M.Ling.....
2.	Tempat dan Tanggal lahir	: Marabahan. 04 Februari 1976.....
3.	Alamat	: Jln.Hadariah No.095 RT 13 RW 01 Kel.ulu
		: Benteng Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala 70513.
4.	Jenis Kelamin	: Laki- laki.....
5.	Status Perkawinan	: Kawin.....
6.	Agama	: Islam.....
7.	No. Telp	: 081347858232.....
8.	Email	wawanriwandy@gmail.com.....
	Pendidikan Formal :	
1.	SD	: SD NEGERI MARABAHAN 1 TAHUN 1989....
2.	SLTP	: SLTP 1 MARABAHAN TAHUN 1992.....
3.	SLTA	: SMAKES BANJARMASIN TAHUN 1995.....
4.	Perguruan Tinggi	: D –III ANALIS KESEHATAN TAHUN 2004....
		D – I V ANALIS KESEHATAN TAHUN 2013
		S2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
		DAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN
		RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
		TINGGI UNIERSITAS LAMBUNG
		MANGKURAT TAHUN 2017

Pendidikan Informasi :

Pengalaman Kerja :

- Tahun 1996 – 2013 bekeja di Laboratorium Rumah Sakit
- Tahun 2014 – 2018 bekerja di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup
- Tahun 2019 – 2023 Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

Demikian curiculu vitae (CV) inu dibuat cukup singkat dan sesuai dengan sebenarnya dengan daftar riwayat hidup saya, adapun tujuan penulisan CV ini adalah sebagai data tambahan dalam penyusunan data IKPLHD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.

Marabahan, 25 Juli 2023

RIWANDY, S.ST.,M.Ling

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	Sarjoko,SH
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	Wonogiri, 17 November 1978
3.	Alamat	:	Jl.Jend Sudirman Komp.Korpri RT.15 No.28 Kelurahan Ulu banteng Kecamatan Marabahan
4.	Jenis Kelamin	:	Laki -Laki
5.	Status Perkawinan	:	Kawin
6.	Agama	:	Islam
7.	No. Telp	:	085249739797
8.	Email	:	Jokosarjoko84@gmail.com

Pendidikan Formal :

1.	SD	:	SDN Mento I Wonogiri
2.	SLTP	:	SMPN 5 Wonogiri
3.	SLTA	:	SMA PGRI 2 Banjarbaru
4.	Perguruan Tinggi	:	STIH Sultan Adam Banjarmasin

Pendidikan Informasi :

Pengalaman Kerja :

a. Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Barito Kuala

b. JF Pengendali Lingkungan Ahli Muda di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barito Kuala

Marabahan, 24 Juli 2023

Sarjoko,SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	GAJALI, A.Md
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	Belandean Muara, 8 Oktober 1980
3.	Alamat	:	Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti, Kec. Alalak
4.	Jenis Kelamin	:	Laki- laki
5.	Status Perkawinan	:	Kawin
6.	Agama	:	Islam
7.	No. Telp	:	0859171314845
8.	Email	:	gajali19801008@gmail,com

Pendidikan Formal :

1.	SD	:	SDN Belandean Muara
2.	SLTP	:	SMP Negeri 16 Banjramasin
3.	SLTA	:	SMA Negeri 6 Banjarmasin
4.	Perguruan Tinggi	:	D-III Politeknik Negeri Banjarmasin

Pendidikan Informasi :-

Pengalaman Kerja :

a. Verifikator Keuangan
b. Bendahara Pengeluaran
c. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Marabahan, April 2023

GAJALI, A.Md

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap	: Mety Monita, SH. MH
2. Tempat & Tanggal Lahir	: Marabahan, 06 Mei 1985
3. Alamat	: Jl. Haryono MT No. 25
4. Jenis Kelamin	: Perempuan
5. Status Perkawinan	: Kawin
6. Agama	: Islam
7. No. Telp	: 081351843006
8. Email	: metymonita2@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SD	: SD Negeri Penghulu Marabahan
2. SLTP	: SLTP Negeri 1 Marabahan
3. SLTA	: SMU Negeri 1 Marabahan
4. Perguruan Tinggi	: S2 Megister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Pendidikan Informal :

-

Pengalaman Kerja :

- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengancukup singkat dan apa adanya sesuai dengan daftar riwayat hidup saya. Adapun tujuan dari penulisan CV ini adalah sebagai data tambahan dalam penyusunan dokumen IKPLKH Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

Marabahan,

Mety Monita, SH. MH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	Muhammad Sabril, S. KM
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	Martapura, 18 maret 1987
3.	Alamat	:	Simpang Nungki, RT. 001, Kecamatan Cerbon
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5.	Status Perkawinan	:	Kawin
6.	Agama	:	Islam
7.	No. Telp (No. Hp)	:	0085246167813
8.	Email	:	mochreal@yahoo.co.id

Pendidikan Formal :

1.	SD	:	MIN Tanah Grogot
2.	SLTP	:	SMPN 5 Tanah Grogot
3.	SLTA	:	SMAN 1 Tanah Grogot
4.	Perguruan Tinggi	:	D III Kesehatan Lingkungan Poltekkes Banjaramsin Fakultas Kesehatan Masyarakat UNISKA Banjarmasin

Pendidikan Informal : -

Pengalaman Kerja :

a. Funsional Sanitarian Puskemas Bantuil
b. Fungsional Sanitarian Puskesmas Anjir Pasar
c. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas LH Kab. batola

Marabahan, 24 Juli 2023

Muhammad Sabril, SKM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	HASNAN AKROMY
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	NEGARA, 16 JUNI 1988
3.	Alamat	:	JL. AES NASUTION KOMP. GRAHA ASRI RT. 04/01 MARABAHAN
4.	Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
5.	Status Perkawinan	:	KAWIN
6.	Agama	:	ISLAM
7.	No. Telp	:	085103293053
8.	Email		akromy4cyber@gmail.com
	Pendidikan Formal :	:	
1.	SD	:	SDN 1 BOJONGLOA KIDUL BANDUNG
2.	SLTP	:	SLTP SALMAN AL FARISI BANDUNG
3.	SLTA	:	SMAN 24 BANDUNG
4.	Perguruan Tinggi		D-III TEKNIK KIMIA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, S-1 KESMAS UNISKA BANJARMASIN

Pendidikan Informasi :

Pengalaman Kerja :

a. Staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian BLH Kab. Batola
b. Staf Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Batola

Marabahan, 25 Juli 2023



Hasnan Akromy

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	Philiana Anggun Prasatyani S. Pd
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	Marabahan, 17 Juli 2023
3.	Alamat	:	Jl. Putri Junjung Buih, RT. 03, RW. 01,
		:	Kelurahan Ulu Benteng, Kec. Marabahan
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Status Perkawinan	:	Belum Kawin
6.	Agama	:	Islam
7.	No. Telp (No. Hp)	:	082358100207
8.	Email	:	Philiana27@gmail.com

Pendidikan Formal :

1.	SD	:	SD Negeri Ulu Benteng 2 Marabahan
2.	SLTP	:	SMP Negeri 1 Marabahan
3.	SLTA	:	SMA Negeri 1 Marabahan
4.	Perguruan Tinggi	:	Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kimia

Pendidikan Informal : -

Pengalaman Kerja :

a. Staf Administrasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Kuala
b. Tenaga Administrasi Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala

Marabahan, 24 Juli 2023

Philiana Anggun Prasatyani, S. Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	TISNA
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	Ciamis, 13 Desember 1984
3.	Alamat	:	Jalan Bahaudin Musa RT. 001 Marabahan
4.	Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
5.	Status Perkawinan	:	Kawin
6.	Agama	:	Islam
7.	No. Telp	:	0852 4500 3878
8.	Email	:	tisna.viking@gmail.com

Pendidikan Formal :

1.	SD	:	SDN Palangkau Baru I
2.	SLTP	:	SLTPN 5 Kapuas Murung
3.	SLTA	:	SMKN 1 Marabahan
4.	Perguruan Tinggi	:	-

Pendidikan Informal :

Pelatihan Penyusunan KLHS
Universitas Lambung Mangkurat
Tahun 2023

Pengalaman Kerja :

a. Bendahara Barang (pada Sekretariat DLH Batola)
b. Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan (pada Bidang Tata Lingkungan DLH Batola)

Demikian curriculum vitac ini saya buat dengan cukup singkat dan apa adanya sesuai dengan daftar riwayat hidup saya, adapun tujuan dari penulisan CV ini adalah sebagai data tambahandalam penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Marabahan, 25 Juli 2023

TISNA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	Rina Murtanti
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	Marabahan, 10 Mei 1997
3.	Alamat	:	Jalan Putri Junjung Buih, Marabahan
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Status Perkawinan	:	Belum Kawin
6.	Agama	:	Islam
7.	No. Telp	:	085754325145
8.	Email	:	Rinamurtanti97@gmail.com

Pendidikan Formal :

1.	SD	:	SDN Ulun Benteng 2
2.	SLTP	:	SMPN 1 Marabahan
3.	SLTA	:	SMKN 1 Marabahan
4.	Perguruan Tinggi	:	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Pendidikan Informal :

Pengalaman Kerja : Tenaga Administrasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala

Marabahan, Juli 2023

Rina Murtanti